

DISERTASI

**PENGARUH TATA KELOLA PEMBINAAN PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA DAN STRUKTUR USAHA SUB SEKTOR INDUSTRI KECIL
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**



SONANG SITOHANG

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**PENGARUH TATA KELOLA PEMBINAAN PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA DAN STRUKTUR USAHA SUB SEKTOR INDUSTRI KECIL
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka**

**Pada hari : Rabu
Tanggal : 18 Januari 2006
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :

**SONANG SITOANG
NIM : 090214932 D**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL

Oleh :

Promotor,



Prof. Dr.H.Suroso Imam Zadjuli, SE
NIP 130 531 862

Ko-Promotor



Prof. Dr. H. Effendie, SE
NIP 130 675 531

**TELAH DIUJI PADA UJIAN TAHAP II (TERBUKA)
TANGGAL 18 JANUARI 2006**

Panitia Penguji Disertasi

Ketua : Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE

2. Prof. Dr. H. Effendie, SE

3. Prof. Dr. IBM. Santika, SE

4. Dr. Djoko Mursinto, Drs, M.Ec

5. Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE

6. Dr. Sri Wahyuni Astuti, SE. M.S

7. Dr. Subagiyo, Drs, MS

8. Dr. Suryanto, MSi

9. Prof. Dr. Imam Syakir, SE

**Ditetapkan Dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga Surabaya
Nomor : 10013 / JO3 / PP / 2005
Tanggal : 30 Desember 2005**

MOTTO :

***FEAR ON GOD
IS THE BEGINNING OF KNOWLEDGE
(Ams, 1; 7)***

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya maka studi ini dapat kami selesaikan dengan baik. Melalui bimbingan promotor, ko-promotor serta para dosen, dan dorongan keluarga, teman-teman kuliah program Pascasarjana (S3) tahun ajaran 2002, akhirnya kami dapat menyelesaikan disertasi dengan judul **Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Terhadap Kinerja Dan Struktur Usaha Sub Sektor Industri Kecil Di Provinsi Sumatera Utara.**

Disertasi ini disusun sebagai persyaratan akhir studi Pascasarjana Universitas Airlangga Program Doktor. Dalam menyelesaikan Disertasi ini, kiranya tidak berlebihan bilamana ucapan tulus terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE, Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Airlangga selaku promotor yang telah berkenaan dan dengan tulus membimbing, mengarahkan dan memotivasi kami untuk menyelesaikan disertasi ini.

Prof. Dr. H. Effendie, SE, Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, selaku ko-promotor yang telah dengan penuh perhatian dan kesabaran untuk memberikan masukan materi dan pandangan-pandangannya tentang berbagai hal berkaitan dengan penelitian, penulisan dan penyempurnaan disertasi.

Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE, Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE., Prof. Dr. Soebandi, AK., Prof. Dr. IBM. Santika, SE., Dr. Solimun, Ir. M.S. yang telah memberikan masukan dan evaluasi guna penyempurnaan disertasi ini serta kesediaannya menjadi tim penguji dalam penilaian terhadap naskah disertasi.

Prof. Dr. Med. Puruhito, dr., SP BTKV, Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., Sp. P (K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga beserta para Asisten Direktur dan Staf Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan kelancaran untuk mengikuti Program Doktor Studi Ilmu Ekonomi, pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Para dosen pengajar Program Pascasarjana Universitas Airlangga bidang studi ilmu ekonomi yang telah dengan sabar dan professional meletakkan dasar-dasar teori yang menjadi dasar dalam penulisan disertasi ini.

Perpendiknas Surabaya cq Bapak Drs. Hartoyo Abdulkahar, Prof. Dr. H. Soedjono, MM, Ketua STIESIA Surabaya Bapak Drs. Ec. Budiyanto, MS, yang telah memberikan bantuan biaya studi lanjut, sehingga meringankan beban biaya pendidikan dan menyelesaikan disertasi ini.

Kapala Balai Diklat Industri Regional V. Kapusdiklat. Departemen Perindustrian Jakarta yang telah memnberikan izin dan mendorong untuk menyelesaikan Program Doktor di Universitas Airlangga Surabaya.

Bapak Kadisperindag Provinsi Sumatera Utara, Ibu Ir. Rita Lisda Lubis, MM yang memberikan kemudahan dalam memperoleh data, dan kepada seluruh Pengusaha Industri kecil Penggerak Ekoomi Daerah yang menjadi responden dalam penelitian sehingga mendukung penyelesaian disertasi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada ayahanda E. Sitohang (Alm) dan Ibunda U. Sinaga (Alm), Mertua Ayahanda J. Tamba (Alm), Mertua Ibunda S. Sihotang, Istri tercinta Ir. Tumair Tamba, ananda Hendri Budi Eko Sitohang, Firdaus Marsahala Sitohang, Arga Christian Sitohang, atas bimbingan, kesabaran, kasih sayang dan pengorbanan besar mereka yang senantiasa memotivasi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, telah membantu dan memberikan dukungan sehingga sanggup menyelesaikan disertasi ini, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal.

RINGKASAN

Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Terhadap Kinerja Dan Struktur Usaha Sub Sektor Industri Kecil Di Provinsi Sumatera Utara

Sonang Sitohang

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan ekonomi nasional dan perwilayahan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi pembangunan untuk setiap sektor seperti halnya sektor industri dan perdagangan harus dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable development*) dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seoptimal mungkin.

Pelaksanaan pemangunan tidak terlepas dari peranan pemerintah dengan berbagai kebijakan (*Government Policy*) baik berupa pembinaan teknis maupun kebijakan dalam menetapkan program, peraturan-peraturan, ketentuan dan perundang-undangan yang diimplementasikan untuk setiap sektor potensial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, efisien dan efektif.

Sub Sektor Industri Kecil yang merupakan salah satu penggerak Ekonomi Daerah, dimana dalam penelitian ini difokuskan terhadap komoditi Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah (IK-PED) yang terus dikembangkan oleh pemerintah sampai saat ini, merupakan bagian dari sektor industri yang turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut, berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah melalui pembinaan secara berkesinambungan (*Sustainable Establishment*).

Orientasi kebijakan pembinaan pemerintah diarahkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengusaha Industri Kecil Penggerak Ekonomi daerah yaitu, (1) rendahnya ketrampilan teknis, (2) peraturan pemerintah berupa layanan perizinan yang kurang mendukung, (3) terbatasnya permodalan, (4) kemampuan promosi dan pemasaran yang terbatas, dan (5) minimnya tenaga penyuluh industri dan perdagangan

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengusaha industri kecil seperti tersebut diatas, pemerintah mengeluarkan kebijakakan pembinaan berupa program, (1) bantuan pelatihan teknis, (2) peraturan pemerintah yang mendukung operasional usaha berupa kemudahan dalam penerbitan izin, (3) bantuan permodalan, (4) bantuan pemasaran, dan (5) bantuan tenaga penyuluh industri dan perdagangan. Program ini, masih tetap dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini seperti ditandakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005).

Tata kelola program pembinaan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan perkembangan struktur unit usaha industri kecil sebagai salah satu kontributor terhadap pembangunan ekonomi nasional sehagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang no 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kinerja dan Perkembangan Struktur unit Usaha Industri Kecil

pertumbuhan jumlah unit usaha rata-rata meningkat sebesar 8.8%, penyerapan tenaga kerja tumbuh rata-rata 9.8%, pertumbuhan nilai investasi 11,2% dan pertumbuhan nilai produksi (omzet) penjualan meningkat 12.2% setiap tahun.

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Pengaruh tata kelola pembinaan Pemerintah yang meliputi bantuan pelatihan teknis, peraturan pemerintah, bantuan permodalan, bantuan pemasaran, dan bantuan tenaga penyuluh industri dan perdagangan terhadap kinerja dan unit usaha diprediksi dengan menggunakan teori human capital, teori kebijakan publik, regulasi dan beberapa hasil penelitian terdahulu baik yang mendukung maupun yang menolak sebagian.

Dalam studi ini terdapat sebelas hipotesis dan populasi adalah pengusaha (owner) industri penggerak ekonomi daerah (IK-PED) yang pernah mendapat bantuan pembinaan dari pemerintah di provinsi sumatera utara sebanyak 2.468 pengusaha dengan tujuh jenis komoditi yang dihasilkan.

Pengambilan sampel sebanyak 150 sampel pengusaha IK-PED didasarkan pada jumlah 30 indikator dikali 5, menggunakan metode stratified proporsional purposive sampling, dan pengambilan sampel dilakukan di masing-masing komoditi sentra binaan utama pemerintah secara proporsional.

Variabel penelitian terdiri dari 7 variabel laten dengan 30 indikator yang dikembangkan dengan skala interval dan rasio. Lima variabel laten menggunakan skala interval (satu sampai lima) yaitu pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh indag. Sedang dua variabel laten lainnya yaitu kinerja usaha dan struktur unit usaha menggunakan skala rasio. Untuk menjawab masalah penelitian dan pengujian hipotesis digunakan model persamaan struktural (struktural equation model (SEM) dengan bantuan program aplikasi AMOS 4.01)

Dari sebelas hipotesis yang diajukan, ternyata sepuluh hipotesis tentang pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah meliputi pelatihan teknis, pelatihan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh indag terhadap kinerja usaha dan struktur usaha dan pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha seluruhnya signifikan. Sembilan hipotesis berpengaruh positif signifikan sedangkan dua hipotesis berpengaruh negatif signifikan yaitu pengaruh peraturan pemerintah terhadap kinerja dan struktur usaha.

Temuan terpenting yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu : ditemukan bahwa pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha sebesar 0,8037. Nilai koefisien jalur tersebut paling besar diantarakesepuluh koefisien jalur lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha merupakan pengaruh dominan diantara kesepuluh lainnya. Hasil analisis SEM diperkuat dengan uji beda dua rata-rata berpasangan yang membuktikan bahwa pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan omzet penjualan sebelum dan sesudah dibina oleh pemerintah terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah berhasil dalam menata dan mengelola pembinaannya melalui bantuan pelatihan peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh indag sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan UKM. Hal ini dilihat dengan adanya kenaikan struktur usaha dari industri mikro

ke industri kecil. Hasil analisis SEM diperkuat oleh uji Chi Square untuk mengetahui hubungan antar dua indikator kinerja usaha dengan tiga indikator struktur usaha. Ternyata dari enam uji Chi Square menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan tidak hanya terdapat hubungan antara konstruk kinerja dengan struktur usaha, namun sekaligus lebih detail hubungan antara indikator pada kedua konstruk tersebut. Disamping temuan utama di atas, ada beberapa temuan lainnya yaitu ; pengaruh pelatihan teknis terhadap kinerja usaha positif signifikan, tidak mendukung hasil penelitian Mulyadi (1999), pengaruh peraturan pemerintah terhadap kinerja dan struktur usaha negatif signifikan, tidak mendukung teori Vasant Desai (2003), pengaruh penyuluh industri dan perdagangan terhadap kinerja usaha positif dan signifikan, tidak mendukung hasil penelitian Mulyadi (1999).

SUMMARY

The Effects of the Government Establishment Policy on the Performance and Business Structure of the Sub Sector Small Industry in North Sumatra

Sonang Sitohang

One of efforts on increasing Society welfare is through National and Regional Economic Development. Thus, the development sector of industry and trade has to be done by implementing sustainable development and optimizing resources.

The implementation of development is under the government role by goverment policies. The government policies are technical establishment, program policy rules, laws, implemented for every potential sector to increasing prosperity by creating condusive, efficient and effective business admosphere.

The Sub-sector of the small industries is one of the rural economic crusades This research is focused on the commodities of the Small Industry Rural Economic Crusade developed by the government until now. It is the part of the industrial sectors which contribute on National Economy Growth. Therefore, there are some policies given by government through the sustainable establishment to increase these sectors contribution.

The government establishment policy is focused to cope the constraints faced by Small Industry Rural Economic Crusade owners, that is, (1) The lower of technical skill. (2) Unsupported government service on licensing, (3) limited capitalization, (4) limited marketing skill, (5) the lacks of industrial and trade technical assistance workers.

The government has issued establishment policies on coping the constraints as programs including ; (1) technical training support, (2) supported government regulation on ease license to industrial operation, (3) capitalization support, (4) marketing support and (5) industrial and trade technical support. "The program is implemented to Indonesian Small And Medium Enterprises (SME'S), as state by president Susilo Bambang Yudhoyono (2005).

The government establishment arrangement is expected to be able to increase performance and structure improvement unit business of the small industry as one of the national economic development contributors as stated in Regulation no 9, 1995 on the Small Medium Enterprise Affair.

The performance and unit business improvement of the Small Industry increase 8,8 % of the business unit average growth. the workforce absorption increase 9,8 % of the average growth, 11,2 % of the investment growth and 12,2 % of the total increasing of annually sales growth.

The objective of the study are to analysis and gaining empirical evidence of the effects of the Government esthabelishment policy, including the technical training support, the government regulation support, the capitalization support, the marketing support and the industrial and trade assistance for business performance and business unit development. They are estimated by the human capital theory, the public policy theory, the regulations and results of previous researches, either supported or rejected.

There are eleven hypothesis. The population of this research which the small industry rural economic crusade owners that have ever got the government establishment support in North Sumatra province as 2,468 businessmen with seven kinds of commodities produced.

The 150 sampling of industry rural economic crusade owner withdrawal is based on 30 indicators times 5, using the stratified proportional purposive sampling, and conducting in each commodity of main centre government establishment proportionally.

The research variables are consist of 7 latent variables with 30 indicators improved by interval and ratio scale. There are five latent variables which use interval scale (one to five), training, government regulation, capitalization, marketing and industrial and trade assistance. Otherwise, the others two of variables, business performance and business unit structure use ratio scale. To solve the research problem and hypothesis testing, the author used structural equation model (SEM) supported by AMOS application program (4.01).

There are ten of eleven hypothesizes that influences establishment arrangement including technical training, governmental training, capitalization, marketing and industrial and trade assistance on business performance. Business structure and entirely significant. The nine hypothesis have positive significant influence and the two others had negative significant influence, that is the influence of government rules on performance and business structure.

The most significant one which has never been researched is the influence of business performance on business structure is 0.8037. It is the highest coefficient value among the other ten ones. There, it could be started that the influence of business performance dominantly influence on the other ten. The result analysis to strengthen to two different testing in pairs average that prove investment growth. The workforce absorption, and the sales revenue growth that was and will be established by government come up with the significant differentiation. It prove that government rules, capitalization, marketing; and industrial and trade assistance stated in Regulation no 9. 1995 on the Small Medium Enterprise Affairs. It's pointed by the increasing of business structure from the micro industry to small industry. The result of SEM analysis strengthen by (Chi Square testing in order to know the relationship of two performance indicators and three structure businesses), The six Chi Square testing shows the strong relationship. It's doesn't only show the relationship between business performance and business structure, but also there are other research results, the positive significant of the technical training on the business performance. The author doesn't support Mulyadi research (1999), the negative significant of government rules on business performance and business structure and Vasant Desai Theory (2003), and the positive significance of the influence of the industrial and trade assistance on business performance.

ABSTRACT

The Effects of the Government Establishment Policy on the Performance and Business Structure of the Sub Sector Small Industry in North Sumatra

Sonang Sitohang



The Sub-Sector of the Small Industry Rural Economic Crusade is a group commodities that generally grows and develops in a rural area, using much local material, traditionally process and handed down from one generation to another. Its commodity is one of the national economic growth contributors, therefore the constraints faced by business owner are the low of technical skill, government service on licensing issues, limited capitalization, limited marketing skill, and limited technical guidance. The constraints can be cope by sustainable establishment.

The government establishment policy is focused on coping problems above, that is, (1) technical skill training program, (2) supporting the government regulation on ease license issues to industrial and trade operation, (3) supporting the capitalization, (4) supporting the marketing skill, (5) supporting the industrial and trade technical guidance. The establishment program conducted by government are aimed to increase the investment rate, workforce absorption, and sales revenue growth as stated in the regulation no 9, 1995 that is, to increase business structure from micro to small industry.

The objective of the results are to analysing and gain empirical evidence of the effects of the Government establishment policy including, technical training support, government regulation support, capitalization support, marketing support, industrial and trade technical guidance supported for business performance and industrial stucture unit development. They are analysed by human capital theory, public policy theory, regulations and the result of previous researches, either supported or rejected.

The most significant findings which have never been researched is the influence of business performance on business structure is 0.8037. It is the highest coefficient value among the other ten. Therefor, it could be stated that the effects of business performance dominantly influence on the other ten. It proves that government is successful in arranging and managing its establishment by training support, government rules, capitalization, marketing, and industrial and trade technical guidance supported as stated in regulation no 9, 1995 on this Small Medium Enterprise Affair by increasing business structure from micro to small industry. Besides, the main finding above, there are other research findings ; the positive significant of the technical training on business performance and the negative significance of government rules on the business performance and business structure that do not support Vasant Decal Theory (2003) and the positive significant of the effects of the industrial and trade elucidation on business performance and doesn't support Mulyadi's research (1999).

Key words : government policy, establishment, performance, unit structure business development, Small Industry Rural Economic Crusade

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Halaman Pergesahan	iv
Halaman Penetapan Panitia Penguji	v
Motto.....	vi
Ucapan Terimakasih	vii
Ringkasan	ix
Summary	xii
Abstract	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Studi.....	22
1.4. Manfaat Studi.....	24
BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Kebijakan Pembinaan Industri Kecil Menengah di Indonesia.....	25
2.1.1 Teori Kebijakan	25
2.1.2 Pembinaan Industri Kecil Menengah di Indonesia.....	29
2.1.2.1 Pengertian Tata Kelola Pembinaan.....	29

2.1.2.2	Pengertian dan Kriteria Industri Mikro, Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar	31
2.1.2.3	Industri Kecil Menengah Penggerak Ekonomi Daerah (IKM-PED).....	31
2.2	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis dengan Kinerja Usaha.....	38
2.3	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Melalui Peraturan Pemerintah dengan Kinerja Usaha.....	45
2.4	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan dengan Kinerja Usaha	53
2.5	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran dengan Kinerja Usaha	57
2.6	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Industri dan Perdagangan (Indag) dengan Kinerja Usaha.....	61
2.7	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis dengan Struktur Usaha.....	67
2.8	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Melalui Peraturan Pemerintah dengan Struktur Usaha	73
2.9	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan dengan Struktur Usaha	79
2.10	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran dengan Struktur Usaha	83
2.11	Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Industri dan Perdagangan (Indag) dengan Struktur Usaha.....	89
2.12	Hubungan Kinerja Usaha dengan Struktur Usaha	94
2.13	Tinjauan beberapa Penelitian Terdahulu	103

BAB	3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1.	Kerangka Konseptual.....	122
3.2.	Hipotesis	125
BAB	4 METODE PENELITIAN	
4.1.	Rancangan Penelitian.....	127
4.2.	Populasi dan Sampel.....	128
4.2.1	Populasi.....	128
4.2.2	Sampel	129
4.3	Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data	132
4.3.1	Jenis dan Sumber Data.....	132
4.3.2	Metode Pengumpulan Data.....	133
4.4.	Variabel Penelitian.....	134
4.4.1.	Klasifikasi Variabel	134
4.4.2.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	135
4.4.3	Instrumen Penelitian	145
4.4.4	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	146
4.5	Metode Analisis Data	148
BAB	5 ANALISIS HASIL PENELITIAN	
5.1.	Karakteristik Pengusaha Industri Kecil	157
5.2.	Analisis Tanggapan Responden Tentang Pelatihan, Peraturan Pemerintah, Permodalan, Pemasaran, Penyuluh Indag, Kinerja Usaha dan Perkembangan Struktur Usaha	162
5.2.1	Pelatihan Teknis.....	162
5.2.2	Peraturan Pemerintah.....	163
5.2.3	Permodalan	164
5.2.4	Pemasaran	165
5.2.5	Penyuluh Industri Perdagangan	166
5.2.6	Kinerja Usaha	167

5.2.7	Struktur Usaha	170
5.3	Analisis Hasil Penelitian.....	174
5.3.1	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	174
5.3.2	Uji Asumsi Model Persamaan Struktural	178
5.3.2.1	Uji Outlier.....	178
5.2.3.2	Uji Normalitas <i>Univariate</i> dan <i>Multivariate</i>	180
5.3.2.3	Uji Multikolonieritas	180
5.3.3	Pelatihan Teknis.....	181
5.3.4	Peraturan Pemerintah.....	183
5.3.5	Permodalan	186
5.3.6	Pemasaran	189
5.3.7	Penyuluh Industri dan Perdagangan	192
5.3.8	Kinerja Usaha	194
5.3.9	Perkembangan Struktur Unit Usaha	195
5.3.10	Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Terhadap Kinerja dan Struktur Unit Usaha	197

BAB 6 PEMBAHASAN

6.1.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	208
6.1.1.	Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara	208
6.1.2.	Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara	213
6.1.3.	Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara	219
6.1.4.	Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara.....	223

6.1.5. Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Indag Terhadap Kinerja Usaha IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara	226
6.1.6. Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis Terhadap Struktur Usaha IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara	230
6.1.7. Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara	234
6.1.8. Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan Terhadap Struktur Usaha IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara	238
6.1.9. Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara.....	241
6.1.10. Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Indag Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara	245
6.1.11 Pengaruh Kinerja Usaha Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara	250
6.1.12 Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Pelatihan, Peraturan Pemerintah, Permodalan, Pemasaran Dan Penyuluh Industri Perdagangan Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha.....	263
6.1.12.1 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara.....	264
6.1.12.2 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara.....	266
6.1.12.3 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara.....	269

6.1.12.4 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK- PED Di Provinsi Sumatera Utara.....	271
6.1.12.5 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Indag Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK- PED Di Provinsi Sumatera Utara.....	273
6.2 Temuan Penelitian	275
6.3 Keterbatasan Penelitian	281
BAB 7 PENUTUP	
7.1 Simpulan	282
7.2 Saran	291
DAFTAR KEPUSTAKAAN	295
LAMPIRAN-LAMPIRAN	309

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Tingkat Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Industri Mikro, Kecil Menengah dan Besar di Indonesia Tahun 1998 – 2001 (Ribu Unit).....	13
Tabel 1.2 Persentase Tingkat Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia Tahun 1998 – 2001 (Ribu Orang).....	14
Tabel 1.3 Perbandingan Antara Unit Usaha (Uu), Tenaga Kerja (Tk) Dan Pdb di Indonesia Tahun 2002.....	15
Tabel 1.4 Persentase Sumbangan LMKM, IB Terhadap Pertumbuhan Industri Secara Keseluruhan di Indonesia Tahun 2000	16
Tabel 1.5 Posisi Jumlah Unit Usaha Penyerapan Tenaga Kerja Dan Nilai Produksi LKM-PED di Indonesia Tahun 2002 (Ribu Unit).....	19
Tabel 1.6 Posisi Jumlah Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Investasi Dan Nilai Produksi IKM-PED Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003	20
Tabel 2.1 Kebutuhan Dasar Industri Pada Setiap Fasa	35
Tabel 2.2 Stratifikasi Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia Tahun 1999	69
Tabel 2.3 Jumlah Biaya Riil Dalam Pengurusan Izin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 (Rp 000).....	78
Tabel 3.1 Identifikasi Variabel Penelitian	124
Tabel 4.1 Posisi Jumlah Unit Usaha Industri Kecil-PED Yang Sudah Mendapat Bantuan Pembinaan Pemerintah Di Sumatera Utara Tahun 2003	129
Tabel 4.2 Sampel Penelitian Untuk Masing-Masing Komoditi Strata Dan Daerah Usaha Industri Kecil-PED Di Sumatera Utara	131
Tabel 4.3 Persamaan Pengukuran Konstruk Eksogen Dan Endogen Dan Persamaan Kausalitas:.....	152

Tabel 4.4	Goodness Of – Fit Indices	155
Tabel 5.1	Nilai Rata-Rata Indikator Pelatihan Per Komoditi	162
Tabel 5.2	Nilai Rata-Rata Indikator Peraturan Pemerintah Per Komoditi	163
Tabel 5.3	Nilai Rata-Rata Indikator Permodalan Per Komoditi	164
Tabel 5.4	Nilai Rata-Rata Indikator Pemasaran Per Komoditi.....	166
Tabel 5.5	Nilai Rata-Rata Indikator Penyuluh Industri Perdagangan Per Komoditi	166
Tabel 5.6	Kategori ROS dan ROI	168
Tabel 5.7	Kategori ROS dan ROI Per Komoditi	169
Tabel 5.8	Kategori Tingkat Pertumbuhan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Omzet Penjualan	171
Tabel 5.9	Kategori Tingkat Pertumbuhan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Omzet Penjualan Per Komoditi.....	172
Tabel 5.10	Variabel dan Indikator	175
Tabel 5.11	Uji Validitas dan Reliabilitas Pelatihan (n = 30)	176
Tabel 5.12	Uji Validitas Dan Reliabilitas Peraturan Pemerintah (n = 30) ..	176
Tabel 5.13	Uji Validitas dan Reliabilitas Permodalan (n = 30).....	177
Tabel 5.14	Uji Validitas dan Reliabilitas Pemasaran (n = 30).....	177
Tabel 5.15	Uji Validitas dan Reliabilitas Penyuluh Indag (n=30).....	178
Tabel 5.16	Data Outlier Responden.....	179
Tabel 5.17	<i>Goodness Of Fit Index</i> Pelatihan (X1) Sebelum Mi.....	181
Tabel 5.18	<i>Goodness Of Fit Index</i> Pelatihan (X1) Setelah Mi	182
Tabel 5.19	<i>Goodness Of Fit Index</i> Peraturan Pemerintah (X2).....	184
Tabel 5.20	<i>Standar Loading Dan Measurement Error</i> Indikator Peraturan Pemerintah (X2).....	185

Tabel 5.21	<i>Goodness Of Fit Index</i> Permodalan (X3)	187
Tabel 5.22	<i>Standar Loading</i> Dan <i>Measurement Error</i> Indikator Permodalan (X3).....	188
Tabel 5.23	<i>Goodness Of Fit Index</i> Pemasaran (X4)	190
Tabel 5.24	<i>Goodness Of Fit Index</i> Penyuluh Industri Dan Perdagangan (X5)	192
Tabel 5.25	<i>Standar Loading</i> Dan <i>Measurement Error</i> Indikator Penyuluh Industri Dan Perdagangan (X5)	193
Tabel 5.26	Reliabilitas Konstruk Dan Varians Ekstrak Struktur Usaha (Y2).....	196
Tabel 5.27	<i>Goodness Of Fit Index</i> Model Persamaan Struktural Tahap Akhir	199
Tabel 5.28	Koefisien Jalur, Critical Ratio Dan Probabilitas Error Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah (Pelatihan, Peraturan Pemerintah, Permodalan, Pemasaran, Penyuluh Indag) Terhadap Kinerja Dan Struktur Usaha	201
Tabel 5.29	Pengujian Pengaruh Langsung, Tidak Langsung Dan Pengaruh Total Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Terhadap Struktur Usaha	206
Tabel 6.1	Uji Perbedaan Dan Perkembangan Struktur Usaha Dari Industri Mikro Menjadi Industri Kecil	252
Tabel 6.2	Tabulasi Silang ROS Dengan Pertumbuhan Investasi.....	256
Tabel 6.3	Tabulasi Silang ROS Dengan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja.....	257
Tabel 6.4	Tabulasi Silang ROS Dengan Pertumbuhan Omzet Penjualan ..	258
Tabel 6.5	Tabulasi Silang ROI Dengan Pertumbuhan Investasi	259

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 2.1 Model Pembinaan Ikm-Ped Era Otonomi.....	34
Gambar 2.2 Tahapan Fasa Pengembangan IKM-PED	34
Gambar 2.3 Mekanisme Koordinasi Pembinaan IKM-PED.	36
Gambar 2.4 Hubungan Pelatihan Dengan Struktur Pertumbuhan Unit Usaha	71
Gambar 2.5 Pembinaan Industri Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia.....	100
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	122
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual.....	123
Gambar 4.1 Diagram Jalur Model Persamaan Struktural.....	151
Gambar 5.1 <i>Pie Chart</i> Umur Responden.....	151
Gambar 5.2 <i>Pie Chart</i> Jenis Kelamin Responden	158
Gambar 5.3 <i>Pie Chart</i> Pendidikan Responden.....	158
Gambar 5.4 <i>Pie Chart</i> Jenis Pelatihan.....	159
Gambar 5.5 <i>Pie Chart</i> Izin Industri Dan Perdagangan.....	160
Gambar 5.6 <i>Pie Chart</i> Izin Sumber Pembiayaan	161
Gambar 5.7 Analisis Faktor Konfirmatori Pelatihan (X1)	181
Gambar 5.8 Analisis Faktor Konfirmatori Peraturan Pemerintah (X2).....	184
Gambar 5.9 Analisis Faktor Konfirmatori Permodalan (X3)	187
Gambar 5.10 Analisis Faktor Konfirmatori Pemasaran (X4).....	189
Gambar 5.11 Analisis Faktor Konfirmatori Penyuluh Industri Dan Perdagangan (X5)	192
Gambar 5.12 Analisis Faktor Konfirmatori Kinerja Usaha (Y1)	195

Gambar 5.13 Analisis Faktor Konfirmatori Struktur Usaha (Y2)	195
Gambar 5.14 Model Persamaan Struktural Tahap Akhir	198
Gambar 5.15 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah (Pelatihan, Peraturan Pemerintah, Permodalan, Pemasaran, Penyuluh Indag) Terhadap Kinerja Usaha Dan Struktur Usaha	200
Gambar 6.1 Grafik Peningkatan Struktur Usaha Dari Industri Mikro Menjadi Industri Kecil	251
Gambar 6.2 Pengaruh Tidak Langsung Pelatihan Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha	264
Gambar 6.3 Pengaruh Tidak Langsung Peraturan Pemerintah Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha	267
Gambar 6.4 Pengaruh Tidak Langsung Permodalan Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha	269
Gambar 6.5 Pengaruh Tidak Langsung Pemasaran Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha	271
Gambar 6.6 Pengaruh Tidak Langsung Penyuluh Industri Perdagangan Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha	274

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Peta Teori	309
Lampiran 2 Kuesioner.....	318
Lampiran 3 Karakteristik Responden, Tanggapan Responden Tentang Pelatihan, Peraturan Pemerintah, Permodalan, Pemasaran, Penyuluh Industri Perdagangan, Kinerja Usaha, Perkembangan Struktur Usaha, Nilai Rata-Rata Per Variabel, Pembagian Kategori Rendah, Sedang dan Tinggi Untuk Variable Kinerja Usaha dan Perkembangan Struktur Usaha ..	326
Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas	347
Lampiran 5 Uji Asumsi Persamaan Model Struktural : Normalitas, Outlier dan Multikolinieritas	352
Lampiran 6 Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Pelatihan (X1)	372
Lampiran 7 Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Peraturan Pemerintah (X2).....	376
Lampiran 8 Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Permodalan (X3)	380
Lampiran 9 Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Pemasaran (X4).....	384
Lampiran 10 Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Penyuluh Industri Perdagangan (X5)	388
Lampiran 11 Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Kinerja Usaha (Y1)..	391
Lampiran 12 Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Perkembangan Struktur Usaha (Y2)	393
Lampiran 13 Persamaan Model Struktural (Structural Equation Model = SEM)	393
Lampiran 14 Uji Chi Square dan Uji Beda Berpasangan	412

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para pakar mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, pembangunan harus tetap dilakukan secara berkesinambungan (*Sustainable Development*) dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seoptimal mungkin.

Sektor industri di Indonesia selama enam Repelita dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1999 tumbuh dengan laju rata-rata di atas 10% per tahun, hal ini selaras dengan pertumbuhan PDB ekonomi rata-rata 7% per tahun. Peran PDB sektor industri terhadap PDB nasional sedikit meningkat dari 25,24% naik menjadi 25,71% dan 26,01% pada tahun 1999, 2000 dan 2001. Namun hal ini tidak diikuti peningkatan peran PDB Industri Kecil Menengah (IKM). Peran PDB sektor ini hanya berkisar antara 38 hingga 39% pada tahun 1999 hingga tahun 2001, sektor industri perannya sangat didominasi oleh industri besar. Hingga tahun 2003 sumbangan sektor industri besar sekitar 61% terhadap PDB sektor industri secara keseluruhan (RIP IKM 2002-2004 Buku 2, 2003).

Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 menggariskan bahwa salah satu tujuan pembangunan sektor industri adalah pengembangan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan

struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Perubahan struktur dalam pembangunan sektor industri yang dimaksud mencerminkan tuntutan peningkatan pada dimensi jenis maupun skala industri, yaitu bahwa selain sector ini tumbuh, tetapi juga memiliki sturktur yang kuat. Oleh karena itu pembangunan industri kecil perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Zadjuli (1986) menyatakan bahwa;

“Pembangunan adalah proses perbaikan organisasi dan lembaga ekonomi yang berada diantara segala golongan masyarakat, untuk meningkatkan serta mengarahkan pertumbuhan produksi barang dan jasa melalui perencanaan pemerintah guna mengusahakan proses produksi agar berjalan seekonomis dan seefisien mungkin untuk dapat memperbanyak *output* dan lebih memperbesar kesempatan kerja produktif, sehingga kemiskinan semakin terhapus serta lebih meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat agar kemakmuran jasmani dan kesejahteraan rohani masyarakat semakin meningkat baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang yaitu dengan tetap menjaga kelestarian hidupnya”.

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peranan pemerintah dengan berbagai kebijakan publik (*Public Policy*), baik berupa pembinaan teknis maupun kebijakan dalam menetapkan program, peraturan-peraturan, ketentuan dan perundang-undangan yang diimplementasikan untuk setiap sektor potensial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, efisien dan efektif.

Semenjak tahun 1969-1994 (PJPI) sampai saat ini pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan secara bertahap dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemampuan dan kemandirian bangsa melalui pemberdayaan berbagai sektor yang di dalamnya termasuk sektor Industri (Depperind; 1999:30).

Sektor industri baik skala besar maupun skala menengah, kecil dan mikro merupakan salah satu sektor yang turut memberikan kontribusi (*Contributor*) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karena itu kebijakan pembinaan dan pengembangan (*Development Policy*) terhadap masing-masing sub-sektor dilakukan secara berkesinambungan dan program pembinaan senantiasa dikembangkan sesuai dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi.

Pembangunan ekonomi nasional sub-sektor industri mikro kecil menengah (IMKM) yang dalam istilah sering disebut UKM ataupun usaha kecil, perlu mendapat prioritas untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN tahun 1999-2004. Dijelaskan bahwa Industri Kecil Menengah termasuk koperasi merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sehingga perlu dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan kinerja, memperluas lapangan usaha.

Morrison dan John Breen (2000) merupakan pengamat dan pemerhati penuh terhadap perkembangan usaha kecil menyatakan :

“Small businesses are well recognized and acknowledged worldwide as vital and significant contributors to economic development, job creation, and the general health and welfare of economies, both nationally and internationally.”

Usaha kecil dikenal dunia luas karena memberikan kontribusi yang signifikan dan vital bagi pembangunan ekonomi, menciptakan pekerjaan, pemulihan serta penyelamatan perekonomian secara umum baik nasional maupun internasional.

Data pada *Small Business Administration* (2000) menunjukkan bahwa peranan sektor usaha kecil untuk menyerap tenaga kerja di daerah (*local level*), kemampuan menciptakan kesempatan berusaha di Amerika Serikat dengan menyerap 99,75 tenaga kerja. Di Australia hampir 96% tenaga kerja demikian juga di Uni Eropa, Indonesia (Australian Bureau of Statistics 2000). Hal yang sama dikatakan oleh Mazzarol (2000), bahwa Usaha Kecil merupakan salah satu mesin pemacu pertumbuhan ekonomi, inkubator inovasi dan merupakan solusi untuk memecahkan pengangguran di era millennium.

Di Indonesia hingga tahun 2003 tercatat bahwa kontribusi Usaha Mikro (formal dan non formal), Kecil dan Menengah (UMKM) dalam PDB sebesar 56,7 persen dari total PDB Nasional yang terdiri dari 41,1 persen usaha mikro dan kecil dan 15,6 persen usaha skala menengah. Pada tahun yang sama, jumlah IMKM sebanyak 42,4 juta unit usaha dan dapat menyerap lebih dari 79 juta orang tenaga kerja atau 99,5 persen dari jumlah tenaga kerja. rinciannya, usaha mikro dan kecil menyerap 70,3 juta orang tenaga kerja dan usaha menengah sebanyak 8,7 juta orang tenaga kerja (Djimanto; 2005).

Berdasarkan data keberhasilan usaha kecil, baik di negara maju maupun di Indonesia, seperti dijelaskan di atas kemudian timbul pertanyaan, apakah usaha kecil selalu tumbuh dan berkembang?. Dan apakah kebijakan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah selalu memberikan kontribusi terhadap kinerja dan perkembangan struktur unit usaha? Mengingat begitu ragamnya jenis dan karakteristik usaha kecil di negara maju maupun di Indonesia jawabannya dapat

dipastikan bahwa tidak semua usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang bahkan sebaliknya ada yang hanya berdiri sesaat lalu gulung tikar.

Wijewardena and Garry E. Tibbits (1999) menyatakan

“Nevertheless, the folklore is that most small businesses discontinue, within a few years of their start up. Of those businesses that continue, there is considerable variability in the rate of growth. Therefore, it is important to identify the causes of failures and discontinuations as well as the factors contributing to the success or growth of small enterprises. Moreover, these causes of failure and factors of success may vary from country to country, depending of economic, geographical, and culture differences. As such, empirical investigation in to these aspects of small business in different countries is needed because the findings of such research are useful to economic development planners as well as to individual entrepreneurs in the countries concerned”.

Meskipun banyak usaha kecil yang berhasil tumbuh dan berkembang serta memberi kontribusi yang tidak kecil terhadap perkembangan ekonomi di Australia, namun tidak sedikit pula usaha kecil yang tidak dapat melanjutkan usahanya setelah beberapa tahun berdiri. Dari beberapa sumber diketahui bahwa faktor penyebab usaha kecil di Negara yang satu dengan lainnya tidak sama tergantung dari kondisi ekonomi, keadaan geografis dan perbedaan budaya.

Demikian juga mengenai pengaruh kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah, terdapat 2 sisi pandang yang berbeda yaitu ada yang menyatakan kebijakan pembinaan memberikan kontribusi terhadap kinerja dan perkembangan struktur unit usaha (Sarder, Ghost and Rosa 1997, William C. Wood; 1999, Leo Paul Dana; 1999, Yusuf; 1995. Murp, F.B. Aji, 1999), namun ada pula yang menyatakan bahwa tidak semua kebijakan pembinaan pemerintah memberikan kontribusi terhadap kinerja dan pertumbuhan unit usaha (S.P. Premaratne; 1999.

Moeljadi; 1999). Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian faktor yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan pertumbuhan usaha kecil.

Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Selanjutnya digunakan sebagai masukan yang sangat berguna bagi perencanaan pengembangan industri nasional.

Selanjutnya Mazzarol (2000), Carter *et al.*, (2000), Morison, *et al.*, (2000) mengatakan untuk memaksimalkan kinerja dan pertumbuhan usaha kecil (*small business performance and growth*) perlu untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan program pembinaan yang telah dan ataupun yang akan dilakukan, dengan demikian para pengambil keputusan dapat menentukan kebijakan (*policy*) pembinaan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Kemudian Carter *et al.*, (2000:71) menyatakan meskipun kebijakan pembinaan usaha kecil di banyak negara tidak ada yang persis sama karena setiap usaha kecil memiliki karakteristik (*characteristics*) permasalahan dan kemampuan bisnis para pemiliknya yang berbeda, namun tujuan utama (*main purpose*) dari suatu kebijakan pembinaan adalah sama yaitu memaksimalkan kinerja dan pertumbuhan unit usaha.

Di Indonesia sejak PJPI tahun 1969 s.d 1994 Repelita I (1969/1970 – 1973/1977) sampai saat ini berbagai kebijakan pembinaan dilakukan orientasi kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengusaha industri kecil yaitu ; (1) Rendahnya ketrampilan teknis, (2) Peraturan pemerintah berupa layanan penerbitan izin yang kurang mendukung, (3) Terbatasnya permodalan, (4) Kemampuan pemasaran yang kurang memadai dan,

(5) Bantuan teknis yang kurang memadai (Murp. B.Aji ; 1999, Manas ; 1999, Departemen perindustrian ; 1994, Susilo Bambang Yudhoyono ; 2005). Selanjutnya untuk mengatasi kendala seperti dijelaskan diatas, pemerintah melakukan pembinaan melalui kebijakan ; (1) Bantuan pelatihan teknis, (2) Peraturan pemerintah yang kondusif melalui kemudahan dalam penerbitan izin usaha, (3) Bantuan permodalan, (4) Bantuan pemasaran dengan bantuan berupa penyuluh industri dengan perdagangan (UU No 9 Tahun, 1995 ; Departemen perindustrian, 1995 ; Budiono, 2005). Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan struktur industri kecil berbentuk program bantuan pelatihan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudahan mendapatkan izin, bantuan permodalan, promosi dan pemasaran baik dalam maupun luar negeri, dan yang populer dewasa ini program pendampingan melalui penyuluhan profesional (UU No 9 Thn 1995), (Departemen perindustrian 1995), Budiono (2005).

Kebijakan pembinaan dengan program yang sama seperti di atas juga diutarakan oleh Presiden RI. Susilo Bambang Yudhono (2005) dalam pidatonya menyambut tahun mikro keuangan di Gedung SMESCO Promotion Center Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2005 dengan istilah empat sehat lima sempurna. Program tersebut diberikan dengan tujuan agar masalah rendahnya keterampilan teknis dan kemampuan manajerial, iklim usaha yang kurang kondusif, terbatasnya permodalan, kurangnya kemampuan dalam memasarkan hasil produksi, minimnya tenaga pendamping/penyuluh dapat teratasi sehingga kinerja usaha kecil dan menengah dapat ditingkatkan yang bermuara pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha penguatan struktur pertumbuhan unit usaha.

Keberhasilan usaha besar seperti digambarkan di atas, kemudian merosot akibat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian Badan Litbang Koperasi dan Pengusaha Kecil pada awal tahun 1998 disebutkan dari 225 ribu pengusaha kecil yang disurvei, diketahui sebanyak 64% masih dapat melanjutkan usahanya, 31% melakukan pembatasan kegiatan usahanya sedang yang 4% menghentikan usahanya, dan 1% industri kecil lainnya mampu berkembang.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa industri kecil unggul dalam hal; peningkatan penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha ini dapat dilihat dari total unit usaha industri mikro kecil dan menengah jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah unit usaha skala besar. Namun sumbangan terhadap PDB industri skala besar jauh lebih unggul dibandingkan industri kecil, sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur pertumbuhan unit usaha.

Untuk meningkatkan kontribusi Industri kecil terhadap perekonomian nasional, pemerintah melalui kebijakan pembinaan dengan berbagai program dan program tersebut bertujuan mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan berupa rendahnya keterampilan teknis dan kemampuan manajerial, iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan biaya tinggi dalam pengurusan izin-izin usaha, rendahnya kemampuan permodalan, terbatasnya kemampuan dalam memasarkan hasil produksi serta minimnya tenaga pendamping (penyuluh industri dan perdagangan), (Murp.B.Aji; 1999), (Deprind 1995).

Kebijakan pembinaan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi usaha kecil terdiri dari :

Hal senada juga disampaikan Maki and Pukkinen (2000) menyatakan kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi penghambat pertumbuhan usaha kecil seperti masalah dalam pemasaran hasil produksi dan kemampuan bisnis.

Berkaitan dengan kebijakan pembinaan usaha kecil, lebih lanjut Birch (1999), Gray, C (2000), Stanworth dan Curran Burns dan Dewhurst (1996), Glavcey, K (1998), Bridge dan Cromie (1998) mengatakan bahwa kontribusi usaha kecil lebih besar dalam menciptakan lapangan usaha, pekerjaan dan pertumbuhan struktur industri. Dibandingkan dengan usaha skala besar, sehingga para pengambil keputusan di berbagai negara memberikan perhatian khusus/mengarahkan kebijakan (*policy*) untuk membina dan mengembangkan usaha kecil dibandingkan usaha skala besar khususnya di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia.

Leo Paul Dana (1999) dalam penelitiannya tentang pengaruh program pembinaan pemerintah terhadap pengrajin (*small businesses*) di Yunani mengatakan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi regional karena peningkatan penjualan hasil produk kerajinan di pasar Yunani dan Uni Eropa sekaligus mampu mempertahankan pelestarian budaya melalui program pelatihan keterampilan teknis bagi para seniman muda, bantuan pameran hasil kerajinan dan penjualan hasil produk, pendampingan/assistensi, dan bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah Yunani untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh para seniman di Yunani.

Sarder, Ghost dan Rosa (1997), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja usaha kecil yang menerima bantuan/pembinaan dan yang tidak memperoleh pembinaan di Banglades.

Dijelaskan dengan adanya pembinaan berupa bantuan finansial dan non finansial terhadap pengusaha kecil berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah per tenaga kerja penuh waktu.

Selanjutnya gambaran singkat mengenai perkembangan Industri Mikro, Kecil, Menengah dan besar dan kebijakan pembinaannya di Indonesia sejak PJP I sampai tahun 2001 dijelaskan sebagai berikut.

Pembangunan industri termasuk industri Mikro kecil dan menengah selama PJP I telah banyak memberi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diutarakan menteri Perindustrian dan Perdagangan pada rapat konsolidasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta tanggal 18 – 22 Maret 1996 tentang “Kebijakan Pembangunan Industri dan Perdagangan”. Pembangunan ekonomi selama PJP-I telah mampu mengubah struktur ekonomi Indonesia menjadi semakin kukuh dan seimbang, di mana sektor industri menjadi bagian penting di dalamnya termasuk industri kecil. Secara keseluruhan sektor industri tumbuh dengan rata-rata lebih dari 12% per tahun antara tahun 1969 sampai 1991. Sumbangan industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 9,6% pada tahun 1969 menjadi 23,1% pada tahun 1994. Kemudian sumbangan terhadap ekspor nasional tahun 1993 mencapai 63% atau 86% dari ekspor non-migas, dengan peningkatan rata-rata di atas 25% per tahun. Memasuki tahun 1996 data BPS (1993) menunjukkan peranan usaha skala besar dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61% dan selisihnya sebesar 39% merupakan sumbangan sektor Industri Kecil Menengah.

- a) Bantuan pelatihan teknis. Adanya program pembinaan tersebut akan meningkatkan keterampilan teknis produksi, kemampuan managerial, kemampuan inovasi produk, sehingga akan meningkatkan volume penjualan, mendorong pertumbuhan unit usaha dan peningkatan struktur unit usaha industri (Simanjuntak, P; 1998, Tan Chwee Huat; 1998, Mc Celland; 1993).
- b) Pembinaan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif yaitu kemudahan dan penyederhanaan penerbitan izin-izin yang berkaitan dengan industri kecil baik mengenai pendirian usaha, pendaftaran, perluasan maupun izin usaha perdagangan. Adanya penyederhanaan dalam pengurusan izin usaha maka biaya produksi tidak terbebani sehingga akan meningkatkan laba dan mendorong struktur pertumbuhan unit usaha (Deprind; 1995, UU no 9 th 1995)
- c) Program pembinaan melalui bantuan permodalan. Dengan adanya bantuan modal, pengusaha akan mampu membeli bahan baku, membayar upah tenaga kerja, menambah peralatan dan mesin produksi yang lebih baik, akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, volume penjualan, dan mendorong pertumbuhan unit usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja (Karmakar; 1996, UUno 9 Thn 1995, Zainimar Naro; 2000).
- d) Pembinaan melalui bantuan pemasaran hasil produksi yaitu promosi dan pameran baik dalam negeri maupun luar negeri. Melalui pembinaan tersebut diharapkan masalah pemasaran hasil produk dapat di atasi dan akhirnya akan meningkatkan jumlah penjualan, berkembangnya usaha dan mendorong perubahan struktur pertumbuhan industri (UU No 9 Thn 1995, Ken Matsuno, *et al.*, 2002).

e) Pembinaan melalui bantuan tenaga pendamping yaitu penyuluh industri dan perdagangan. Penempatan tenaga pendamping yaitu penyuluh industri dan perdagangan akan memberikan bimbingan/assistensi bagi pengusaha baik yang menyangkut perencanaan yang berkaitan dengan visi misi usaha, teknik proses produksi, standardisasi, pemasaran, administrasi usaha dan sebagainya. Pengusaha akan memiliki kemampuan dalam mengelola usaha sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, volume penjualan yang bermuara pada pertumbuhan struktur unit usaha. (Leo Paul Dana, 1999 ; Moeljadi, 1999)

Pada tahun 2001 jumlah Industri Mikro (tidak termasuk industri mikro non-formal), Industri Kecil Menengah (IKKM) mencapai 2.885.827 unit usaha atau 99,9% dari total unit usaha industri yang ada di Indonesia yaitu sejumlah 2.886.563 unit. (RIP IKM; 2002-2004). Dari jumlah unit usaha industri tersebut 2.874.383 unit termasuk dalam kelompok industri mikro dan kecil (99,6%), 11.444 unit usaha tergolong industri menengah (0,4%), dan sisanya industri skala usaha besar yaitu sebanyak 756 unit usaha (0,1%).(RIP IKM; 2002-2004).

Pertumbuhan jumlah unit usaha baik Industri Mikro, Kecil dan Menengah serta Industri Besar tahun 1998 – 2001 menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 11,10% dengan rincian pertumbuhan masing-masing sub sektor seperti pada Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan struktur unit usaha industri mikro dan kecil meningkat setiap tahun rata-rata sebesar 11,12%. Jumlah unit usaha industri menengah meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,24% per tahun, sedang unit usaha industri skala besar meningkat setiap tahun rata-rata sebesar ,45%.

Tabel 1.1
 PERSENTASE TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH
 UNIT USAHA INDUSTRI MIKRO DAN KECIL SERTA MENENGAH DAN
 BESAR DI INDONESIA TAHUN 1998 – 2001 (RIBU UNIT)

No	Jenis Industri	1998	1999	2000	2001	Pertumbuhan rata –rata /tahun (%)
1	Industri Mikro dan Kecil	2.104,86	2.526,16	2.713,86	2.874,38	11,12
2	Industri Menengah	9,54	10,06	10,81	11,44	6,24
3	Industri Besar	0,63	0,67	0,71	0,76	6,45
	Jumlah	2.115,03	2536,89	2.725,38	2.886,58	11,10

Sumber : Depperindag Rencana Induk Pengembangan IKM. tahun 2002 data diolah

Kemudian persentase tingkat penyerapan tenaga kerja setiap tahun pada periode yang sama di sektor industri mikro dan kecil jauh lebih besar (hampir empat kali lipat) jika dibandingkan dengan industri menengah dan besar yaitu sebesar 15,7% setiap tahun, sedang industri kecil meningkat rata rata sebesar 4,1% setiap tahun, dan kontribusi industri skala besar terhadap penyerapan tenaga kerja hanya 4,13%. Adapun laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya untuk industri mikro, kecil dan industri skala besar selama tahun 1998 – 2001 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Berdasarkan data persentase pertumbuhan rata – rata unit usaha seperti pada Tabel 1.1 dan laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada Tabel 1.2, maka perbandingan antara unit usaha, tenaga kerja dan PDB dapat ditunjukkan pada Tabel 1.3. Selanjutnya pada Tabel 1.3 rasio PDB terhadap unit usaha industri kecil dan mikro adalah sebesar 19,31 sedang untuk tenaga kerja sebesar 7,34. Kemudian rasio PDB terhadap unit usaha industri menengah yaitu 4.751,92 dan untuk tenaga kerja 14,42.

Tabel 1.2
 PERSENTASE TINGKAT PERTUMBUHAN PENYERAPAN
 TENAGA KERJA INDUSTRI MIKRO DAN KECIL SERTA MENENGAH DAN
 BESAR DI INDONESIA TAHUN 1998 – 2001 (RIBU ORANG)

No	Jenis Industri	1998	1999	2000	2001	Pertumbuhan rata –rata /tahun (%)
1	Industri Mikro dan Kecil	4.986,16	6.771,88	7.154,65	7.592,51	15,86
2	Industri Menengah	3.343,37	3.363,64	3.553,77	3.771,25	4,13
3	Industri Besar	220,97	222,31	222,31	249,25	4,13
	Jumlah	8.550,50	10.357,83	10.930,93	11.604,91	23,12

Sumber : Depperindag. RIP. IKM. tahun 2002 data diolah

Rasio PDB terhadap industri besar adalah sebesar 366.489,31 dan untuk tenaga kerja 1.111,60. Dari data tersebut diketahui peranan Industri Besar terhadap PDB jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan industri mikro dan kecil, industri menengah padahal jika dilihat dari jumlah unit usaha industri besar relatif lebih kecil. Namun sebaliknya industri mikro, kecil, industri menengah menunjukkan kemampuannya untuk memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Gambaran mengenai perbandingan persentase kontribusi industri mikro, kecil, menengah dan besar terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 1.4. Persentase sumbangan industri mikro kecil menengah dan industri besar terhadap pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan selama tahun 2000 masing-masing yaitu; sumbangan IKM terhadap unit usaha sebesar 99,74% sedang sumbangan industri besar 0,26%.

Sumbangan industri mikro kecil dan menengah terhadap *output* hanya sebesar 14,74 dan industri besar 85,26%. Sumbangan industri mikro kecil dan menengah terhadap *input* sebesar 15,03% dan industri besar 84,97%. Persentase

sumbangan industri mikro kecil dan menengah terhadap nilai tambah sebesar 14,26% sedang industri besar 85,74%.

Tabel 1.3
PERBANDINGAN ANTARA UNIT USAHA (UU),
TENAGA KERJA (TK) DAN PDB INDUSTRI MIKRO DAN KECIL SERTA
MENENGAH DAN BESAR DI INDONESIA TAHUN 2002

No	Jenis Industri	Unit Usaha (ribu unit)	Tenaga Kerja (ribu orang)	PDB (Rp Triliun)	Rasio PDB Terhadap:	
					(Rp Juta/Unit)	(Rp Juta/orang)
1	Industri Kecil dan Mikro	2.874,38	7.592,52	55,69	19,31	7,34
2	Industri Menengah	11,44	3.771,25	54,38	4.751,92	14,42
3	Industri Besar	0,76	249,25	218,34	366.489,31	1.111,60

Sumber : Depperindag. RIP. IKM. tahun 2002 data diolah

Sumbangan Industri Kecil Mikro Menengah terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 64,59% serta Industri Besar sebesar 35,41. Kemudian persentase sumbangan IMKM terhadap upah sebesar 21,28 dan 78,72 sumbangan Industri Besar. Sumbangan IMKM terhadap pertumbuhan *Fixed Asset* sebesar 27,20 dan Industri Besar sebanyak 72,80%.

Berdasarkan uraian di atas dan data perkembangan serta keberhasilan usaha kecil secara umum baik di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Uni Eropa maupun negara berkembang seperti Indonesia, begitu juga permasalahan yang dialami serta kebijakan pembinaannya, diketahui betapa pentingnya peranan usaha kecil sebagai kontributor terhadap pembangunan ekonomi baik nasional maupun tingkat internasional.

Tabel 1.4
 PERSENTASE SUMBANGAN IMKM, IB TERHADAP PERTUMBUHAN
 INDUSTRI SECARA KESELURUHAN DI INDONESIA TAHUN 2000

URAIAN	IMKM	IB	TOTAL	% Sumbangan	
				IMKM	IB
Jumlah Perusahaan (unit)	2.614081	6.797	2.620.878	99,74	0,26
Output (Rp. Juta)	101.159.233	584.968.192	686.127.426	14,74	85,26
Input (Rp. Juta)	64.674.265	365.684.454	430.358.718	15,03	84,97
Nilai Tambah (Rp. Juta)	36.484.970	219.283.733	255.768.702	14,26	85,74
Tenaga Kerja (Orang)	6.884.298	3.733.518	10.657.816	64,59	35,41
Upah (Rp. Juta)	8.933.560	33.053.038	41.986.599	21,28	78,72
Fixed Asset (Rp. Juta)	66.750.032	178.626.042	245.376.074	27,20	72,80

Sumber: Depperindag. RIP IKM tahun 2002 data diolah

Keterangan: IMKM = Industri Mikro Kecil dan Menengah. IB = Industri besar

Oleh sebab itu eksistensinya perlu dijaga dan ditingkatkan melalui kebijakan pembinaannya sesuai dengan strata usaha (*Firms Structure*), *characteristics*, permasalahan dan wilayah di mana fokus pembinaan usaha tersebut dilakukan, seperti halnya Industri Kecil dan Menengah Penggerak Ekonomi Daerah (IKM-PED) yang menjadi objek penelitian ini.

Seiring dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah 1999 sejak tahun 2001 di Indonesia, kebijakan pembinaan dengan pendekatan sektor atau kelompok industri pilihan yang diprioritaskan sebagai penghela pertumbuhan industri kecil penggerak ekonomi daerah telah dilaksanakan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 1999/2000.

Konsep kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan industri kecil di Indonesia mengalami pergeseran dari kebijakan

yang bersifat *generalis* (anggapan sebagai sektor yang seragam) seperti yang dilaksanakan sejak Pelita Lima (akhir tahun 1999). Mengarah pada pengembangan sektor atau kelompok industri pilihan yang diprioritaskan sebagai penghela pertumbuhan industri kecil dengan pola pendekatan logis dan komprehensif baik dalam pemecahan masalah (*problem solving*) maupun yang bersifat pengembangan ke depan (*development oriented*) (Depperind 1999, Buku 1 hal.45). Kebijakan pembinaan pemerintah dengan konsep tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Industri kecil Menengah (RIP-IKM) buku satu dan dua, IKM dikelompokkan dalam 4 sub-sektor yaitu;

- 1) Industri Kecil Menengah Penggerak Ekonomi Daerah (IKM-PED).
- 2) Industri Kecil Menengah Pendukung (*Supporting Industry*).
- 3) Industri Kecil Menengah Berorientasi Ekspor.
- 4) Industri Kecil menengah berbasis pengetahuan (*Knowledge Based SMEs*).

Masing-masing sub-sektor IKM mempunyai karakteristik dan kontribusi yang berbeda terhadap perkembangan industri nasional. Demikian juga pembinaannya, lingkup komoditi dan wilayah pengembangannya sehingga untuk meneliti pengaruh kebijakan dan program pembinaan untuk masing-masing sub-sektor memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup besar.

Oleh sebab itu penulis hanya meneliti sub-sektor Industri Kecil Penggerak Ekonomi (IK-PED) di Provinsi Sumatera Utara dengan judul penelitian, **“Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Terhadap Kinerja Dan Struktur Usaha Sub Sektor Industri Kecil Di Provinsi Sumatera Utara”**.

Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah yang selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan istilah IK-PED adalah industri yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan-bahan utamanya berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat sehingga komoditi yang termasuk dalam kelompok industri ini secara prioritas tumbuh dan dikembangkan di daerah pedesaan. Misi dan Tujuan pengembangan IM-PED adalah untuk ikut mempercepat pemulihan dan pergerakan kegiatan ekonomi secara maluas di daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. (Depperindag. 2002, RIP IKM Bk I hlm 57-58).

Posisi jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja serta nilai produksi untuk tiap-tiap komoditi yang termasuk dalam kelompok IKM-PED di Indonesia pada tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 1.5 yaitu sebesar 1.194.052 unit usaha dan jumlah Tenaga kerja yang terserap sebanyak 3.066.590 orang dengan nilai produksi sebesar Rp 12.255.460.000.

Posisi jumlah masing-masing unit usaha komoditi IKM-PED, penyerapan tenaga kerja dan nilai produksi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.5. Berdasarkan Tabel 1.5 diketahui peranan IKM-PED terhadap jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja terhadap industri secara menyeluruh di Indonesia pada tahun 2002. Total unit usaha yang ada di Indonesia tahun 2001 sebesar 2.886.580 unit usaha, sedangkan IKM-PED sebanyak 1.194.052 unit berarti kontribusi IKM-PED sebesar 41%.

Tabel 1.5
POSISI JUMLAH UNIT USAHA PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN
NILAI PRODUKSI IKM-PED DI INDONESIA TAHUN 2002 (RIBU UNIT)

No	Jenis Komoditi	Junlah Unit Usaha (Unit)	Tenaga kerja (Orang)	Nilai Produksi (Rp.000)
1	Makanan ringan	66.288	240.650	1.996.240
2	Sutra Alam	32.547	187.870	347.898
3	Penyamakan Kulit	386	12.050	141.367
4	CP0-IKM	10	10.330	1.114.607
5	Pupuk	412	9.660	142.133
6	Garam	2.866	30.180	156.239
7	Genteng	197.909	941.710	3.370.177
8	Alasintan	404	5.230	32.403
9	Motorisasi Kapal nelayan	2.516	17.110	83.604
10	Kapal $\leq$ 100 GT	2.010	26.370	350.150
11	Mesin Alat Pertanian Tradisional	24.324	66.360	467.352
12	Tenun Tradisional	185.458	381.840	1.119.154
13	Perhiasan	18.955	49.400	866.379
14	Anyaman	659.987	1.066.590	1.567.796
	J u m l a h	1.194.052	3.066.590	12.255.460

Sumber. Disperindag Provinsi Sumut. tahun 2002 data diolah

Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja IKM-PED pada periode yang sama yaitu sebesar 3.066.590 yaitu sebesar 26,4% dari total seluruh tenaga kerja yang terserap di sektor IKM sebanyak 11.604.910 orang.

Jenis komoditi yang termasuk dalam kelompok IKM-PED di Indonesia terdiri dari 14 komoditi yaitu; makanan ringan, sutra alam, penyamakan kulit (kulit samak), crued palm oil (CPO-IKM), pupuk alam, garam, genteng, alat-alat dan mesin pertanian (alsintan), motorisasi kapal nelayan, kapal $\leq$ 100 GT, mesin dan alat pertanian tradisional, tenun tradisional dan anyam-anyaman.

Untuk lebih jelasnya pada Tabel 1.6 dapat dilihat posisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, investasi dan nilai produksi IKM-PED di provinsi Sumatera Utara tahun 2003.

Tabel 1.6
 POSISI JUMLAH UNIT USAHA, PENYERAPAN TENAGA
 KERJA NILAI INVESTASI DAN NILAI PRODUKSI IKM-PED
 DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2003

No	Jenis Komoditi	Jumlah Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp 000)	Nilai Produksi (Rp 000)
1	Makanan ringan	243	4215	5.058.000	48.334.000
2	Tenun Gedongan Ulos	1238	4952	7.428.000	11.142.000
3	Pupuk Alam Organik	50	183	450.800	5.000.000
4	Genteng	5	42	84.806	256.293
5	Kapal kayu/perahu	20	137	542.625	1.234.620
6	Perhiasan emas & perak	59	413	767.000	472.000
7	Alsintan dri logam	253	1.012	1.518.000	1.771.000
	Jumlah	2.468	10.954	15.849.231	64.732.293

Sumber. Disperindag. Prov. Sumut. Tahun 2003 data diolah

Kontribusi jumlah unit usaha IKM-PED di Provinsi Sumatera Utara sebesar 11.306 unit terhadap jumlah unit usaha yang ada di Indonesia sebanyak 1.194.052 adalah 1,2%. Selanjutnya penyerapan tenaga kerja sebesar 44.936 orang di Provinsi Sumatera Utara yaitu 1,49% dari total tenaga kerja yang terserap di sektor IKM-PED yang ada di Indonesia yaitu 3.066.590 orang. Jika dilihat dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja yang terserap di sektor ini relatif kecil namun dampak pembinaan terhadap IKM-PED sangat strategis dalam rangka meningkatkan kinerja, penyerapan tenaga kerja dan penguatan struktur pertumbuhan unit usaha khususnya yang ada di pedesaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan teknis berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah tata kelola pembinaan melalui peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?
5. Apakah tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh industri dagang berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?
6. Apakah tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan teknis berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?
7. Apakah tata kelola pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?

8. Apakah tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?
9. Apakah tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?
10. Apakah tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?
11. Apakah kinerja usaha berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara ?

1.3 Tujuan Studi

Tujuan utama studi ini adalah untuk memahami fenomena. fenomena merupakan gejala yang terjadi dilingkungan sekitar yang perlu diketahui secara komprehensif. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut .

1. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan teknis terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara

3. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara
4. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara
5. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh industri dagang terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara
6. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan teknis terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara
7. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara
8. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara
9. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara

10. Untuk mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara
11. Untuk mengkaji pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara

1.4 Manfaat Studi

Dengan dilakukannya studi ini diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Sebagai suatu sumbangan keilmuan dalam pengembangan Teori Kebijakan Pembangunan (*development policy*) khususnya sektor industri dan perdagangan dan pembangunan ekonomi (*economic development*) umumnya serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai pembina dan bagi pengusaha industri kecil.
2. Untuk memperluas wawasan tentang tata kelola pembinaan pemerintah sebagai upaya untuk mengembangkan sub sector IK-PED dalam rangka meningkatkan kinerja dan Struktur Usaha.
3. Memberikan masukan bagi pengusaha IK-PED dalam rangka pengembangan usaha dengan memanfaatkan seoptimal mungkin program pembinaan pemerintah berupa Pelatihan, Iklim Usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan, Permodalan, Promosi dan Pemasaran serta bantuan Tenaga Penyuluh.
4. Studi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Pembinaan Pemerintah terhadap industri kecil di Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kebijakan Pembinaan Industri Kecil Menengah di Indonesia

2.1.1 Teori Kebijakan

Kebijakan atau *policy* sesungguhnya dipergunakan dalam banyak pengertian yang berbeda-beda sesuai tujuan. Hesel Nogi S., *et al.*, (2003:3) mengatakan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilakukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Sedang kebijakan publik diartikan sebagai :

“Sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu; (1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; (2) adanya output kebijakan di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; (3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat” (Woll dalam Hesel Nogi S, *et al.*, 2003:2)

Berkaitan dengan implikasi kebijakan publik, Ibnu Syamsu, *et al.*, (1994:35) mengatakan; kebijakan pemerintah itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat, terlepas siapa yang melakukannya baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini, tetapi juga untuk yang akan datang.

Oleh sebab itu menurut Hesel Nogi S, *et al.*, (2003:3) kebijakan publik mempunyai komponen-komponen yaitu, (1) *goal* atau tujuan yang diinginkan (2) *plans* atau proposal yaitu pengertian spesifik untuk mencapai tujuan; (3) program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan; (4) *decision* atau keputusan yaitu, tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; (5) efek yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Lebih lanjut Islami, *et al.*, (1998:12) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kemudian dalam Lembaran negara RI No 22 tahun 1984, yang menjelaskan tentang dasar yang kokoh bagi Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan pelaksanaan pembangunan sektor industri secara mantap dan berkesinambungan pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian. Dalam UU tersebut pada pasal 7 dikatakan bahwa bentuk dari kebijakan pemerintah adalah berupa peraturan, pembinaan dan pengembangan industri. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 9 tahun 1995. Dalam pasal 4a dijelaskan bahwa tujuan kebijakan pembinaan pemerintah terhadap Industri Kecil Menengah adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah.

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa kebijakan publik diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dengan cara mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan serta program-program yang diimplementasikan, kemudian melakukan penilaian apakah kebijakan yang dibuat dapat mencapai sasaran.

Kemudian timbul pertanyaan apakah setiap implementasi (*implementation*) kebijakan pemerintah (*policy*) akan selalu berpengaruh positif dan tepat sasaran ?

Dalam kenyataannya kebijakan pemerintah ada yang bahkan banyak yang mengalami kegagalan. Kebijakan pemerintah sebenarnya memiliki resiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan ini oleh Abdul Wahab, *et al.*, (1998: 61-62) dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. *Non Implementation*, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Keadaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kerja sama, penguasaan permasalahan ataupun wilayah permasalahan yang diluar jangkauan kewenangan.
2. *Unsuccesful Implementation*, kebanyakan disebabkan oleh faktor eksternal yang ternyata tidak menguntungkan.

Kebijakan yang memiliki resiko gagal disebabkan oleh faktor; pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), atau kebijakan itu sendiri memang jelek (*bad policy*), atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

Sementara itu Cleaves dalam Abdul Wahab (1998:125) mengatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat diteliti dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang

telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dilihat dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan akhir.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan pembinaan pemerintah terhadap Industri Mikro Kecil Menengah adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga dengan adanya program pembinaan yang dilakukan diharapkan Kinerja Usaha dan Struktur Pertumbuhan Unit Usaha akan meningkat. Dengan demikian kontribusi IMKM terhadap perkembangan ekonomi nasional akan meningkat pula.

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 9 tahun 1995 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil hingga saat ini berbagai program pembinaan pemerintah terhadap IMKM telah banyak dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Pada dasarnya jenis program yang diimplementasikan tidak jauh berbeda antara sub-sektor yang satu dengan yang lainnya. Karena tujuan utama dilakukannya pembinaan terhadap industri tersebut adalah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Kebijakan pembinaan melalui program bantuan pelatihan teknis, iklim usaha yang kondusif berupa peraturan-peraturan di bidang perijinan, bantuan permodalan, promosi dan pemasaran serta pendampingan melalui tenaga penyuluh industri dan perdagangan merupakan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal tahun 1995, dan tetap dilanjutkan sampai saat ini, seperti ditandakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Pebruari (2005) di Jakarta dengan istilah pembinaan yang disebut formula empat sehat lima sempurna.

Sebenarnya program pembinaan serupa telah dilakukan sebelumnya terhadap industri mikro dan kecil meski dalam strata (struktur industri dan kelompok komoditi yang berbeda). Namun penelitian terhadap pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah terhadap Kinerja usaha dan Struktur Pertumbuhan Unit Usaha pada Industri Mikro Kecil Menengah Penggerak Ekonomi Daerah belum pernah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara.

2.1.2 Pembinaan Industri Kecil Menengah di Indonesia

2.1.2.1 Pengertian Tata Kelola Pembinaan

Menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1998 pembinaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Sedang tata kelola pembinaan diartikan sebagai ; segala sesuatu mengenai implementasi peraturan-peraturan, susunan dan bentuk program pembinaan yang dilakukan pemerintah.

Lebih lanjut Depperindag (2002:40) menjelaskan bahwa tujuan tata kelola pembinaan Industri Kecil Menengah adalah:

1. Untuk meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, *output*, serta nilai tambah yang dihasilkan.
2. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan menengah dan dengan industri besar.

2.1.2.2 Pengertian dan Kriteria Industri Mikro, Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar

“Industri mikro adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dipwerniagakan secara komersial yang mempunyai invesatasi kurang dari Rp 5 juta, jumlah tenaga kerja 1 s/d 4 orang, memiliki sifat entrepreneurship yang sangat terbatas (embrional), belum berbadan hukum, pemasaran produksi lingkup kecamatan (lokal), belum memanfaatkan jasa bank, menggunakan teknologi sederhana, manual, sumber bahan baku diperoleh disekitar daerah produksi, dan memiliki omzed sampai dengan 50 juta. (Industri Kecil Dagang Kecil (IKDK) ; 1992)”

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pengertian dan kriteria Industri Kecil dan Menengah didefenisikan sebagai berikut:

“Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 Juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun tidak lebih dari Rp 1 Milliar”

“Sedang Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun tidak lebih dari Rp 50 miliar. (RIP-IKM; 2002;3)”

Kemudian batasan mengenai skala usaha menurut BPS, yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja yaitu;

Industri dan Dagang Mikro (ID-Mikro)	: 1 – 4 orang
Industri dan Dagang Kecil (ID – Kecil)	: 5 – 19 orang
Industri dan Dagang Menengah (ID-Menengah)	: 20 – 99 orang
Industri dan Dagang Besar (ID – Besar)	: > 100 orang

2.1.2.3 Industri Kecil Menengah Penggerak Ekonomi Daerah (IKM-PED)

a. Pengertian IKM-PED

Industri Kecil menengah Penggerak Ekonomi Daerah adalah industri yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utamanya

berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat, mudah ditumbuh kembangkan di suatu daerah, yang dapat menimbulkan dampak penggairahan ekonomi daerah secara cepat dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga dapat mempercepat peningkatan penghidupan/kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. (Depperindag, 2002:57)

b. Ciri-Ciri IKM-PED

Menurut Depperindag (2002:17) IKM-PED memiliki ciri sebagai berikut, (1) Bahan baku mudah diperoleh, utamanya karena tersedia di daerah, (2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi, (3) Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun, (4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, (5) Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor, (6) Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat, (7) Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, (8) Secara ekonomi menguntungkan.

c. Permasalahan IMKM-PED

(1) Keterbatasan wawasan bisnis serta rendahnya keterampilan teknik produksi (kurang inovatif). Kemampuan berusaha tidak dapat ditunjukkan dengan cepat, tapi harus melalui proses secara bertahap, (2) Implementasi Peraturan Pemerintah berupa penerbitan izin modal/izin usaha yang kurang kondusif (prosedur perizinan yang kurang lancar serta banyaknya pungutan

biaya), (3) Keterbatasan modal investor ataupun modal kerja, (4) Kesulitan mendapat akses pasar karena keterbatasan pengetahuan mengenai jaringan pemasaran yang ada dengan keterbukaan dana promosi dan pelaksanaan pameran di dalam negeri maupun tingkat internasional, (5) Terbatasnya sumber daya pembina seperti tenaga penyuluh Indag sebagai pendamping untuk memberikan asistensi bagi pengusaha. (Bapik, 1994 :6 – 7)

d. Lingkup Komoditi IKM-PED

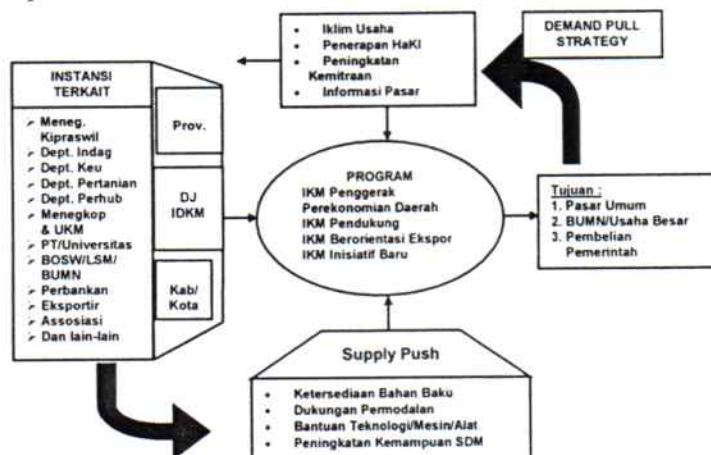
Komoditi yang termasuk dalam kelompok IKM-PED yaitu: (1) Makanan ringan, (2) Sutera alam, (3) Penyamakan kulit, (4) Minyak Sawit (CPO-IKM), (5) Pupuk alam dan organik, (6) Garam, (7) Genteng, (8) Alsintani dan pande besi, (9) Kapal<100GT, (10) Motorisasi kapal nelayan, (11) Alat pertanian tradisional, (12) Tenun tradisional, (13) Perhiasan, (14) Anyaman

e. Misi dan Tujuan Pembinaan IKM-PED

Pembinaan dan pengembangan IKM-PED mempunyai misi dan tujuan yaitu; (1) Memanfaatkan potensi sumber daya alam andalan lokal secara optimal, masyarakat IKM setempat dan sebagai pemasok utama pasar lokal, (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (4) Memperluas kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), (5) Melestarikan dan mengembangkan seni tradisional budaya daerah, (6) Mengisi kebutuhan pasar lokal dan (7) memajukan daerah. (Depperindag, 2002:18)

f. Model Pembinaan IKM-PED

Model pembinaan IKM-PED dilakukan seperti pada Gambar 2.1 berikut



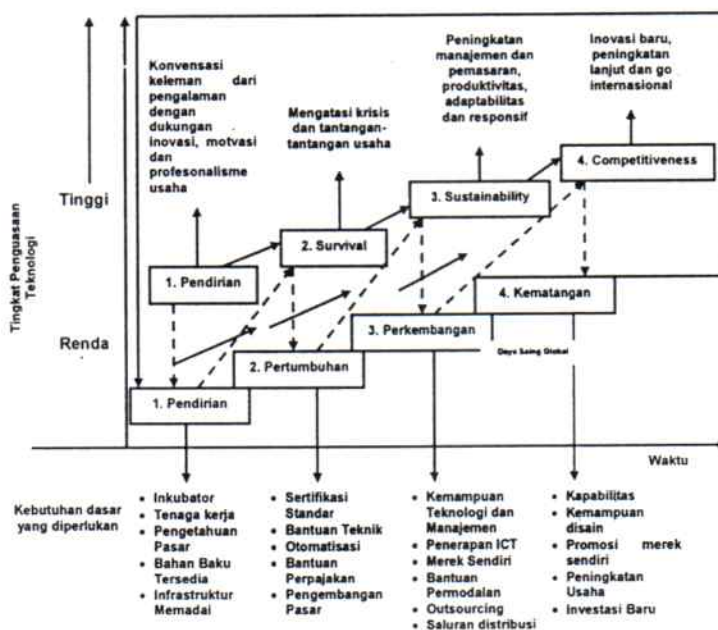
Sumber. Depperindag RIP IMKM (2002:46)

Gambar 2.1

MODEL PEMBINAAN IKM-PED ERA OTONOMI

g. Perlakuan Pembinaan

Perlakuan dan tahapan fasa pengembangan IKM-PED dilakukan seperti pada Gambar 2.2 sebagai berikut.



Sumber. Depperindag RIP IKM (2002:48)

Gambar 2.2

TAHAPAN FASA PENGEMBANGAN IKM-PED

h. Pembidangan Peran antar Instansi

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan IKM-PED terdapat beberapa instansi yang terlibat di dalamnya. Pembidangan peran/tugas dan tanggung jawab pengembangan IDKM/IKM antar instansi pusat, tingkat provinsi, daerah Kab dan Kota mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Depperindag cq Ditjen IDKM; sebagai penanggung jawab utama pengembangan IDKM secara nasional, dengan tugas pembuatan kebijakan dan model pengembangan, pembuatan arahan dan pedoman pembinaan IDKM bagi daerah, serta pengembangan IKM pada segmen-segmen tertentu seperti pada Tabel 2.1.

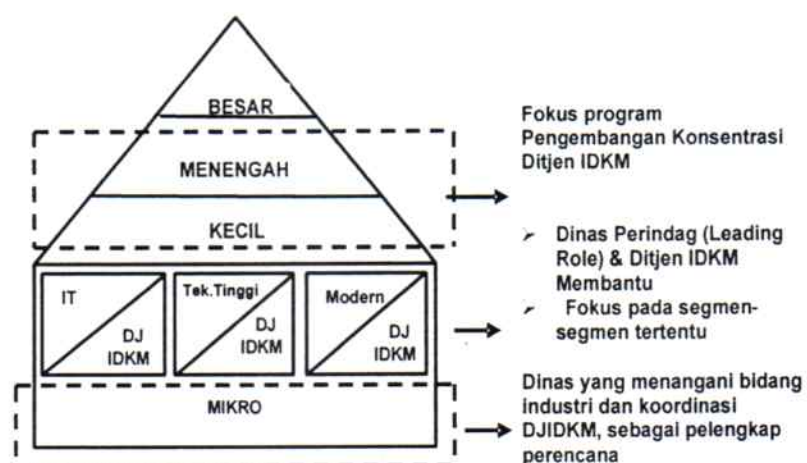
Tabel 2.1
KEBUTUHAN DASAR INDUSTRI PADA SETIAP FASA

Fasa Pendirian	Fasa Pertumbuhan	Fasa Pengembangan	Fasa Kematangan
1) Inkubator, ketersediaan infra struktur untuk memulai usaha, seperti : studi kelayakan, pelatihan (AMT, CEFE, dst), pengetahuan tentang perijinan, serta pengetahuan tentang aspek legal lainnya 2) Ketersediaan tenaga kerja 3) Ketersediaan pasar dan informasinya 4) Permodalan 5) Ketersediaan bahan baku/penolong yang sesuai dengan produk yang dihasilkan 6) Ketersediaan infrastruktur fisik untuk pabrik dan sebagainya.	1) Sertifikasi standar 2) Pengembangan Teknik/Technology 3) Proses otomatisasi atau teknologi tepat guna 4) Bantuan perpajakan 5) Bantuan Promosi dan Pemasaran	1) Peningkatan kemampuan teknik dan teknologi 2) Peningkatan kemampuan manajemen 3) Peningkatan penerapan ICT 4) Bantuan kepemilikan merek sendiri 5) Peningkatan akses ke lembaga keuangan/modal ventura 6) Out Sourcing 7) Pengembangan saluran distribusi	1) Pengembangan Desain 2) Promosi Merek 3) Peningkatan kemampuan lanjut usaha 4) Penjagaan investasi baru

Sumber. Depperindag RIP IKM (2002:49)

- 2) Instansi lain di pusat : Menunjang tugas-tugas pengembangan IKM yang dilakukan oleh Depperindag, dalam segi-segi pengembangan di luar jangkauan pembinaan industrinya, perlindungan, prasarana dan sarana penunjang, khususnya dukungan penyediaan sumber daya permodalan, pembinaan perkoperasian, pengembangan kewira usahaan dan manajerial, iklim usaha yang kondusif, keterampilan teknis, pendampingan penyuluh, promosi dan pemasaran.
- 3) Instansi daerah cq. Dinas yang menangani masalah pengembangan industri : Sebagai pelaksana pengembangan sebagian usaha kecil dan mikro, yang dalam hal ada aspek-aspek kemampuan yang belum siap (misalnya yang bersifat modernisasi dan yang memerlukan penggalangan upaya secara nasional) maka keterlibatan instansi pusat (Ditjen IDKM) sebagai koordinator masih diperlukan.

Mekanisme koordinasi penanganan pembinaan IKM-PED dapat dilihat seperti pada Gambar 2.3.



Sumber. Depperindag RIP IKM (2002:50)

Gambar 2.3
MEKANISME KOORDINASI PEMBINAAN IKM-PED

i. Mekanisme Koordinasi

Instansi Indag (pusat/daerah cq. Dinas Indag) bertanggung jawab menjadi pengambil peran pemrakarsa dalam setiap program pengembangan IDKM, mulai dari pembuatan kebijakan, pengaturan, penyusunan program sampai dengan implementasi dan evaluasi hasilnya. Atas keputusan politik otoritas koordinasi, instansi lainnya bertugas untuk menunjang program pengembangan IDKM/IKM di wilayah administrasinya.

j. Pelimpahan Peran kepada Daerah untuk Berprakarsa membuat Program

Daerah didorong untuk secara *bottom-up* mengembangkan program berdasarkan kajian potensi ekonomi daerah dan prospek pasar masing-masing, dengan mengikuti kebijakan nasional sebagaimana termuat dalam pedoman dan arahan pengembangan IKM serta memperhatikan program umum pengembangan.

Setiap daerah didorong untuk melakukan:

- 1) Identifikasi sentra-sentra IKM yang berpotensi dapat ditumbuhkan berdasarkan peluang pasar lokal/regional dan nasional
- 2) Identifikasi peluang investasi pemerintah, khususnya kelemahan dan hambatan yang mengganggu suksesnya pengembangan IKM di daerah masing-masing.
- 3) Investasi pemerintah daerah (maupun kerja sama dengan swasta) untuk pengembangan prasarana dan sarana usaha yang meliputi : bantuan teknik yang diperlukan, pengaturan yang dapat menciptakan kepastian usaha dan iklim kondusif bagi kegiatan usaha IKM, termasuk sistim insentif,

pengembangan sistim layanan fasilitatif dan penataran aparat Pembina, pemberdayaan pelaku usaha.

- 4) Identifikasi peluang investasi IKM yang mempunyai prospek layak usaha bekerja sama dengan BKPMD untuk dipromosikan kepada para calon investor khususnya dari kalangan pengusaha/ masyarakat setempat.

2.2 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis dengan Kinerja Usaha

“Training is the process of improving people’s knowledge and skills. It may also involve changing their attitude so that they can do their jobs more effectively. Training can be conducted at all levels in the organization. At the lower level, it often involves teaching employees “how to” do task, such as operating a machine, or writing a report “ (Tan Chuee Hurt dan Derch Torrington, 1998:288).

Pelatihan adalah suatu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan manusia. Pelatihan juga dapat merubah perilaku mereka sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif. Pelatihan dapat diikuti oleh semua tingkatan pegawai di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pada tingkat yang lebih rendah, pelatihan itu bermanfaat untuk memberikan petunjuk bagaimana melakukan suatu tugas, seperti menjalankan sebuah mesin ataupun menulis sebuah laporan.

Hal senada juga dikatakan oleh Mathis & Jackson (2000) :

“Training is a process whereby people accuire capabilities to aid in the achievement of organizational goals. Becouse this process is tied to a variety of organizational purposes, training can be viewed either narrowly or broadly. In a limited sense, training provides employees with specific, identifiable knowledge anda skills for use on their present jobs.”

Menurut Chiu, Warren (1999) pelatihan merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi, karena kualitas manusia sangat menentukan kesuksesan pencapaian tujuan organisasi, oleh sebab itu untuk meningkatkan kinerja usaha pelatihan harus dilakukan. Pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, dengan meningkatnya keterampilan maka produktivitas akan meningkat pula karena adanya efisiensi yang tinggi sehingga kinerja usaha meningkat dan kelangsungan perusahaan terjamin.

Dengan keterampilan teknis, kreativitas, inovasi dan kemampuan manajerial yang dimiliki oleh seorang pengusaha akan mampu menciptakan peluang, mengantisipasinya serta mengupayakan kesuksesan kinerja bagi diri, perusahaannya, maupun orang lain. Dan segala sesuatu tentang kesuksesan kinerja usaha yang berhubungan dengan kemampuan (*ability*) SDM, baik dari aspek manajerial maupun keterampilan teknis (*technical skill*) tersebut dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui apa yang disebut dengan pelatihan. Efektivitas pelatihan, dapat diketahui dengan membandingkan tingkat kinerja usaha seseorang sebelum dan sesudah mengikuti suatu pelatihan teknis yang berkaitan dengan usahanya.

Nitisemito (1996:72), Simamora (1997:91) menyatakan bahwa tujuan dan sasaran pelatihan adalah untuk memperbaiki sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari karyawan, memperbaiki kinerja, membantu memecahkan permasalahan sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu; (1) pekerjaan akan lebih cepat dan lebih baik; (2) penggunaan bahan dapat lebih hemat; (3) penggunaan peralatan dan mesin diharapkan lebih tahan lama; (4) angka kecelakaan diharapkan

lebih kecil; (5) tanggung jawab diharapkan lebih besar; (6) biaya produksi diharapkan lebih rendah; (kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin)

Pendapat tersebut juga didukung oleh Mathis dan Jackson (2000) dengan mengikuti *training* (pelatihan) akan mendapatkan keuntungan yaitu (1) *increase in production*, (2) *reduction in errors*, (3) *reduction in turnover*, (4) *less supervision necessary*, (5) *ability to advance*, (6) *new capabilities*, (7) *attitude changes*.

Selanjutnya Anwar Prabu, *et al.*, (2003:51) merumuskan prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan yaitu; (a) Materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan; (b) Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai; (c) Pelatih harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran; (d) Adanya penguat (*reinforcement*) guna membangkitkan respon yang positif dari peserta; (e) Menggunakan konsep pembentukan (*shaping*) perilaku. Oleh karena itu, prinsip dasar utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelatihan adalah (1) Prinsip relevansi diartikan sebagai kesesuaian dengan tuntutan kehidupan artinya pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna bagi lingkungan hidup *trainee*. Untuk itu topik pelatihan (*training*) yang akan diberikan hendaknya dipertimbangkan sejauh mana topik tersebut harus dimulai dan dijabarkan bagi perusahaan. Relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan artinya materi pelatihan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. (2) Efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berkaitan dengan pencapaian target yaitu seluruh program pelatihan harus diselesaikan

tuntas (tidak ada yang terlewatkan sesuai dengan target). Sedang efisiensi adalah berkaitan dengan waktu, tenaga pelatih dengan metode pelatihan yang digunakan para instruktur. (3) Prinsip Kesenambungan yaitu saling berhubungan antara berbagai tingkat dan jenis program pelatihan serta komposisi kurikulum (teori dan praktek yang berkesinambungan).

Berdasarkan pengertian, tujuan dan sasaran serta prinsip dasar pelatihan seperti diutarakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hubungan antara pelatihan dan kinerja usaha sebenarnya mempunyai kaitan yang sangat erat, ini dapat dilihat dari teori human kapital.

Asumsi dasar teori *Human Capital* adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui pendidikan dan pelatihan. Setiap tambahan satu satuan pendidikan dan latihan akan meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan (Simanjuntak, 1998; 70). Pendidikan dan latihan dalam pengembangan sumber daya manusia, tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja (Simanjuntak, 1998:69). Yang dimaksud dengan produktivitas di sini adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan jasa) yang diproduksi dengan sumber (jumlah tenaga kerja yang terampil, modal, tanah, energi, peraturan-peraturan pemerintah yang mendukung, promosi pemasaran dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk (Depperind, 1995).

Freeman (1986), Haywood (1992) juga mengatakan dukungannya bahwa *Human Capital* bagi sumber daya manusia dapat memberikan kesan bahwa

mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan investasi jangka panjang dari arus waktu, uang dan upah untuk dimasa mendatang. Walaupun pelatihan itu memerlukan biaya besar tetapi pengeluaran untuk pelatihan tersebut akan dapat kembali berupa peningkatan pendapatan dari laba usaha. Jadi dampak dari pelatihan akan meningkatkan kinerja.

Kinerja menurut Erich A. Helfert (1996:56) adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Kinerja merupakan indikator suatu tingkat kerja karena telah melahirkan suatu aktivitas. Jadi kinerja diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas diketahui bahwa seluruh aktivitas baik individu maupun kelompok dalam melakukan tindakan (pekerjaan) yang sudah ditetapkan sesuai atau lebih baik dari apa yang diminta atau diharapkan orang lain.

Jane Orpha (1997) mengatakan bahwa penilaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa dimensi antara lain dilihat dari efektivitas, efisiensi dan *equity/kewajaran*. Jane mengatakan efektivitas diartikan sebagai kemampuan seseorang atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang sesuai dengan standar-standar yang menjadi ketetapan. Sedangkan efisiensi diartikan dengan sejauh mana sumber-sumber yang ada digunakan dengan biaya yang relatif lebih rendah untuk menghasilkan *output*. Efisiensi akan berkaitan dengan efektivitas, sebab hasil yang diinginkan harus sesuai atau lebih baik dari standar yang diinginkan pengguna akhir. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan menfokuskan pada dua hal yaitu produktivitas dan profitabilitas. Produktivitas berkaitan dengan



pengukuran terhadap bagaimana *input* dan sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan *output*, sehingga dalam hal ini yang diukur adalah efisiensi secara fisik (*output*). Profitabilitas berkaitan dengan pengukuran secara menyeluruh terhadap efisiensi keuangan (*financial efficiency*).

Equitas/kewajaran dalam hal ini ditujukan pada profitabilitas dan biaya relatif yang bertujuan untuk menetapkan kepuasan perusahaan maupun konsumen dengan memberikan harga yang terjangkau. Oleh karena itu perusahaan senantiasa meningkatkan efisiensi agar kinerja usaha (kemampulabaan) dapat optimal yang pada akhirnya akan meningkatkan strata maupun pertumbuhan unit usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa produktivitas adalah perbandingan antara *output* (hasil) dengan *input* (masukan). Jika produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu-bahan-tenaga kerja) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerja. Peningkatan keterampilan diartikan sebagai kemampuan pekerja untuk melakukan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Sedang untuk meningkatkan keterampilan adalah melalui pelatihan, dengan adanya pelatihan maka akan meningkatkan kinerja.

Menurut penelitian Sarder Ghost and Rosa (1997), William Cole, Woll (1999), Leo Paul Dana (1999), Yusuf (1998) dan Murp F.B Aji (1999) bahwa kebijakan pembinaan melalui pelaksanaan pelatihan bagi para pengrajin dan industri kecil dapat meningkatkan kinerja usaha.

Hal senada juga dilaporkan oleh Abdul Manan (1999) yang meneliti dampak pola pembinaan terhadap kinerja sektor industri kecil di Provinsi Jawa

Timur, bahwa pelatihan teknik produksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Timur.

Namun demikian pendapat di atas sangat kontradiktif terhadap hasil penelitian Moeljadi (1999) yang melaporkan bahwa pelaksanaan pelatihan bagi industri kecil di Jawa Timur tidak berpengaruh signifikan (pengaruh langsung negatif) terhadap kinerja usaha industri kecil. Hal ini dikarenakan oleh:

- 1) Kesalahan menentukan sasaran pelatihan.
- 2) Kurikulum kurang sesuai.
- 3) Identifikasi kebutuhan peserta keliru.
- 4) Kapasitas lembaga pelatihan tidak memadai.
- 5) Pelaksanaan pola pelatihan pada Unit Pelayanan Teknis kurang dilengkapi alat peraga dan media belajar mengajar yang memadai.

Menurut Anwar Prabu, *et al.*, (2003: 51), bahwa keberhasilan pelatihan paling tidak ditunjang oleh lima indikator yaitu (relevansi, efektivitas dengan prinsip berkesinambungan yaitu antara teori dan praktek) : (1) Mutu program pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan, (2) Metode / sistem belajar dan pengajaran) yang digunakan oleh para instruktur dapat diterima oleh peserta, (3) Perubahan perilaku yaitu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis peserta kearah yang lebih baik, (4) Kompetensi para instruktur (pengajar) sudah tepat dan menguasai materi yang diajarkan, (5) Pencapaian tujuan pelatihan teknis yaitu hasil akhir pelaksanaan pelatihan, sebagaimana ditetapkan sebelumnya yang digambarkan oleh adanya peningkatan kinerja usaha setelah mengikuti pelatihan teknis.

2.3 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Melalui Peraturan Pemerintah dengan Kinerja Usaha

"The basic objective behind the whole process of regulations is to ensure that the results of Operations Conform as closely as possible to established standards of goods, specified procedures, or instructions. The small scale industry has to develop as an important segment of society : as such it has to adhere to the rules of the land, i.e. it has to be subject to the various regulation." (Vasant Desai, 2003:148).

Tujuan dasar dibalik semua peraturan adalah untuk meyakinkan bahwa hasil dari operasi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik pada barang, prosedur maupun instruksi. Industri Kecil harus bisa berkembang sebagai suatu hal terpenting di semua lapisan masyarakat sehingga industri tersebut harus mematuhi peraturan yang ada di daerah di mana dia berada.

Peraturan Pemerintah adalah yang berkaitan dengan perizinan (lisensi/izin teknis) atau izin pokok/izin induk yang harus dimiliki oleh setiap pelaku bisnis baik yang bergerak di bidang industri dan pengolahan maupun di bidang perdagangan produk barang dan jasa. (UU No. 9 Th 1995)

Kekuatan dan kekuasaan hukum suatu ketentuan perundang-undangan secara yuridis formal, yang cakupan wilayah berlakunya di sebuah negara disebut hukum nasional. Di antaranya terdapat ketentuan/peraturan pemerintah yang memberikan perlindungan dan jaminan pada eksistensi perusahaan domestik dan multinasional.

Beberapa peraturan dan ketentuan perundang-undangan itu mengatur tentang perijinan mendirikan perusahaan, perluasan dan melakukan operasional bisnis. Di samping persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis dalam negeri, di luar negeri juga setiap negara membuat atau merekayasa ketentuan

hukum mengenai aturan main bisnis di negaranya, dengan maksud untuk mengatur dan melindungi identitas dan kepentingan bisnis nasional yang diselenggarakan warga negaranya. Oleh karena itu untuk kelancaran usaha baik usaha dalam negeri/domestik maupun internasional tidak boleh tidak pengusaha harus mematuhi.

Di Indonesia rekayasa ini disebut hubungan industri Pancasila yang realisasinya dilakukan melalui pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain dalam hidup bisnis. Semua ketentuan, hukum seperti diutarakan di atas sangat berpengaruh terhadap kinerja usaha, karena pengembangan perusahaan sangat tergantung pada kemampuan perusahaan mematuhi (Hadari Nawawi, 2003:164).

Penelitian tentang hubungan perijinan dengan kinerja usaha belum banyak dipublikasikan karena adanya anggapan bahwa masalah perijinan tidak begitu berpengaruh langsung terhadap kinerja usaha. Anggapan demikian memang benar jika perusahaan tersebut berupa kerajinan rumah tangga atau industri mikro/industri non-formal karena kebanyakan produknya masih bersifat hasil kerajinan rumah tangga (*home industry*) sehingga pencantuman nomor ijin dalam surat keterangan dianggap (1) tidak penting karena menambah beban biaya pengurusan izin (2) barang dipasarkan di daerah setempat (*Local Market*) sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap keputusan bagi pembeli untuk membeli atau tidak, produknya palsu atau bukan.

Tetapi tidak demikian halnya dengan produk-produk hasil industri kecil, menengah dan besar yang pemasarannya sudah ada yang menjangkau pasar internasional. Izin merupakan bagian terpenting, karena nomor-nomor izin harus melekat langsung bagi setiap hasil produksi (keterangan vital), sebagai informasi penting bagi para pembeli tentang karakteristik produk (palsu atau tidak). Dalam era persaingan yang semakin ketat dewasa ini kelengkapan pencantuman nomor izin dalam produk merupakan salah satu pertimbangan bagi para pembeli untuk menentukan pilihannya (beli atau tidak) karena membanjirnya produk-produk palsu di pasar. (Disperindag, 2000:6)

Oleh sebab itu untuk kelancaran aktivitas, legalitas, identitas dan eksistensi perusahaan, izin merupakan salah satu instrumen penting, dan dapat mempengaruhi kinerja usaha baik langsung maupun tidak langsung.

Namun demikian untuk mendapatkan izin baik izin pendirian baru atau perluasan produksi (peningkatan kapasitas riil) maupun perluasan wilayah pemasaran sampai ke tingkat ekspor, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku bisnis sehingga enggan melengkapi perizinan usahanya. Hal ini mengakibatkan kinerja usaha dan pertumbuhan struktur unit usaha tidak dapat berkembang.

Zeitham dalam Ridwan (2003:79) menyatakan item indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 5 indikator yang tercakup dalam (*tangible, reliability, responsiveness, competence, security, understanding the customer*) yaitu :

- 1) Mekanisme layanan penerbitan izin.

- 2) Kejelasan (kejujuran) rincian biaya pengurusan izin.
- 3) Jangka waktu penyelesaian/penerbitan izin.
- 4) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
- 5) Kemampuan petugas mengenai peraturan penerbitan izin.

Undang-Undang RI no 5 tahun 1984 tentang perindustrian dan Keputusan Menperindag RI No 256/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan dan tata cara pemberian ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dijelaskan bahwa :

- 1) Setiap pendirian perusahaan wajib memperoleh ijin Usaha Industri jika industri tersebut termasuk kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki ijin usaha baik yang melalui tahap Persetujuan Prinsip maupun tanpa persetujuan yang melakukan perluasan wajib memperoleh Ijin Perluasan.
- 3) Terhadap semua ijin industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp 5 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak diwajibkan memperoleh tanda daftar industri kecuali bila dikehendaki.
- 4) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP (PP no 36 Tahun 1977).
- 5) Instruksi bersama Menteri Perdagangan dengan Kepolisian RI nomor

032/INS/M/VIII/1990
INS/04/VIII/1990 tentang Petunjuk Kerja sama Pelaksanaan Penyidikan

tindak di bidang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk setiap kantor Cabang, Kantor Pembantu, anak perusahaan serta agen perwakilan dari perusahaan itu wajib mendaftarkan usahanya.

Dalam poin 1 sampai dengan 5 di atas menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab dan yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis yang beroperasi di Wilayah Indonesia.

Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) huruf f UU Nomor 9 tahun 1995 ditegaskan bahwa dengan menetapkan peraturan dan perundang-undangan, kebijakan pemerintah adalah bertujuan untuk :

- 1) Menyederhanakan dari tatacara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya sistim pelayanan satu atap.
- 2) Memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan

Dengan demikian dampak dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai perijinan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai alat pengaturan lalu lintas perdagangan intern maupun ditingkat pasar internasional (ekspor-impor). Diharapkan akan meningkatkan kinerja usaha melalui kemudahan dibeberapa kegiatan seperti :

- a) Dalam kegiatan operasional dan wilayah, legalitas dan identitas di mana lokasi perusahaan berada.

Izin industri dan perdagangan berperan sebagai lisensi, sehingga perusahaan akan leluasa melakukan aktivitas bisnisnya untuk meningkatkan eksistensinya

tanpa ada gangguan sepanjang mematuhi semua aturan sebagaimana tercantum dalam izin yang melekat langsung secara fisik dalam produksi. Sehingga sangat terkait dengan aspek pemasaran sebagai kontributor penting terhadap kinerja usaha.

b) Dalam Kegiatan Perbankan.

Surat izin baik izin industri maupun izin usaha perdagangan (SIUP) merupakan salah satu prasyarat untuk dapat memanfaatkan fasilitas perkreditan.

Menurut hasil penelitian Rumerang Dience (1992) terhadap pengusaha industri mikro/ rumah tangga anyaman rotan di Maluku, diketahui bahwa upaya pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal usaha melalui fasilitas kredit bunga rendah dari perbankan sangat sulit. Karena tidak dapat melampirkan foto kopi izin usaha dalam permohonan sebagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dijelaskan bahwa para pengusaha yang tidak dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah berupa bantuan kredit bunga lunak dari perbankan karena tidak meneliti izin usaha terpaksa harus meminjam dana tambahan modal usaha dari pihak swasta dengan konsekuensi, (1) pengenaan bunga yang relatif besar. (2) penjualan hasil produk juga harus melalui pihak pemodal. Akibatnya keuntungan yang diperoleh relatif kecil, sehingga usaha ini sulit untuk berkembang.

c) Dalam memanfaatkan peluang untuk menjadi supplier barang-barang kebutuhan pemerintah atau lembaga administrasi pemerintahan lain termasuk badan usaha milik negara (BUMN).

SIUP digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat yang selanjutnya dapat mengikuti dan melaksanakan tender-tender pemerintah.

- d) Dalam praktek pelaksanaan kontrak bisnis.

SIUP merupakan prasyarat yang menjamin keberadaan dan klasifikasi perusahaan yang akan melakukan transaksi perjanjian kerja sama usaha.

- e) Praktek kerja sama dikalangan swasta atau dalam iklim kemitraan yang dicoba untuk dikembangkan oleh pemerintah untuk mendorong proses akselerasi kegiatan ekonomi.

SIUP sebagai dasar untuk melakukan hubungan kerja sama dan juga untuk melakukan tindakan hukum bila mana hubungan kerja sama tersebut dilanggar.

- f) Dalam pemenuhan persyaratan dokumen ekspor yang banyak diminta oleh mitra dagang di luar negeri.

Certificate of Origin (COO), SIUP juga dipergunakan sebagai dasar untuk dapat mengamatai praktek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan nasional ataupun mendeteksi keberadaan dan posisi perusahaan nasional dalam kasus-kasus yang berkembang. Dalam hal ini COO berlaku sebagai visa dalam perdagangan internasional.

Laporan hasil penyuluh Disperindag (2000) menjelaskan karena tidak memiliki izin, pengrajin industri mikro kecil perak di Pasuruan terpaksa mengekspor hasil produksinya berupa alat perhiasan dari bahan perak yang banyak digemari oleh masyarakat Eropa melalui pihak ketiga yaitu eksportir dari Bali karena eksportir tersebut memiliki izin yang dapat mendukung dokumen penting

dalam kegiatan ekspor. Akibatnya hasil yang diperoleh para pengusaha Mikro Kecil dari Pasuruan atas penjualan kerajinan perak relatif kecil.

Godfrey Baldacchino (1999) mengatakan bahwa peraturan pemerintah berupa perizinan khususnya yang berhubungan dengan kegiatan bisnis di bidang perdagangan baik domestik apalagi perdagangan internasional sangat berkaitan erat. Hasil penelitian yang dilakukan di Fiji menjelaskan semakin banyak persyaratan/peraturan yang harus dipenuhi dalam rangka mendapatkan izin perdagangan ekspor semakin sulit mendapatkan izin. Akhirnya akan mempersulit dilakukannya perdagangan luar negeri yang berdampak terhadap rendahnya kinerja usaha (keuntungan).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Dience Rumerang (1992) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengusaha industri mikro anyaman rotan di Maluku sulit memanfaatkan fasilitas kredit lunak (modal) dari pihak bank karena tidak dapat melampirkan surat izin usaha sebagai persyaratan administratif permohonan yang diajukan. Hal ini menyebabkan kinerja usaha rendah. (sebagian laba usaha digunakan untuk membayar bunga tinggi atas pinjaman dari pemilik modal tengkulak).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manan Abdul (1999) terhadap Sub-sektor industri kecil dengan topik Dampak Pola Pembinaan terhadap Kinerja Subsektor Industri Kecil di Jawa Timur melaporkan bahwa pola pembinaan berupa peraturan pemerintah membantu pertumbuhan kinerja sub sektor industri kecil di Jawa Timur sebesar 20,18%. Dijelaskan bahwa sebelum adanya pembinaan peraturan pemerintah kinerja sub sektor industri kecil tahun 1994 Rp 2.110,71 juta.

Setelah adanya pembinaan, kinerja sub sektor industri kecil naik 19,52% (Rp 2.522,69 juta tahun 1995) karena adanya kemudahan dalam mendapatkan izin-izin usaha dan perdagangan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian seperti diuraikan sebelumnya diketahui dengan jelas bahwa peraturan pemerintah berupa perijinan berkaitan erat dengan kinerja usaha, namun demikian untuk membuktikan secara empiris perlu dilakukan penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam Kebijakan Pembinaan dan Pembangunan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Penggerak Ekonomi Daerah khususnya, dan Usaha Kecil Menengah umumnya.

2.4 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan dengan Kinerja Usaha

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti membutuhkan sejumlah dana (modal) untuk membiayai operasi perusahaan. Salah satu keputusan pokok yang harus diambil oleh pimpinan perusahaan yang berhubungan dengan keputusan jangka pendek (*short-term decision*) adalah investasi pada modal kerja (*working capital investment*). Investasi modal kerja merupakan proses terus menerus selama perusahaan beroperasi. Penggunaan modal kerja utamanya ditujukan untuk: (1) pengadaan bahan; (2) keperluan proses produksi; (3) dan distribusi (penjualan). Ketersediaan modal kerja yang cukup akan mendukung lancarnya proses produksi (Riyanto Bambang, 1990:51).

Kebijakan bantuan permodalan bagi industri kecil dimaksudkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi khususnya kendala permodalan (UU Nomor 9 Tahun 1995) terdiri dari : (1) akses sumber modal ; (2) Realisasi besarnya bantuan

modal ; (3) Kesesuaian jangka waktu pengembalian ; (4) Variasi/jenis modal ; (5) kesesuaian proposal dengan persyaratan administrasi. Pengelolaan modal kerja merupakan aktivitas perusahaan setiap hari (*day-to day activity*) sehingga masalah operasional perusahaan berjalan lancar (Eitman, 1992; 383).

Pada industri mikro, kecil dan menengah, faktor modal mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi. Oleh sebab itu untuk menjaga kelancaran produksi, maka kecukupan modal baik modal kerja maupun modal tetap akan meningkatkan produksi. Yang dimaksud dengan modal kerja adalah modal yang habis dalam sekali pakai. Modal ini digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari dan biaya dalam bentuk uang baik kas maupun untuk membeli bahan, membayar tenaga kerja dan sebagainya. Sedang modal tetap adalah modal/aktiva yang tidak habis dalam sekali pakai, melainkan secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi, golongan modal tetap ini diadakan penyusutan sebagai prestasi yang digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu. Dengan demikian modal merupakan faktor pendorong kuat untuk meningkatkan *output* yang pada akhirnya akan meningkatkan dan menentukan keberhasilan usaha/kinerja usaha.

Pendapatan pengusaha berupa keuntungan yang diperoleh atas hasil produksi/*output* dapat menggambarkan kinerja usaha. Laba sebagai pengukur keberhasilan adalah alat ukur keberhasilan yang pertama kali digunakan, dan alat ukur ini dianggap sebagai alat ukur yang cukup baik. Perusahaan yang mempunyai laba besar adalah perusahaan yang berhasil. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu memanfaatkan segala sumber yang ada secara efisien dan

efektif seperti halnya modal. Dengan demikian modal mempunyai peranan dan berpengaruh positif terhadap kinerja usaha.

Modal merupakan salah satu kendala bagi Industri Mikro Kecil dan Menengah Penggerak Ekonomi Daerah (IMKM-PED). Terdapat 16,06% dari pengusaha industri kecil menengah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang mengalami masalah permodalan dalam menjalankan usahanya (Abdul Manan, 1999:7). Keterbatasan modal yang dimiliki IKM-PED mengakibatkan perusahaan sulit berkembang. Aspek permodalan selalu dianggap masalah krusial yang perlu ditangani. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pengusaha mendapatkan bantuan permodalan. Undang-undang RI no 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Pada pasal 21 dijelaskan tentang pembiayaan dan penjaminan pemerintah, pengusaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi; (1) kredit perbankan; (2) pinjaman lembaga keuangan bukan bank; (3) modal ventura; (4) pinjaman dari dana penyesuaian sebagian laba Badan Usaha Milik negara (BUMN); (5) Hibah dan (6) Jenis pembiayaan lainnya. Untuk meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan seperti disebut di atas, dilakukan dengan; (a) meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri; (b) meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan; (c) meningkatkan kemampuan manajemen keuangan; (d) menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin. Melalui kebijakan ini diharapkan pengusaha mampu menambah modalnya melalui fasilitas tersebut. Namun sampai saat ini masalah kecukupan modal serta sumber yang diharapkan mampu untuk membantu pengusaha masih sulit didapatkan.

Kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber modal secara tepat ditunjukkan dari struktur modal perusahaan. Struktur permodalan secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu sumber pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Sumber jangka pendek adalah sumber pembiayaan (pinjaman) yang jatuh tempo pelunasannya kurang dari dua belas bulan, sedangkan sumber pembiayaan jangka panjang adalah sumber pembiayaan yang jatuh tempo pelunasannya lebih dari satu tahun (Riyanto Bambang, 1990:15). Sumber pembiayaan jangka panjang dapat berupa pinjaman maupun setoran modal dari pemilik (*owners*). Jika sumber pembiayaan berasal dari pinjaman, berarti timbul kewajiban kepada pihak ketiga, sedangkan bila sumber pembiayaan berupa setoran modal sendiri, berarti kewajiban perusahaan adalah kepada pemilik sendiri. Struktur pembiayaan jangka panjang dikenal sebagai struktur modal yaitu pembiayaan aktiva jangka panjang yang berasal dari kombinasi hutang, modal pemilik dan *private*. Masalah kombinasi sumber modal memberikan landasan berpikir bagi pengusaha tentang jumlah modal yang optimal. Utami (1995:43) menyatakan kebijakan permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja ($\beta = 0,233$; $\rho = 0,049$), Karmakar (1996) menyebutkan kebijakan permodalan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ($\beta = 0,540$; $\rho = 0,042$).

Naro R (2000) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pengrajin dan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil bordir di Jawa Timur, diketahui bahwa faktor kecukupan modal berpengaruh dominan terhadap peningkatan pendapatan para pengrajin industri kecil bordir dan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin

besar modal yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk memperoleh pendapatan dan penyerapan tenaga kerja semakin besar.

2.5 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran dengan Kinerja Usaha

Kotler (1997:9) mengatakan pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan tingkat kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kotler juga menjelaskan, perusahaan yang cemerlang tahu bagaimana menyesuaikan diri pada pasar yang terus berubah, dengan melakukan perencanaan strategis yang berwawasan pasar. Mereka harus tahu mengembangkan dan menjaga keselarasan antara sasaran, sumber daya, kemampuan dan peluang. Mereka melakukan proses perencanaan strategis pada tingkat korporasi, tingkat bisnis dan tingkat produk.

Kebijakan pembinaan bantuan pemasaran bagi pengusaha industri kecil permodalan (UU Nomor 9 Tahun 1995) terdiri dari : (1) realisasi jumlah bantuan biaya promosi ; (2) pemberian dana bantuan pameran ; (3) bantuan informasi barang dalam negeri berupa penerbitan leaflet dan brosur ; (4) keakuratan informasi harga dan mutu barang ; (5) bantuan akses pasar luar negeri.

Jauch dan Glueck (1999) mengemukakan bahwa terdapat empat belas faktor-faktor internal pemasaran dan distribusi yang dapat diamati oleh perencana strategi apakah perusahaan cukup kuat dalam pemasaran jika dibandingkan dengan pesaingnya yaitu; (1) Struktur persaingan dan pangsa pasar, sejauh mana perusahaan telah menciptakan pangsa pasar yang kuat dalam seluruh pemasaran

atau sub pasarnya yang penting, (2) Sistem riset pasar yang efisien dan selektif, (3) Bauran produk dan jasa, (4) Lini produk-jasa utama, (5) Produk baru yang kuat dan kepemimpinan jasa baru, (6) Perlindungan hak paten, (7) Pandangan positif terhadap perusahaan dan produk serta layanannya kepada konsumen akhir, (8) Pengepakan produk yang efisien dan efektif, (9) Strategi harga yang efektif untuk produk dan jasa, (10) Tenaga penjual yang efisien dan efektif, yaitu hubungan erat dengan pelanggan utama, (11) Periklanan yang efektif, (12) Kegiatan promosi dan pemasaran yang efisien dan efektif, (13) Jasa purna jual yang efisien dan efektif, (14) Jalur distribusi dan liputan geografis yang efisien dan efektif.

Masalah pemasaran operasional dalam bidang segmentasi, penempatan dan bauran (produk, harga, promosi dan distribusi) merupakan hal yang cukup penting bagi perusahaan agar mampu bersaing secara efektif. Penilaian atas kekuatan dan kelemahan pasar menunjukkan bidang-bidang yang mungkin dapat diperbaiki seperti halnya jika terjadi kesenjangan dalam lini produk, pengembangan produk baru, mungkin perlu dikembangkan untuk mengisi lini yang ada atau menciptakan lini yang baru, demikian pula halnya jika perusahaan menjaga hubungan baik dengan rekayasa produksi atau produk baru, panafsiran terhadap kebutuhan pasar dengan menghasilkan barang atau jasa yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Kinerja suatu perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor di antaranya adalah faktor promosi dan pemasaran yang meliputi; posisi daya saing (*positions of advantage*) dan posisi ini ditentukan oleh adanya kemampuan assets usaha (*business assets*), kemampuan usaha (*capabilities of the business*), dan kemampuan inti dari korporasi (John *et al.*, 1992). Sumber keunggulan bersaing adalah

ditunjukkan dengan biaya rendah atau diferensiasi produk (Porter,1994). Selanjutnya dalam konsep Porter (p.37), pendekatan diferensiasi di definisikan kedalam beberapa strategi). Seperti *brand image*, *product feature*, *customer service*, *dealer network* dan teknologi.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui setelah perusahaan memproduksi barang, menetapkan harga, dan menyalurkan melalui para distributor, maka kegiatan lain yang juga sangat penting perannya dalam pemasaran yaitu; menyebarkan informasi/komunikasi pada para calon konsumen, bahwa barang tersebut sudah tersedia di pasar. Usaha komunikasi dengan promosi (*promotion*) ini dikatakan sebagai “*beat the drum*” yaitu kegiatan memukul genderang yang diarahkan ke masyarakat luas, dengan demikian diharapkan barang yang ditawarkan akan mendapatkan respons.

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap perusahaan sebagaimana ditetapkan sebelumnya akan ditunjang oleh kemampuan perusahaan untuk melakukan promosi dan pemasaran sehingga produk dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja usaha.

Oleh karena itu upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan Industri Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia salah satunya adalah kebijakan bantuan promosi dan pemasaran untuk mengatasi kendala yang dihadapi

Kanwil Perindustrian Dati I dalam Manan (1999:7), menjelaskan bahwa kendala yang kedua yang dihadapi oleh pengusaha industri kecil di Provinsi Jawa Timur, setelah masalah teknologi adalah lemahnya di bidang promosi dan

pemasaran dengan bobot 19.39%, kendala tersebut berupa : (1) Terbatasnya kemampuan finansial untuk membiayai tempat-tempat pusat promosi dan (2) Terbatasnya informasi pasar (3) tidak memiliki kemampuan pendanaan dan keterampilan dalam hal penyebaran katalog/buklet/brosur dan lain-lain (4) Terbatasnya biaya transportasi yang dimiliki pengusaha dalam rangka mengikuti promosi dan pameran yang diselenggarakan di tingkat regional, nasional maupun internasional (5) Sulitnya mendapatkan akses pasar luar negeri.

Hal yang sama juga diutarakan Susilo Bambang Yudhoyono (2005). Sehingga bantuan promosi dan pemasaran bagi IMKM merupakan salah satu formula dari program pembinaan empat sehat lima sempurna

Dalam UU RI no. 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan usaha kecil, pada pasal 4 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan industri kecil, yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat utamanya dalam bidang; (1) Produksi dan pengolahan; (2) Pemasaran; (3) Sumber daya manusia dan (4) teknologi. Dalam pasal 16 ditekankan bahwa pemerintah menyediakan sarana serta dukungan pembiayaan promosi dan uji coba pasar, mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi serta memasarkan produk usaha kecil.

Melalui sarana pameran yang dilaksanakan baik ditingkat regional nasional maupun Internasional diharapkan volume penjualan produk hasil IMKM – PED akan dapat ditingkatkan. Di samping itu juga dilakukan upaya peningkatan kemampuan manajemen pemasaran, mengadakan penyediaan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar. Menurut Home dan Armstrong (1995)

pembangunan pasar akan membawa keberhasilan pengusaha (peningkatan kinerja usaha).

Berkaitan dengan hubungan promosi dan pemasaran dengan kinerja usaha, Leo Paul Dana (1999), dan Acar (1993) dalam penelitiannya tentang pengaruh faktor lingkungan internal pada perusahaan kecil yang diidentifikasi kedalam lima kelompok yaitu; (1) pengalaman manajer/pemilik dan umur perusahaan, (2) kemampuan produksi (*production competencies*), (3) kemampuan pemasaran (*marketing competencies*), (4) kemampuan manajemen (*management competencies*) dan (5) Strategi (*strategy*). Faktor *internal* dapat menunjukkan kekuatan (*strength*) ataupun kelemahan (*weakness*) dalam suatu perusahaan. Faktor eksternal dapat menimbulkan peluang (*opportunity*) maupun ancaman (*threat*) bagi perusahaan. Faktor *ekstern* meliputi; kemajuan teknologi, kebijakan dan peraturan pemerintah, perubahan strategi para pesaing, selera konsumen. Penelitian ini dilakukan pada *small casting and machinery manufacturing firms* di kota Ancara Metropolitan, diperoleh hasil bahwa kemampuan promosi dan pemasaran, kemampuan produksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha.

2.6 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Industri dan Perdagangan (Indag) dengan Kinerja Usaha

“The consultant is able to look at the problem a more appropriate angle and his or her services should be more widely used. The consulting is the planned intervention in a company with the aim of identifying the problems that may in its organizations and implementing those weaknes considered suitable and fitting in order to the resolve them.” (Shapiro, Eccles, and Soske; 1993)

Konsultan yang sama dengan jasanya akan mampu melihat permasalahan yang dihadapi oleh kliennya, oleh sebab itu jasanya sangat dibutuhkan, dengan

adanya konsultan suatu perusahaan yang ada dalam suatu perusahaan akan dapat diidentifikasi dengan menentukan upaya pemecahannya.

Ivancevich, *et al.*, (1996) mengatakan bahwa perkembangan industri di Spanyol sangat didukung oleh jasa para konsultan pendamping/penyuluh. Dengan ketersediaan tenaga penyuluh untuk membekali bimbingan, ternyata banyak masalah yang dapat teratasi sehingga meningkatkan eksistensi usaha

Pendapat di atas juga didukung oleh Hermosilla (1997) yang menyatakan bahwa pengusaha industri di Spanyol sangat membutuhkan kehadiran para tenaga penyuluh pendamping untuk meningkatkan pendapatan pengusaha. Tenaga penyuluh membimbing pengusaha di bidang keterampilan manajemen, cara meningkatkan daya saing, pemasaran dan konsultan di bidang pengembangan mutu.

Penyuluhan dalam bahasa Inggris disebut *extension* yang menggambarkan perluasan atau pengembangan. Sedang dalam bahasa Belanda disebut *voorlichting* yang berarti memberikan penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalan. Dalam bahasa Jerman penyuluhan disebut *beratung* yang berarti seseorang yang memberikan saran kepada orang lain, tetapi orang yang diberi saran itu berhak untuk menentukan pilihannya. Dalam bahasa Perancis penyuluhan menggunakan kata *vulgarization* yang menekankan pentingnya menyederhanakan pesan untuk orang awam (Van den Baan dan Hawkins dalam Sri Widodo, 2003:144).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI nomor 120/KEP/M.PAN/12/2002 pada pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penyuluhan perindustrian dan perdagangan bagi para pengusaha industri mikro kecil dan menengah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja usaha.

Berdasarkan beberapa pengertian penyuluhan seperti disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan adalah upaya untuk mengubah perilaku dan memberdayakan seseorang, sehingga pada akhirnya orang tersebut mampu menolong dirinya dengan kekuatan sendiri. Artinya penempatan tenaga penyuluh industri dan perdagangan bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah adalah kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk mengubah perilaku dan memberdayakan pengusaha dan pekerjanya, sehingga pada akhirnya mereka mampu menolong diri mereka untuk menyelesaikan masalah/kendala bisnis yang dihadapi dengan kekuatan sendiri untuk memanfaatkan segala sumber yang ada dan mengolahnya kemudian berusaha untuk memasarkan produk yang dihasilkan untuk mendapatkan yaitu laba/keuntungan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja usaha. (Depperindag, 1999 ; IV-34).

Berkaitan dengan kebijakan pembinaan pemerintah terhadap peningkatan kinerja usaha IMKM-PED, penyuluh indag bertugas untuk memberikan penyuluhan/pendampingan dan konsultasi bagi pengusaha untuk (1) Membantu pengusaha IMKM-PED melakukan analisis situasi dan merumuskan tindakan yang akan datang, (2) Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan wawasan usaha yang berorientasi pasar global, (3) Membantu pengusaha dan pelaku IMKM-PED dalam memonitoring, mengevaluasi dan menganalisis ekonomi usahanya serta membantu dalam penerapan pilihan usaha yang tepat.

Lebih jauh mengenai kegiatan penyuluhan/pendampingan dalam rangka peningkatan kinerja usaha IMKM-PED, Ismail (2002; 53) lebih rinci menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan meliputi;

- (1) Bimbingan usaha dalam manajemen dan administrasi pengelolaan usaha yang efektif dan professional,
- (2) Bimbingan penyusunan laporan keuangan dan pembuatan proposal kelayakan kredit;
- (3) Pendampingan menyangkut kualitas SDM dan manajemen;
- (4) Pendampingan menyangkut peningkatan mutu dan proses produksi;
- (5) Pendampingan menyangkut kemudahan memperoleh informasi;
- (6) Pendampingan menyangkut pengembangan jaringan usaha;
- (7) Pendampingan menyangkut hubungan sosial, budaya dan kemanusiaan dengan lingkungan setempat;
- (8) Pendampingan menyangkut pembukaan akses ke sumber pembiayaan, sumber bahan baku dan akses pasar baik domestik maupun internasional;
- (9) Pendampingan menyangkut pengembangan mentalitas dan moralitas kerja yang positif, maju dan profesional;
- (10) Pendampingan menyangkut pengembangan strategi dan infrastruktur perluasan usaha.

Selanjutnya menurut Depperindag (2004:89-98) agar tugas penyuluhan dapat berdayaguna dan tepat sasaran maka sebelum melakukan penyuluhan atau pendampingan setiap penyuluh harus :

- a) Mampu menentukan jenis kegiatan penyuluhan/pendampingan yang akan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha (binaan).
- b) Menyusun jadwal penyuluhan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengusaha (binaan)
- c) Mampu menyusun metode penyuluhan/pendampingan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- d) Mampu menyusun rincian kegiatan penyuluhan secara integrated.
- e) Mampu menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan di lapangan.

Selanjutnya keberhasilan dalam pelaksanaan penyuluhan / pendampingan bagi pengusaha industri mikro, kecil dan menengah di lapangan, Zeitham dalam Ridwan (2003:103) menyatakan terdapat 5 indikator yang terobservasi (*observed variable*) yaitu: (1) manfaat bantuan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (reaksi), (2) pengalaman tenaga penyuluh (kompetensi), (3) Pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha, (4) Penyuluhan yang diberikan pemerintah dapat merubah perilaku para pengusaha (perilaku), (5) Tenaga penyuluh cepat tanggap terhadap segala masalah bisnis dan keluhan dunia usaha (hasil)

Berdasarkan teori penyuluhan seperti diutarakan di atas dapat diketahui bahwa kehadiran tenaga penyuluh indag sebagai pendamping di tengah-tengah pengusaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja usaha. Pernyataan yang sama juga disampaikan pakar

Penyuluhan dan UKM (Kompas; 2005), dan beberapa pengusaha kerajinan dan mikro Dewa Purna Jaya Taman Bali (2005), Maryoto Andreas (2005) .

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moeljadi (1999) terhadap pengusaha industri kecil di Provinsi Jawa Timur dengan topik Pengaruh Beberapa Faktor Internal Perusahaan dan Asistensi Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Kecil (Studi di wilayah Jawa Timur) melaporkan bahwa program asistensi atau bantuan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja usaha ($\beta = -0,153$). Keadaan ini disebabkan oleh sifat asistensi yang cenderung menimbulkan ketergantungan kegiatan usaha yang pada gilirannya menjadikan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif. Program bantuan asistensi untuk penyuluhan teknik menyebabkan pengusaha terpola pada bentuk teknologi yang diberikan. Bantuan non-teknik berupa asistensi yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja, ternyata memerlukan proses pemahaman yang lama.

Selanjutnya Leo Paul Dana (1999), Murp F B Aji (1999) melaporkan hasil penelitiannya, bahwa bantuan tenaga penyuluh (asistensi) yang diberikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja usaha.

Demikian juga hasil penelitian Manan Abdul (1999) bagi pengusaha Industri kecil di Jawa Timur, melaporkan bahwa bantuan tenaga ahli mempunyai besaran koefisien regresi positif. Sistem bantuan yang diberikan kepada sub sektor industri kecil melalui Unit Pelayanan teknis (UPT) pada sentra-sentra dengan melakukan penyuluhan, cara berproduksi sehingga para pengusaha dapat mengambil manfaat bantuan tenaga penyuluh terutama yang terkait dengan teknik produksi. Dijelaskan bantuan penyuluhan bermanfaat untuk:

- a) Meningkatkan kemampuan teknik Produksi (desain dan mutu produk).
- b) Pertemuan para pengusaha pada saat mengikuti Penyuluhan dan atau pendampingan dapat dijadikan pusat informasi pasar. mendiskusikan permasalahan yang di hadapi karena dalam pertemuan tersebut sering dihadiri oleh pengusaha IMKM yang sama, memungkinkan terjadinya saling tukar pengalaman utamanya dalam memecahan permasalahan yang dihadapi.

2.7 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis dengan Struktur Usaha

Quebec's Muister of International, Johor Cirecodalas La Presse (1992)

mengatakan

"Deplored the fact that only 13 percent of all Quebec's small business exported then product before ettending the the training. So throught Government Supporty training program nearly three quarters of a firms had grown in the last three years and intended to porsue their growth in the future."

Terbukti bahwa hanya 13 persen dari total seluruh pengusaha kecil di Quebec yang mampu melakukan ekspor hasil produknya sebelum mengikuti pelatihan. Namun setelah pemerintah membantu melaksanakan program pelatihan, hampir tiga puluh dua setengah persen dari perusahaan telah tumbuh dalam tiga tahun setelah pelatihan terakhir dan mempunyai potensi akan lebih berkembang di masa akan datang, meskipun telah ditemukan teknologi baru berupa mesin-mesin otomatis dan komputerisasi berupa perangkat keras (*hardware*), maupun perangkat lunak (*software*), tetapi bagi sebagian besar perusahaan belum dapat melaksanakan kegiatan produksi secara efisien dan efektif jika tenaga kerja tidak ada. Selanjutnya meskipun tenaga kerja cukup tersedia dengan peralatan produksi yang

lengkap tidak menjamin pekerjaan akan lancar tanpa ditunjang oleh keterampilan teknis dan kemampuan manajerial pengusaha.

Oleh karena itu keterampilan teknis dan kemampuan manajerial dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga mutu dan jumlah produk akan meningkat yang kemudian meningkatkan daya saing, omzet penjualan, peningkatan jumlah investasi, peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, penggunaan bahan baku yang semakin efisien, wilayah pemasaran akan lebih luas, dengan demikian akan mendorong struktur pertumbuhan strata unit usaha.

Mangkuprawira Syafri (2003:134) mengatakan dukungannya jika sebuah perusahaan ingin memiliki daya saing tinggi di masa depan maka salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan adalah menciptakan *school process* belajar berkelanjutan di seluruh lapisan karyawan melalui paket pelatihan. Dengan demikian akan meningkatkan keterampilan teknis dan produktivitas para karyawan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan struktur usaha.

Devine P, J. *et al.*, (1994; 52) mengatakan, "*structure meaning covering a mixellani of diferent characteristics relating both to individual firms and relationship between firms*". Struktur/strata diartikan sebagai karakteristik yang membedakan jenis dan hubungan antar perusahaan secara individual.

Badan Pengembangan Industri Kecil (BAPIK, 1994:23) mengatakan struktur yaitu tingkat pertumbuhan unit usaha yang menunjukkan perkembangan baik jumlah unit usaha, maupun strata usaha yaitu dari industri mikro menjadi

usaha kecil, dan dari usaha kecil meningkat menjadi usaha strata menengah ataupun strata besar.

Adapun stratifikasi industri mikro, kecil, dan menengah di Indonesia tahun 1999 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Hadiwiryo Siswanto (2003:199) mengatakan tujuan pelaksanaan pelatihan adalah agar para manajer mendapat pengetahuan tentang sikap dan kelakuan tenaga kerja yang diperlukan agar kondisi perusahaan efektif.

Tabel 2.2
STRATIFIKASI INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DI INDONESIA TAHUN 1999

No	Indikator	Strata Industri		
		Mikro	Kecil	Menengah
1	Nilai investasi	≤ Rp 5 Juta	Rp 5 s/d 200 Juta	Rp 200 s/d 5 Milliar
2	Jumlah Tenaga Kerja	1 s/d 4 Orang	5 s/d 10 orang	Rp 20 s/d 90 orang
3	Omzet penjualan	S/D Rp 50 Juta	Rp 50 s/d 1 miliar	Rp 5 Miliar

Sumber : Depperindag. Ditjen IKDK Tahun 1992, RIP IKM 2003, UU No 9 thn 1995, Devine, 1994

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Tilaar (2003:16), melalui pelatihan akan menguasai keterampilan-keterampilan fisik maupun mental akademik dan inovatif yang diperlukan dalam pekerjaan atau profesi tertentu. Oleh karena itu seorang pengusaha yang telah mengikuti pelatihan akan memiliki kemampuan untuk mengelola/memimpin usaha dan sebagai innovator. Selanjutnya Suparmoko (2002:202) menyatakan tentang jenis inovasi yaitu; (1) Motivasi dapat berupa *capital saving* (menghemat kapital), (2) *Labor Saving*, (menghemat tenaga kerja), (3) *Cost reducing*, (menekan biaya-biaya produksi), (4) *Demand Increasing*

(meningkatkan permintaan), (5) Menurunkan biaya dan juga meningkatkan mutu sehingga keuntungan bertambah.

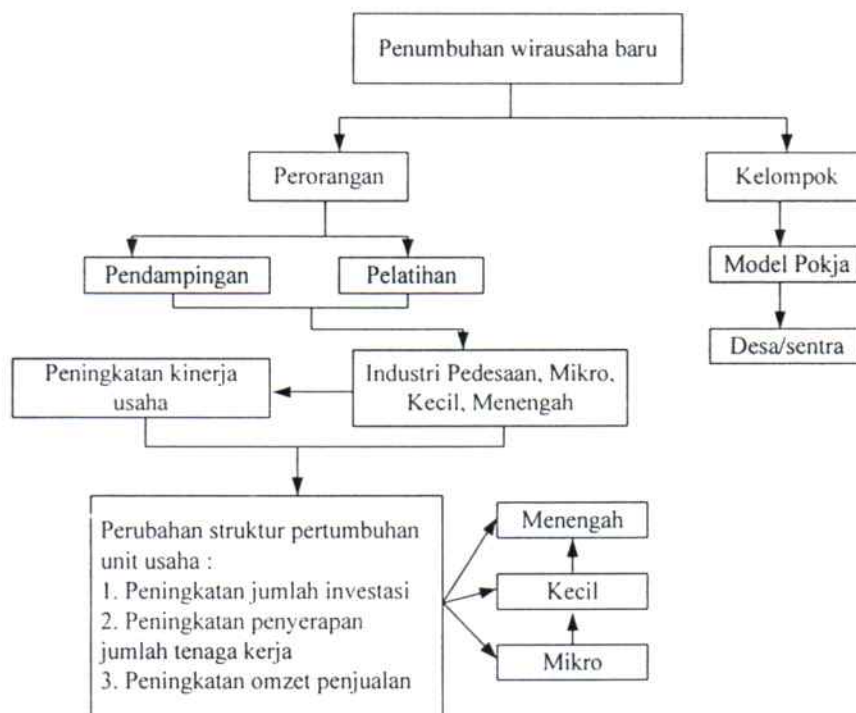
Kemudian mengenai inovasi Shumpeter dalam Subanar Harimurti (1998 :11) menyatakan ada beberapa jenis inovasi yaitu; (1) Turunnya biaya termasuk memperkenalkan metode baru, (2) Menggunakan sumber-sumber bahan mentah baru, (3) Pemakaian bentuk organisasi yang lebih baik, (4) Memperkenalkan barang-barang baik dengan kualitas baik, (5) Pembukaan pasar-pasar baru, (6) Menekan biaya transportasi, meningkatkan adanya kombinasi-kombinasi baru dan faktor-faktor produksi dan terbukanya pasar-pasar baru.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelatihan berkaitan erat dengan pertumbuhan unit usaha sebagai akibat dari peningkatan keterampilan teknis pengusaha dan mampu berinovasi serta memiliki kemampuan manajerial usaha ke arah yang lebih mandiri kuat dan berkembang baik dalam jumlah maupun struktur unit usaha.

Pada Gambar 2.4 dapat dilihat hubungan pelatihan dengan struktur pertumbuhan unit usaha. Kebijakan pembinaan dan pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah adalah melalui program pelatihan. Kegiatan ini dilakukan bagi pengusaha baik secara individu maupun kelompok (Pokja) dalam suatu sentra. Pelatihan tersebut meliputi (a) Diklat Kewirausahaan, (b) Diklat *Achievement Motivation Training (AMT)*, (c) Manajemen Sederhana, (d) Diklat *Creation of Enterprisess Formation of Rnterpreneurs (CEFE)*. Melalui kebijakan melaksanakan pendidikan ini diharapkan akan menciptakan, (1) Penguaha yang inovatif, (2) Entrepreneur yang kreatif (McCelland, 1993). Sehingga akan tercipta entrepreneur yang baru yang mendorong peningkatan jumlah unit usaha, perubahan starata

usaha/investasi, peningkatan omzet penjualan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penggunaan bahan baku, dan peningkatan persentase barang yang dapat diekspor.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan usaha kecil menengah dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap UKM dengan demikian UKM tumbuh dan kemampuannya meningkat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.



Sumber. Ditjen IK DK, 1992, RIP IKM, 2000, McClland, 1993, Wijewardane 1999, Camille Career 1999

Gambar 2.4
HUBUNGAN PELATIHAN DENGAN STRUKTUR
PERTUMBUHAN UNIT USAHA

Perluasan kesempatan bekerja artinya adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesempatan berusaha, artinya pertumbuhan unit usaha baru dan meningkatnya penggunaan bahan baku yang berarti peningkatan investasi perusahaan, terjadinya peningkatan ekspor yang berarti adanya perluasan pasar,

dan peningkatan omzet penjualan serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur industri khususnya dan industri nasional umumnya.

Menurut Zadjuli (2002:2-3), bahwa di Rusia pendidikan khusus yang diberikan kepada pekerja yang tidak pernah sekolah telah meningkatkan kinerja sebesar 78,00% output per pekerja. Sedangkan bagi pekerja tamatan Sekolah Dasar adalah 91,00%, output per pekerja. Di Norwegia output per pekerja telah meningkat 67,00%, di US output di sektor agraris telah meningkat dengan 83,00%, di Mexico meningkat 50,0%, di Argentina 45.00%. Sedangkan di United Kingdom di sektor industri sebesar 75,00% akibat meningkatnya kualitas pendidikan.

Menurut Bastech (1994) bahwa pelatihan/training berhubungan dengan peningkatan produktivitas. Penelitian ini dilakukan pada 747 manajer perusahaan menemukan bahwa pelatihan terhadap pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas produksi. Kualitas produk yang baik menurut Suparmoko (2002:67) merupakan hasil inovasi dari pengusaha setelah mendapat pengetahuan dan keterampilan teknis selama mengikuti pelatihan yang bermuara pada peningkatan penjualan dan keuntungan produk, perluasan pasar dan pertumbuhan investasi.

Selanjutnya Hema Wijewardane dan Garry E Tibbits (1999) yang meneliti tentang faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan unit usaha industri kecil di Australia, menemukan bahwa di samping pertumbuhan unit dan ukuran, perusahaan, kemampuan bersaing (market competition), aset usaha, juga faktor keterampilan kerja memberikan sumbangan yang relatif besar terhadap struktur pertumbuhan unit usaha.

Hasil penelitian Camille Carrier (1999) di Quebec Canada terhadap sejumlah manager usaha kecil melaporkan bahwa setelah mengikuti pelatihan teknis, terjadi perubahan pola pikir/perilaku pribadi para manajer. Ini dapat dibuktikan dari jumlah peserta pelatihan yang sebelumnya hanya 15% yang berstatus sebagai eksportir, namun setelah mengikuti pelatihan ternyata 50% dari peserta berambisi untuk melakukan kegiatan ekspor, para manajer tersebut mengatakan keyakinannya setelah mengikuti pelatihan mereka mampu memperluas pemasaran ekspor atas bekal pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan, sebagai upaya meningkatkan keuntungan. Karena telah memiliki pengetahuan dan keterampilan, kemampuan membuat produk berkualitas sebagai salah satu syarat untuk barang ekspor hasil usaha kecil akan mampu melakukan ekspor. (Joyal 1993).

2.8 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Melalui Peraturan Pemerintah dengan Struktur Usaha

Vasant Desai (2003:148) menyatakan;

“Regulation are the basis of steady growth. The Industrial Development Regulation Acts is an instrument in the hands of the government for the control and direction of private sector industrial investment through the mechanism of the industrial licensing system, which enables it to exert pressure on the applicants in a variety of ways. Conceptually, the Government ought to direct further industrial investment in such product lines as would better serve the overal national interest an in such product lines as would better serve the overal national interest and in such geografical areas as need it the most”

Peraturan pemerintah/regulasi dengan struktur pertumbuhan unit usaha merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sisi satu dengan sisi lain, karena adanya keterkaitan langsung di antara keduanya. Peraturan merupakan

bagian dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan unit usaha mikro kecil dan menengah.

Peraturan pemerintah berupa perizinan baik yang menyangkut izin usaha, produksi maupun pemasaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu bisnis, karena pelaksanaan bisnis secara operasional harus mengikuti aturan sebagai mana ditetapkan dalam kebijakan pemerintah (UU No 5 Tahun 1984, Kep. Menperindag no.256/MPP/Kep /7/1997), Oleh sebab itu menurut Hadari Nawawi (2003:164) pengembangan eksistensi perusahaan sangat tergantung pada kemampuan organisasi/perusahaan mematuhi, artinya pertumbuhan dan perkembangan struktur unit usaha tidak terlepas dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan.

Namun demikian fenomena yang terjadi, tidak seperti apa yang diharapkan karena adanya kesenjangan antara pemerintah sebagai yang mengeluarkan peraturan dengan segala persyaratan yang kadang kala tidak dapat dipenuhi/ruwet pengurusannya oleh para pelaku bisnis ataupun layanan yang kurang profesional dari instansi yang berwenang seperti halnya layanan penerbitan izin-izin yang harus dimiliki oleh pengusaha yang memakan waktu lama dan berlarut-larut, biaya pengurusan yang relatif besar Akibatnya para pelaku bisnis enggan untuk mengurus izin-izin tersebut meskipun sebenarnya perizinan itu sangat diperlukan sebagai instrumen vital dalam memanfaatkan berbagai fasilitas kredit bank dengan bunga lunak, pengadaan bahan baku, pemasaran ekspor, dan sebagainya.

Hasilnya dapat dilihat di mana pertumbuhan unit usaha menjadi lamban bahkan berhenti di tempat (tidak ada penambahan investasi, omzet penjualan yang

tidak betumbuh, penyerapan tenaga kerja yang tidak meningkat, akses sumber bahan baku yang terbatas, perluasan pasar berupa produk ekspor yang tidak dapat bersaing (Depperindag, 2002).

Siapakah yang salah ? kebijakannya atautkah prosedurnya atautkah pemahaman dari para pelaku bisnis tersebut yang kurang memadai tentang peranan, fungsi dan manfaat perizinan terhadap eksistensi usaha khususnya dan pertumbuhan unit usaha umumnya?

Selanjutnya menurut Vasant Desai (2003; 148) terdapat beberapa kendala yang dihadapi pengusaha kecil berkaitan dengan penerbitan izin yang mempengaruhi eksistensi dan pertumbuhan unit usaha industri kecil di India yaitu;

It is a complicated, time-consuming and costly exercise to acquire an industrial licence. Sometimes, it takes years before it can be obtained. Obviously, it cannot be the intention of the government to extend this procedure to the small scale sector because it would be impossible of implementation. A small unit cannot even prepare an application for an industrial licence; and there is no body to help it in preparing it. There is no agency which is capable of cheking the varacity of what the aplicant says in this application, much less comment thereon.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara peraturan pemerintah berupa izin usaha, produksi maupun pemasaran sangat berkaitan dengan struktur pertumbuhan unit usaha.

Kemudian menurut BPS (1993), UU No 9 Tahun 1995 tentang pemberdayaan UKM, IKDK (1992) bahwa indikator dari struktur pertumbuhan unit usaha dapat digambarkan oleh adanya sejumlah perubahan penting di berbagai aspek usaha yang menggambarkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan sehingga terjadinya perubahan

strata usaha seperti dari strata mikro menjadi strata kecil, dari industri kecil meningkat menjadi industri menengah dan sebaliknya, yang disebabkan oleh: pertumbuhan jumlah investasi, pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan jumlah atau omzet penjualan.

Dalam Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Kep. Menperindag No 254/MPP/Kep/7/1997 tentang kriteria Industri kecil di lingkungan Depperindag dan no 256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian Ijin Usaha Industri, perluasan dan Tanda daftar Usaha, struktur ataupun strata ataupun tingkat/karakteristik usaha di Indonesia telah ditetapkan mulai dari kelompok industri/usaha baik produksi maupun jasa strata mikro, kecil, menengah dan besar. Oleh karena itu peruntukan izin ataupun jenis izin untuk masing-masing kelompok/strata telah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan karakteristik produk atau jasa serta lingkup wilayah pemasaran. Bahkan dalam kebijakan umum di bidang pemasaran ekspor-impor telah ditetapkan produk-produk apa yang dilarang ekspornya, diawasi, dibatasi, dan yang bebas ekspornya (Depperindag, 2003).

Izin usaha seperti SIUP mempunyai kedudukan sebagai lisensi/izin teknis atau izin induk untuk dapat melakukan kegiatan di bidang perdagangan. Di samping itu SIUP juga merupakan legalitas usaha yang menjadi dasar bagi para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain perizinan merupakan jantung kegiatan suatu perusahaan. Dan bagi pemerintah perizinan merupakan alat yang efektif untuk melakukan pembinaan dan atau sebagai sarana

untuk memelihara komunikasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam rangka pembangunan dunia usaha dan para pelaku bisnis.

Hasil survei yang dilakukan oleh ketua team *Private Sector Development* (PSD) Bank Dunia Bido A Budiman (2005) terhadap pengusaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa, hambatan utama para pengusaha untuk menanamkan investasi baik dalam perluasan maupun usaha baru di Jawa Timur adalah masalah perizinan. Diketahui bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan izin membuka usaha baru, perluasan kapasitas produksi riil masih berbelit-belit walaupun semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Mestinya jika semua dokumen yang dibutuhkan sebagai pelengkap permohonan mendapatkan izin, seharusnya dalam waktu satu hari izin sudah keluar, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Berdasarkan pengalamannya dan beberapa pengusaha kecil menengah di Sidoarjo pada awal bulan Februari 2005 saat mengurus izin perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ternyata sampai 12 hari izin belum terbit. Jangankan izin yang terbit para surveiur saja belum datang untuk mensurvei lokasi usaha tanpa alasan yang jelas, tandasnya. Lebih lanjut dikatakan hal inilah yang menjadi penghambat utama, selain tidak efisien, juga tidak produktif karena menghambat proses produksi. Oleh sebab itu Bido menghimbau pemerintah agar melakukan layanan izin satu atap, kalau tidak, berbahaya karena banyak pengusaha di Jawa Timur yang akan gulung tikar seperti usaha garmen, sepatu, dan industri lain.

Menurut Vasant Desai (2003), Disperindag (1999) dan Bido (2005) Keluhan mendasar dari para pengusaha terkait dengan pengurusan izin meliputi;

- a) Biaya pengurusan yang relatif tinggi dan terdapat berbagai variasi tentang biaya pengurusan seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
JUMLAH BIAYA RIIL DALAM PENGURUSAN IZIN
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2004 (Rp 000)

Lokasi	Jenis Izin	
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Kabupaten Gresik	100 – 200	75
Kabupaten Jember	50 – 350	60
Kabupaten Pamekasan	20 – 250	25
Kabupaten Pasuruan	25 - 100	-
Kota Surabaya	100 – 750	150
Kabupaten Tulungagung	-	500

Sumber: Kompas, 2005

Berdasarkan tabel di atas terdapat variasi jumlah biaya pengurusan izin usaha.

Bagi usaha menengah dan besar hal ini memang tiak terlalu tinggi, namun bagi usaha mikro, ini masalah besar yang tidak dapat dipenuhi Di samping biaya resmi seperti pada Tabel 2.3 di atas, dalam hal pengurusan izin masih banyak lagi biaya yang tidak resmi (pungli) yang jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan biaya resmi yang harus di keluarkan, akhirnya para pengusaha mikro, kecil enggan mengurus izin dan berproduksi seadanya (tidak termotivasi meningkatkan usahanya) (Disperindag; 1999).

- b) Waktu pengurusan relatif lama dan tidak ada kepastian kapan harus selesai. Jika pengurusan izin dinformasikan selesai dalam waktu 3 hari ternyata bisa memakan waktu 1 – 3 bulan. Sedang di India bisa ber tahun lamanya baru keluar izin (Vasant Desai, 2003)
- c) Persyaratan Administratif yang terlalu banyak mulai dari Kartu identitas, NPWP, Surat izin HO, Laporan produksi satu tahun terakhir, pengendalian

pencemaran, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan.

- d) Kemampuan pegawai dalam melayani dan penanganan proses perizinan yang terlalu lamban dan kurang profesional. Sering dijumpai pegawai memberikan informasi yang tidak jelas, sehingga menjengkelkan para pemohon dan pengurusan izin menjadi terbengkalai.
- e) Formulir isian yang tidak selalu tersedia. Kadang-kadang pemohon harus menunggu beberapa hari kemudian baru mendapatkannya.
- f) Untuk kelancaran proses perizinan sering dijumpai adanya pungutan liar (pungli) yang jumlahnya jauh melebihi jumlah biaya yang sebenarnya harus dikeluarkan. Hal ini sangat memberatkan pengusaha
- g) Rendahnya pemahaman para pengusaha khususnya pengusaha industri mikro dan kecil tentang arti, fungsi dan manfaat perizinan terhadap eksistensi perusahaan di masa depan, sehingga enggan untuk mengurus izin usaha.

Dari teori dan hasil penelitian seperti diutarakan di atas, diketahui dengan jelas bahwa peraturan pemerintah dengan struktur pertumbuhan unit usaha sangat terkait erat. Oleh sebab itu perlu adanya solusi (deregulasi) untuk memecahkan masalah perizinan agar tujuan dan sasaran kebijakan pemerintah dalam membina dan mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah dapat tercapai.

2.9 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan dengan Struktur Usaha

Menurut hasil penelitian Theo and Low (1994), Wijewardena and Cooray (1995) Tan and Tay (1994), bahwa bantuan permodalan dari pemerintah mendorong pertumbuhan industri kecil menengah di Singapore, dan Kobe, Japan ;

“Was based on a questionnaire survei of 161 small manufacturing and commercial enterprises in Singapore. This study found several factor to be positively and significantly related to small business success, growth of small firms: acces financing, Financial support by the government”.

Budiono (2005) menyatakan bahwa suatu kegiatan produksi akan bisa berlangsung apabila tersedia faktor-faktor produksi. Modal (*Capital*) berupa mesin, gedung, dan sarana prasarana lainnya) merupakan faktor produksi yang berperan terhadap pertumbuhan unit usaha

Pertumbuhan unit usaha dicerminkan oleh adanya perubahan secara struktur dari (1) nilai investasi, (2) jumlah tenaga kerja yang terserap, (3) omzet penjualan (Disperindag, 1995; III-22-29)

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah (UU No 9 thn 1995 psl 4). Oleh sebab itu permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah berupa lemahnya di bidang permodalan (Manan, 1999; 7), pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu bantuan permodalan seperti dituangkan dalam pasal 21 UU no 9 tahun 1995 yang menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang bersumber dari: (a) Kredit Perbankan, (b) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, (c) Modal Ventura, (d) Pinjaman dari dana penyesihan sebahagian laba badan usaha milik negara (BUMN), (e) Hibah.

Seperti dinyatakan Budiono (2005), bahwa produksi akan bisa berlangsung jika tersedia modal yang cukup. Lancarnya proses produksi akan menghasilkan output yang kompetitif.

Pada perekonomian secara umum *ceteris paribus*, penambahan modal akan meningkatkan produksi, sehingga modal merupakan pendorong kuat untuk meningkatkan output dan pada akhirnya akan meningkatkan laba usaha yang merupakan salah satu indikator dari struktur pertumbuhan unit usaha.

Selanjutnya menurut Awat dan Muljadi (1996:26), perusahaan yang menggunakan sumber modal secara tepat dapat menghasilkan biaya modal yang rendah. Kondisi demikian juga bisa mengurangi total biaya karena apabila biaya modal rendah, maka beban biaya yang dibayarkan semakin rendah pula. Jika beban biaya rendah, diharapkan laba produksi juga akan semakin besar, karena sumber modal yang digunakan secara tepat. Oleh sebab itu menurut perindag (2000:16) penyaluran bantuan permodalan bagi IMKM perlu mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut : (1) peran pemerintah dalam akses modal ; (2) sumber modal ; (3) besarnya bantuan modal ; (4) jangka waktu pengembalian ; (5) variasi jenis modal ; (6) biaya-biaya administratif yang harus dikeluarkan pengusaha dalam rangka mendapatkan pinjaman ; (7) persyaratan administratif yang harus dipenuhi setiap pengusaha yang membutuhkan pinjaman modal.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005) yaitu salah satu formula untuk mengatasi kendala permodalan yang dialami para pengusaha industri mikro kecil dan menengah di Indonesia adalah kebijakan bantuan permodalan. Sehingga untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan dengan (1) meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri, (2) meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan, (3) meningkatkan

kemampuan manajemen keuangan, (4) menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin. Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam memberikan akses dan sumber permodalan akan dapat membantu pengusaha untuk mengatasi kendala permodalan yang dialami.

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah unit usaha meningkat rata-rata sebesar 9,6% setiap tahun selama lima tahun yaitu 1999 s.d 2003. Selanjutnya penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan peningkatan selama periode tahun yang sama yaitu sebesar 8,8% per tahun. Demikian juga nilai produksi meningkat sebesar 7,8% setiap tahun selama periode tahun 1999 – 2003.

Dijelaskan bahwa bantuan permodalan bagi para pengusaha industri mikro kecil dan menengah yang disalurkan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya sangat membantu pengusaha untuk membiayai operasional perusahaan seperti pembelian bahan baku, biaya proses produksi dan pemasaran yang sebelum mendapat bantuan permodalan terpaksa harus meminjam dari pihak swasta di mana bunga yang relatif besar sekitar 20-30% setiap tahun dan jangka waktu pengembaliannya relatif singkat kurang dari 12 bulan. (Kanwil Perindag Prov. Jatim, 1993). Namun demikian menurut Kanwil Perindag Prov. Jatim, dana bantuan dari pemerintah akan lebih bermanfaat bagi para pengusaha jika;

- 1) Akses terhadap sumber modal dapat diinformasikan dengan jelas bagi para pengusaha oleh pemerintah.
- 2) Pemerintah harus berperan aktif untuk membantu pendanaan usaha mikro dan kecil.
- 3) Besarnya dana bantuan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

- 4) Jangka waktu pengembalian yang tidak terlalu cepat (lebih dari 12 bulan).
- 5) Modal (Capital) cukup bervariasi.
- 6) Biaya administrasi yang tidak terlalu besar dalam rangka mendapatkan dana pinjaman.
- 7) Persyaratan administrasi yang tidak terlalu sulit untuk dipenuhi pengusaha.

Menurut penelitian Premaratne (1999) kebijakan bantuan pemerintah di bidang permodalan dan bantuan bahan baku yang disalurkan bagi para pengusaha industri kecil berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penjualan hasil produksi. Demikian juga wilayah pemasaran bertambah setelah mendapatkan bantuan permodalan. Karena pengusaha mempunyai kemampuan untuk membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan saat ini tanpa dibebani biaya bunga yang relatif tinggi, membiayai proses produksi dalam jumlah relatif besar sehingga mampu melakukan ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat.

Berdasarkan teori tentang permodalan serta hasil laporan penelitian terdahulu seperti diutarakan di atas dapat diketahui bahwa hubungan kebijakan bantuan permodalan oleh pemerintah dengan struktur pertumbuhan unit usaha sebenarnya mempunyai kaitan erat. Ini dapat dilihat dari adanya peningkatan dan perubahan struktur unit usaha sebelum dan sesudah diberikan bantuan permodalan.

2.10 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran dengan Struktur Usaha

Huck and McEwen (1995) melaporkan hasil penelitiannya tentang pengaruh promosi dan pemasaran terhadap keberhasilan dan pertumbuhan usaha kecil di Jamaika. Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan terhadap 54

manufacturing service small business di Jamaica mengatakan bahwa; *marketing as most crucial for the succesful to the growth of a small business in Jamica.*

Berkaitan dengan pernyataan di atas, Subanar Harimurti (1998:137). juga mengatakan bahwa, produk atau jasa yang tidak terjual atau tidak dapat dipasarkan akan menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Oleh sebab itu untuk mencapai kondisi terjual tersebut diperlukan aspek-aspek pemasaran seperti promosi dan periklanan, distribusi/ penyaluran. Ketiganya merupakan perwujudan dari perencanaan, pengendalian serta pengawasan program pemasaran suatu poroduk atau jasa usaha kecil. Lebih lanjut Subanar mengatakan secara praktis 3-P di atas dapat berpedoman pada 4-P yaitu;

- 1) Pencarian informasi pemasaran yang diperlukan
- 2) Penonjolan diri untuk meyakinkan konsumen
- 3) Pengurangan ongkos produksi dan penjualan
- 4) Pelayanan konsumen bagi terciptanya kelangsungan pembelian.

Untuk menjawab ke-empat hal di atas perlu adanya promosi dan pameran sebagai upaya meningkatkan penjualan (Subanar Harimurti, 1998: 140). Dijelaskan bahwa promosi, pameran merupakan sebagian dari aktivitas publikasi yang akan menunjang peluang usaha kecil. Berbagai kegiatan promosi dan pameran telah sering dilakukan dan memberikan masukan yang cukup berarti bagi industri kecil maupun kerajinan di Indonesia.

Marketing (pemasaran) menurut Stanton dalam Sirat (2002:48) menyatakan pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha, yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli, baik kepada konsumen aktual maupun yang potensial.

Selanjutnya Khan dan Rocha (1982). Sa dan Hambrick, (1998); Dess dan Davis (1984), menyatakan faktor-faktor yang menentukan efektivitas suatu perusahaan yang berkaitan dengan kemampuan pemasaran (*marketing competencies*) untuk mencapai target segmen pasar, maupun akses terhadap posisi pasar/produk alternatif, yaitu (*pricing*), periklanan (*advertising*), promosi (*promotion*), distribusi (*distribution*), pelayanan purna jual (*after-sales customer service*).

Jauck dan Glueck (1999:165), pemasaran dan distribusi berarti memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dimulai dengan mencari hal-hal yang diinginkan konsumen, dan dapat tidaknya produk dan atau jasa dapat dijual dengan laba. Hal ini memerlukan riset pasar, pengidentifikasian pasar, pengembangan produk, pengujian reaksi konsumen, perhitungan produksi dan biayanya, penentuan keperluan distribusi dan pelayanan, memutuskan cara pengiklanan dan promosi.

Peluang pasar dan konsumen baru dapat dirintis dengan mengupayakan suatu penampilan yang prima atau siap memikat untuk disaksikan dan diindak lanjuti. Adanya sarana tersebut sebaiknya dimanfaatkan oleh para pengusaha mikro kecil dan menengah sebaik mungkin, untuk mengembangkan peluang pasar yang baru dan sekaligus menarik minat investor ataupun pemilik modal yang bersedia bekerja sama dalam pembuatan produk.

Khusus untuk industri kecil dan sejenisnya, peluang pasar akan lebih terbuka dengan berbagai sarana dan prasarana promosi yang meliputi; (1) promosi langsung, (2) pameran serta workshop yang berkonotasi eksperimental atau memperlihatkan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk. Juga pemanfaatan produk pada pemakaian sehari-hari atau pada kegiatan dan acara-acara tertentu.

Daya tarik industri mikro dan kecil adalah jenis produk yang dihasilkan serta cara pembuatannya yang unik dan merangsang kreativitas. Oleh karenanya konsumen akan merasa menyukai bila semakin besar kemungkinannya untuk terlibat dalam menentukan model dan menyaksikan proses produksi.

Di samping upaya di atas untuk mengantisipasi dampak negatif atas kehadiran pasar modern, maka pertumbuhan pasar modern perlu ditata dan dibina (adanya pembatasan), agar pedagang kecil dan menengah serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang dalam memanfaatkan peluang yang ada (Depperindag, 1995)

Nurcahyadi Ketua Forum Daerah UKM Jatim (Kompas, 2005 hlm. 7) menyampaikan yang termasuk kendala yang dihadapi oleh para pengusaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan promosi dan pameran meliputi;

- a) Terbatasnya dana promosi dan pameran yang dimiliki oleh para pengusaha
- b) Tidak mampu mencari pasar sendiri sehingga masih banyak terlibat dalam pasar konvensional. Pada hal telah banyak hasil, produk UKM yang sudah di ekspor melalui pihak ketiga seperti kerajinan tangan perak yang di hasilkan

para pengusaha mikro di Kabupaten Pasuruan di ekspor ke Jepang, Eropa, Belanda melalui eksportir di Bali (Kanwil perindag; Prov Jatim;1999).

Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan kebijakan pemerintah berupa:

- 1) Pendirian pusat-pusat pameran sebagai wadah bagi para IMKM untuk berpameran dan bertransaksi dengan buyer baik lokal maupun luar negeri seperti Pusat Pengembangan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) yang didirikan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Pusat-pusat promosi tersebut didirikan di beberapa Provinsi yaitu; (1) DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan di Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui program ini pengusaha IMKM dapat mempromosikan produknya bagi umum baik masyarakat dalam negeri maupun buyer dari Luar negeri secara reguler tanpa dipungut biaya promosi.
- 2) Membuat jaringan ke luar negeri dalam rangka memperluas pasar internasional. Di samping pusat promosi, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi pengusaha IMKM untuk memasarkan produknya ke luar negeri melalui fasilitas internet yang tersedia di pusat-pusat promosi daerah.
- 3) Mengikut sertakan para pengusaha secara langsung untuk berpameran di luar negeri (yang difasilitasi oleh pemerintah). Tidak sedikit para pengusaha setelah mengikuti pameran di Luar Negeri, mendapatkan ide-ide dan usul dari mitra bisnisnya untuk memproduksi model-model yang diusulkan terbuat dari bahan yang sama. Setelah pulang ke Indonesia, ide-ide tersebut diolah dan dikembangkan sehingga tercipta desain-desain unik baru dan diversifikasi produk dengan berbagai macam bentuk dan model. Di samping ditemukannya

desain-desain baru, para pengusaha dapat meningkatkan produksi dan penjualan ekspornya. Yang bermuara pada pertumbuhan dan pengembangan usaha.

- 4) Penyebaran informasi harga produk negara importir dan jenis produk yang dibutuhkan pasar dalam maupun luar negeri.
- 5) Penyebaran Informasi kualitas dan kuantitas permintaan produk yang di distribusikan melalui bagian perdagangan luar dan dalam negeri pada Dinas Perindag Provinsi ataupun Depperindag jakarta.
- 6) Akses pasar baik luar maupun pasar luar negeri.
- 7) Informasi sistim packaging yang efisien dan efektif.
- 8) Informasi jalur distribusi dan liputan geografis yang efisien dan efektif.

Untuk mendukung keberhasilan kebijakan bantuan promosi dan pemasaran Menperindag dan Mendagri mengeluarkan SKB no 145/MPP/Kep/5/1997 dan nomor 57 tahun 1997 tentang penataan dan pembinaan pasar dan pertokoan tanggal 12 Mei 1997, yang intinya mengatur pembagian kewenangan dalam Pengaturan Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian pasar dan pertokoan yaitu (1) Menteri dalam negeri melakukan pembinaan, penataan dan pembangunan pasar dan pertokoan. (2) menteri perindustrian dan Perdagangan mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di pasar dan pertokoan dan perdagangan mikro, kecil dan menengah agar mampu berkembang secara tangguh, maju dan mandiri menjadi usaha menengah.

Selanjutnya Sintaasih dalam Salim, Wahid (1996), meneliti industri garmen di Bali, hasil penelitian membuktikan bahwa faktor internal seperti promosi

penjualan/pameran, distribusi penjualan, bauran produk, jumlah tenaga kerja, kesejahteraan karyawan, kapasitas produksi dan kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja usaha berupa peningkatan penjualan dan wilayah pemasaran.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti diutarakan di atas diketahui bahwa kebijakan pembinaan pemerintah berupa bantuan promosi dan pemasaran bagi usaha kecil menengah berkaitan erat dengan struktur pertumbuhan unit usaha. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan dan peningkatan nilai produksi dan penjualan, wilayah pemasaran produk, yang merupakan indikator dari struktur pertumbuhan unit usaha (Depperindag 2002).

2.11 Hubungan Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Industri dan Perdagangan (Indag). dengan Struktur Usaha

Rubalcaba (1999), Gonzales (1999) mengatakan bahwa:

“Specilized service that hepl inefficent decision – making in company management – that is conculting cervice. Undoubtly make up one of the most dynamic sector of economy in most European Countries and in Spain”

Pernyataan di atas diartikan bahwa jasa khusus yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan efisiensi di perusahaan adalah jasa tenaga konsultan pendamping. Tidak diragukan lagi bahwa penyuluhan terhadap para pengusaha meningkatkan dinamisasi ekonomi di kebanyakan di negara Eropa dan Spanyol.

Asocioacion Terciario Avancado Dela Commonidad Valenciana (1987) menyatakan bahwa sebanyak 62% perusahaan skala menengah sektor penyaluran barang dan jasa yang mempekerjakan antara 50 – 250 tenaga kerja di Spanyol menggunakan jasa tenaga pendamping/penyuluh untuk meningkatkan efisiensi.

Penelitian ini didukung oleh Manas. E (1992) yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan menengah di Eropa menggunakan tenaga ahli/penyuluh yaitu (di Spanyol 23%), Italy (47%), kerajaan Inggris (34%) dari total pengusaha yang ada di masing-masing negara. Para tenaga penyuluh/pendamping sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha (pertumbuhan usaha). Di bidang pemasaran (35,6%), organisasi (26,5%), perbaikan mutu (23,1%) penyuluhan lain-lainnya (14,8%).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Quasar (1990) untuk perusahaan yang beroperasi di daerah Murcia yang pertama yang menjadi perusahaan jasa penyediaan tenaga penyuluh/pendamping khusus untuk perusahaan strata menengah. Menyatakan bahwa pendampingan yang dibutuhkan oleh para pengusaha adalah penyuluhan di bidang (1) peningkatan mutu, (2) strategi pemasaran, (3) kemampuan manajerial, (organisasi).

Dalam pasal 4 Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, ditegaskan bahwa pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan untuk (1) menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah, (2) meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Membina dan mengembangkan industri mikro kecil dan menengah bukan hanya sebatas peningkatan kinerja berupa peningkatan laba usaha namun lebih dari itu, perusahaan harus mampu berkembang dan meningkat menjadi usaha menengah

yang digambarkan dengan adanya perubahan ataupun peningkatan struktur usaha (Depperindag 1995) :

- 1) Jumlah Investasi
- 2) Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
- 3) Omzet Penjualan

Oleh sebab itu kendala yang menghambat pertumbuhan industri mikro, kecil dan menengah perlu mendapat solusi. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang di atas adalah melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) melalui bantuan tenaga penyuluh Indag yang berperan sebagai pendamping/konsultan untuk memberikan asistensi bagi pengusaha baik secara individu maupun kelompok.

Penyuluh industri dan perdagangan mempunyai kedudukan sangat strategis karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan bimbingan/pendampingan langsung bagi pengusaha maupun keluarganya terutama di pedesaan.

Kompas (2005) dalam tajuk rencana membahas mengenai kendala yang di hadapi pengusaha mikro, kecil menengah menjelaskan bahwa dari studi kasus yang secara riil terjadi di lapangan, terlihat bahwa yang lebih dibutuhkan pengusaha mikro hingga saat ini adalah pendampingan. Mereka yang bergerak di bidang usaha mikro umumnya tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi kehadiran tenaga pendamping pertama-tama ditujukan untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan itu. Paling tidak perlu dibangun akan jiwa kewirausahaan yang benar di mana dasar

perhitungan usahanya bukan hanya keberanian tanpa perhitungan, tetapi keberanian yang didukung sistem pengadministrasian yang benar.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tingkat kegagalan pada tahap-tahap awal usaha begitu tinggi. Namun dengan pendampingan yang benar dan secara terus menerus disuntikkan sistem manajemen yang benar, maka dari proses *trial and error* akhirnya banyak juga yang berhasil. Keberhasilan dari usaha mikro inilah yang menjadi kunci bagi mereka untuk naik kelas membangun usaha dan kemudian menjadi usaha kecil dan meningkat menjadi usaha menengah. (Kompas; 2005 hlm.4).

Hal senada juga diutarakan Apibunyopas (1983:3) menyatakan peran penyuluh/asistensi dibutuhkan untuk memberikan arah dan membantu kemampuan merumuskan kebijakan strategi dalam memanfaatkan faktor produksi. Keberhasilan internal ditentukan pula oleh kejelian pengusaha dalam memanfaatkan kesempatan, Viljoen (1991:31) menyatakan keberhasilan internal ditentukan pula oleh kejelian pengusaha dalam memanfaatkan kesempatan. Viljoen (1991:31) menyatakan sebagai kesempatan untuk memperoleh *niche*, " .. *create or defend a strong position in a particular segment* ". Program pendampingan untuk memberikan bimbingan usaha sangat diperlukan, termasuk masalah kemitraan dalam mencari pasar yang baru (Kotler, 1995:56). Kemudian Kerlinger (1990:230), berpendapat " *the regulatory system is a primary means through which government tries to harmonize business behaviour and the public interest* .. ".

Lessem (1995:47) mengutarakan suatu perusahaan yang memperoleh pendampingan berarti mendapatkan faktor produksi baru (*fresh resources*) baik

bidang manajemen, teknik dan financial, sehingga dapat memperlancar kegiatan usaha. Mereka yang mendapatkan pendampingan dapat mengadakan adaptasi dan responsif terhadap langkah strategiknya (*corporate strategic activities*) dan sekaligus menjabarkan dalam manajemen operasi (*operating management*) (Lyman. 1968:87). Hal ini dicerminkan pada penentuan kebijakan fungsional berupa, kebijakan pelatihan, permodalan, iklim usaha yang kondusif berupa peraturan dan perizinan, kebijakan promosi dan pemasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan struktur dan pertumbuhan unit usaha.

Selanjutnya Viljoen (1991:1) "... it concern with designing and implementation a firm adaption to change in its external environment; a response which we shall refer to as the firm strategic activities." Melalui pendampingan dapat memberikan hasil yang berbeda dengan yang tidak memperoleh pendampingan (Edward, 1994:19).

Depperindag (2002) melaporkan bahwa tingkat pertumbuhan unit usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan jumlah investasi, nilai produksi, meningkat selama lima tahun terakhir (1999 – 2003) setelah mendapat pembinaan. Peningkatan rata-rata setiap tahun masing-masing 9,0% untuk peningkatan jumlah unit usaha, 7,8% peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jumlah investasi sebesar 8,8% dan pertumbuhan nilai produksi 7,8% khusus IMKM-PED makanan olahan di Provinsi Sumatera Utara.

Dari penjelasan teori dan hasil penelitian seperti disampaikan di atas memberikan gambaran mengenai peran kebijakan program penyuluhan atau

pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap meningkatkan struktur pertumbuhan jumlah unit usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

2.12 Hubungan Kinerja Usaha dengan Struktur Usaha

Kinerja usaha merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan sering diukur dengan cara melihat kinerja keuangan (tingkat laba usaha) yaitu berdasarkan data fundamental perusahaan seperti laporan keuangan (Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal).

Adapun analisis keberhasilan/prestasi perusahaan dilakukan dengan tiga cara yaitu, (1) analisis profitabilitas, (2) analisis produktivitas dan (3) analisis berdasarkan data non keuangan.

1) Analisis Profitabilitas.

Analisis profitabilitas dapat dilakukan dengan empat cara yaitu :

- ❑ *Laba, earning per share (EPS)*
- ❑ *Return on Investment (ROI)*
- ❑ *Residual Income (RI)*
- ❑ *Economic Value Added (EVA)*

Laba sebagai pengukur keberhasilan adalah alat ukur keberhasilan yang sering digunakan, dan alat ukur ini dianggap sebagai alat ukur yang cukup baik. Perusahaan yang mempunyai laba besar adalah perusahaan yang berhasil. Namun demikian penggunaan alat ukur ini memiliki kelemahan, misalnya tidak memperhitungkan investasi yang digunakan, sehingga mendorong timbulnya

konsep-konsep alat pengukuran lain di luar laba seperti diutarakan oleh Weston dan Copeland (1992:103) yaitu :

“(a) Rasio likuiditas (*liquidity ratio*), yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban yang segera di lunasi, (b) Rasio Leverage (*leverage ratio*) yang hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. (c) ratio profitabilitas (*profitability ratio*) mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan, (d) rasio aktivitas (*activity ratio*) mengukur seberapa efektif perusahaan-perusahaan menggunakan sumber dayanya. (e) rasio penilaian (*valuation ratio*), mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui biaya investasi, (f) rasio pertumbuhan (*growth ratio*), mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri.”

Adapun ratio keuangan yang paling sering digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan adalah rasio likuiditas, ratio leverage, ratio aktivitas dan ratio profitabilitas. Penilaian kinerja keuangan dapat pula dinilai dengan menggunakan konsep *Economic Value Added (EVA)*.

Tunggal Amin Wijaya (2001), menjelaskan konsep *Economic Value Added (EVA)* sebagai suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi (*operating costs*) sistem dan biaya modal (*cost of capital*). Selanjutnya Anjar V. Thakor yang dikutip oleh Tunggal Amin Wijaya (2001) menyatakan.

“Economic Value Added (also called Economic Value Added) = Revenue – Direct Cost (including taxes) – opportunity cost of using capital = after tax profit – opportunity cost of using capital”.

(a) *Earning per share.*

Earning per share (EPS) dihitung dengan cara membagi laba setelah kena pajak dengan jumlah saham yang beredar. Suatu perusahaan disebut berhasil apabila mempunyai EPS relatif tinggi. Konsep pengukuran ini sekaligus dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pengukuran keberhasilan perusahaan yang menggunakan laba. Sebagai alat ukur suatu keberhasilan, EPS inipun tidak terlepas dari kelemahan. Kelemahan tersebut menurut Wheelen and Hunger (1995:286) adalah mengabaikan nilai waktu dari uang. Lebih lanjut dikatakan ada bukti-bukti bahwa EPS bisa tidak berhubungan dengan harga saham suatu perusahaan. Dengan keterbatasan ini maka EPS adalah alat ukur yang kurang memadai terhadap kinerja perusahaan.

(b) *Return On Investment (ROI)*

Wheelen and Hunger (1995:286) mengatakan *Return On Investment (ROI)* merupakan hasil bagi pendapatan sebelum pajak dengan total asset. ROI merupakan alat ukur keberhasilan yang paling sering digunakan sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti Reece dan Cool dalam Anthony Dearden (1980:279) mengatakan di Amerika Serikat tingkat pengembalian investasi (ROI) merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menilai prestasi pusat investasi. Konsep laba maupun investasi yang dimaksud disini dapat berupa laba sebelum pajak (*income before tax*) ataupun laba setelah pajak (*income after tax*). (Teuku Mirza, 1996:35).

Dengan formula:

$$\text{Return On Investment (ROI)} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Activa}}$$

Lebih lanjut Mirza (1996) menjelaskan ROI biasanya dibandingkan dengan *required of return* yang dikehendaki oleh investor. Apabila ROI rata-rata sepanjang umur proyek (*yeld maturity*) dalam perhitungan obligasi lebih

rendah dari *required rate of return* berarti investasi tersebut tidak layak. ROI yang lebih rendah dari *required rate of return* akan tercermin dari hasil net present value yang negatif atau IRR yang lebih rendah dari *requirement of return* (dalam perhitungan NPV dan IRR) yang digunakan adalah net profit + depresiasi.

(c) *Residual Income* (Laba Residual)

Laba residual merupakan laba yang diperoleh dari selisih antara laba sebelum dikurangi biaya modal yang diperhitungkan atas investasi. Biaya modal yang diperhitungkan tersebut merupakan biaya kesempatan atas investasi yang ditanamkan pada perusahaan. Dalam ROI ukuran keberhasilan usaha dinyatakan dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan rupiah *residual income* yang diharapkan.

2) Analisis Produktivitas

Wheelen and Hunger (1995:286) mengatakan bahwa pada prinsipnya ROI sama dengan produktivitas, hanya saja ROI merujuk pada nilai (*value*) sedangkan produktivitas menunjuk pada jumlah (*quantity*). Hal ini dapat diamati dari definisi produktivitas seperti dikatakan Robinson, *et al.*, (1983; 40) misalnya mendefinisikan produktivitas sebagai jumlah *output* yang diperoleh dari sejumlah *input* tertentu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa produktivitas adalah suatu ukuran dari efisiensi yang merupakan rasio antara *output* dan *input*. Artinya, makin besar rasio tersebut, makin efisien penggunaan *input* dari suatu usaha. Kemudian dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (1990) dijelaskan bahwa produktivitas pada dasarnya adalah rasio atau perbandingan antara

output (*keluaran*) dan input (masukan). Nilai rasio ini menunjukkan jumlah keluaran yang diperoleh dari jumlah masukan. Semakin besar nilai tersebut, berarti produktivitas makin tinggi. Oleh sebab itu produktivitas usaha adalah perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh (*output*) dengan jumlah sumber daya yang digunakan (*input*).

Selanjutnya dalam ilmu ekonomi klasik dikenal empat faktor produksi, yaitu (a) tanah, (b) tenaga kerja, (c) modal dan (d) manajemen. Terkait dengan faktor produksi tersebut *input* dari proses produksi dari suatu usaha untuk menghasilkan *output*. Dari pengertian ini, maka kinerja suatu usaha dapat dilihat dari nilai (*value*) maupun jumlah (*quantity*) yang dihasilkan dalam suatu kurun waktu tertentu. Oleh karena itu kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari hasil yang dicapai perusahaan itu sebagai keseluruhan, seperti hasil penjualan sebelum dan sesudah pajak (*net profit after tax*), produktivitas perusahaan, maupun tenaga kerja sebagai salah satu *input* penting dalam proses produksi.

3) Analisis berdasarkan data keuangan non keuangan

Foster (1998) mengatakan bahwa untuk melihat keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari data keuangan dan non-keuangan yaitu dari :

- (a) *Product Market Information*, seperti halnya, market share, data laba operasi, data teknik hunian, data load faktor, data penjualan.
- (b). *Capital Market Information*, seperti, *Pricing Earning Ratio* dan *Pay Out Ratio*.

Pandangan yang lain mengenai kinerja perusahaan seperti dikutip Nurhayati dari Jauch dan Glueck (2003) menjelaskan;

“Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif di mana kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari prestasi perusahaan dengan membandingkan dengan apa yang dilakukan di masa lampau dengan hasil saat ini, atau membandingkannya dengan para pesaingnya dalam sejumlah faktor seperti laba bersih, harga saham, tingkat deviden, laba per lembar saham, hasil pengembalian atas modal, hasil pengembalian atas ekuitas, pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, jumlah hari kerja yang hilang karena buruh mogok, biaya produksi dan efisiensinya, keluar masuknya karyawan (*turn over*) dan index kepuasan buruh. Sementara ukuran kuantitatif berupa pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui apakah tujuan, strategi dan rencana yang terpadu dan komprehensif dari suatu perusahaan sudah konsisten, tepat dan dapat berjalan atau tidak“.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan suatu perusahaan (kinerja usaha) dapat dilihat dari tingkat laba (kemampulabaan) suatu usaha dalam suatu periode tertentu. Sedangkan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi termasuk sumber daya manusia yang memiliki kemampuan baik dalam keterampilan teknis (*technical skill*) maupun kemampuan manajerial (*manajerial ability*). Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kebijakan pembinaan dilakukan terhadap IMKM dengan program (bantuan pelatihan teknis, iklim usaha yang kondusif berupa peraturan dan kemudahan dalam perizinan, bantuan permodalan, promosi dan pemasaran serta bantuan tenaga penyuluh indag/pendampingan dalam rangka memberikan asistensi bagi para pengusaha dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan struktur pertumbuhan unit usaha.

Sehingga dalam studi ini Kinerja Usaha (pendapatan perusahaan) dihitung menggunakan rumus :

- *Retur on Sales (ROS)* yaitu ratio laba usaha terhadap hasil penjualan.



$$\frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Hasil Penjualan}} \times 100\%$$

- *Retur on Investment (ROI)* yaitu ratio laba usaha terhadap total investasi

$$\frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Total Investasi}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang teori pembinaan yang menjelaskan hubungan antara kinerja usaha dengan struktur pertumbuhan unit usaha dijelaskan sebagai berikut :

Struktur pertumbuhan unit usaha adalah perubahan strata usaha (*Manufactur Structure Level*) dari strata usaha mikro menjadi usaha kecil dan dari strata usaha kecil meningkat menjadi usaha menengah yang kuat tangguh dan mandiri, dapat dicerminkan oleh adanya perubahan, (1) pertumbuhan jumlah unit usaha, (2) jumlah investasi, (3) jumlah produksi, (4) nilai penjualan, (5) jumlah tenaga kerja yang terserap, (6) persentase jumlah produksi yang dapat di ekspor atas prestasi usaha, investasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana produksi yang dilakukan dan bantuan pembinaan pemerintah (UU no 9 tahun 1995, Disperindag; 1995 Devine et al., 1994)



Sumber. Disperindag (2002) Manan (1999), Alison Morson (1999), disusun kembali

Gambar 2.5

PEMBINAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

Pada Gambar 2.5 dapat dilihat konsep pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah kaitannya dengan kinerja dan struktur pertumbuhan unit usaha

Untuk mewujudkan terciptanya industri mikro, kecil yang kuat mandiri dan berkembang menjadi industri menengah sebagaimana yang terkandung dalam pasal 4 UU no 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Indonesia, pemerintah pada tahun 1995 telah menetapkan kebijakan pembinaan industri kecil melalui program bantuan pelaksanaan pelatihan, iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perijinan usaha, bantuan permodalan, bantuan promosi dan pemasaran serta pemanfaatan Tenaga Penyuluh Industri di daerah-daerah. (Depperind; 1995).

Kebijakan pembinaan yang sama dan searah terhadap industri mikro, kecil dan menengah di Indonesia juga dipertegas dan di dukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 Pebruari 2005 dalam pidatonya menyambut tahun mikro keuangan di gedung SMESCO Promotion Center Jakarta, menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan, miningkatkan penyerapan tenaga kerja, memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya, adalah melalui pemberdayaan UKM. Oleh sebab itu kebijakan pembinaan yang dilakukan adalah program dengan formula empat sehat lima sempurna yaitu peningkatan keterampilan SDM (Pelatihan), Iklim usaha yang kondusif melalui peraturan dan kemudahan dalam perijinan bantuan permodalan, promosi dan pemasaran hasil produk baik dalam maupun ekspor, kemampuan manajerial.

Melalui Kebijakan Pembinaan Pemerintah diharapkan kinerja IMKM akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan struktur pertumbuhan unit usaha pula. Hal senada juga disampaikan oleh Budiono (2005). Program pembinaan ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi oleh para pengusaha IMKM, berupa rendahnya keterampilan teknis dan kemampuan manajerial, iklim usaha (peraturan pemerintah) yang kurang kondusif, keterbatasan modal, kesulitan dalam promosi pemasaran produk dan keterbatasan tenaga penyuluh/pendamping dapat diminimisasi sehingga kinerja usaha IMKM dapat meningkat (Murp, F.B.Aji; 1999).

Selanjutnya Tambunan Tulus (1999:35) mengatakan keberhasilan pembinaan pemerintah terhadap peningkatan pertumbuhan unit usaha industri mikro kecil menengah tidak hanya berhasil di Indonesia, tetapi juga di negara lain melalui kebijakan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti; Pilipina, Malaysia, Thailand, dan di Singapura Peningkatan laba usaha/pendapatan pengusaha sebagai hasil pembinaan memberikan dampak positif terhadap perkembangan unit usaha karena tumbuh dan perkembangan kegiatan industri skala mikro kecil dan menengah tersebut (berarti penambahan permintaan terhadap tenaga kerja melalui pasar output, meningkatkan volume produksi, mempunyai kesempatan waktu dan dana untuk investasi, *(Positive demand-site effect)*).

Lebih lanjut Tambunan mengatakan peningkatan laba usaha/pendapatan pengusaha mendorong minat dan kemampuan pengusaha untuk menanamkan sebahagian keuntungan yang diperoleh untuk diinvestasikan membeli mesin dan peralatan produksi yang baru sebagai pengganti mesin dan peralatan yang sudah

aus dan ketinggalan jaman. Sehingga perusahaan akan dapat bekerja lebih efisien dan efektif yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah dan struktur pertumbuhan unit usaha.

Berdasarkan beberapa pengertian dan konsep kebijakan pembinaan IMKM di atas dapat diketahui adanya hubungan yang erat antara kinerja dengan struktur pertumbuhan unit usaha. (Hema Wijewar Dane and Garry E. Tibbits, 1999; Colm O’Gorman and Rosalyn Doran, 1999, Camille Career, 1999).

Bahwa kebijakan pembinaan pemerintah berupa pelatihan teknis, iklim usaha yang kondusif berupa peraturan pemerintah kemudahan bidang perizinan, bantuan permodalan, promosi dan pemasaran bantuan tenaga penyuluh indag berpengaruh terhadap kinerja dan struktur pertumbuhan unit usaha.

2.13 Tinjauan beberapa Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pengaruh Faktor-Faktor Kebijakan Pembinaan Pemerintah terhadap Kinerja dan Perkembangan Struktur Unit Usaha pada Industri Kecil Penggerak Ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan awal ide dari penulisan disertasi ini yaitu:

1. Dience Rumerang (1992)

Melaporkan hasil penelitiannya yang berjudul Analisis Tingkat Keberhasilan Usaha Industri Kecil Kerajinan rotan di Maluku. Dalam penelitian ini variabel bebas terdiri dari modal usaha, bahan baku, volume produksi, harga jual per unit produksi, pemasaran, produktivitas dan proses produksi sedang variabel terikat yaitu keberhasilan usaha industri kecil kerajinan rotan. Alat analisis yaitu

regresi linear berganda dan populasi seluruh pengrajin industri kecil rotan di Maluku dengan jumlah sampel 270 pengrajin.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sulitnya untuk mendapatkan modal karena perusahaan tidak memiliki izin usaha, sulit mendapatkan sumber bahan baku, belum adanya pembagian kerja yang jelas dan rendahnya keterampilan yang dimiliki, penjualan hasil produksi tidak langsung ke konsumen melainkan melalui pihak ketiga, produktivitas tenaga kerja rendah, kurang efisien, rendahnya produktivitas disebabkan kurangnya jumlah peralatan produksi. Berdasarkan tingkat keuntungan terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan usaha industri kecil kerajinan rotan di Maluku yaitu, bahan baku, volume produksi dan harga jual per unit output. Seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha.

2. Godfrey Baldacchino (1997)

Small Business in small Islands : A Case Study from Fiji. adalah topik penelitian yang dilakukan oleh Godfrey Baldacchino di Pulau Fiji. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perizinan terhadap volume pemasaran produk sabun dan kacang (SPL) di Fiji, faktor expatriat dalam meningkatkan kinerja usaha, lingkungan kerja dan bantuan internet dalam mengurangi biaya pemasaran dalam rangka meningkatkan pasar ekspor.

Dari hasil penelitian (secara deskriptif) diketahui bahwa usaha kecil di pulau-pulau kecil ternyata dapat berkembang jika didukung oleh fasilitas dan kebijakan perizinan. Penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian sebelumnya (Bray, 1987, Bune, 1987, Hordes 1985) yang menyatakan bahwa perekonomian di

pulau-pulau kecil sangat kritis, fatalitis, kemampuan penerangan minim, tidak ada hubungan diplomatik, hasil ekspor yang relatif kecil dibandingkan nilai impor yang jauh melebihi nilai ekspor, mengakibatkan usaha kecil tidak berkembang.

Dijelaskan oleh Godfrey Small *is Beautiful*. Ini terbukti keberhasilan SPL usaha kecil untuk menembus pasar Eropa, Afrika Selatan, dan Amerika Utara. Namun menurut penelitian yang dilakukan terhadap pengusaha industri kecil/rumahtangga produk sabun (SPL) di lembah Suva ibukota Fiji keberhasilan usaha ini didukung oleh kemudahan dalam perizinan untuk pemasaran ekspor, pengemasan yang baik karena adanya inovasi yang dibawa oleh expatriat, lingkungan kesatuan kerja yang baik antara pemilik dan pekerja (hubungan kekeluargaan) dan bantuan fasilitas internet dalam memaarkan hasil produksi melalui internet. Situs ini merupakan strategi organisasi dari agennya di Australia, new Zeland, California AS dan UK. Melalui internet biaya pemasaran jauh lebih murah (tidak ada lagi handicap dari extra tansport dan biaya asuransi) Jaidep Motwani (1999)

3. Sarder, Ghost dan Rosa (1997)

Meneliti tentang pentingnya dukungan pembinaan kepada usaha kecil di Banglades. Penelitian dilakukan terhadap 161 usaha kecil untuk mengetahui kinerja usaha kecil yang memperoleh bantuan pembinaan. Kinerja usaha kecil dilihat dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, penjualan per tenaga kerja penuh waktu dan nilai tambah per tenaga kerja penuh waktu. Sementara bantuan pembinaan dilihat dari ruang lingkup bantuan, jenis bantuan (finansial dan non finansial) dan intensitas bantuan (jumlah bantuan keuangan yang

diterima oleh pengusaha industri kecil. Hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja usaha yang signifikan antara usaha kecil yang memperoleh pembinaan/bantuan dan yang tidak memperoleh pembinaan.

4. Muji Utami (1998)

Melaporkan hasil penelitiannya tentang Faktor-faktor Keunggulan Strategis pada Industri Bordir di Jawa Timur. Dengan menggunakan alat analisis model regresi berganda diketahui bahwa; volume penjualan dipengaruhi oleh faktor-faktor keunggulan strategis sebesar 99,58% dan faktor lainnya (pengganggu) sebesar 0,42%. Faktor keunggulan strategik yang berpengaruh dominan terhadap volume penjualan adalah tingkat perputaran aktiva sebesar 93,40%. Faktor keunggulan strategik yang berpengaruh dominan terhadap ROI adalah biaya pemasaran sebesar 86,02%. Faktor keunggulan strategik sebesar 99,34% dan faktor lainnya (pengganggu) sebesar 0,64%. Faktor keunggulan strategik yang berpengaruh dominan terhadap ROI adalah pangsa pasar sebesar 71%.

5. Abdul Manan (1999)

Melakukan penelitian tentang Dampak Pola Pembinaan terhadap Kinerja Subsektor Industri Kecil di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja subsektor industri kecil di Jawa Timur dipengaruhi oleh pola pembinaan non-pelatihan (pemberian bantuan dan kerja sama), dan peraturan pemerintah. Dengan menggunakan uji stepwise (bertahap) faktor-faktor tersebut berpengaruh secara signifikan. Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja sub-sektor

industri kecil di Jawa Timur terdiri dari; pelatihan teknis produksi, bantuan tenaga ahli, bantuan keuangan, bantuan peralatan mesin, kerjasama operasional, dan peraturan pemerintah. Aspek-aspek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja subsektor industri kecil di Jawa Timur yaitu pelatihan kesehatan, penanganan limbah dan pelatihan kewirausahaan. Aspek-aspek yang berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan yang dapat memperlemah subsektor industri kecil di Jawa Timur adalah; pelatihan keuangan, pelatihan pemasaran, pelatihan manajemen dan kerja sama perdagangan.

Analisis hasil penelitian menggunakan model fungsi regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah subsektor industri kecil yang ada di daerah Jawa Timur dengan teknik penarikan sampel yang digunakan secara *stratified proportional random sampling* sebesar 179 pengusaha yang terdapat di sentra-sentra subsektor industri kecil di Jawa Timur.

6. Camille Career (1999)

Dalam penelitiannya yang berjudul *The Training and Development Needs of Owner-Managers of Small Businesses Export Potential*. Camille Career melaporkan hasil penelitiannya terhadap sekelompok manajer pengusaha kecil terdiri dari 15 pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan ekspor dengan jumlah tenaga kerja antara 5 s.d 15 pekerja dengan usia perusahaan antara 3 s.d 50 tahun. Melalui wawancara yang dilakukan untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap kemampuan memasuki pasar ekspor.

Diketahui bahwa pelatihan berpengaruh terhadap keuntungan, pertumbuhan unit usaha karena melalui pelatihan pengusaha dapat beradaptasi terhadap produk

yang diinginkan pembeli dari luar negeri sesuai dengan keinginan mereka, (pendapat dari 80% responden). Kemudian 50 % dari responden menyatakan bahwa pelatihan yang berhubungan dengan teknik perdagangan internasional akan meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan perdagangan internasional yang efisien dan efektif sehingga akan meningkatkan jumlah penjualan dan memperluas wilayah pemasaran luar negeri. Dan pelatihan yang diinginkan antara 30 s.d 45 jam. Kemudian yang menjadi instruktur harus yang berpengalaman sebagai eksportir (pendapat 50% responden).

7. Colm O’Gorman and Roselyn Doran (1999)

Penelitian dengan judul *Mission Statements in Small and Medium Size Business* oleh Colm O’Gorman and Rosalyn Doran bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan yang tinggi ukuran perusahaan kecil dan menengah (SMES) berkaitan erat dengan pernyataan Misi yang lebih komplek. Dari hasil penelitian secara deskriptif disampaikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan (peningkatan stratata usaha) paling utama yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha industri kecil menengah (SMES) adalah pernyataan misi.

Dari hasil penelitian diketahui paling tidak terdapat 3 komponen yang harus terkandung dalam pernyataan misi agar pertumbuhan pendapatan dan format usaha (strata usaha) dapat meningkat.yiatu; (1) persoalan kualitas, (2) kebutuhan konsumen, (3) hubungan suplier. Penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vearce dan David (1987) yang menyatakan untuk keberhasilan pertumbuhan usaha kecil dan kinerja paling tidak terdapat 8 komponen yang perlu

terkandung dalam pernyataan misi. Dan kedelapan pernyataan misi oleh David and Verce diluar komponen dari pernyataan missi dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis diketahui seluruh responden (225 pengusaha) menyatakan 8 komponen misi seperti diutarakan David and Verse (1987) tidak dikenal. Artinya penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penekana utama dalam pernyataan misi dalam penelitian ini agar dapat menunjang pertumbuhan dan keberhasilan saha setidak-tidaknya menyangkaut 3 hal seperti disebutkan di atas yaitu; (1) persoalan kualitas, (2) kebutuhan konsumen, (3) hubungan suplier. Ketiga aspek tersebut berkaitan erat dengan kemampuan manager dalam mengelola usaha agar dapat tumbuh dan berkembang.

8. Hema Wijewardane and Garry E. Tibbits (1999)

Dalam penelitiannya yang berjudul *Foctors Contributing to the growth of Small Maufacturing Firms : Data from Australia*, meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan industri kecil di Australia.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Keterampilan pekrja (*Worker Skill*), umur perusahaan (*Age of firm*), Strata usaha (*Size of Firm*), kemampuan daya saing (*Market Competitio*), orientasi Ekspor (*Export Orientation*) Asset usaha (*Industry*) (Variabel bebas) berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha kecil (*Growth of Small Firms*) di Australia.(Variabel terikat).

Dengan menggunakan alat analisis Regresi berganda (*Multiplr Regression*) dengan jumlah sampel 136 pengusaha kecil di Australia diketahui bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan unit usaha. Hal ini

diakibatkan oleh walaupun usia perusahaan relatif tua namun jika pimpinan usaha tidak inovatif dan kreatif maka perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan, hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Little 1987, Davidson 1991, dan Tan dan Tay, 1994) di India, Swedia dan di Singapura. Sedang di satu sisi meski umur suatu perusahaan kecil relatif muda (baru berdiri), tetapi jika pengusahanya (*The Manager of Firm*) cukup inovatif dan kreatif maka akan mendorong pertumbuhan unit usaha. Selanjutnya variabel ukuran perusahaan (*Size of firm*) dengan tingkat kepercayaan 5% berpengaruh significant positif terhadap pertumbuhan unit usaha. Penemuan ini juga mendukung hasil penelitian dari Tan dan Tay 1994, Wijewardane dan Cooray 1995) di Singapura dan Jepang. Hal ini dapat dilihat dari data statistik pertumbuhan data skala usaha dari usaha kecil menjadi menengah di masing-masing negara. Kemudian variabel *Export Orientation, Asset Industry* berpengaruh significant positive terhadap pertumbuhan unit usaha.

9. Jaidep Motwani, Thomas dan Dridge, James Jiang and Klas Soderquist (1999)

Managing Innovation in French Small and Medium – Sized Entreprises merupakan topik penelitian yang dilakukan oleh Jaidep Motwani et al. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak inovasi produk, orientasi pemasaran, formulasi strategi efektif terhadap keberhasilan industri kecil menengah (profitabilitas perusahaan). Dengan populasi para eksekutif industri kecil dan menengah di Rhone Alps wilayah Perancis yang terkenal dengankelompok

pengusaha kecil menengah yang berhasil dan yang bergerak di bidang manufaktur, transportasi, komunikasi dan sektor konstruksi.

Dari penelitian diketahui bahwa 60% responden adalah pengusaha kecil dan mempekerjakan karyawan kurang dari 100 orang, penjualan bersih kurang dari 100 Juta Francs. Dan sisanya adalah pengusaha menengah (medium) yang mempekerjakan antara 100 – 500 tenaga kerja dengan jumlah penjualan antara 100 – 500 juta francs Perancis. Dengan alat analisis Multivariat analisis of variance (manovas), diketahui untuk tingkat kepercayaan 5 % tidak ada perbedaan yang signifikan di antara responden usaha kecil dan menengah yang menyatakan harus dianalisis secara terpisah. Kemudian dari hasil analisis diketahui terciptanya produk-produk baru merupakan hasil dari inovasi dan kemampuan inovasi merupakan hasil pelaksanaan pelatihan. penelitian ini mendukung penelitian Deborah Hartman and Tower (1994). Penelitian ini menjelaskan bahwa 49% Pengusaha industri kecil menengah mampu meningkatkan pemasaran hasil produknya setelah adanya inovasi produk baru, teknologi dan penciptaan lingkungan kerja yang baik Kemudian 29% responden berpendapat bahwa adanya pembaharuan merk meningkatkan penjualan produk. Sehingga perusahaan tumbuh berkembang lebih besar.

10. Leo Paul Dana (1999)

Melaporkan hasil penelitiannya tentang upaya Mempertahankan budaya melalui kebijakan pembinaan pemerintah terhadap pengusaha kerajinan tangan di Yunani dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan pemerintah yang disebut EOMEX (suatu organisasi non profit yang didanai oleh

pemerintah Yunani) terbukti mampu mengatasi permasalahan ekonomi dengan cara memasarkan hasil kerajinan tangan (produk seni Yunani di pasar Yunani dan Eropah Utara dan menciptakan peluang perkembangan regional yang sekaligus juga mempertahankan kekayaan budaya Yunani).

Improvisasi yang luas terutama dalam birokrasi dan struktur pajak, masih diperlukan jika ingin pertumbuhan sektor kesenian tetap berjalan. Pembinaan pemerintah melalui EOMEX menyediakan pelayanan untuk mentraining seniman muda dalam berbagai sektor kerajinan di Yunani. EOMEX membantu proyek-proyek kesenian mengoperasikan workshop, melakukan seminar bekerja sama dengan institusi lain terkait dalam mendirikan laboratorium seni di sekolah-sekolah dengan tujuan agar para seniman muda dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pameran, membantu penjualan produk. Kebijakan pembinaan pemerintah dalam membina pengusaha kerajinan di Yunani berpengaruh terhadap perkembangan industri kerajinan tangan di Yunani.

Populasi penelitian terdiri dari para pengrajin dan para seniman di Yunani. Kerajinan tangan di Yunani adalah bagian terpenting dari kebudayaan nasional dan pemeliharaan budaya tersebut dilakukan melalui kerangka kebijakan pembinaan khusus pemerintah.

11. Moeljadi (1999)

Melakukan penelitian tentang pengaruh beberapa faktor internal perusahaan dan asistensi pemerintah terhadap kinerja industri kecil di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel internal yaitu pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja dan pengalaman usaha akan dapat membentuk jiwa

wirusaha dan identitas budaya. Dan variabel-variabel tersebut secara langsung dapat membentuk kemampuan usaha. Pengaruh langsung diklat terhadap kinerja berpengaruh negatif. Karakteristik perusahaan yang ditunjukkan oleh indikator lamanya berdiri, bentuk usaha yang turun temurun, letak geografis, wilayah kerja, banyaknya unit usaha dan kepemilikan hak paten yang secara langsung telah terkait dengan pencapaian kinerja. Faktor dominan yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan usaha.

Sedang asistensi/pendampingan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja industri kecil. Populasi penelitian adalah perusahaan yang mempunyai karakteristik; produknya sensitif terhadap permintaan, manufaktur dan pemilik bertindak sebagai operator yang berjumlah 563 buah di daerah Jawa Timur. Pengambilan sampel menggunakan *Systematic Random Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 248 pengusaha dan diambil secara proporsional dari dua kelompok pengusaha yaitu pengusaha yang mendapat asistensi dan yang tidak mendapat asistensi dari pemerintah.. Teknik analisis menggunakan teknik jalur (multiple regression – path technic).

12. Murp, F. B. Aji (1999)

Meneliti tentang pengaruh kebijakan pembinaan pemerintah/ BUMN/ P/D berupa (Kemitraan, kemampuan majaerial, pendidikan, teknologi, kewirausahaan, aliran informasi pasar, keterampilan teknis sebagai variabel bebas) terhadap Kinerja UKM (Variabel terikat) di Indonesia. Dalam makalah yang disampaikan pada seminar Small and Medium Enterprises Development in Indonesia yang diselenggarakan bersama ADB, ILO, Bappenas World Bank di Hotel Borobudur

tanggal 8-9 Desember, 1999 . Penelitian dilakukan pada pengusaha industri kecil yang ada dilingkungan sentra potensial/komoditi andalan dengan metode yang digunakan stratified random sampling. Alat analisis untuk masalah adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis, secara serempak seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja usaha Kecil di lingkungan sentra. Sedang variabel modal, pendidikan, kemitraan usaha, kemampuan manajerial berpengaruh dominan.

13. Premaratne, S.P, (1999)

Melaporkan hasil penelitiannya dalam *Journal of Small Business Management* Vol, 37 No 1, Januari 1999, tentang hubungan antara pembinaan pemerintah melalui bantuan keuangan, informasi dan non material, kewirausahaan dan hubungan sumber bahan baku terhadap kinerja usaha industri kecil di Srilanka.

Hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara variabel kewirausahaan, bantuan modal, non bahan baku, dan informasi secara bersama-sama terhadap kinerja usaha industri kecil di Srilanka. Secara parsial bantuan modal, hubungan bahan baku berpengaruh signifikan. Populasi terdiri dari pengusaha industri kecil di Srilanka dengan jumlah sampel 303 pengusaha.

14. Susan Hart and Nocolaos Tzigas (1999)

Judul penelitian yang dilakukan oleh Susan Hart dan Nocolaos Tzigas (1999) yaitu *The Impact of Consulting Service of Spanis Firms* bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari konsultan pendamping/penyuluhan terhadap eksistensi usaha menengah di Spanyol yang mempekerjakan antara 50-250 pekerja. Dengan

populasi sebanyak 1.000 pengusaha menengah yang bergerak di bidang distributor yang menggunakan jasa tenaga pendamping/penyuluh dalam melakukan kegiatan usaha.

Melalui alat analisis Test Chi Squared Mentel Haenzels dan pearson diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara jasa tenaga pendamping terhadap kecakapan para karyawan dalam aktivitas bisnis. Dari total responden sebanyak 50% menagatakan keberhasilan usaha menengah di Spanyol didukung oleh jasa para tenaga pendamping/penyuluh. Adapun menurut hasil penelitian jasa yang banyak dibutuhkan oleh respondent sebagai pengusaha menengah adalah penyuluhan dan bimbingan di bidang; (1) Organisasi, (2) Peningkatan kualitas, (3) pemasaran, (4) dan strategi usaha. Diketahui bahwa tenaga pendamping/penyuluh dari luar perusahaan dalam frekuensi tertentu sangat mendukung keberhasilan usaha.pendapatan). namun demikian penggunaan konsultan pendamping harus benar-benar yang memiliki kompetensi di bidangnya.Penelitian Hart mendukung penelitian yang dilakukan oleh *Assosiation Terrciario avnzado Dela Comunidad Valenciane* (1987).

15. William Cole (1999)

Melaporkan hasil penelitiannya tentang pengaruh kemitraan usaha terhadap kinerja Klaster di Philipina. Bahwa kemitraan dalam investasi, teknologi, jalur informasi, dan kemitraan bisnis secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja klaster di Philipina, model kemitraan teknologi dan jalur informasi berpengaruh dominan. Alat analisis yang digunakan analisis regresi.

Populasi dan sampel adalah para pengusaha/pemilik industri kecil kerajinan, garment, embroydery, curtain sebanyak 130 pengusaha.

16. Zainimar Naro. R (2000)

Melaporkan hasil penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pengrajin dan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil bordir di Jawa Timur. Dari hasil penelitian melalui analisis faktor dari 44 faktor variabel bebas, 17 faktor yaitu; gaji, modal saat ini, volume penjualan per bulan, penerangan ruangan kerja, harga mesin baru, lama produksi per satuan, organisasi perusahaan, jumlah mesin, fasilitas yang dimiliki, asal pengrajin, tingkat pendidikan, jumlah mesin lama, kedisiplinan kerja, upah persatuan, motivasi mendirikan berusaha, tunjangan perbulan, sirkulasi udara di ruangan kerja secara bersama-sama (F hitung) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pengrajin (Y_1). Melalui uji t (secara parsial) terdapat dua variabel berpengaruh nyata terhadap pendapatan pengrajin yaitu faktor modal dan organisasi perusahaan. Untuk mengetahui pengaruh industri kecil terhadap penyerapan tenaga kerja (Y_2), melalui uji F diketahui bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dan uji t (secara parsial) diketahui terdapat dua variabel bebas yaitu modal dan fasilitas yang dimiliki pengusaha berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan uji t (parsial) disimpulkan bahwa faktor modal berpengaruh dominan terhadap peningkatan pendapatan pengrajin (Y_1) maupun terhadap penyerapan tenaga kerja (Y_2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah modal yang dimiliki pengusaha maka semakin besar pula kemampuan untuk

meningkatkan pendapatan dan semakin besar pula kemampuan untuk menyerap tenaga kerja.

Oleh karena itu faktor modal merupakan hal penting terhadap peningkatan pendapatan para pengrajin industri kecil bordir dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah pengrajin Industri kecil bordir di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sampel 360 pengrajin dan analisis yang digunakan yaitu analisis faktor dan regresi linear berganda. Industri kecil bordir di Provinsi Jawa Timur *memiliki keterkaitan ke belakang (backward lincage) lebih kuat dibandingkan keterkaitan ke depan (forward lincage)*.

17. Alison Morison, John Breen and Sammeem Ali (2003)

Alison Morison dengan Judul penelitian *Small Business Growth Intention Ability and Opportunity*, meneliti hubungan antara Tujuan usaha, Kemampuan dan Kesempatan (*sebagai variabel bebas*) terhadap pertumbuhan usaha kecil (*Small Business Growth*) (*sebagai variabel terikat*). Dengan cara deskriptif diketahui bahwa pertumbuhan (*pro-growth*) digambarkan oleh peningkatan penggunaan tenaga kerja, peningkatan jumlah dan nilai penjualan, peningkatan jumlah produksi peningkatan perputaran uang (Aus \$), format usaha (*manufacturing Strukture*) Akses pasar (*market Acces*), dipengaruhi oleh kemampuan usaha (*ability*). Dari hasil survei melalui pengiriman kuesioner terhadap 3.570 pengusaha kecil yang ditanggapi oleh 407 pengusaha kecil (12,1%) dari total kuesioner yang dikirimkan kepada para pengusaha kecil di kota besar Marybirnong Australia diperoleh jawaban bahwa untuk meningkatkan kemampuan usaha diperlukan pelatihan.

Dijelaskan bahwa dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan kemampuan manajerial sehingga akan meningkatkan keberhasilan dan pertumbuhan unit usaha. Dari hasil penelitian juga diketahui setelah mereka selesai mengikuti pelatihan dan bekerja (setelah 12 bulan) maka pendapatan dan pertumbuhan usaha meningkat 10% dibandingkan sebelum pelatihan di kota besar Marybirnong Australia.

Di samping peningkatan pertumbuhan unit usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja juga meningkat sebesar 50% dari total tenaga kerja yang dipekerjakan sebelumnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mazzarol, (2000), Carter *et al.*, (2000), Maki dan Pukkinem (2000).

18. Djumilah Zain, Tulus Rahayu, Agung Yuniarinto (2005)

Penelitian dengan judul Analisis Struktural Industri terhadap daya saing industri kerajinan Kuningan Juwana Pati-Jawa Tengah dilakukan oleh Djumilah Zain et al. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh difrensiasi produk, kebutuhan modal, jumlah pesaing, pertumbuhan industri, hambatan pengunduran diri, penurunan harga, mutu yang tinggi, produk substitusi dan pemasok (sebagai variabel bebas) terhadap daya saing usaha (pertumbuhan sebagai variabel terikat).

Dari hasil penelitian diketahui dengan menggunakan alat analisis metode Simultan (*Independent Together*) dan metode Step Wise (stepwise method) diketahui terdapat empat variabel yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan daya saing industri kerajinan kuningan di Juwana yaitu; permodalan, jumlah pesaing, penurunan harga dan peningkatan mutu. Dijelaskan bahwa modal

merupakan salah satu aspek penting pertumbuhan dan perkembangan perusahaan industri kecil kuningan. Dan khususnya perusahaan-perusahaan kecil yang sulit mendapatkan modal maka hendaknya pemerintah memberikan dukungan bantuan pembinaan permodalan agar industri kecil dapat tumbuh dan berkembang.

Untuk lebih jelasnya uraian tentang tinjauan hasil penelitian terdahulu disajikan dalam peta teori pada lampiran satu.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu seperti diutarakan di atas, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Duabelas penelitian yang disebutkan di atas menggunakan kinerja usaha sebagai variabel terikat. Sedang penelitian no 16 menggunakan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat dan variabel antara pendapatan pengusaha.
Kemudian penelitian no. 6, 7, 8, 17, 18 menggunakan struktur pertumbuhan unit usaha sebagai variabel terikat sedang variabel kinerja usaha merupakan variabel antara.
- b. Seluruh penelitian di atas tidak ada yang menggunakan alat analisis menggunakan Struktural Equation Model. Tetapi menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda sebagai analisis statistiknya, dan sebagian dengan pendekatan kualitatif.
- c. Enam penelitian yaitu no. 3, 5, 10, 11, 12, 13 menggunakan kebijakan pembinaan pemerintah sebagai variabel bebas, sedang 12 peneliti lainnya campuran antara pembinaan pemerintah dengan institusi lain sebagai variabel bebas.

Di samping persamaan dalam penelitian ini terdapat juga perbedaan yaitu:

- a. Jumlah dan jenis variabel bebas
- b. Waktu, tempat dan objek penelitian, meski yang diteliti sama sama industri kecil menengah namun berbeda dalam kelompok komoditi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah IK Penggerak Ekonomi Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Penelitian terhadap Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah terhadap Industri Mikro Kecil dilakukan sebelum terjadinya otonomi daerah di mana fungsi pemerintah dan cara pembina teknis yang dilakukan sangat berbeda dengan pembinaan yang dilakukan setelah era otonomi daerah.
- d. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel terikat yaitu, kinerja usaha IK Penggerak Ekonomi Daerah, dan perkembangan struktur usaha.
- e. Alat analisis statistik yang digunakan adalah SEM (*Structural Equation Model*).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang pengaruh tata kelola pembinaan terhadap IK-PED perlu dikaji lebih mendalam karena memiliki perbedaan-perbedaan prinsip dari hasil yang diperoleh oleh para peneliti terdahulu. Disatu pihak terdapat peneliti yang menyatakan bahwa kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif seperti yang dilaporkan oleh Abdul Manan. Dikatakan bahwa program asistensi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja industri kecil di Provinsi Jawa Timur.

Hal ini boleh terjadi karena kebijakan pembinaan pemerintah sebelum otonomi daerah masih bersifat generalis artinya bahwa program pembinaan sama untuk semua komoditi industri kecil tanpa membedakan tempat dan komoditi

(kelompok usaha). Sedang kebijakan pemerintah untuk pembinaan industri kecil setelah otoda sudah berbeda yaitu *bottom up* bukan *top down* seperti sebelumnya.

Atas dasar kajian penelitian terdahulu, maka peneliti mencoba mengadakan studi tentang Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah terhadap Kinerja, dan perkembangan Struktur Usaha Sub Sektor Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

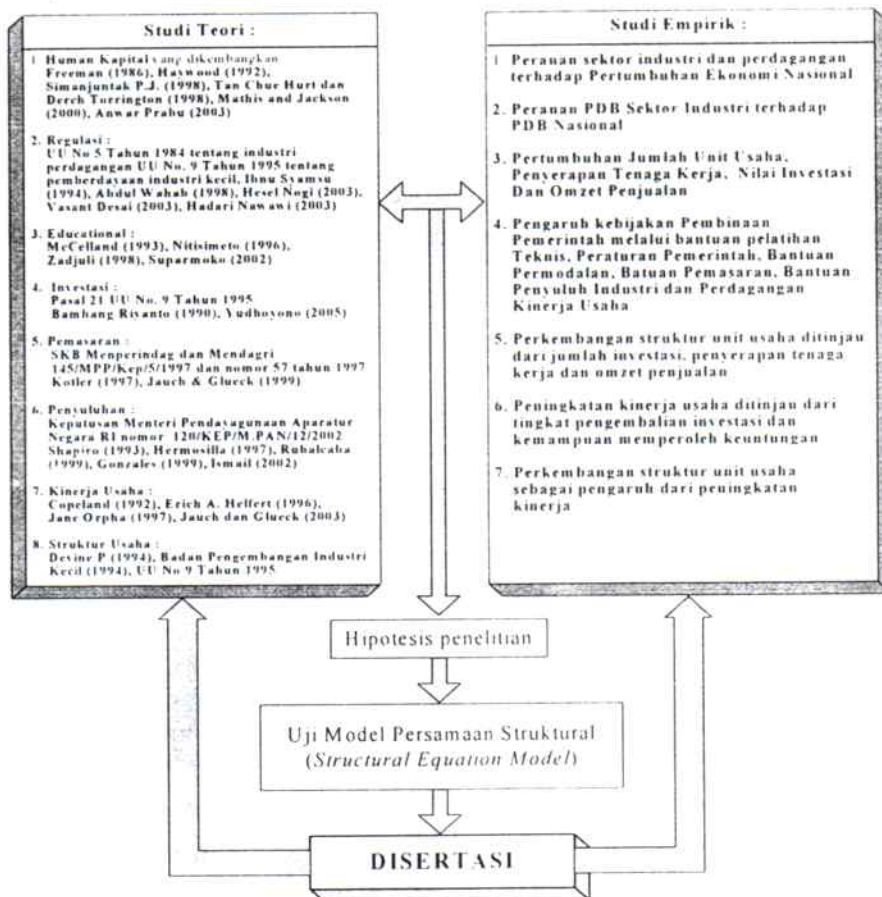
Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan kebijakan pembinaan industri kecil yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya pola atau model pembinaan pemerintah yang lebih mantap untuk mengembangkan industri mikro kecil menengah penggerak ekonomi daerah di provinsi Sumatera Utara khususnya dan industri nasional umumnya.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, tujuan studi dan tinjauan kepustakaan, disusun kerangka proses berfikir dan kerangka konseptual seperti pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 sebagai berikut :



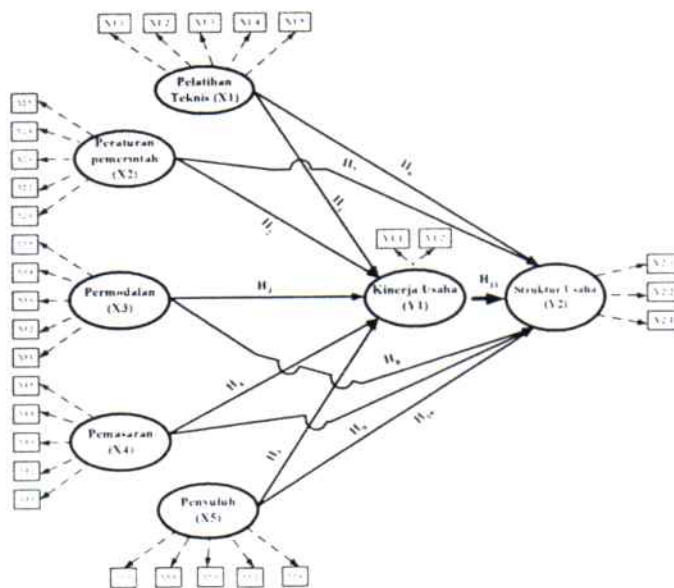
Gambar 3.1
KERANGKA PROSES BERPIKIR

Berdasarkan sintesa studi teori dan studi empirik diharapkan dapat disusun beberapa konsep yang digunakan dalam melakukan analisis hasil studi dalam penelitian. Teori adalah suatu konsep yang dapat digunakan sebagai landasan

berpikir secara deduktif, untuk mengetahui hal-hal yang bersifat universal yang bisa diterapkan kepada hal yang bersifat spesifik. Sedangkan studi empiris dapat digunakan sebagai landasan berfikir secara induktif, untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus yang dapat diterapkan pada hal-hal yang bersifat universal.

Berdasarkan kedua studi tersebut maka dapatlah disusun suatu rumusan hipotesis yang akan dapat diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis yang diuji berdasarkan tes kuantitatif yang relevan sehingga hipotesis yang telah teruji kebenarannya akan menjadi temuan baru dan akan menjadi konsep disertasi. Temuan-temuan berupa teori baru akan memperkaya teori yang telah digunakan, dan hasil studi ini akan memperkaya hasil penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kerangka proses berpikir di atas dapat disusun kerangka konseptual seperti pada Gambar 3.2.



Keterangan □ = indikator variabel ○ = variabel laten - - - - - = dihentikan → = mempengaruhi

Keterangan selanjutnya dapat dilihat pada table 3.1 halaman 124

Gambar 3.2
KERANGKA KONSEPTUAL

Tabel 3.1
IDENTIFIKASI VARIABEL

Nama variabel		Indikator (notasi)
Eksogen	Tata Kelola Pembinaan Pemerintah (X) yang terdiri dari :	
	Pelatihan Teknis (X1)	Mutu program pelatihan (X1.1)
		Metode Pelatihan (X1.2)
		Perubahan perilaku pengusaha (X1.3)
		Kompetensi para Instruktur (X1.4)
		Hasil pencapaian tujuan pelatihan (X1.5)
	Peraturan pemerintah (X2)	Mekanisme penerbitan izin sesuai dengan prosedur (X2.1)
		kejelasan (kejujuran) petugas memberikan keterangan tentang biaya pengurusan penerbitan izin (X2.2)
		Jangka waktu pengurusan izin (X2.3)
		Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi (X2.4)
		Kemampuan pemahaman petugas mengenai peraturan penerbitan izin (X2.5)
	Permodalan (X3)	Akses sumber bantuan modal (X3.1)
		Besarnya bantuan modal (X3.2)
		Jangka waktu pengembalian (X3.3)
		Variasi/jenis modal (X3.4)
		Persyaratan administratif yang diperlukan (X3.5)
	Pemasaran (X4)	Realisasi jumlah dana bantuan promosi (X4.1)
		Pemberian bantuan pameran (X4.2)
		Penyebaran informasi harga dalam negeri (X4.3)
		Keakuratan informasi harga mutu dan permintaan barang dari importir di luar negeri (X4.4)
		Akses pasar luar negeri (X4.5)
	Penyuluh Indag (X5)	Metode penyuluhan (X5.1)
		Kompetensi para tenaga penyuluh (X5.2)
		Pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha (X5.3)
		Perubahan perilaku para pengusaha (X5.4)
		Ketanggapan tenaga penyuluh terhadap masalah bisnis (X5.5)
Endogen	Kinerja Usaha (Y1)	Rasio Laba Usaha terhadap hasil penjualan sebelum dan sesudah dibina (Y1.1)
		Rasio Laba Usaha terhadap total investasi sebelum dan sesudah dibina (Y1.2)
	Struktur Usaha (Y2)	Persentase pertumbuhan investasi sebelum dan setelah dibina (Y2.1)
		Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah dibina (Y2.2)
		Persentase peningkatan jumlah omzet penjualan (Y2.3)

3.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan studi dan kerangka konseptual, disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.
2. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.
3. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.
4. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.
5. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.
6. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan struktur unit usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.

7. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan struktur unit usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.
8. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.
9. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.
10. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.
11. Kinerja usaha berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah terhadap Kinerja dan Perkembangan Struktur Unit Usaha pada Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu untuk menjawab masalah yang dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai, dan hipotesis yang akan dibuktikan berdasarkan informasi/data kuantitatif yang diperoleh dari data hasil pengukuran, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu penelitian dengan mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data utama (Singarimbun, 1989: 3).

Pada umumnya terdapat tiga tipe dalam penelitian sosial, yaitu penelitian eksploratif (*explorative research*), penelitian deskriptif (*descriptive research*), dan penelitian penjelasan (*explanatory research*).

Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Faktor-Faktor Kebijakan Pembinaan Pemerintah terhadap Kinerja dan Perkembangan Struktur Unit Usaha, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian explanatori (*explanatory research*) yaitu suatu penelitian untuk mencari dan menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis (Nazir; 1988). Selain itu penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, karena mengutarakan beberapa penjelasan secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang hendak

diteliti yaitu variabel Kebijakan Pembinaan Pemerintah, Kinerja dan variabel Perkembangan Struktur Unit Usaha.

4.2. Populasi dan Sampel

4.2.1 Populasi

Populasi adalah kelompok yang diamati dalam penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Hal senada juga dikatakan oleh Christensen *et.al.*, (1992:8) Populasi adalah "a complete set of observation...". Tentang sampel Christensen (1992:9) menyatakan sampel merupakan bagian dari populasi atau merupakan sub kelompok yang mewakili populasi yang diteliti. Dalam penelitian tidak perlu menggunakan semua individu dalam populasi sebagai responden, tetapi cukup mengambil sampel yang diharapkan dapat menggambarkan sifat populasi tersebut. Sementara itu Sugiyono (2003:55) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Selanjutnya Hasan (2002:58) mengatakan bahwa populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Berdasarkan ketiga definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang diambil secara lengkap. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah (IK-PED) yang pernah mendapatkan bantuan pembinaan dari pemerintah di Provinsi Sumatera Utara dengan rincian pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
 POSISI JUMLAH UNIT USAHA INDUSTRI KECIL-PED YANG
 SUDAH MENDAPAT BANTUAN PEMBINAAN PEMERINTAH
 DI SUMATERA UTARA TAHUN 2003

No	Unit usaha	Jumlah Unit Usaha
1	Makanan Ringan	843
2	Tenun Gedongan Ulos	1183
3	Pupuk Alam dan Organik	50
4	Genteng	37
5	Kapal kayu atau perahu	43
6	Perhiasan	59
7	Alsintan	253
Total		2468

Sumber : Laporan Proyek IKM SUMUT Tahun 2003 data diolah.

4.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Stratified Sampling* yang dialokasikan secara proporsional atau metode *Stratified Proporsional Sampling* (Sugiyono, 2003:101), karena penentuan besarnya sampel berdasarkan jumlah unit usaha yang berkembang di sentra binaan pemerintah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Menentukan lokasi penelitian yaitu sentra binaan pemerintah.
- 2) Penentuan populasi pada setiap unit usaha.
- 3) Penentuan komoditi yaitu berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- 4) Menentukan responden yaitu manajer (pengusaha) IK-PED yang sudah pernah mendapatkan bantuan pembinaan dari pemerintah.

- 5) Melakukan konsultasi dengan instansi lain di luar Depperindag seperti BPPS untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat pertumbuhan unit usaha IK-PED di provinsi Sumatera Utara.

Industri kecil tersebar di 13 lokasi dengan 7 jenis komoditi yaitu :

- (1) makanan ringan tersebar dan tumbuh di Kabupaten Deli Serdang ;
- (2) tenun gedongan ulos di Kabupaten Tapanuli Utara ; (3) Pupuk Alam dan Organik di Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Daeri ; (4) Genteng di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun ; (5) Kapal Kayu atau perahu di Kota Sibolga dan Tanjung Balai ; (6) Perhiasan tersebar dan tumbuh di Kabupaten Langkat, Tebing Tinggi ; (7) Alsitan dan besi logam tersebar dan tumbuh di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui jumlah populasi sebanyak 2.468 unit usaha. Pada analisis SEM ada kriteria pengambilan sampel yaitu ukuran sampel minimum adalah sebanyak 5 observasi untuk setiap indikator (Augusty Ferdinand, 2002:47). Penelitian ini ada 30 indikator, sehingga jumlah sampel minimal yaitu $5 \times 30 = 150$ responden. Proposisi pengambilan sampel pada setiap strata adalah :

$$\frac{150}{2468} \times 100\% = 6,07 \%$$

Perhitungan sampel pada setiap industri kecil sebagai berikut :

1. Makanan Ringan : $843 \times \frac{150}{2468} = 51$ responden
2. Tenun Gedongan Ulos : $1183 \times \frac{150}{2468} = 72$ responden
3. Pupuk alam organik : $50 \times \frac{150}{2468} = 3$ responden

4. Genteng : $37 \times \frac{150}{2468} = 2$ responden
5. Kapal kayu atau perahu : $43 \times \frac{150}{2468} = 3$ responden
6. Perhiasan : $59 \times \frac{150}{2468} = 4$ responden
7. Alsintan : $253 \times \frac{150}{2468} = 15$ responden

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan sampel dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
SAMPel PENELITIAN UNTUK MASING-MASING KOMODITI
STRATA DAN DAERAH USAHA INDUSTRI KECIL-PED
DI SUMATERA UTARA

No	Industri	Jumlah Unit Usaha (N)	Jumlah Sampel (n)	Daerah Pengambilan Sampel
1	Makanan Ringan	843	51	Kab Deli Serdang
2	Tenun Gedongan Ulos	1183	72	Kab Tapanuli Utara
3	Pupuk Alam dan Organik	50	3	Kab. Karo, Labuhan Batu, Dairi
4	Genteng	37	2	Kab. Deli Serdang, Simalungun
5	Kapal kayu atau perahu	43	3	Sibolga, Tanjungbalai
6	Perhiasan emas & perak	59	4	Langkat, Tebing Tinggi
7	Alsintan dari besi /alagam	253	15	Binjai, Kab Langkat
	T o t a l	2468	150	

Sumber : Tabel 4.1 data diolah

Berdasarkan Table 4.2 dapat dirinci pengambilan sampel sebagai berikut :

1. Makanan ringan : pengambilan sampel 51 responden seluruhnya di Kabupaten Deli Serdang.
2. Tenun gedongan Ulos : pengambilan sampel 72 responden seluruhnya di Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Pupuk Alam dan Organik : pengambilan sampel masing-masing 1 responden di Kabupaten karo, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Dairi .
4. Genteng : pengambilan sampel masing-masing 1 responden di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun.
5. Kapal kayu atau perahu: pengambilan sampel 2 responden di Kabupaten Tanjungbalai dan 1 responden di Kabupaten Sibolga.
6. Perhiasan emas dan perak : pengambilan sampel masing-masing 2 responden di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tebing Tinggi.
7. Alsintan dari besi dan logam : pengambilan sampel 10 responden di Kota Binjai dan 5 responden di Kabupaten Langkat.

4.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

4.3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan sejumlah data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer akan dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden yaitu para pengusaha IK-PED yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya untuk melengkapi data sekunder akan dikumpulkan dari beberapa instansi terkait yang berhubungan dengan kebijakan pembinaan pemerintah terhadap IK-PED yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan baik Provinsi, maupun dari tingkat Kabupaten dan Kota Wilayah Sumatera Utara.

Data sekunder di sini merupakan data dan informasi pendukung yang diperoleh dan sudah diolah oleh pihak lain (Nazir, 1988:21). Jenis atau macam data sekunder yang telah dikumpulkan adalah jumlah industri dan jumlah perusahaan yang sudah pernah mendapat bantuan pembinaan dari pemerintah berupa bantuan

pelatihan teknis, peraturan pemerintah, bantuan permodalan, promosi dan pemasaran dan bantuan tenaga penyuluh Indag.

Guna mengadakan *cross-check* kebenaran (*realibilitas dan validitas*) data tentang jumlah penggunaan tenaga kerja, tingkat gaji atau upah dan tingkat profitabilitas, pertumbuhan unit usaha dari masing-masing responden digunakan data primer hasil Sensus Industri 1997 (BPS, 1997). Langkah ini dimaksudkan agar data primer yang dilakukan menjadi lebih meyakinkan tingkat reabilitasnya, sehingga dapat mendukung dalam penarikan kesimpulan.

4.3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan seluruh data dan informasi dari responden, disebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang akan dijawab oleh setiap responden. Di samping itu untuk melengkapi kuesioner tersebut dilakukan wawancara. Dengan demikian seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan lengkap untuk digunakan sebagai bahan dalam melakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Kriteria ini juga merupakan gambaran pengukuran mengenai ketepatan konsep yang dinilai. Informasi yang diambil dalam penelitian ini telah memiliki kesahihan dan kehandalan yang tinggi.

Sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih tajam dan mendalam setiap komponen yang diamati, Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interviews*) untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari kuesioner dan informasi lain yang diperlukan. Wawancara menggunakan pola terstruktur atau terstandar, pertanyaan dengan susunan uraian pertanyaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui kuesioner. Wawancara dan penggunaan

kuesioner dalam penelitian ini dilakukan kepada pengusaha dengan cara mengirimkan kepada calon responden (*mailing questionnaire*) yang telah ditentukan terlebih dahulu sesuai lokasi penelitian.

4.4. Variabel Penelitian

4.4.1. Klasifikasi Variabel

Variabel adalah simbol atau bilangan yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai (Kerlinger, 1990:49). Pengertian lain variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto Suharsini, 1995:96)

Berdasarkan kerangka konseptual gambar 3.2 pada Bab 3 terdapat dua kelompok variabel yaitu konstark eksogen dan konstark endogen. Variabel Konstark Eksogen (*Exogenous Constructs*) dikenal juga sebagai *source variabel* atau *independent variabel* yaitu variabel yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Pada Gambar 3.2 dapat diidentifikasi variabel konstark eksogen yaitu variabel konstark yang dituju oleh garis tebal dengan satu ujung panah. Pada gambar tersebut konstark eksogenous adalah kebijakan pembinaan pemerintah yang terdiri dari bantuan pelatihan teknis, peraturan pemerintah, permodalan, promosi dan pemasaran, bantuan tenaga penyuluh Indag. Dalam penelitian ini yang diidentifikasi sebagai variabel independen (X_n) adalah: variabel Pelatihan, Peraturan Pemerintah, Permodalan, Pemasaran, Tenaga Penyuluh Indag,

Selanjutnya **Variabel Konstark Endogen** (*Endogenous Constructs*) adalah faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstark. Variabel konstark endogen dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya,

tetapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen. Variabel Konstruk Endogen meliputi : variabel Kinerja Usaha, variabel Struktur Pertumbuhan Unit Usaha.

Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Variabel bebas (*Independent variable*) terdiri dari :

- a. Bantuan Pelatihan Teknis (X1)
- b. Kebijakan Peraturan Pemerintah (deregulasi) (X2)
- c. Bantuan Permodalan (X3)
- d. Bantuan Pemasaran (X4)
- e. Bantuan Tenaga Penyuluh Industri dan Perdagangan (Indag) (X5)

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel Terikat (*Dependent Variable*) terdiri dari :

- a. Kinerja Usaha (Y1)
- b. Perkembangan Struktur Unit Usaha (Y2).

4.4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang sesuai dengan kerangka konseptual dalam penelitian ini, didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

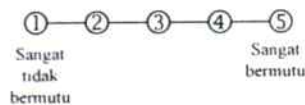
a. Bantuan Pelatihan Teknis (X1)

Pelatihan teknis merupakan kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan pengusaha sebagai upaya meningkatkan kinerja dan Struktur Pertumbuhan Unit Usaha IK-PED. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara

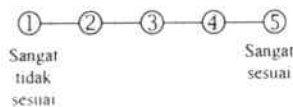
(2003:116), Ismail (2002); Depperindag (2002), keberhasilan suatu pelatihan diukur dengan 5 indikator yang terobservasi (*observed variable*). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran Likert yaitu, skala interval 1 sampai dengan 5 dengan masing-masing pilihan jawaban sesuai dengan pertanyaan.

- 1) Mutu program pelatihan teknis (X1.1) yaitu :

Mutu program dan kesesuaian topik pelatihan dengan kebutuhan peserta (*valueable/realistis*)

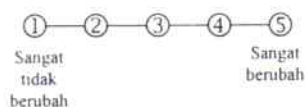


- 2) Kesesuaian metode (sistem) yang digunakan para instruktur (X1.2) yaitu :
metode atau sistem belajar dan pengajaran yang digunakan oleh para instruktur apakah sesuai dan dapat diterima oleh peserta dalam mencapai tujuan pelatihan (*learning*).

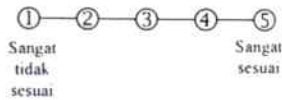


- 3) Perubahan perilaku pengusaha setelah mengikuti pelatihan (X1.3) yaitu :

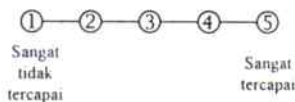
Perubahan atau peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis peserta ke arah yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja setelah mengikuti pelatihan teknis (*behaviour*).



- 4) Kompetensi para instruktur sesuai dengan bidang tugasnya (X1.4) yaitu :
Kesesuaian keahlian dan keterampilan para instruktur untuk mengajarkan materi pelatihan bagi peserta sesuai dengan kurikulum dan silabi yang ditentukan



- 5) Pencapaian tujuan pelaksanaan program pelatihan (X1.5) yaitu :
Hasil akhir pelaksanaan pelatihan sebagaimana ditetapkan sebelumnya yang digambarkan oleh adanya peningkatan kinerja usaha setelah mengikuti pelatihan



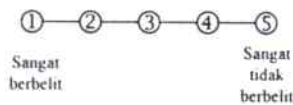
b. Kebijakan Peraturan Pemerintah (X2)

Adalah perizinan yang dikeluarkan pemerintah bagi pengusaha berkaitan dengan jenis dan operasional usaha serta produk yang dihasilkan. Izin-izin tersebut meliputi; Izin Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan. Setiap pengusaha yang memiliki izin-izin tersebut akan bermanfaat sebagai; kepastian hukum (legalitas) usaha, sarana pembinaan, pengawasan dan pemamfaatan fasilitas untuk mendapatkan pembinaan pemerintah dalam rangka mengembangkan kinerja usaha. Menurut Zeitham dalam Ridwan (2003:79) Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 5 indikator. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala

pengukuran Likert yaitu, skala interval 1 sampai dengan 5 dengan masing-masing pilihan jawaban sesuai dengan pertanyaan.

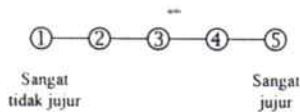
- 1) Mekanisme layanan penerbitan izin sesuai dengan prosedur (X2.1) yaitu :

Layanan yang diberikan oleh petugas kepada pengusaha dalam penerbitan izin yang harus dilalui mekanismenya oleh pemohon mulai dari pengajuan permohonan sampai izin terbit



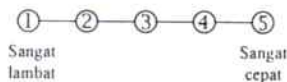
- 2) Kejujuran petugas memberikan keterangan tentang biaya pengurusan penerbitan izin (X2.2) yaitu :

Kejujuran para petugas dalam menjelaskan tentang biaya pengurusan penerbitan izin baik biaya resmi maupun yang tidak resmi yang harus ditanggung oleh pemohon.



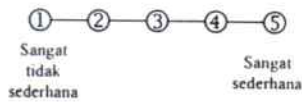
- 3) Jangka waktu pengurusan izin (X2.3) yaitu :

Lamanya waktu, kecepatan proses dan ketepatan pelayanan petugas dalam menerbitkan permohonan izin.



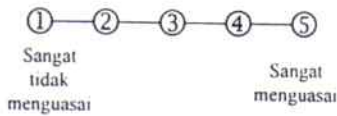
- 4) Kesederhanaan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi (X2.4) yaitu :

Kesederhanaan persyaratan administrasi berupa dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha.



5) Kemampuan petugas menguasai peraturan penerbitan izin (X2.5) yaitu :

Tingkat pengetahuan dan ketrampilan petugas untuk menyelesaikan penerbitan izin sesuai dengan waktu yang ditentukan

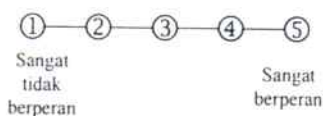


c. Bantuan Permodalan (X3)

Sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah ataupun akses sumber modal bagi pengusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Dengan sejumlah modal yang diperoleh akan mampu mendukung usahanya. Dukungan permodalan untuk meningkatkan kinerja dan struktur pertumbuhan unit usaha, diukur dengan 5 indikator yang terobservasi (*observed variable*). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran Likert yaitu, skala interval 1 sampai dengan 5 dengan masing-masing pilihan jawaban sesuai dengan pertanyaan.

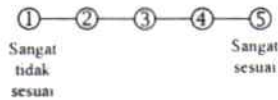
1) Akses sumber bantuan modal (X3.1) yaitu :

Peranan pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk mendapatkan akses sumber bantuan modal yang disalurkan oleh pemerintah bagi pengusaha industri kecil.



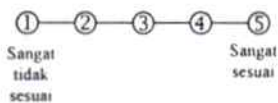
2) Besarnya bantuan modal (X3.2) yaitu :

Kesesuaian realisasi jumlah modal yang disalurkan oleh pemerintah bagi pengusaha dengan kebutuhan



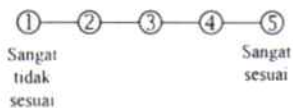
3) Jangka waktu pengembalian (X3.3) yaitu :

Kesesuaian jangka waktu pengembalian pinjaman modal dan bunga (*grace period*) dengan kebutuhan jangka waktu pengolahan sampai dengan hasil produksi dapat dipasarkan



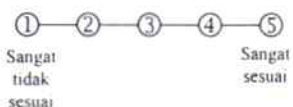
4) Variasi/jenis modal (X3.4) yaitu :

Kesesuaian jenis modal yang diberikan oleh pemerintah dengan kebutuhan pengusaha (investasi, modal kerja).



5) Persyaratan administrasi/proposal (X3.5) yaitu :

Kesesuaian proposal yang diajukan oleh pengusaha dengan persyaratan yang diminta oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah

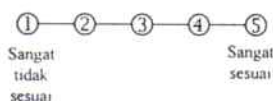


d. Bantuan Pemasaran (X4)

Adalah pembinaan yang dilakukan pemerintah untuk membantu mempromosikan dan memasarkan hasil produksi pengusaha. Di samping bantuan promosi pemerintah juga membantu pengusaha untuk menjual hasil produksi melalui sarana pameran yang dilaksanakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pasar regional dan Internasional. Pembangunan pasar akan membawa keberhasilan usaha (peningkatan usaha). UU Nomor 9 Tahun 1995 dan Home Armstrong (1995) menyatakan bahwa bantuan pemasaran untuk meningkatkan kinerja dan struktur pertumbuhan unit usaha, diukur dengan 5 indikator yang terobservasi (*observed variable*). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran Likert yaitu, skala interval 1 sampai dengan 5 dengan masing-masing pilihan jawaban sesuai dengan pertanyaan.

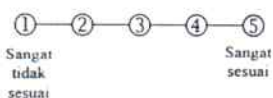
1) Realisasi jumlah bantuan biaya promosi (X4.1) yaitu :

Kesesuaian realisasi bantuan dana pemasaran melalui penyelenggaraan promosi yang disalurkan oleh pemerintah dengan kebutuhan dan harapan pengusaha



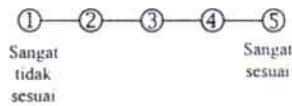
2) Pemberian dana bantuan pameran (X4.2) yaitu :

Kesesuaian bantuan biaya pameran yang disalurkan oleh pemerintah dengan kebutuhan dan harapan pengusaha



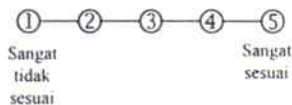
3) Bantuan penyebaran informasi (X4.3) yaitu :

Kesesuaian bantuan dana penyebaran informasi hasil produksi, harga di dalam negeri dengan kebutuhan pengusaha



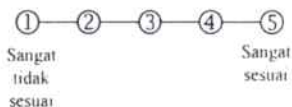
4) Keakuratan informasi (X4.4) yaitu :

Kesesuaian dan keakuratan informasi harga, jumlah, mutu barang. yang yang diberikan oleh pemerintah dengan keinginan para importir di luar negeri



5) Bantuan akses pasar luar negeri (X4.5) yaitu :

Kesesuaian bantuan akses pasar dari pemerintah dengan jangkauan pemasaran hasil produksi ke luar negeri.



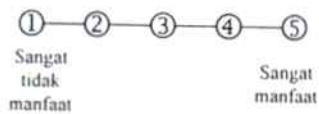
e. Bantuan Penyuluh Industri dan Perdagangan (Indag) (X5)

Tenaga Penyuluh/pendamping Indag adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menperindag untuk melakukan penyuluhan/pendampingan/asistensi bagi pengusaha IK-PED (Kep.Menpan.RI No 20/Kep/M.Pan/12/2002). Tugas tenaga penyuluh Indag adalah untuk melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap IK-PED

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha (binaan). Variabel bantuan tenaga penyuluh Indag merupakan variabel/konstruk laten yang diukur dengan 5 indikator yang terobservasi (*observed variable*) yang dikembangkan oleh (Zeitham dalam Ridwan, 2003; 103). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran Likert yaitu, skala interval 1 sampai dengan 5 dengan masing-masing pilihan jawaban sesuai dengan pertanyaan.

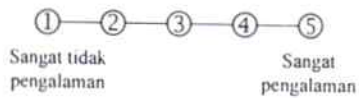
1) Metode penyuluhan (X5.1) yaitu :

Kemanfaatan metode bantuan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha.



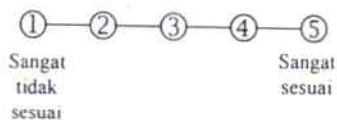
2) Kompetensi penyuluh (X5.2)

Pengalaman tenaga penyuluh Indag dalam melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh/pendamping pengusaha. (*Kompetensi*)



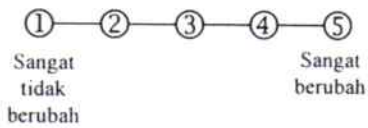
3) Pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha (X5.3) yaitu :

Kesesuaian penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha



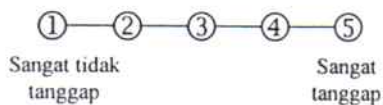
4) Perubahan perilaku para pengusaha (X5.4) yaitu :

Penyuluhan yang diberikan pemerintah dapat merubah perilaku para pengusaha sehingga kinerja usaha dapat meningkat



5) Ketanggapan tenaga penyuluh terhadap masalah bisnis (X5.5) yaitu :

Tenaga penyuluh Indag senantiasa tanggap terhadap masalah bisnis dan menyelesaikannya dengan tuntas



f. Kinerja Usaha (Y1)

Prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan sebagai pencerminan kemampuan pengusaha untuk mendapatkan laba setiap tahun. Indikator kinerja usaha dapat dilihat dari pencapaian penjualan dan jumlah biaya yang digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan rumus (Jauch dan Gluech, 2003):

- 1) Return on Sales (ROS), yaitu ratio Laba Usaha terhadap hasil penjualan (Y1.1).

$$\frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Hasil Penjualan}} \times 100\%$$

- 2) Return On Investment (ROI) yaitu Rasio Laba Usaha terhadap Total Investasi (Y1.2)

$$\frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Total Investasi}} \times 100\%$$

g. Perkembangan Struktur Unit Usaha (Y2)

Adalah gambaran perubahan strata (struktur) industri dari kelompok industri mikro menjadi industri kecil. Indikator perkembangan struktur unit usaha diukur dengan (Disperindag, 2000 ; Manan 1999 ; Alison Morson, 1999) :

- 1) Persentase pertumbuhan jumlah investasi (Y2.1).

$$\frac{\text{Investasi sesudah dibina} - \text{Investasi sebelum dibina}}{\text{Investasi sesudah dibina}} \times 100\%$$

- 2) Persentase pertumbuhan penyerapan tenaga kerja (Y2.3)

$$\frac{\text{Penyerapan tenaga kerja sesudah dibina} - \text{Penyerapan tenaga kerja sebelum dibina}}{\text{Penyerapan tenaga kerja sesudah dibina}} \times 100\%$$

- 3) Persentase pertumbuhan jumlah omzet penjualan (Y2.4)

$$\frac{\text{omzet penjualan sesudah dibina} - \text{omzet penjualan sebelum dibina}}{\text{omzet penjualan sesudah dibina}} \times 100\%$$

4.4.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Dalam kuesioner terdapat sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden sesuai dengan hal-hal yang diketahui dengan demikian akan diperoleh data dan informasi tentang kebijakan bantuan pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran, penyuluhan, kinerja usaha dan perkembangan struktur unit usaha. Kemudian dalam melengkapi kuesioner tersebut akan dilakukan wawancara.

Data deskriptif dan data yang diperlukan untuk pengujian hipotesis dikumpulkan sedemikian rupa, dan disusun berdasarkan konstruk teoritik (mendasarkan penelitian terdahulu). Item pertanyaan berbentuk interval dan ordinal dengan model kuesioner yang bersifat tertutup dan terbuka. Dalam menjawab item

yang berkaitan dengan derajat atau kecenderungan beberapa variabel dan sub-variabel dalam penelitian ini seperti diutarakan sebelumnya, digunakan pertanyaan bentuk Likert dan format tipe skala Likert untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan pertanyaan yaitu (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju). (Babbie, 1979:118). Dengan pemberian skala akan ditentukan penentuan skala skor pada setiap pertanyaan dari responden. Kemungkinan mendapatkan skor terkecil adalah 1 dan skor terbesar adalah 5 atau sebaliknya. Semua pengukuran variabel terutama yang menyangkut data interval digunakan kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya.

4.4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Tes instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut sesuai dengan alat ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas *internal* yang menggunakan analisis item dengan metode korelasi *Product Moment Pearson*. Metode ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item (Hadi, 1991:30). Adapun rumus korelasi Product Moment Pearson adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n(\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

Keterangan :

Y adalah skor total

X adalah skor per item

n adalah besar sampel.

Syarat signifikan suatu butir dalam mengukur validitasnya menurut Sutrisno Hadi (1991:22) dengan dua syarat yaitu: (1) korelasi antara butir dan faktor harus positif, dan (2) peluang atau *probability* dari korelasi maximum 5% ($p < 0,05$)

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi data yang diperoleh (Indriantoro dan Supomo, 1999:18). Realibilitas suatu data dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu; (1) pendekatan stabilitas (2) koefisien ekuivalensi dan (3) konsistensi internal. Dalam penelitian ini akan digunakan konsistensi internal dengan teknik *Cronbach alpha* karena karakteristik data tidak bersifat dekotomi. Menurut Sekaran (2000:287) bahwa hasil uji realibilitas dengan koefisien alpha 0,80 sampai dengan 1 dinyatakan baik, koefisien alpha 0,60 sampai dengan 0,70 dinyatakan realibilitasnya diterima, sedangkan koefisien alpha 0,60 ke bawah kurang realibel.

4.5 Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian serta pengujian hipotesis yang diajukan, maka seluruh data dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan analisis. Untuk kepentingan pembahasan, data diolah dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip statistik deskriptif. Kemudian untuk kepentingan analisis dan pengujian hipotesis digunakan pendekatan statistik inferensial

Analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktur atau *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan paket program Amos 4,0 dan SPSS versi 13.0.

Structural Equation Model (SEM) adalah teknik *multivariate* yang mengkombinasikan aspek-aspek *multiple regression* (menguji hubungan saling ketergantungan) dan *faktor analysis* (menunjukkan konsep-konsep tak terukur faktor dengan banyak variabel) untuk mengestimasi hubungan saling ketergantungan secara simultan (Hair *et al.*, 1998). SEM menganalisis struktur kovarian yang terdiri dari dua bagian, yaitu model pengukuran (*measurement model*) dan model persamaan struktural (*structural model*) (Cooper and Emory, 1995 dan Hair *et al.*, 1998). Hair *et al.*, (1998) mengungkapkan bahwa model pengukuran adalah sub model dalam SEM yang menetapkan indikator untuk setiap konstruk dan menilai realibilitas setiap konstruk untuk mengestimasi hubungan kausal.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian multidimensi dengan menggambarkan fenomena praktis yang diamati dalam berbagai dimensi atau

indikator. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mampu dalam mengakomodasi penelitian multidimensi maka peneliti menggunakan analisis statistik pemodelan persamaan struktural (*Structural Equation Model = SEM*). Pada prinsipnya didalam SEM adalah ingin menganalisis hubungan kausal antar variabel exogen dan endogen yang menunjukkan adanya perubahan nilai dari suatu variabel akan menghasilkan perubahan dari variabel lain, di samping itu juga dapat sekaligus untuk memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen penelitian (Solimun, 2003:72)

Model SEM ada yang menyebutnya dengan *Linear Structural Relation* (LISREL) merupakan pendekatan yang terintegrasi antara Analisis Faktor, Model Struktural, dan Analisis Path, dengan melakukan tiga kegiatan secara serempak, yaitu pemeriksaan validitas dan realibilitas instrumen (setara dengan analisis konfirmatori), pengujian model hubungan antar variabel laten (setara dengan analisis path), dan mendapatkan model yang bermanfaat untuk perkiraan (setara dengan model struktural dan analisis regresi) (Solimun, 2003:66).

Menurut Hair *et al.*, (1998), ada tujuh langkah yang harus dilakukan apabila menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* yaitu :

1. Pengembangan model teoritis.

Langkah pertama prinsipnya merupakan pengujian kausalitas secara empiris dari teori yang sudah ada dan digunakan untuk mengkonfirmasi model teoritis melalui data empirik.

2. Pengembangan diagram jalur (*Path Diagram*).

Langkah kedua menunjukkan model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama akan digambarkan dalam sebuah diagram alur hubungan antara

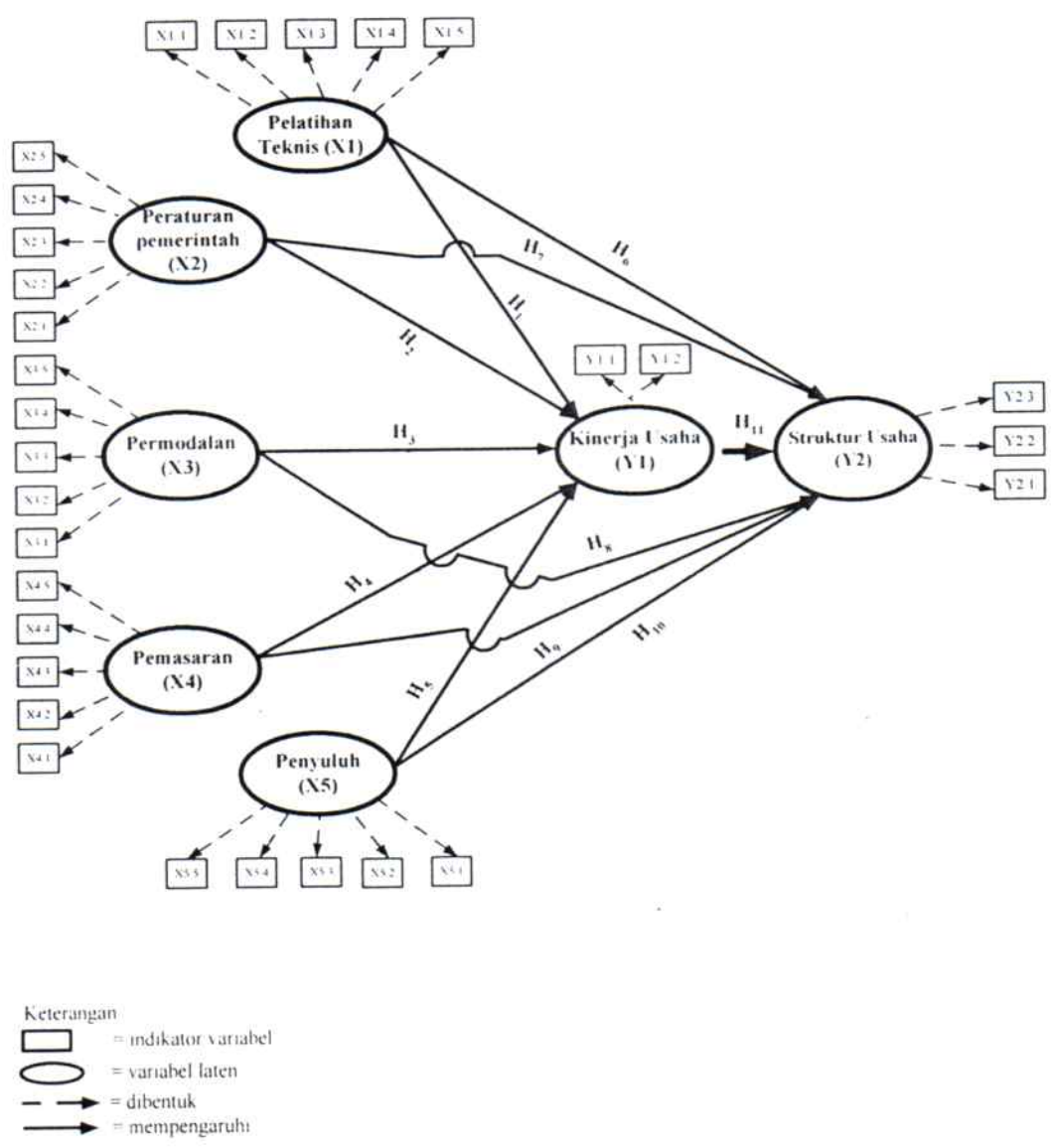
konstrak akan dinyatakan melalui anak panah. Anak panah yang lurus akan menunjukkan sebuah hubungan kausal yang langsung antara satu konstrak dengan konstrak yang lain sedangkan garis lengkung antar konstrak dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antar konstrak. Konstrak yang dibangun dalam diagram alur dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu : Konstrak eksogen (*exogenous constructs*) dan konstrak endogen (*endogenous construct*).

3. Konversi diagram path kedalam persamaan struktural dan model pengukuran.

Langkah ketiga menjelaskan bahwa persamaan yang didapatkan dari diagram alur yang telah dikonversi terdiri dari :

- a. Persamaan struktural (*structural equation*) yang dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstrak. Hubungan antar konstruk pada penelitian ini yaitu : pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh terhadap kinerja usaha dan perkembangan struktur usaha.
- b. Persamaan spesifik model pengukuran (*measurement models*) dengan menentukan variabel yang mengukur konstrak dan matriks yang menunjukkan korelasi menjadi hipotesis antar konstrak atau variabel.

Diagram jalur dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.1
DIAGRAM JALUR MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL

Diagram jalur di atas dikonversi ke dalam persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan pengukuran konstruk eksogen dan endogen :

Tabel 4.3
PERSAMAAN PENGUKURAN KONSTRUK ESKOGEN DAN ENDOGEN
DAN PERSAMAAN KAUSALITAS

Konstruktif eksogen			
Pelatihan	Peraturan Pemerintah	Permodalan	Pemasaran
$X_{1.1} = \lambda_{1.1} X_1 + \varepsilon_{1.1}$	$X_{2.1} = \lambda_{2.1} X_2 + \varepsilon_{2.1}$	$X_{3.1} = \lambda_{3.1} X_3 + \varepsilon_{3.1}$	$X_{4.1} = \lambda_{4.1} X_4 + \varepsilon_{4.1}$
$X_{1.2} = \lambda_{1.2} X_1 + \varepsilon_{1.2}$	$X_{2.2} = \lambda_{2.2} X_2 + \varepsilon_{2.2}$	$X_{3.2} = \lambda_{3.2} X_3 + \varepsilon_{3.2}$	$X_{4.2} = \lambda_{4.2} X_4 + \varepsilon_{4.2}$
$X_{1.3} = \lambda_{1.3} X_1 + \varepsilon_{1.3}$	$X_{2.3} = \lambda_{2.3} X_2 + \varepsilon_{2.3}$	$X_{3.3} = \lambda_{3.3} X_3 + \varepsilon_{3.3}$	$X_{4.3} = \lambda_{4.3} X_4 + \varepsilon_{4.3}$
$X_{1.4} = \lambda_{1.4} X_1 + \varepsilon_{1.4}$	$X_{2.4} = \lambda_{2.4} X_2 + \varepsilon_{2.4}$	$X_{3.4} = \lambda_{3.4} X_3 + \varepsilon_{3.4}$	$X_{4.4} = \lambda_{4.4} X_4 + \varepsilon_{4.4}$
$X_{1.5} = \lambda_{1.5} X_1 + \varepsilon_{1.5}$	$X_{2.5} = \lambda_{2.5} X_2 + \varepsilon_{2.5}$	$X_{3.5} = \lambda_{3.5} X_3 + \varepsilon_{3.5}$	$X_{4.5} = \lambda_{4.5} X_4 + \varepsilon_{4.5}$
Konstruktif eksogen		Konstruktif endogen	
Penyuluh Indag	Kinerja Usaha	Perkembangan Struktur Usaha	
$X_{5.1} = \lambda_{5.1} X_5 + \varepsilon_{5.1}$	$Y_{1.1} = \lambda_{26} Y_1 + \varepsilon_{26}$	$Y_{2.1} = \lambda_{28} Y_2 + \varepsilon_{28}$	
$X_{5.2} = \lambda_{5.2} X_5 + \varepsilon_{5.2}$	$Y_{1.2} = \lambda_{27} Y_1 + \varepsilon_{27}$	$Y_{2.2} = \lambda_{29} Y_2 + \varepsilon_{29}$	
$X_{5.3} = \lambda_{5.3} X_5 + \varepsilon_{5.3}$		$Y_{2.3} = \lambda_{30} Y_2 + \varepsilon_{30}$	
$X_{5.4} = \lambda_{5.4} X_5 + \varepsilon_{5.4}$			
$X_{5.5} = \lambda_{5.5} X_5 + \varepsilon_{5.5}$			

Persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y_1 = \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \gamma_3 X_3 + \gamma_4 X_4 + \gamma_5 X_5 + \zeta_1$$

$$Y_2 = \gamma_6 X_1 + \gamma_7 X_2 + \gamma_8 X_3 + \gamma_9 X_4 + \gamma_{10} X_5 + \zeta_2$$

$$Y_2 = \beta Y_1 + \zeta_2$$

Keterangan :

X_1 = konstruk pelatihan

X_2 = konstruk peraturan pemerintah.

$X_{1.1} \dots X_{1.5}$ = indikator pelatihan

$X_{1.1} \dots X_{1.5}$ = indikator peraturan pem

$\lambda_{1.1} \dots \lambda_{1.5}$ = faktor loading pelatihan

$\lambda_{2.1} \dots \lambda_{2.5}$ = faktor loading PP

$\varepsilon_{1.1} \dots \varepsilon_{1.5}$ = error indikator pelatihan

$\varepsilon_{2.1} \dots \varepsilon_{2.5}$ = error indikator PP

X_3 = konstruk permodalan

X_4 = konstruk pemasaran

$X_{3.1} \dots X_{3.5}$ = indikator permodalan

$X_{4.1} \dots X_{4.5}$ = indikator pemasaran

$\lambda_{3.1} \dots \lambda_{3.5}$ = faktor loading permodalan

$\lambda_{4.1} \dots \lambda_{4.5}$ = faktor loading pemasaran

$\varepsilon_{3.1} \dots \varepsilon_{3.5}$ = error indikator permodalan

$\varepsilon_{4.1} \dots \varepsilon_{4.5}$ = error indikator pemasaran

X_5	= konstruk penyuluh	Y_1	= konstruk kinerja usaha
$X_{5.1} \dots X_{5.5}$	= indikator penyuluh	$Y_{1.1} \dots Y_{1.2}$	= indikator kinerja usaha
$\lambda_{21} \dots \lambda_{25}$	= faktor loading penyuluh	$\lambda_{26} \dots \lambda_{27}$	= faktor loading kin usaha
$\varepsilon_{21} \dots \varepsilon_{25}$	= error indikator penyuluh	$\varepsilon_{26} \dots \varepsilon_{27}$	= error indikator kin usaha
ζ_1	= error konstruk kin usaha	Y_2	= konstruk struktur usaha
ζ_2	= error konstruk strukt usaha	$Y_{2.1} \dots Y_{2.3}$	= indikator struktur usaha
$\gamma_1 \dots \gamma_{10}$	= koefisien jalur eksogen ke endogen	$\lambda_{28} \dots \lambda_{30}$	= faktor loading struktur usaha
		$\varepsilon_{28} \dots \varepsilon_{30}$	= error indikator strukt usaha
β	= koefisien jalur endogen ke endogen		

4. Memilih matriks input dan estimasi model.

Langkah keempat menjelaskan bahwa data input SEM adalah matriks varians/kovarians atau teknik korelasi untuk keseluruhan model estimasi yang dilakukan. Matrik kovarian digunakan karena SEM memiliki keunggulan dalam menyajikan perbandingan yang valid antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda yang tidak dapat disajikan oleh korelasi. Dalam penggunaan SEM disarankan agar menggunakan matriks varians/kovarians pada saat pengujian teori sebab akan lebih memenuhi asumsi metodologi di mana besarnya standart error yang diajukan akan menunjukkan angka yang lebih akurat dibandingkan apabila menggunakan matriks korelasi.

5. Kemungkinan munculnya masalah identifikasi.

Langkah kelima menjelaskan bahwa setelah dilakukan revisi model masih terdapat hasil estimasi yang unik, maka perlakuan lainnya adalah menciptakan

composite variabels melalui *compusite measure* atau mengembangkan lebih banyak konstrak.

6. Evaluasi kriteria *goodness-of-fit*

Pada langkah keenam dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui evaluasi terhadap berbagai kriteria *goodness-of-fit*. Berikut beberapa indeks kesesuaian dan *cut-off value* untuk menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak.

- a. X^2 atau Chi-Square statistik, di mana model dipandang baik atau memuaskan apabila nilai Chi-Square rendah. Semakin kecil nilai X^2 maka model dinyatakan semakin baik dan diterima berdasarkan probabilitas dengan *cut-of value* sebesar $P > 0,05$ atau $P > 0,010$.
- b. RMSEA (*The Root Mean Square Error of Approximation*) yang menunjukkan *goodness-of-fit* yang dapat diharapkan apabila model diestimasi dalam populasi nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya suatu model berdasarkan *degree of freedom*.
- c. GFI (*Goodness of Fit Index*) adalah ukuran non statistik yang mempunyai rentang nilai antara 0 (*poor of-fit*) sampai 1,0 (*perfect of-fit*). Nilai yang tinggi dalam indeks tersebut menunjukkan sebuah *better of-fit*.
- d. AGFI (*Adjusted Goodness of fit Index*) adalah ukuran penerimaan yang direkomendasikan apabila mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90.

- e. CFI (*Comparative Fit Index*) adalah ukuran tingkat *fit* dengan ketentuan apabila mendekati 1,00 maka mengindikasikan tingkat *fit* yang paling tinggi. Nilai yang merekomendasikan adalah $CFI > 0,95$. Untuk lebih jelasnya Indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model adalah seperti pada Tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4
GOODNESS OF – FIT INDICES

<i>Goodness of-fit Index</i>	Kriteria
<i>X Chi-Square</i>	<i>Diharapkan Kecil</i>
<i>Significant Probability</i>	$\geq 0,05$
<i>RMSEA</i>	$\leq 0,08$
<i>GFI</i>	$\geq 0,90$
<i>AGFI</i>	$\geq 0,90$
<i>CMIN/DF</i>	$\leq 2,00$
<i>TLI</i>	$\geq 0,95$
<i>CFI</i>	$\geq 0,95$

Sumber : Hair, *et al.*, 1998

Keterangan :

a. *Chi-square statistics*

Likelihood ratio chi-square statistics merupakan alat uji statistik untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan antara matrik kovarianspopulasi dan kovarians sampel. Hal ini sesuai dengan tujuan analisis yaitu untuk mengembangkan dan menguji sebuah modal yang sesuai dengan data atau *fit* terhadap data. Oleh sebab itu dibutuhkan nilai *Chi-square* yang tidak signifikan, yang menguji hipotesis nol bahwa *estimated population covarians*. Dalam pengujian ini nilai *Chi-square* yang rendah menghasilkan sebuah tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 akan mengindikasikan tidak adanya yang signifikan antara matrik kovarians data dan matrik kovarians yang diestimasi (Hair *et al.*, 1998).

b. *The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)*

RMSEA merupakan sebuah indeks yang dapat dipergunakan untuk mengkompensasikan *Chi-square Statistics* dalam sampel ukuran besar. Nilai *RMSEA* menunjukkan *Goodness of-fit* yang dapat diharapkan apabila model diestimasi dalam populasi (Hair *et al.*, 1998). Nilai *RMSEA* yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan index untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah *close fit* dari model tersebut berdasarkan *degree of freedom*.

c. *AGFI (Adjusted Godness of-fit Index)*

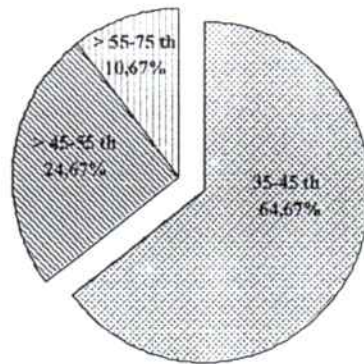
Fit Indeks dalam hal ini dapat disesuaikan terhadap *degree of freedom* yang tersedia untuk menguji diterima tidaknya model. Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI memiliki nilai sama dengan satu atau lebih besar dari 0,90. Baik GFI dan AGFI pada dasarnya merupakan kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari varians dalam sebuah matrik kovarians sampel. Meskipun demikian modifikasi hanya dapat dilakukan jika terdapat justifikasi teoritis yang cukupkuat, karena SEM tidak ditujukan untuk menghasilkan teori, tetapi hanya menguji model yang mempunyai pijakan teori yang kuat.

BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Karakteristik Pengusaha Industri Kecil

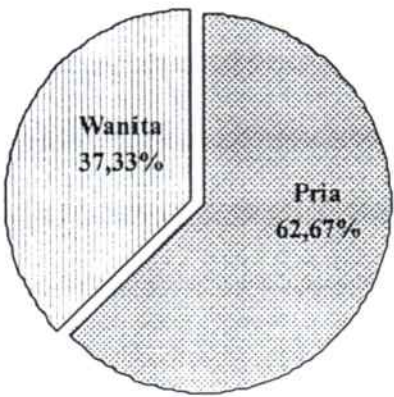
Pada bagian ini akan dibahas mengenai karakteristik pengusaha industri kecil terdiri atas : umur, jenis kelamin, pendidikan formal yang pernah ditempuh, jenis pelatihan yang pernah diikuti, jenis izin yang dimiliki, bentuk badan usaha, dan sumber pembiayaan berdasarkan data pada Lampiran 3.



Gambar 5.1

PIE CHART UMUR RESPONDEN

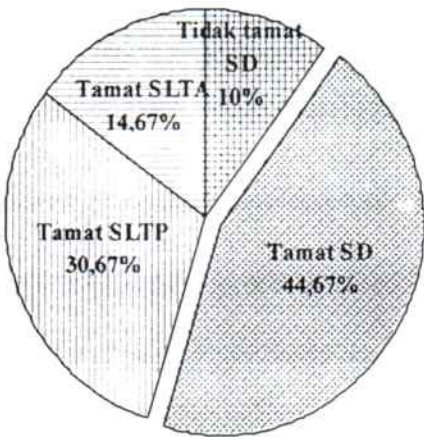
Berdasarkan Gambar 5.1 dapat diketahui karakteristik pengusaha industri kecil berdasarkan umur yaitu : 35-45 tahun sebanyak 97 responden (64,67%), >45-55 tahun sebanyak 37 responden (24,67%), >55-75 tahun sebanyak 16 responden (10,67%). Para pengusaha industri kecil kebanyakan berusia 35-45 tahun, pada usia ini motivasi untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan masih tinggi untuk meraih kesuksesan kinerja bagi dirinya sendiri maupun perusahaan.



Gambar 5.2

PIE CHART JENIS KELAMIN RESPONDEN

Berdasarkan Gambar 5.2 dapat diketahui karakteristik pengusaha industri kecil berdasarkan jenis kelamin yaitu : pria sebanyak 94 responden (62,67%), wanita sebanyak 56 responden (37,33%).

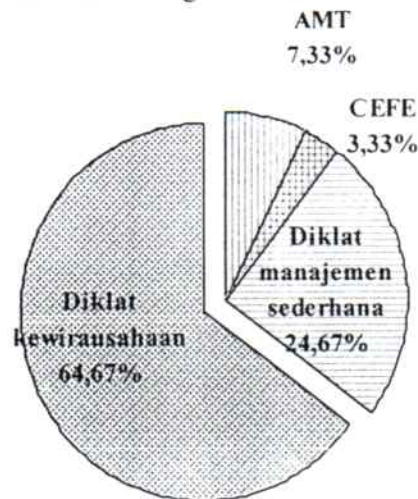


Gambar 5.3

PIE CHART PENDIDIKAN RESPONDEN

Berdasarkan Gambar 5.3 dapat diketahui karakteristik pengusaha industri kecil berdasarkan pendidikan yaitu : tamat SD sebanyak 67 responden (44,67%), tamat SLTP sebanyak 46 responden (30,37%), tamat SLTA sebanyak 22 responden (14,67%), tidak tamat SD sebanyak 15 responden (10,00%). Kebanyakan

responden ternyata tamat SD karena yang dulunya industri mikro sekarang berkembang menjadi industri kecil berada di pedesaan. Meskipun tingkat pendidikannya tidak sampai ke pendidikan tinggi dengan adanya bantuan pelatihan, bantuan permodalan, pemasaran, penyuluh industri perdagangan diupayakan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus menumbuhkembangkan struktur usaha.

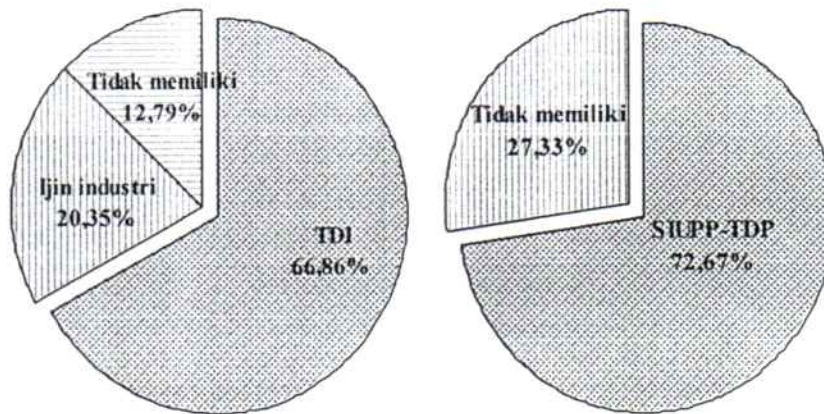


Gambar 5.4

PIE CHART JENIS PELATIHAN

Berdasarkan Gambar 5.4 dapat diketahui karakteristik pengusaha industri kecil berdasarkan jenis pelatihan yaitu : diklat kewirausahaan sebanyak 97 responden (64,67%), diklat manajemen sederhana sebanyak 37 responden (24,67%), *Achievement Motivation Training* (AMT) sebanyak 11 responden (7,33%), *Creation of Enterprises Formation of Entrepreneur* (CEFE) sebanyak 5 responden (7,33%). Kebanyakan responden ternyata mengikuti diklat kewirausahaan karena diklat ini merupakan dasar bagi para pengusaha pemula yang pada awalnya tidak memiliki jiwa kewirausahaan sehingga tingkat kegagalan pada tahap-tahap awal usaha begitu tinggi. Dengan adanya diklat kewirausahaan

diupayakan pertama kali dibangun akan jiwa kewirausahaan yang benar dimana dasar perhitungan usahanya bukan hanya keberanian tanpa perhitungan, tetapi keberanian yang didukung sistem pengadministrasian yang benar. Bagi pengusaha yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan dan sudah memulai punya usaha dapat mengikuti diklat manajemen, AMT maupun CEFE. Ketiga pelatihan ini lebih mengarah ke peningkatan mutu, strategi pemasaran, kemampuan manajerial (organisasi), menjadikan enterpreneur bermotivasi tinggi, kreatif dan inovatif.

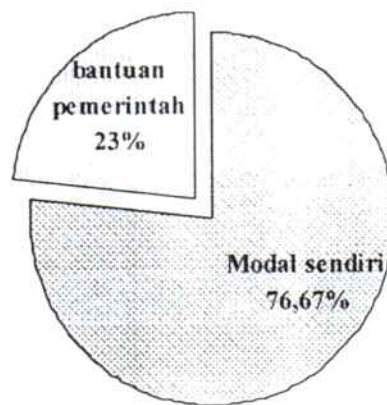


Gambar 5.5

PIE CHART IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Berdasarkan Gambar 5.5 dapat diketahui karakteristik pengusaha industri kecil berdasarkan izin perindustrian dan perdagangan yaitu : yang memiliki Tanda Daftar Industri sebanyak 115 responden (76,67%), ijin industri sebanyak 35 responden (23,23%), yang tidak memiliki ijin sebanyak 22 responden (14,67%), sedangkan untuk izin perdagangan yang memiliki SIUPP dan TDP sebanyak 109 responden (72,67%), yang tidak memiliki ijin sebanyak 41 responden (27,33%). Pengusaha yang tidak memiliki izin dikarenakan biaya pengurusan relatif tinggi disamping biaya resmi ada beberapa biaya yang dapat dikategorikan biaya pungli,

waktu pengurusan relatif lama dan tidak ada kepastian kapan selesai, waktu selesai yang dijanjikan seringkali tidak tepat, persyaratan administratif yang terlalu banyak sehingga terkesan berbelit, kemampuan pegawai dalam melayani dan penanganan proses perizinan yang terlalu lamban dan kurang profesional. Untuk bentuk badan usaha seratus persen perseorangan.



Gambar 5.6

PIE CHART SUMBER PEMBIAYAAN

Berdasarkan Gambar 5.6 dapat diketahui karakteristik pengusaha industri kecil berdasarkan jenis pembiayaan yaitu : modal sendiri sebanyak 115 responden (76.67%), bantuan pemerintah sebanyak 35 responden (23.33%). Kebanyakan pengusaha industri kecil menggunakan modal sendiri karena prosedur untuk memanfaatkan bantuan pemerintah harus ada izin dari departemen industri perdagangan, sedangkan untuk memperoleh seluruh izin yang dipersyaratkan kualitas layanan pemerintah masih belum memuaskan sehingga para pengusaha lebih memilih menggunakan modal sendiri daripada memanfaatkan bantuan pemerintah.

5.2 Analisis Tanggapan Responden Tentang Pelatihan, Peraturan Pemerintah, Permodalan, Pemasaran, Penyuluh Indag, Kinerja Usaha dan Struktur Usaha

5.2.1 Pelatihan Teknis

Berdasarkan tanggapan responden pada variabel pelatihan diperoleh nilai rata-rata setiap indikator pada setiap komoditi industri sebagai berikut :

Tabel 5.1
NILAI RATA-RATA INDIKATOR PELATIHAN PER KOMODITI

Komoditi Industri Kecil	Indikator				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
Makanan Ringan	3,7647	3,7451	3,8039	3,6275	3,6863
Tenun Gedogan Ulos	3,6944	3,6944	3,8333	3,7361	3,7500
Pupuk Alam & Organik	4,0000	3,6667	4,0000	4,0000	4,0000
Genteng	4,0000	4,0000	4,0000	4,5000	4,5000
Kapal Kayu Perahu	4,3333	4,0000	4,3333	4,3333	4,6667
Pehiasan emas Perak	4,0000	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500
Alsintan dari Besi dan logam	4,0667	4,0667	3,9333	4,3333	4,2000
Mean Per Indikator	3,7867	3,7600	3,8467	3,7867	3,8067
Mean variabel pelatihan : 3,7973					

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 5.1 nilai rata-rata variabel pelatihan sebesar 3,7973. Untuk lebih jelasnya nilai rata-rata per indikator dapat dirinci sebagai berikut : pelatihan yang diberikan oleh pemerintah cukup bermutu (nilai rata-rata variabel pelatihan 3,7867), para instruktur mengajarkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik (nilai rata-rata 3,7600), ada perubahan perilaku pengusaha setelah mengikuti pelatihan teknis (nilai rata-rata 3,8467), kompetensi para pengajar sudah sesuai dengan bidang tugasnya (nilai rata-rata 3,7867), tujuan pelaksanaan program pelatihan teknis bagi peserta tercapai (nilai rata-rata 3,8067).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pembinaan pemerintah melalui pelatihan mendapat respon yang cukup baik dilihat dari mutu

program, proses pembelajaran, perubahan perilaku pengusaha, kompetensi para instruktur dan pencapaian tujuan pelatihan.

5.2.2 Peraturan Pemerintah

Berdasarkan tanggapan responden pada variabel Peraturan Pemerintah diperoleh nilai rata-rata setiap indikator pada setiap komoditi industri sebagai berikut:

Tabel 5.2
NILAI RATA-RATA INDIKATOR PERATURAN PEMERINTAH
PER KOMODITI

Komoditi Industri Kecil	Indikator				
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
Makanan Ringan	2,8627	2,9412	2,8824	2,9216	2,8627
Tenun Gedogan Ulos	2,8333	2,8611	2,9722	2,9722	2,9861
Pupuk Alam & Organik	2,6667	2,6667	2,6667	3,0000	3,0000
Genteng	3,5000	3,5000	3,5000	3,5000	3,5000
Kapal Kayu Perahu	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333
Pehiasan emas Perak	2,2500	2,5000	2,2500	2,2500	2,5000
Alsintan dari Besi dan logam	2,6000	2,4667	2,5333	2,4667	2,4000
Mean Per Indikator	2,8000	2,8333	2,8667	2,8800	2,8667
Mean variabel peraturan pemerintah: 2,8493					

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 5.2 nilai rata-rata variabel peraturan pemerintah sebesar 2,8493. Untuk lebih jelasnya nilai rata-rata per indikator dapat dirinci sebagai berikut : persyaratan yang diminta masih berbelit-belit (nilai rata-rata 2,800), petugas kurang memegang sikap kejujuran dalam memberikan keterangan dan kejelasan rincian biaya pengurusan izin (nilai rata-rata 2,8333), waktu pengurusan izin, petugas kurang memperhatikan kecepatan proses dan ketepatan pelayanan (nilai rata-rata 2,8667), persyaratan administrasi berupa dokumen penyerta yang dipersyaratkan tidak sederhana dan kurang dapat dipenuhi (nilai rata-rata 2,8800), dalam proses

penerbitan izin, petugas kurang mampu dan menguasai peraturan dan kurang trampil (nilai rata-rata 2,8667).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pembinaan pemerintah melalui implementasi peraturan pemerintah ternyata petugas di lapangan meminta persyaratan yang berbelit, tidak jujur, layanan lambat, persyaratan tidak sederhana, dan tidak menguasai prosedur penerbitan izin usaha.

5.2.3 Permodalan

Berdasarkan tanggapan responden pada variabel permodalan diperoleh nilai rata-rata setiap indikator pada setiap komoditi industri sebagai berikut :



Tabel 5.3
NILAI RATA-RATA INDIKATOR PERMODALAN PER KOMODITI

Komoditi Industri Kecil	Indikator				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
Makanan Ringan	3,6275	3,4706	3,4706	3,4314	3,6078
Tenun Gedogan Ulos	3,6806	3,8611	3,8889	3,8750	3,8333
Pupuk Alam & Organik	3,6667	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
Genteng	4,5000	5,0000	5,0000	5,0000	4,5000
Kapal Kayu Perahu	4,3333	4,0000	4,6667	4,3333	4,6667
Pehiasan emas Perak	4,0000	3,7500	3,7500	3,2500	3,7500
Alsintan dari Besi dan logam	4,1333	4,1333	4,0667	4,0000	4,2000
Mean Per Indikator	3,7400	3,7533	3,7733	3,7267	3,8000
Mean variabel bantuan permodalan: 3,7587					

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 5.3 nilai rata-rata variabel permodalan sebesar 3,7587. Untuk lebih jelasnya nilai rata-rata per indikator dapat dirinci sebagai berikut : pemerintah berperan untuk memberikan kemudahan mendapatkan akses sumber bantuan modal sesuai harapan pengusaha (nilai rata-rata 3,7400), realisasi bantuan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan pengusaha (nilai rata-rata 3,7533), jangka waktu pengembalian pinjaman modal dan bunga

(*grace period*) disesuaikan dengan kebutuhan jangka waktu pengolahan sampai dengan hasil produksi dapat dipasarkan (nilai rata-rata 3,7733), variasi atau jenis modal (Investasi, modal kerja) yang disalurkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan harapan dan jenis usaha (nilai rata-rata 3,7267), proposal yang diusulkan sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pemerintah (nilai rata-rata 3,8000).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan sudah direspon cukup baik oleh pengusaha.

5.2.4 Pemasaran

Berdasarkan Tabel 5.4 nilai rata-rata variabel bantuan pemasaran sebesar 3,7573. Untuk lebih jelasnya nilai rata-rata per indikator dapat dirinci sebagai berikut : realisasi bantuan dana pemasaran melalui penyelenggaraan promosi yang disalurkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengusaha (nilai rata-rata 3,7933), bantuan biaya pameran yang disalurkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengusaha (nilai rata-rata 3,8133), dana bantuan pembuatan leaflet, brosur, dan biaya media elektronik lainnya yang disalurkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan pengusaha dalam rangka penyebaran informasi hasil produksi, harga, dalam negeri (nilai rata-rata 3,8133), informasi harga, jumlah, mutu barang yang diinginkan para importir di luar negeri yang diinformasikan oleh pemerintah sesuai dan cukup akurat (nilai rata-rata 3,6667), bantuan akses pasar dari pemerintah sesuai dengan jangkauan pemasaran hasil produksi ke luar negeri (nilai rata-rata 3,700).

Tabel 5.4
NILAI RATA-RATA INDIKATOR PEMASARAN PER KOMODITI

Komoditi Industri Kecil	Indikator				
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
Makanan Ringan	3,5882	3,6078	3,5882	3,3725	3,4706
Tenun Gedogan Ulos	3,8889	3,8750	3,9028	3,7083	3,6528
Pupuk Alam & Organik	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	2,6667
Genteng	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000
Kapal Kayu Perahu	4,3333	4,3333	4,3333	4,3333	4,6667
Pehiasan emas Perak	3,2500	4,2500	3,7500	4,2500	4,0000
Alsintan dari Besi dan logam	4,1333	4,0667	4,1333	4,2000	4,5333
Mean Per Indikator	3,7933	3,8133	3,8133	3,6667	3,7000
Mean variabel bantuan pemasaran : 3,7573					

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran sudah direspon cukup baik oleh pengusaha baik itu dari aspek bantuan dana promosi di media cetak maupun di media elektronik dalam rangka penyebaran informasi hasil produksi, harga, mutu barang ke pangsa pasar dalam negeri maupun ekspor.

5.2.5 Penyuluh Industri Perdagangan

Tanggapan responden pada variabel penyuluh industri perdagangan diperoleh nilai rata-rata setiap indikator pada setiap komoditi industri sebagai berikut

Tabel 5.5
NILAI RATA-RATA INDIKATOR PENYULUH INDUSTRI PERDAGANGAN PER KOMODITI

Komoditi Indusri Kecil	Indikator				
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5
Makanan Ringan	3,4314	3,4510	3,4902	3,4314	3,4118
Tenun Gedogan Ulos	3,6528	3,6528	3,6944	3,5694	3,5278
Pupuk Alam & Organik	3,3333	3,0000	3,3333	3,3333	3,0000
Genteng	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000
Kapal Kayu Perahu	4,6667	4,6667	4,6667	4,6667	4,6667
Pehiasan emas Perak	4,2500	4,0000	4,2500	4,0000	4,2500
Alsintan dari Besi dan logam	4,4000	4,4667	4,4000	4,4000	4,4000
Mean Per Indikator	3,6933	3,6933	3,7333	3,6467	3,6200
Mean variabel bantuan penyuluh indag : 3,6773					

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 5.5 nilai rata-rata variabel bantuan penyuluh industri perdagangan sebesar 3,6773. Untuk lebih jelasnya nilai rata-rata per indikator dapat dirinci sebagai berikut : bantuan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha (nilai rata-rata 3,6933), penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan informasi tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha (nilai rata-rata 3,6933), tenaga penyuluh Indag mempunyai pengalaman yang memadai dan menunjang kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas (nilai rata-rata 3,7333), penyuluhan yang diberikan pemerintah dapat merubah perilaku para pengusaha Indag sehingga kinerja usaha dapat meningkat (nilai rata-rata 3,6467), tenaga penyuluh Indag senantiasa tanggap terhadap masalah bisnis dan menyelesaikannya dengan tuntas (nilai rata-rata 3,6200).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh industri perdagangan sudah direspon cukup baik oleh pengusaha dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha sekaligus diupayakan dapat merubah perilaku pengusaha. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman dan kemampuan teknis para penyuluh yang senantiasa tanggap terhadap masalah bisnis yang dihadapi oleh para pengusaha industri kecil.

5.2.6 Kinerja Usaha

Kinerja usaha yang diukur berdasarkan tingkat pengembalian penjualan (ROS) dan tingkat pengembalian investasi (ROI) dari hasil tanggapan responden dihitung dari nilai minimal dan maksimal (Lampiran 3) kemudian dikategorikan ke

dalam tiga golongan. Tujuan pengkategorian ini untuk melihat lebih detail nilai dan kinerja usaha dan jumlah industri kecil yang berada di setiap kategori, berdasarkan data perubahan nilai investasi, penyerapan tenaga kerja dan omzet penjualan.

1. Untuk ROS : nilai 19,75 – 27,24 persen tergolong rendah, nilai 27,25 – 34,74 persen tergolong sedang, nilai 34,75 – 42,24 persen tergolong tinggi.
2. Untuk ROI : nilai 11,15 – 23,77 persen tergolong rendah, nilai 23,78 – 36,41 persen tergolong sedang, nilai 36,42 – 49,05 persen tergolong tinggi

Dari pengkategorian ROS dan ROI Tabel 5.6 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk kategori rendah : ROS ada 46 industri kecil (30,67%) dan ROI ada 45 industri kecil (30,00%).
2. Untuk kategori sedang : ROS ada 60 industri kecil (40,00%) dan ROI ada 52 industri kecil (34,67%).
3. Untuk kategori tinggi : ROS ada 44 industri kecil (29,33%) dan ROI ada 53 industri kecil (35,33%).

Tabel 5.6
KATEGORI ROS DAN ROI

Kategori	ROS (%)	ROI (%)
Rendah		
ROS : 19,75 – 27,24 % ROI : 11,15 – 23,77 %	46,0 30,67 %	45,0 30,00 %
Sedang		
ROS : 27,25 – 34,74 % ROI : 23,78 – 36,41 %	60,0 40,00 %	52,0 34,67 %
Tinggi		
ROS : 34,75 – 42,24 % ROI : 36,42 – 49,05%	44,0 29,33 %	53,0 35,33 %

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 5.6 terlihat bahwa pencapaian ROS tidak jauh beda dengan pencapaian ROI, berarti jika tingkat pengembalian penjualan rendah, maka tingkat pengembalian investasi juga rendah demikian untuk tingkatan yang lain.

Untuk lebih detailnya akan ditampilkan data tingkat pencapaian ROS dan ROI per komoditi seperti terlihat pada Tabel 5.7. Dari Tabel 5.7 diketahui bahwa industri kecil makanan ringan, tenun gedogan ulos dan alsintan dari besi dan logam ROS dan ROI kebanyakan berada pada tingkatan tinggi dan sedang. Industri makanan ringan nilai ROS rendah sebanyak 17 industri (33,33%), sedang sampai tinggi sebanyak 34 industri (66,66%), nilai ROI rendah sebanyak 16 industri (31,37%), sedang sampai tinggi sebanyak 35 industri (68,63%). Industri tenun gedogan ulos nilai ROS dan ROI sama besar yaitu : rendah sebanyak 16 industri (31,33%), sedang sampai tinggi sebanyak 35 industri (68,63%). Industri tenun alsintan dari besi dan logam nilai ROS dan ROI sama besar yaitu : rendah sebanyak 6 industri (40,00%), sedang sampai tinggi sebanyak 9 industri (60,00%).

Tabel 5.7
KATEGORI ROS DAN ROI PER KOMODITI

Komoditi	Kategori	ROS (jumlah perusahaan)	ROI (jumlah perusahaan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan Ringan (51 industri kecil)	Rendah	17	16
	Sedang	15	14
	Tinggi	19	21
Tenun gedogan ulos (72 industri kecil)	Rendah	16	16
	Sedang	31	29
	Tinggi	25	27
Pupuk Alam & Organik (3 industri kecil)	Rendah	1	1
	Sedang	2	2
	Tinggi	0	0

dilanjutkan...

... lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)
Genteng (2 industri kecil)	Rendah	1	1
	Sedang	1	1
	Tinggi	0	0
Kapal Kayu Perahu (3 industri kecil)	Rendah	1	1
	Sedang	2	2
	Tinggi	0	0
Pehiasan emas Perak (4 industri kecil)	Rendah	3	3
	Sedang	1	1
	Tinggi	0	0
Alsintan dari Besi dan logam (15 industri kecil)	Rendah	6	6
	Sedang	9	4
	Tinggi	0	5

Sumber : Lampiran 3

5.2.7 Struktur Usaha

Struktur unit usaha yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan investasi (Y2.1) dan tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja (Y2.2) dan tingkat pertumbuhan omzet penjualan (Y2.3) dari hasil tanggapan responden dihitung dari nilai minimal dan maksimal (Lampiran 3) dikategorikan ke dalam tiga golongan yaitu :

1. Untuk tingkat pertumbuhan investasi : nilai 80,00 – 85,32 persen tergolong rendah, nilai 85,33 – 90,66 persen tergolong sedang, nilai 90,67 – 96,00 persen tergolong tinggi.
2. Untuk tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja : nilai 33,33 – 48,13 persen tergolong rendah, nilai 48,14 – 62,95 persen tergolong sedang, nilai 62,96 – 77,77 persen tergolong tinggi.

3. Untuk tingkat pertumbuhan omzet penjualan : nilai 36,00 – 54,32 persen tergolong rendah, nilai 54,33 – 72,66 persen tergolong sedang, nilai 72,67 – 91,00 persen tergolong tinggi

Tabel 5.8
KATEGORI TINGKAT PERTUMBUHAN INVESTASI, PENYERAPAN
TENAGA KERJA DAN OMZET PENJUALAN

Kategori	Tingkat Pertumbuhan		
	Investasi	Penyerapan tenaga kerja	Omzet penjualan
Rendah Investasi : 80,00 – 85,32 % Tenaga kerja : 33,33 – 48,13 % Omzet penjualan : 36,00 – 54,32 %	24,0 16,00 %	32,0 21,34 %	39 26,00 %
Sedang Investasi : 85,33 – 90,66 % Tenaga kerja : 48,14 – 62,95 % Omzet penjualan : 54,33 – 72,66 %	70,0 46,67 %	74,0 49,33 %	72 48,00 %
Tinggi Investasi : 90,67 – 96,00 % Tenaga kerja : 62,96 – 77,77 % Omzet penjualan : 72,67 – 91,00 %	56,0 37,33 %	44,0 29,33 %	39 26,00 %

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan pengkategorian ketiga indikator pada Tabel 5.8 dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Untuk kategori rendah : pertumbuhan investasi ada 24 industri kecil (16,00%), pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ada 32 industri kecil (21,33%), pertumbuhan omzet penjualan ada 39 industri kecil (26,00%).
2. Untuk kategori sedang : pertumbuhan investasi ada 70 industri kecil (46,67%), pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ada 74 industri kecil (49,33%), pertumbuhan omzet penjualan ada 72 industri kecil (48,00%).

3. Untuk kategori tinggi : pertumbuhan investasi ada 56 industri kecil (37,33%), pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ada 44 industri kecil (29,33%), pertumbuhan omzet penjualan ada 39 industri kecil (26,00%).

Berdasarkan Tabel 5.8 terlihat bahwa pencapaian pertumbuhan investasi tidak jauh beda dengan pencapaian pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan omzet penjualan, berarti jika tingkat pertumbuhan investasi rendah, maka tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan omzet penjualan juga rendah demikian untuk tingkatan yang lain.

Untuk lebih detailnya akan ditampilkan data tingkat pertumbuhan investasi, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan omzet penjualan komoditi makanan ringan (51 perusahaan), tenun gedogan ulos (72 perusahaan), pupuk alam dan organik (3 perusahaan), genteng (2 perusahaan), kapal/perahu kayu (3 perusahaan), perhiasan emas dan perak (4 perusahaan), alat-alat mesin pertanian dari besi dan logam (alsintan) (15 perusahaan). Hasil pengkategorian ROS dan ROI untuk masing-masing komoditi dapat dilihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
KATEGORI TINGKAT PERTUMBUHAN INVESTASI, PENYERAPAN
TENAGA KERJA DAN OMZET PENJUALAN PER KOMODITI

Komoditi	Kategori	Investasi (perusahaan)	Penyerapan tenaga kerja (perusahaan)	Omzet penjualan (perusahaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan Ringan (51 industri kecil)	Rendah	8	12	12
	Sedang	21	25	23
	Tinggi	22	14	16
Tenun gedogan ulos (72 industri kecil)	Rendah	8	12	19
	Sedang	35	35	35
	Tinggi	29	25	18

dilanjutkan ...

... lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pupuk Alam & Organik (3 industri kecil)	Rendah	0	0	0
	Sedang	3	3	3
	Tinggi	0	0	0
Genteng (2 industri kecil)	Rendah	1	1	1
	Sedang	1	1	1
	Tinggi	0	0	0
Kapal Kayu Perahu (3 industri kecil)	Rendah	1	1	1
	Sedang	2	2	2
	Tinggi	0	0	0
Pehiasan emas Perak (4 industri kecil)	Rendah	3	3	3
	Sedang	1	1	1
	Tinggi	0	0	0
Alsintan dari Besi dan logam (15 industri kecil)	Rendah	2	2	2
	Sedang	8	8	8
	Tinggi	5	5	5

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 5.9 diketahui bahwa industri kecil makanan ringan, tenun gedogan ulos dan alsintan dari besi dan logam tingkat pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan omzet penjualan sebagian besar berada pada tingkatan tinggi dan sedang, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Industri makanan ringan dengan nilai pertumbuhan investasi rendah sebanyak 8 industri (15,69%), sedang sampai tinggi sebanyak 43 industri (84,31%), nilai pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan omzet penjualan sama besar yaitu rendah sebanyak 12 industri (23,53%), sedang sampai tinggi sebanyak 39 industri (76,47%).
2. Industri makanan tenun gedogan ulos dengan nilai pertumbuhan investasi rendah sebanyak 8 industri (11,11%), sedang sampai tinggi sebanyak 64 industri (88,89%), nilai pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yaitu rendah sebanyak 12

industri (16,67%), sedang sampai tinggi sebanyak 60 industri (83,33%), nilai pertumbuhan penyerapan omzet penjualan yaitu rendah sebanyak 19 industri (26,39%), sedang sampai tinggi sebanyak 53 industri (73,61%).

3. Industri makanan alsintan dari besi dan logam dengan nilai pertumbuhan investasi, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan penyerapan omzet penjualan ketiganya sama besar yaitu : rendah sebanyak 2 industri (13,33%), sedang sampai tinggi sebanyak 13 industri (86,67%).

5.3 Analisis Hasil Penelitian

5.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Alat ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner terdiri atas butir-butir pertanyaan yang dirancang dan disusun untuk memperoleh data variabel-variabel penelitian yang berasal dari jawaban responden. Item-item pertanyaan yang diajukan sesuai dengan variabel-variabel penelitian yaitu pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh industri perdagangan bersifat tertutup dengan skala satu sampai 5, sedangkan dua variabel penelitian yaitu kinerja usaha (2 indikator) dan struktur usaha (3 indikator) berskala rasio bersifat terbuka. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada indikator dengan kuesioner tertutup dan berskala interval, sedangkan indikator berskala rasio dan bersifat terbuka pada variabel kinerja usaha dan struktur usaha tidak dilakukan uji ini. Secara keseluruhan diperoleh hasil kuesioner tertutup yang terdiri dari lima variabel penelitian yang diukur dengan masing-masing 5 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
VARIABEL DAN INDIKATOR

Pelatihan (X1)	Mutu program pelatihan (X1.1)
	Metode Pelatihan (X1.2)
	Perubahan perilaku pengusaha (X1.3)
	Kompetensi para Instruktur (X1.4)
	Hasil pencapaian tujuan pelatihan (X1.5)
Peraturan pemerintah (X2)	Mekanisme penerbitan izin sesuai dengan prosedur (X2.1)
	kejelasan (kejujuran) petugas memberikan keterangan tentang biaya pengurusan penerbitan izin (X2.2)
	Jangka waktu pengurusan izin (X2.3)
	Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi (X2.4)
	Kemampuan pemahaman petugas mengenai peraturan penerbitan izin (X2.5)
Permodalan (X3)	Akses sumber bantuan modal (X3.1)
	Besarnya bantuan modal (X3.2)
	Jangka waktu pengembalian (X3.3)
	Variasi/jenis modal (X3.4)
	Persyaratan administratif yang diperlukan (X3.5)
Pemasaran (X4)	Realisasi jumlah dana bantuan promosi (X4.1)
	Pemberian bantuan pameran (X4.2)
	Penyebaran informasi harga dalam negeri (X4.3)
	Keakuratan informasi harga mutu dan permintaan barang dari importir di luar negeri (X4.4)
	Akses pasar luar negeri (X4.5)
Penyuluh Indag (X5)	Metode penyuluhan (X5.1)
	Kompetensi para tenaga penyuluh (X5.2)
	Pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha (X5.3)
	Perubahan perilaku para pengusaha (X5.4)
	Ketanggapan tenaga penyuluh terhadap masalah bisnis (X5.5)

Tahap awal dilakukan uji coba pendahuluan yaitu dengan uji validitas dan reliabilitas dengan 30 responden sebelum digunakan kuesioner sesungguhnya yang dapat memenuhi persyaratan untuk perolehan data penelitian yang sebenarnya. Dari uji coba ini pada para responden ini diperoleh sejumlah masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan khususnya terhadap bentuk dan pemahaman arti kalimat-kalimat pertanyaan dalam kuesioner.

Uji validitas pada penelitian ini mengkorelasikan tanggapan responden setiap indikator dengan total seluruh indikator pada setiap variabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan memasukkan seluruh indikator pada setiap variabel.

Tabel 5.11
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PELATIHAN (n = 30)

Indikator	Korelasi	Prob.	Keterangan
X1.1	0,8433	$4,920 \cdot 10^{-9}$	Valid
X1.2	0,8289	$1,532 \cdot 10^{-8}$	Valid
X1.3	0,8287	$1,554 \cdot 10^{-8}$	Valid
X1.4	0,7975	$1,322 \cdot 10^{-7}$	Valid
X1.5	0,7350	$3,732 \cdot 10^{-6}$	Valid
Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i> = 0,8656			

Sumber : Lampiran 4

Koefisien korelasi indikator pelatihan berada antara 0,7350 sampai 0,8433, seluruh *probabilitas error* lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan kelima indikator tersebut valid. Koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* sebesar 0.8656 lebih besar dari 0,6 dapat dikatakan sudah reliabel (Ghozali 2001 : 133).

Tabel 5.12
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PERATURAN PEMERINTAH (n = 30)

Indikator	Korelasi	Prob.	Keterangan
X2.1	0,6538	$8,935 \cdot 10^{-5}$	Valid
X2.2	0,4945	0,0055	Valid
X2.3	0,7022	$1,525 \cdot 10^{-5}$	Valid
X2.4	0,8443	$4,530 \cdot 10^{-9}$	Valid
X2.5	0,8494	$2,941 \cdot 10^{-9}$	Valid
Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i> = 0,7578			

Sumber : Lampiran 4

Koefisien korelasi indikator peraturan pemerintah berada antara 0,4945 sampai 0,8494, seluruh *probabilitas error* lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan kelima indikator tersebut valid. Koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* sebesar 0,7578 lebih besar dari 0,6 dapat dikatakan sudah reliabel (Ghozali 2001 : 133).

Tabel 5.13
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PERMODALAN (n = 30)

Indikator	Korelasi	Prob.	Keterangan
X3.1	0,8963	$2,143 \cdot 10^{-11}$	Valid
X3.2	0,9647	$9,383 \cdot 10^{-18}$	Valid
X3.3	0,9664	$4,610 \cdot 10^{-18}$	Valid
X3.4	0,9664	$4,610 \cdot 10^{-18}$	Valid
X3.5	0,8001	$1,116 \cdot 10^{-7}$	Valid
Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i> = 0,9528			

Sumber : Lampiran 4

Koefisien korelasi indikator permodalan berada antara 0,8001 sampai 0,9664, seluruh *probabilitas error* lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan kelima indikator tersebut valid. Koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* sebesar 0,9528 lebih besar dari 0,6 dapat dikatakan sudah reliabel (Ghozali 2001 : 133).

Tabel 5.14
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PEMASARAN (n = 30)

Indikator	Korelasi	Prob.	Keterangan
X4.1	0,8793	$1,615 \cdot 10^{-10}$	Valid
X4.2	0,9333	$5,619 \cdot 10^{-14}$	Valid
X4.3	0,9068	$5,163 \cdot 10^{-12}$	Valid
X4.4	0,9157	$1,327 \cdot 10^{-12}$	Valid
X4.5	0,9333	$5,619 \cdot 10^{-14}$	Valid
Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i> = 0,9494			

Sumber : Lampiran 4

Koefisien korelasi indikator pemasaran berada antara 0,8793 sampai 0,9333, seluruh *probabilitas error* lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan kelima indikator tersebut valid. Koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* sebesar 0,9494 lebih besar dari 0,6 dapat dikatakan sudah reliabel (Ghozali 2001 : 133).

Tabel 5.15
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PENYULUH INDAG (n = 30)

Indikator	Korelasi	Prob.	Keterangan
X5.1	0,7944	$1,597 \cdot 10^{-7}$	Valid
X5.2	0,9226	$4,186 \cdot 10^{-13}$	Valid
X5.3	0,9393	$1,564 \cdot 10^{-14}$	Valid
X5.4	0,9392	$1,588 \cdot 10^{-14}$	Valid
X5.5	0,8872	$6,570 \cdot 10^{-11}$	Valid
Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i> = 0,9379			

Sumber : Lampiran 4

Koefisien korelasi indikator penyuluh industri perdagangan berada antara 0,7944 sampai 0,9393, seluruh *probabilitas error* lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan kelima indikator tersebut valid. Koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* sebesar 0,9379 lebih besar dari 0,6 dapat dikatakan sudah reliabel (Ghozali 2001 : 133).

5.3.2 Uji Asumsi Model Persamaan Struktural

Pengujian dengan uji statistik model analisis struktural dilakukan dengan langkah-langkah uji sebagai berikut ini:

5.3.2.1 Uji Outlier

Pemeriksaan outlier terhadap seluruh indikator dilakukan untuk mengetahui suatu titik data yang sama sekali tidak tipikal dibandingkan dengan data lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan jarak Mahalanobis (*Mahalanobis Distance*). Dengan mempergunakan program statistik *Statistic Program for Social Science* (SPSS) 13.0, 30 indikator diberlakukan sebagai variabel independen (bebas) dan 150 responden diberlakukan sebagai variabel dependen (terikat). Untuk mengetahui apakah data tersebut terkena outlier atau tidak digunakan Tabel *Chi Square* pada *level of significant* 5% : $\chi^2 (30 ; 005) = 43,773$. Apabila hasil jarak Mahalanobis $> 43,773$ berarti terkena outlier dan sebaliknya. Jumlah dan nomor responden yang terkena *outlier* dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Berdasarkan Tabel 5.16 di atas dapat diketahui bahwa ada 26 responden yang terkena *outlier*. Dua puluh enam responden yang terkena outlier tersebut tidak perlu dikeluarkan dari data karena setelah diuji univariate outlier (per indikator) ternyata dua puluh enam responden tersebut tidak terkena outlier (Lampiran 5). Jadi untuk analisis berikutnya tetap digunakan 150 responden.

Tabel 5.16
DATA OUTLIER RESPONDEN

Resp	Mahalanobis	Resp	Mahalanobis	Resp	Mahalanobis
2	57,018	52	51,396	140	43,980
3	53,700	63	46,180	141	70,454
4	50,786	65	67,861	142	45,588
6	49,742	67	62,404	143	50,543
17	56,961	70	51,666	148	77,728
19	50,038	72	62,809	149	75,081
20	45,461	87	44,769		
26	43,791	122	50,288		
41	44,970	129	51,882		
51	58,309	136	45,321		

Sumber : Lampiran 5

5.2.3.2 Uji Normalitas *Univariate* dan *Multivariate*

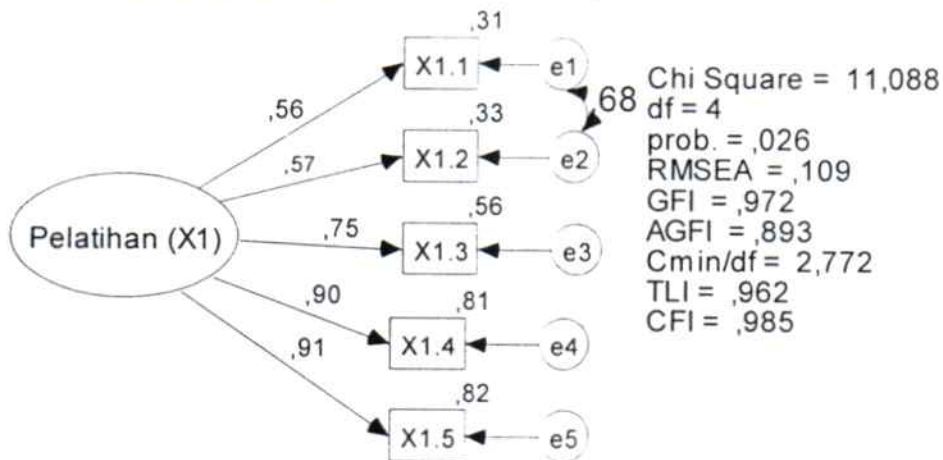
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat nilai *Critical Ratio* untuk *skewness* dan *kurtosis* setiap indikator berada di $-2,58 \leq CR \leq 2,58$. Jika berada di luar interval tersebut dapat diindikasikan bahwa ada tanggapan responden pada indikator tersebut yang tidak normal. Jadi pada uji normalitas tidak ada pengeluaran responden dari indikator dan akan tetap dipertahankan 150 responden untuk analisis-analisis berikutnya. Hasil selengkapnya untuk *univariate* maupun *multivariate* normal dapat dilihat pada lampiran 5. Berdasarkan nilai *Critical Ratio* untuk *skewness* dan *kurtosis* ada dua indikator yang tidak normal karena nilai *critical Ratio* tidak berada pada interval $-2,58 \leq CR \leq 2,58$. Untuk *multivariate* normalitas $24,930 > 2,58$, sehingga secara *multivariate* data tidak berdistribusi normal. Hal ini tidak menjadi masalah serius seperti dikatakan oleh Bentler & Chou (1987) dan Ghazali (2004) bahwa jika teknik estimasi dalam model SEM menggunakan *maximum likelihood estimation* [MLE] walau distribusi datanya tidak normal masih dapat menghasilkan *good estimate*, sehingga data layak untuk digunakan dalam estimasi selanjutnya.

5.3.2.3 Uji Multikolonieritas

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinier (adanya hubungan) antar konstruk dapat dilihat dari *determinant covariance matrix*, nilainya 21635590000 (Lampiran 5) jauh lebih besar dari nol, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas.

5.3.3 Pelatihan Teknis

Analisis faktor konfirmatori (CFA) untuk menguji unidimensionalitas 5 indikator pembentuk konstruk pelatihan teknis yaitu : Mutu program pelatihan (X1.1), Metode Pelatihan (X1.2), Perubahan perilaku pengusaha (X1.3), kompetensi para instruktur (X1.4) dan hasil pencapaian tujuan pelatihan (X1.5). Hasil uji CFA dapat dilihat pada Gambar 5.7 (Lampiran 6).



Gambar 5.7
ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PELATIHAN (X1)

Hasil evaluasi *goodness of fit Index* selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17
GOODNESS OF FIT INDEX PELATIHAN TEKNIS (X1)

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
<i>Chi Square</i>	Kecil	11,088	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,026	Belum fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,109	Kurang Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,972	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,893	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	2,772	Kurang Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,962	Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,985	Baik

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 5.17 dapat diketahui bahwa ada tiga parameter *Goodness of Fit* belum baik, sehingga dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang

pelatihan mendekati fit dengan model konseptualnya. Karena rekomendasi modifikasi indeks sudah tidak ada lagi maka model di atas dianggap sudah unidimensional meskipun prob masih lebih kecil dari 0,05.

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi internal dari indikator-indikator konstruk pelatihan dan varians ekstrak untuk mengetahui indikator-indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk pelatihan yang dikembangkan (Augusty, 2002:62-63). Untuk mengukur kedua uji tersebut diperoleh hasil standard loading dan *measurement error* CFA pelatihan (X1) dapat dilihat pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18
STANDAR LOADING DAN MEASUREMENT ERROR INDIKATOR
PELATIHAN TEKNIS (X1)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
X1.1	0,5606	0,3143	0,6857
X1.2	0,5719	0,3271	0,6729
X1.3	0,7456	0,5559	0,4441
X1.4	0,8981	0,8066	0,1934
X1.5	0,9053	0,8196	0,1804
Jumlah	3,6815	2,8234	2,1766

Sumber : Lampiran 6

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :

$$\frac{(3,6815)^2}{(3,6815)^2 + 2,1766} = \frac{13,5534}{15,7300} = 0,8616.$$

Nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,8616, artinya kelima indikator tersebut sudah dikatakan reliabel karena koefisien reliabilitas $> 0,7$ (Augusty, 2002)

$$\text{Varians ekstrak} = \frac{2,8234}{2,8234 + 2,1766} = \frac{2,8234}{5,000} = 0,5647.$$

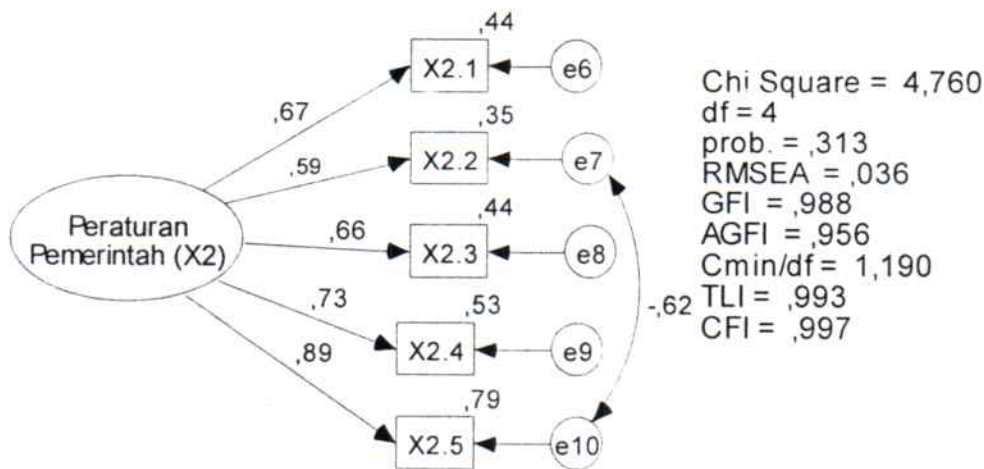
Hasil varians ekstrak $0,5647 > 0,5$, dapat dikatakan bahwa kelima indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk pelatihan (X1).

Berdasarkan Tabel 5.18 dapat dijelaskan bahwa konstruk pelatihan dibentuk oleh mutu program pelatihan (X1.1) sebesar 0,5606, metode pelatihan (X1.2) sebesar 0,5719, perubahan perilaku pengusaha (X1.3) sebesar 0,7556, kompetensi para instruktur (X1.4) sebesar 0,8981, dan hasil pencapaian tujuan pelatihan (X1.5) sebesar 0,9053.

Hasil penelitian ini memperkuat prinsip-prinsip perencanaan dan pengembangan pelatihan Anwar Prabu (2003) dan Ismail (2002) yang menyatakan bahwa pelatihan dibentuk oleh faktor-faktor penting yaitu topik dan materi pelatihan harus diberikan secara sistematis dan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, kompetensi pelatih harus mampu memotivasi peserta dan komposisi kurikulum harus relevan dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan mendatang.

5.3.4 Peraturan Pemerintah

Analisis faktor konfirmatori (CFA) untuk menguji unidimensionalitas 5 indikator pembentuk peraturan pemerintah yaitu : layanan penerbitan izin sesuai dengan prosedur (X2.1), kejujuran petugas memberikan keterangan tentang biaya pengurusan penerbitan izin (X2.2), kecepatan proses dan ketepatan layanan (X2.3), persyaratan administrasi yang harus dipenuhi (X2.4) dan kemampuan petugas memahami peraturan penerbitan izin (X2.5). Hasil uji CFA dapat dilihat pada Gambar 5.8 (Lampiran 7).



Gambar 5.8

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PERATURAN PEMERINTAH (X2)

Hasil evaluasi *goodness of fit Index* selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.19.

Tabel 5.19
GOODNESS OF FIT INDEX PERATURAN PEMERINTAH (X2)

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
<i>Chi Square</i>	Kecil	4,760	
Signifikansi	≥ 0,05	0,313	fit
RMSEA	≤ 0,08	0,036	Baik
GFI	≥ 0,90	0,988	Baik
AGFI	≥ 0,90	0,956	Baik
CMIN/DF	≤ 2,00	1,190	Baik
TLI	≥ 0,95	0,993	Baik
CFI	≥ 0,95	0,997	Baik

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 5.19 dapat diketahui bahwa seluruh parameter *Goodness of Fit* baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kelima indikator tersebut sudah unidimensional membentuk konstruk peraturan pemerintah.

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi internal dari indikator-indikator konstruk peraturan pemerintah dan varians ekstrak untuk mengetahui indikator-indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk peraturan pemerintah yang dikembangkan (Augusty, 2002:62-

63). Untuk mengukur kedua uji tersebut diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA peraturan pemerintah (X2) dapat dilihat pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20
STANDAR LOADING DAN MEASUREMENT ERROR INDIKATOR
PERATURAN PEMERINTAH (X2)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
X2.1	0,6652	0,4425	0,5575
X2.2	0,5903	0,3485	0,6515
X2.3	0,6649	0,4421	0,5579
X2.4	0,7262	0,5274	0,4726
X2.5	0,8894	0,7910	0,2090
Jumlah	3,5360	2,5514	2,4486

Sumber : Lampiran 7

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :

$$\frac{(3,5360)^2}{(3,5360)^2 + 2,4486} = \frac{12,5033}{14,9519} = 0,8362.$$

Nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,8362, artinya kelima indikator tersebut sudah dikatakan reliabel karena koefisien reliabilitas $> 0,7$ (Augusty, 2002)

$$\text{Varians ekstrak} = \frac{2,5514}{2,5514 + 2,4486} = \frac{2,5514}{5,000} = 0,5103.$$

Hasil varians ekstrak $0,5103 > 0,5$, dapat dikatakan bahwa kelima indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk peraturan pemerintah (X2).

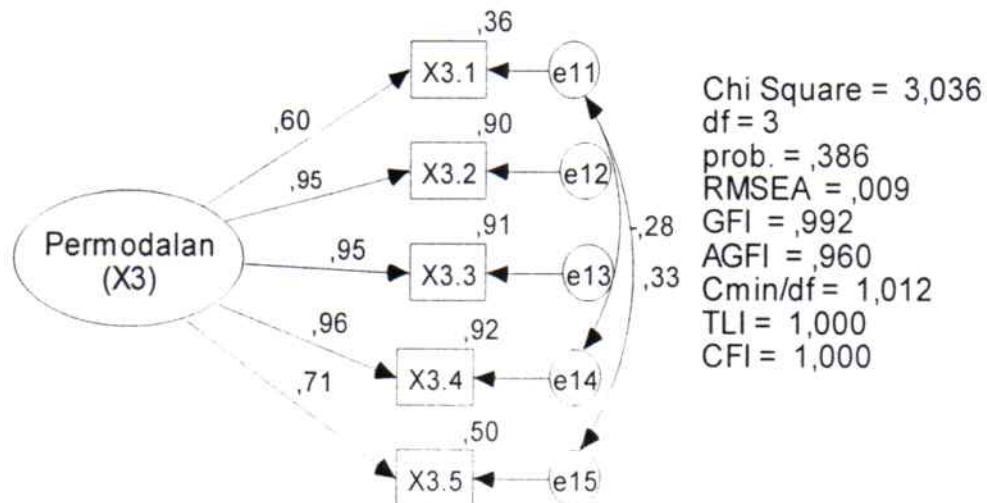
Berdasarkan Tabel 5.20 dapat dijelaskan bahwa konstruk peraturan pemerintah dibentuk oleh layanan penerbitan izin sesuai dengan prosedur (X2.1) sebesar 0,6652, kejujuran petugas memberikan keterangan tentang biaya pengurusan izin (X2.2) sebesar 0,5903, kecepatan proses dan ketepatan layanan (X2.3) sebesar 0,6649, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi (X2.4) sebesar 0,7262, dan kemampuan petugas memahami peraturan penerbitan izin (X2.5) sebesar 0,8894.

Hasil penelitian ini memperkuat indikator yang digunakan oleh Ridwan (2002) dan sesuai dengan penelitian Vasant Desai (2003) yang menyatakan tujuan semua peraturan adalah untuk meyakinkan bahwa hasil dari operasi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan , prosedur maupun instruksi. Tingginya kualitas layanan yang diberikan oleh departemen industri dan perdagangan sangat membantu pemasaran produk-produk industri kecil ke pasar internasional karena kelengkapan pencantuman nomor izin dalam produk merupakan pertimbangan bagi para pembeli untuk menentukan pilihannya karena membanjirnya produk produk palsu di pasar (Disperindag, 2000). Selain itu sangat membantu pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal usaha melalui fasilitas kredit bunga rendah dari perbankan (Rumerang Dience, 1992).

5.3.5 Permodalan

Analisis faktor konfirmatori (CFA) untuk menguji unidimensionalitas 5 indikator pembentuk permodalan yaitu : Sumber modal (X3.1), Besarnya bantuan modal (X3.2), Jangka waktu pengembalian (X3.3), Variasi/jenis modal (X3.4) dan Persyaratan administratif (proposal) yang diperlukan (X3.5). Hasil uji CFA dapat dilihat pada Gambar 5.9 (Lampiran 8).

Berdasarkan Tabel 5.21 dapat diketahui bahwa seluruh parameter *Goodness of Fit* baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kelima indikator tersebut sudah unidimensional membentuk konstruk permodalan.



Gambar 5.9
ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PERMODALAN (X3)

Hasil evaluasi *goodness of fit Index* selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21
GOODNESS OF FIT INDEX PERMODALAN (X3)

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
<i>Chi Square</i>	Kecil	3,036	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,386	fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,009	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,992	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,960	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,012	Baik
TLI	$\geq 0,95$	1,000	Baik
CFI	$\geq 0,95$	1,000	Baik

Sumber : Lampiran 8

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi internal dari indikator-indikator konstruk permodalan dan varians ekstrak untuk mengetahui indikator-indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk permodalan yang dikembangkan (Augusty, 2002:62-63). Untuk mengukur kedua uji tersebut diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA permodalan (X3) dapat dilihat pada Tabel 5.22.

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :

$$\frac{(4,1686)^2}{(4,1686)^2 + 3,5891} = \frac{17,3772}{18,7881} = 0,9249.$$

Tabel 5.22
STANDAR LOADING DAN MEASUREMENT ERROR INDIKATOR
PERMODALAN (X3)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	measurement error ($1-\lambda^2$)
X3.1	0,5989	0,3587	0,6413
X3.2	0,9473	0,8974	0,1026
X3.3	0,9547	0,9115	0,0885
X3.4	0,9583	0,9183	0,0817
X3.5	0,7094	0,5032	0,4968
Jumlah	4,1686	3,5891	1,4109

Sumber : Lampiran 8

Nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,9249, artinya kelima indikator tersebut sudah dikatakan reliabel karena koefisien reliabilitas $> 0,7$ (Augusty, 2002)

$$\text{Varians ekstrak} = \frac{3,5891}{3,5891 + 1,4109} = \frac{3,5891}{5,000} = 0,7178.$$

Hasil varians ekstrak $0,7178 > 0,5$, dapat dikatakan bahwa kelima indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk permodalan (X3).

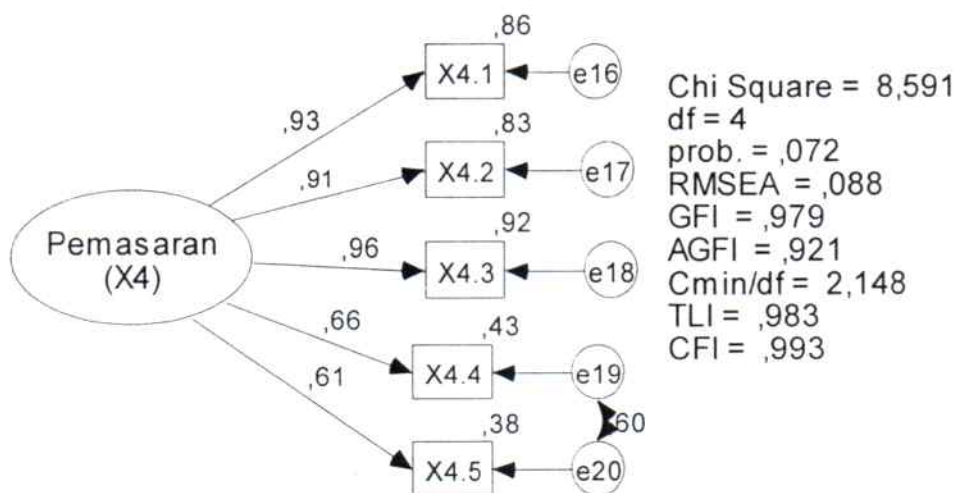
Berdasarkan Tabel 5.22 dapat dijelaskan bahwa konstruk permodalan dibentuk oleh sumber modal (X3.1) sebesar 0,5989, besarnya bantuan modal (X3.2) sebesar 0,9473, jangka waktu pengembalian (X3.3) sebesar 0,9547, variasi/jenis modal (X3.4) sebesar 0,9583 dan persyaratan administratif (proposal) yang diperlukan (X3.5) sebesar 0,7094.

Kereliabelan kelima indikator pada penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas penelitian Abdul Manan (1999) yang meneliti aspek-aspek bantuan keuangan dan bantuan peralatan mesin saja sebagai indikator pembentuk bantuan

modal. Indikator modal penelitian ini lebih bersifat kualitatif dibandingkan dengan penelitian Zainimar Naro (2000) yang lebih bersifat kuantitatif pada variabel permodalan. Kemudahan mendapatkan akses modal kerja dan besarnya bantuan modal yang cukup akan mendukung lancarnya proses produksi (Riyanto Bambang, 1990). Variasi modal yang disediakan oleh pemerintah memberikan banyak pilihan bagi para pengusaha sesuai dengan kemampuan untuk mengelola dan mengembalikan modal tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

5.3.6 Pemasaran

Analisis faktor konfirmatori (CFA) untuk menguji unidimensionalitas 5 indikator pembentuk pemasaran yaitu : realisasi jumlah dana bantuan promosi (X4.1), frekuensi pemberian bantuan pameran (X4.2), penyebaran informasi harga dalam negeri (X4.3), keakuratan informasi harga mutu dan permintaan barang dari importir di luar negeri (X4.4) dan akses pasar luar negeri (X4.5). Hasil uji CFA dapat dilihat pada Gambar 5.10 (Lampiran 9).



Gambar 5.10
ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PEMASARAN (X4)

Hasil evaluasi *goodness of fit Index* selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.23.

Tabel 5.23
GOODNESS OF FIT INDEX PEMASARAN (X4)

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
<i>Chi Square</i>	Kecil	8,591	
Signifikansi	≥ 0,05	0,072	fit
RMSEA	≤ 0,08	0,088	Kurang Baik
GFI	≥ 0,90	0,979	Baik
AGFI	≥ 0,90	0,921	Baik
CMIN/DF	≤ 2,00	2,148	Kurang Baik
TLI	≥ 0,95	0,983	Baik
CFI	≥ 0,95	0,993	Baik

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan Tabel 5.23 dapat diketahui bahwa hanya dua parameter *Goodness of Fit* kurang baik, tapi nilai probabilitas error lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kelima indikator tersebut sudah membentuk unidimensionalitas.

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi internal dari indikator-indikator konstruk pemasaran dan varians ekstrak untuk mengetahui indikator-indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk pemasaran yang dikembangkan (Augusty, 2002:62-63).

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :

$$\frac{(4,0692)^2}{(4,0692)^2 + 3,4193} = \frac{16,5584}{18,1391} = 0,9129.$$

Nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,9129, artinya kelima indikator tersebut sudah dikatakan reliabel karena koefisien reliabilitas > 0,7 (Augusty, 2002)

$$\text{Varians ekstrak} = \frac{3,4193}{3,4193 + 1,5807} = \frac{3,4193}{5,000} = 0,6839.$$

Hasil varians ekstrak $0,6839 > 0,5$. dapat dikatakan bahwa kelima indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk pemasaran (X4).

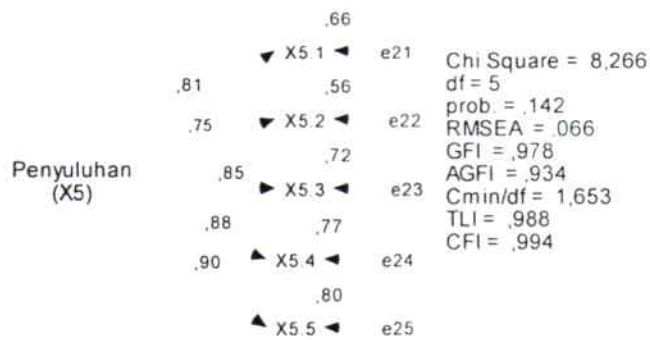
Berdasarkan Tabel 5.23 dapat dijelaskan bahwa konstruk pemasaran dibentuk oleh realisasi jumlah dana bantuan promosi (X4.1) sebesar 0,9285, frekuensi pemberian bantuan pameran (X4.2) sebesar 0,9087, penyebaran informasi harga dalam negeri (X4.3) sebesar 0,9597, keakuratan informasi harga mutu dan permintaan barang dari importir di luar negeri (X4.4) sebesar 0,6591 dan akses pasar luar negeri (X4.5) sebesar 0,6132.

Kelima indikator yang didasarkan pada penelitian Armstrong dan Home (1995) memperkuat empat belas indikator yang diteliti oleh Jauch dan Glueck (1999) tentang faktor-faktor internal pemasaran dan distribusi yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan strategi menghadapi pesaing. Indikator kesesuaian realisasi jumlah dana dan bantuan promosi, frekuensi pemberian bantuan pameran dari pemerintah dengan harapan pengusaha dapat digunakan untuk kegiatan periklanan, promosi dan pemasaran yang efisien dan efektif. Selain itu dapat mengatasi kendala terbatasnya kemampuan finansial untuk membiayai tempat-tempat pusat promosi dan pemasaran baik ditingkat nasional maupun internasional (Abdul Manan, 1999). Indikator penyebaran informasi harga dalam negeri merupakan salah satu strategi harga yang efektif untuk produk dan jasa dan memperkuat bauran produk dan jasa. Indikator keakuratan informasi harga mutu dan permintaan barang dari importir di luar negeri dan akses pasar luar negeri sangat membantu dalam sistem riset pasar yang efisien dan selektif, memperluas jalur distribusi dan liputan geografis yang efisien dan efektif. Hal ini juga berguna

untuk mengatasi kendala terbatasnya informasi pasar dan sulitnya mendapatkan akses pasar luar negeri seperti dalam penelitiannya Manan (1999).

5.3.7 Penyuluh Industri dan Perdagangan

Analisis faktor konfirmatori (CFA) untuk menguji unidimensionalitas 5 indikator pembentuk penyuluh industri dan perdagangan yaitu : metode penyuluhan (X5.1), kompetensi para tenaga penyuluh (X5.2), pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha (X5.3), perubahan perilaku pengusaha (X5.4) dan ketanggapan tenaga penyuluh terhadap masalah bisnis (X5.5). Hasil uji CFA dapat dilihat pada Gambar 5.11 (Lampiran 10).



Gambar 5.11
ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PENYULUH
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN (X5)

Hasil evaluasi *goodness of fit Index* selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24
GOODNESS OF FIT INDEX PENYULUH INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN (X5)

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
<i>Chi Square</i>	Kecil	8,266	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,142	fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,066	baik
GFI	$\geq 0,90$	0,978	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,934	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,653	baik
TLI	$\geq 0,95$	0,988	baik
CFI	$\geq 0,95$	0,994	Baik

Sumber : Lampiran 10

Berdasarkan Tabel 5.24 dapat diketahui bahwa seluruh parameter *Goodness of Fit* baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kelima indikator tersebut sudah unidimensional membentuk konstruk penyuluh industri dan perdagangan.

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi internal dari indikator-indikator konstruk penyuluh industri dan perdagangan dan varians ekstrak untuk mengetahui indikator-indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk penyuluh industri dan perdagangan yang dikembangkan (Augusty, 2002:62-63).. Untuk mengukur kedua uji tersebut diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA penyuluh industri dan perdagangan (X5) dapat dilihat pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25
STANDAR LOADING DAN MEASUREMENT ERROR INDIKATOR
PENYULUH INDUSTRI DAN PERDAGANGAN (X5)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
X5.1	0,8144	0,6632	0,3368
X5.2	0,7516	0,5649	0,4351
X5.3	0,8514	0,7249	0,2751
X5.4	0,8759	0,7672	0,2328
X5.5	0,8954	0,8017	0,1983
Jumlah	4,1887	3,5220	1,4780

Sumber : Lampiran 10

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :

$$\frac{(4,1887)^2}{(4,1887)^2 + 1,4780} = \frac{17,5452}{19,0232} = 0,9223.$$

Nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,9223, artinya kelima indikator tersebut sudah dikatakan reliabel karena koefisien reliabilitas $> 0,7$ (Augusty, 2002)

$$\text{Varians ekstrak} = \frac{3,5220}{3,5220 + 1,4780} = \frac{3,5220}{5,000} = 0,7044.$$

Hasil varians ekstrak $0,5647 > 0,5$, dapat dikatakan bahwa kelima indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk penyuluh industri dan perdagangan (X5).

Berdasarkan Tabel 5.25 dapat dijelaskan bahwa konstruk penyuluh industri dan perdagangan dibentuk oleh metode penyuluhan (X5.1) sebesar 0,8144, kompetensi para tenaga penyuluh (X5.2) sebesar 0,7516, pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengelola usaha (X5.3) sebesar 0,8514, perubahan perilaku pengusaha (X5.4) sebesar 0,8759 dan ketanggapan tenaga penyuluh terhadap masalah bisnis (X5.5) sebesar 0,8954.

Kelima indikator di atas yang sudah reliabel memperkuat penelitian Hermosilla (1997) dengan kehadiran para tenaga penyuluh dapat membimbing pengusaha di bidang ketrampilan manajemen, cara meningkatkan daya saing, pemasaran dan pengembangan mutu. Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Ismail (2002) bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan pendampingan secara teknis, tetapi juga pendampingan manajerial, kualitas sumber daya manusia dan strategi pemasaran. Pemberian penyuluhan jangan sampai cenderung menimbulkan ketergantungan pada pemerintah sehingga menjadikan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif.

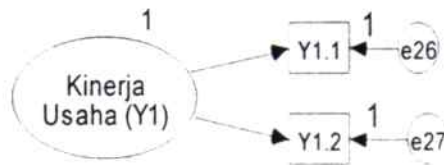
5.3.8 Kinerja Usaha

Analisis faktor konfirmatori (CFA) untuk menguji unidimensionalitas 2 indikator pembentuk kinerja usaha yaitu : ROS (Y1.1), ROI (Y2.2). Hasil uji CFA dapat dilihat pada Gambar 5.12 (Lampiran 11).

Berdasarkan Gambar 5.12 nilai goodness of fit index tidak muncul karena hanya mempunyai dua indikator sehingga derajat bebas bernilai negatif (Lampiran 11).

Kedua indikator tersebut diambil dari Jauch dan Gluech (2003) yang sudah diuji

validitas dan reliabilitasnya, jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa keduanya dapat reliable dalam membentuk konstruk kinerja usaha.

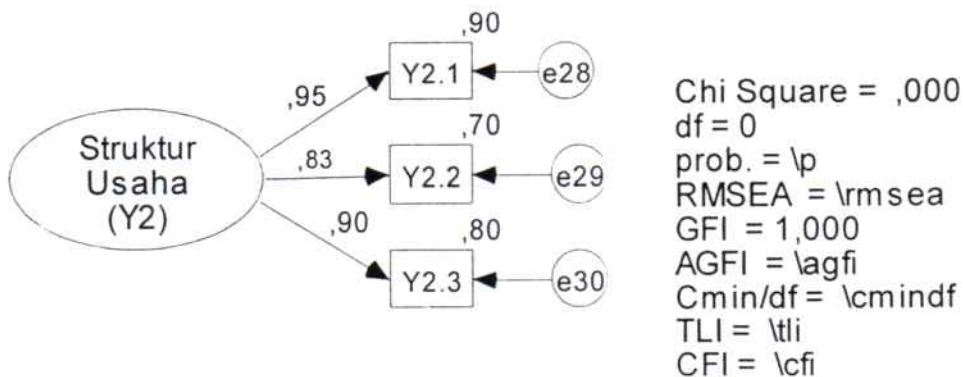


Gambar 5.12

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI KINERJA USAHA (Y1)

5.3.9 Struktur Usaha

Analisis faktor konfirmatori (CFA) untuk menguji unidimensionalitas 3 indikator pembentuk struktur usaha yaitu : persentase pertumbuhan jumlah investasi (Y2.1), persentase pertumbuhan penyerapan jumlah tenaga kerja (Y2.2), persentase pertumbuhan jumlah omzet penjualan (Y2.3). Hasil uji CFA dapat dilihat pada Gambar 5.13 (Lampiran 12).



Gambar 5.13

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI STRUKTUR USAHA (Y2)

Nilai goodness of fit indeks tidak muncul karena jumlah indikator hanya ada tiga, sehingga derajat bebas sama dengan nol. Ketiga indikator tersebut tidak perlu diragukan lagi unidimensionalitasnya karena dikembangkan dari beberapa penelitian yaitu (Disperindag, 2000 ; Manan, 1999 ; Allison Morson, 1999).

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi internal dari indikator-indikator konstruk struktur usaha dan varians ekstrak untuk mengetahui indikator-indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk struktur usaha yang dikembangkan (Augusty, 2002:62-63).. Untuk mengukur kedua uji tersebut diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA struktur usaha (Y2) dapat dilihat pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26
RELIABILITAS KONSTRUK DAN VARIANS EKSTRAK
STRUKTUR USAHA (Y2)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
Y2.1	0,9510	0,9044	0,0956
Y2.2	0,8344	0,6962	0,3038
Y2.3	0,8963	0,8034	0,1966
Jumlah	2,6817	2,4040	0,5960

Sumber : Lampiran 12

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :

$$\frac{(2,6817)^2}{(2,6817)^2 + 0,5960} = \frac{7,1915}{7,7875} = 0,9235.$$

Nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,9235, artinya ketiga indikator tersebut sudah dikatakan reliabel karena koefisien reliabilitas > 0.7 (Augusty, 2002)

$$\text{Varians ekstrak} = \frac{2,4040}{2,4040 + 0,5960} = \frac{2,4040}{3,000} = 0,8013.$$

Hasil varians ekstrak $0,8013 > 0,5$, dapat dikatakan bahwa ketiga indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk struktur usaha (Y2).

Berdasarkan Tabel 5.26 di atas dapat dijelaskan bahwa konstruk struktur usaha dibentuk oleh persentase pertumbuhan jumlah investasi (Y2.1) sebesar 0,9510,

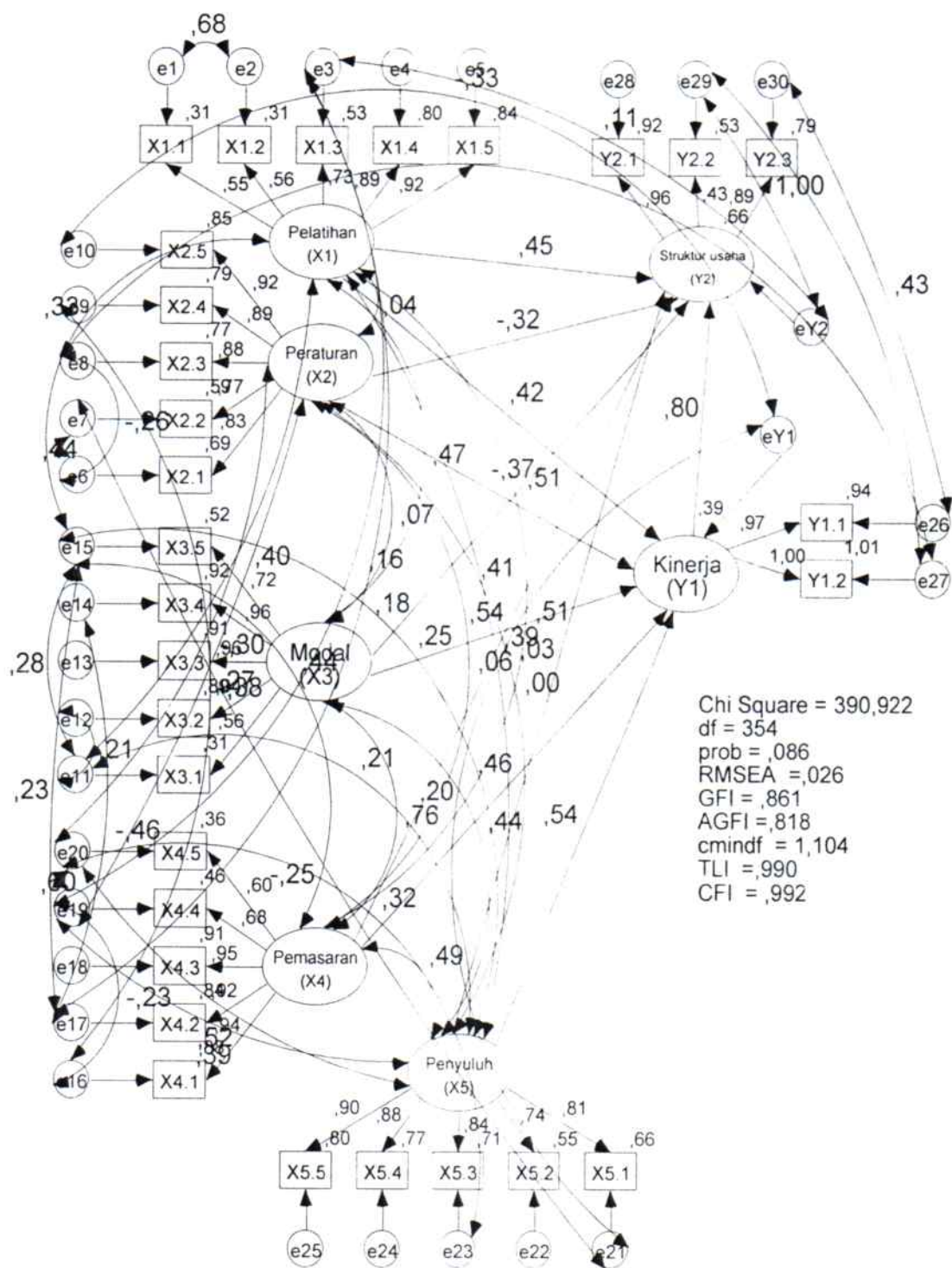
persentase pertumbuhan penyerapan jumlah tenaga kerja (Y2.2) sebesar 0,8344, persentase pertumbuhan jumlah omzet penjualan (Y2.3) sebesar 0,8963.

Ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan sehingga terdapat perubahan strata usaha (Disperindag, 2002).

5.3.10 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Terhadap Kinerja dan Struktur Usaha

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas tentang pengujian setiap faktor dengan analisis faktor konfirmatori dan telah berhasil diidentifikasi dari suatu variabel laten yang dapat digunakan dalam model.

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah meliputi pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan tenaga penyuluh terhadap kinerja dan struktur usaha akan dilakukan pengujian dengan menggunakan model persamaan struktural melalui program AMOS 4.0. Hasil analisis model persamaan struktural dapat dilihat pada Gambar 5.14, setelah dilakukan tiga puluh satu kali modifikasi indeks (lampiran 13).



Chi Square = 390,922
df = 354
prob = ,086
RMSEA = ,026
GFI = ,861
AGFI = ,818
cmin/df = 1,104
TLI = ,990
CFI = ,992

Keterangan : = indikator variabel = variabel laten → = mempengaruhi

Gambar 5.14

MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL TAHAP AKHIR

Hasil evaluasi *goodness of fit Index* selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.27.

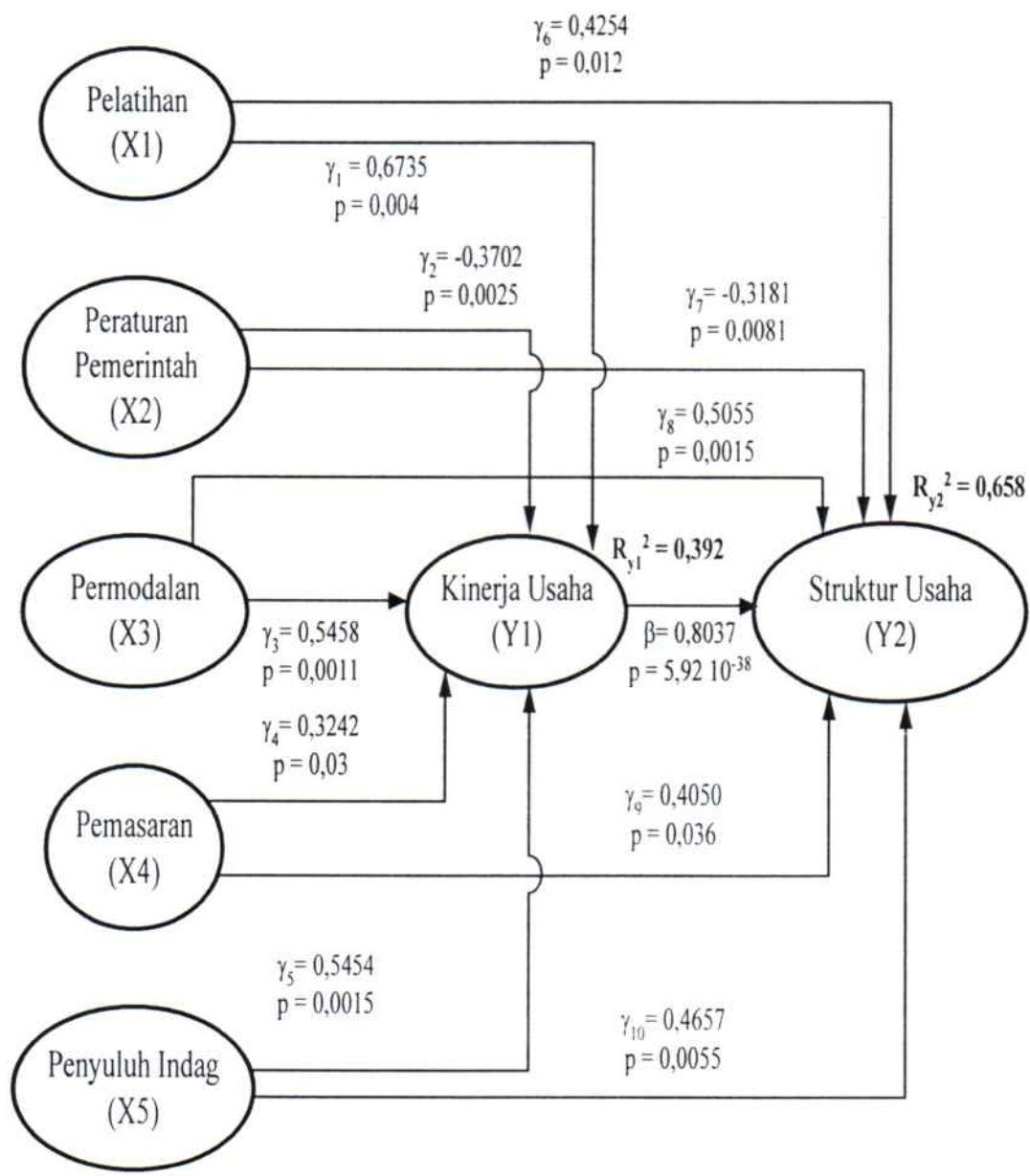
Tabel 5.27
GOODNESS OF FIT INDEX MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL
TAHAP AKHIR

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
<i>Chi Square</i>	Kecil	390.922	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0.086	sudah fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0.026	baik
GFI	$\geq 0,90$	0.861	Kurang Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0.818	Kurang Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1.104	baik
TLI	$\geq 0,95$	0.990	baik
CFI	$\geq 0,95$	0.992	baik

Sumber : Lampiran 13

Berdasarkan Tabel 5.27 dapat diketahui bahwa hanya dua parameter *Goodness of Fit* kurang baik, tetapi nilai probabilitas error $0.086 > 0.05$ menunjukkan model tersebut sudah fit, sehingga dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang tata kelola pembinaan pemerintah sudah fit dengan model konseptualnya.

Apabila model akhir pada Gambar 5.14 digambarkan secara garis besar dengan memperlihatkan koefisien jalur beserta probabilitas erronya akan tampak seperti Gambar 5.15. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh industri perdagangan terhadap kinerja usaha dan struktur usaha, serta pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha akan ditampilkan nilai koefisien jalur, Critical Ratio dan probabilitas error pada Tabel 5.28.



Gambar 5.15
PENGARUH TATA KELOLA PEMBINAAN PEMERINTAH (PELATIHAN,
PERATURAN PEMERINTAH, PERMODALAN, PEMASARAN,
PENYULUH INDAG) TERHADAP KINERJA USAHA DAN
STRUKTUR USAHA

Tabel 5.28
KOEFSIEN JALUR, CRITICAL RATIO DAN PROBABILITAS ERROR
PENGARUH TATA KELOLA PEMBINAAN PEMERINTAH
(PELATIHAN, PERATURAN PEMERINTAH, PERMODALAN,
PEMASARAN, PENYULUH INDAG) TERHADAP KINERJA
DAN STRUKTUR USAHA

Variabel	Koef. Jalur	CR	Prob	Keterangan
Pelatihan → Kinerja usaha	0,6735	2,8967	0,004	Signifikan
Peraturan pemerintah → Kinerja usaha	-0,3702	-3,0351	0,0025	Signifikan
Permodalan → kinerja usaha	0,5458	3,2801	0,0011	Signifikan
Pemasaran → kinerja usaha	0,3242	2,1767	0,003	Signifikan
Penyuluh indag → kinerja usaha	0,5454	3,1855	0,0015	Signifikan
Pelatihan → struktur usaha	0,4254	2,5213	0,012	Signifikan
Peraturan pemerintah → struktur usaha	-0,3181	-2,6602	0,0081	Signifikan
Permodalan → struktur usaha	0,5055	3,1959	0,0015	Signifikan
Pemasaran → struktur usaha	0,4050	2,1091	0,036	Signifikan
penyuluh indag → struktur usaha	0,4657	2,7938	0,0055	Signifikan
Kinerja usaha → struktur usaha	0,8037	14,558	5,92 10 ⁻³⁸	Signifikan

Sumber : Lampiran 13

Keterangan : → menunjukkan dipengaruhi oleh

Berdasarkan Tabel 5.28 dapat diketahui hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,004 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh pelatihan terhadap kinerja usaha sebesar 0,6735.
2. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan melalui peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,0025 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh peraturan pemerintah terhadap kinerja usaha sebesar - 0,3702.

3. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,0011 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh permodalan terhadap kinerja usaha sebesar 0,5458.
4. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,003 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh pemasaran terhadap kinerja usaha sebesar 0,3242.
5. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh industri perdagangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,0015 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh penyuluh indag terhadap kinerja usaha sebesar 0,5454.
6. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,012 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh pelatihan terhadap struktur usaha sebesar 0,4254
7. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan melalui peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,0081 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh peraturan pemerintah terhadap struktur usaha sebesar -0,3181.

8. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,0015 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh permodalan terhadap struktur usaha sebesar 0,5055.
9. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,036 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh pemasaran terhadap struktur usaha sebesar 0,4050.
10. Hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluhan indag berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $0,0055 < 0,05$. Koefisien jalur pengaruh penyuluhan terhadap struktur usaha sebesar 0,4657.
11. Hipotesis yang menyatakan kinerja usaha berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara diterima karena probabilitas error $5,92 \cdot 10^{-38} < 0,05$ Koefisien jalur pengaruh kinerja terhadap struktur usaha sebesar 0,8037.

Berdasarkan Gambar 5.15 dapat dibuat tabel pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Pengaruh langsung adalah pengaruh konstruk pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluhan indag terhadap kinerja usaha dan struktur usaha. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh konstruk pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluhan indag terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha. Pengaruh total

merupakan jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung. Rincian ketiga pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan terhadap kinerja usaha dan struktur usaha.
2. Pengaruh langsung tata kelola pembinaan melalui peraturan pemerintah terhadap kinerja usaha dan struktur usaha.
3. Pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan terhadap kinerja usaha dan struktur usaha.
4. Pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran terhadap kinerja usaha dan struktur usaha.
5. Pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag terhadap kinerja usaha dan struktur usaha.
6. Pengaruh tidak langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha.
7. Pengaruh tidak langsung tata kelola pembinaan pemerintah peraturan pemerintah terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha.
8. Pengaruh tidak langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha.
9. Pengaruh tidak langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha.
10. Pengaruh tidak langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha.

11. Pengaruh total tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan terhadap struktur usaha.
12. Pengaruh total tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan peraturan pemerintah terhadap struktur usaha.
13. Pengaruh total tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan terhadap struktur usaha.
14. Pengaruh total tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran terhadap struktur usaha.
15. Pengaruh total tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag terhadap struktur usaha.

Hasil analisis SEM atas pengaruh langsung, tidak langsung dan total antara variabel pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh indag terhadap kinerja usaha dan struktur usaha dapat dilihat pada tabel 5.29.

Berdasarkan Tabel 5.43 dapat dijelaskan pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung pelatihan teknis terhadap kinerja usaha sebesar 0,6735, terhadap struktur usaha sebesar 0,4254.
2. Pengaruh langsung peraturan pemerintah terhadap kinerja usaha sebesar - 0,3702, terhadap struktur usaha sebesar - 0,3181.
3. Pengaruh langsung permodalan terhadap kinerja usaha sebesar 0,5458, terhadap struktur usaha sebesar 0,5055.
4. Pengaruh langsung pemasaran terhadap kinerja usaha sebesar 0,3242, terhadap struktur usaha sebesar 0,4050.

Tabel 5.29
PENGUJIAN PENGARUH LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG DAN
PENGARUH TOTAL TATA KELOLA PEMBINAAN PEMERINTAH
TERHADAP STRUKTUR USAHA

Pengaruh langsung		
Variabel	Kinerja usaha (Y1)	Struktur Usaha (Y2)
Pelatihan (X1)	0,6735	0,4254
Peraturan pemerintah (X2)	-0,3702	-0,3181
Permodalan (X3)	0,5458	0,5055
Pemasasaran (X4)	0,3242	0,4050
Penyuluh indag (X5)	0,5454	0,4657
Kinerja usaha (X6)	0,000	0,8037
Pengaruh tidak langsung		
Pelatihan (X1)	0,000	0,2865
Peraturan pemerintah (X2)	0,000	-0,1178
Permodalan (X3)	0,000	0,2759
Pemasasaran (X4)	0,000	0,1313
Penyuluh indag (X5)	0,000	0,2539
Kinerja usaha (X6)	0,000	0,000
Pengaruh total		
Pelatihan (X1)	0,000	0,924
Peraturan pemerintah (X2)	0,000	-0,488
Permodalan (X3)	0,000	0,8217
Pemasasaran (X4)	0,000	0,4555
Penyuluh indag (X5)	0,000	0,7993
Kinerja usaha (X6)	0,000	0,8037

Sumber : Lampiran 13

5. Pengaruh langsung penyuluh indag terhadap kinerja usaha sebesar 0,5454, terhadap struktur usaha sebesar 0,4657.
6. Pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha sebesar 0,2865.
7. Pengaruh tidak langsung peraturan pemerintah terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha sebesar -0,1178.
8. Pengaruh tidak langsung permodalan terhadap kinerja usaha melalui kinerja usaha sebesar 0,2759.

9. Pengaruh tidak langsung pemasaran terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha sebesar 0,1313.
10. Pengaruh tidak langsung penyuluh inidag terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha sebesar 0,2539.
11. Pengaruh total pelatihan terhadap struktur usaha 0,9240.
12. Pengaruh total peraturan pemerintah terhadap struktur usaha sebesar 0,4880.
13. Pengaruh total permodalan terhadap struktur usaha 0,8217.
14. Pengaruh total pemasaran terhadap struktur usaha 0,4555
15. Pengaruh total penyuluh indag terhadap struktur usaha 0,7993.

BAB 6

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap hasil peneltiian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, temuan teoritis dan keterbatasan penelitian. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada temuan empiris maupun teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan atas analisis yang dilakukan, akan diuraikan pengaruh dari masing-masing variabel tata kelola pembinaan pemerintah terhadap kinerja usaha dan struktur usaha dan pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha.

6.1.1 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,8967 dan nilai probabilitas (p) sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima.

Besarnya pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan teknis terhadap kinerja usaha sebesar 0,6735, artinya apabila ada

kenaikan tanggapan responden tentang mutu program, materi yang diajarkan instruktur, perubahan perilaku pengusaha setelah mengikuti pelatihan teknis, kompetensi para Instruktur, pencapaian tujuan pelaksanaan program pelatihan teknis sebesar satu satuan skor maka kinerja pengusaha naik 0.6735 dengan asumsi pengaruh variabel lain terhadap kinerja usaha tetap.

Pengaruh antara setiap indikator pembentuk konstruk pelatihan dengan kinerja usaha dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) semakin bermutu program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka semakin meningkat pula kinerja usaha para pengusaha industri kecil. Mutu program pelatihan yang tepat sasaran, dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha dalam memperbaiki kinerja perusahaan ; (2) semakin sesuai materi yang diajarkan oleh para instruktur terhadap kebutuhan peserta pelatihan, maka semakin meningkat pula kinerja usaha para pengusaha industri kecil. Prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik, ketrampilan teknis produksi dan pemasaran yang diajarkan instruktur dapat meningkatkan pendapatan pengusaha ; (3) semakin tinggi perubahan perilaku pengusaha setelah mengikuti pelatihan, semakin meningkat kinerja usaha para pengusaha industri kecil. Pelatihan tidak hanya sekadar menambah pengetahuan dan ketrampilan tetapi lebih mengarah pada perubahan sikap pengusaha ke arah yang lebih baik ; (4) semakin kompeten para instruktur semakin meningkat pula kinerja usaha para pengusaha industri kecil. Kompetensi instruktur dalam penyampaian dan penguasaan materi sangat diperlukan dalam setiap pelatihan supaya para pengusaha industri kecil yang sebagian besar lulusan SD (44,67%) dapat menyerap dengan baik dan menerapkannya di perusahaan ; (5) Tujuan

pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan, maka semakin tinggi pencapaian tujuan pelaksanaan program pelatihan semakin meningkat pula kinerja usaha para pengusaha industri kecil..

Hasil penelitian ini mendukung data empiris pada tabel 1.1 yang menginformasikan adanya pertumbuhan jumlah unit usaha industri mikro, kecil dan menengah mulai tahun 1998 sampai tahun 2001 dengan pertumbuhan rata-rata 11,12% per tahun. Pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya perubahan perilaku pengusaha dan peningkatan kemampuan untuk meningkatkan kinerja usahanya dan pencapaian tujuan pelaksanaan program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penghasilan pengusaha industri kecil.

Hasil analisis faktor konfirmatori pada setiap indikator yang membentuk konstruk pelatihan pada tabel 5.20 menunjukkan hasil yang positif dan signifikan serta semua nilai loading lebih besar dari 0,5. Hasil penelitian ini mendukung teori prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan yang dikemukakan oleh Anwar Prabu (2003), Ismail (2002) dan Depperindag (2002). Oleh karena itu kebijakan pemerintah tentang pelatihan harus tetap memperhatikan kelima indikator tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung teori Human Capital yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui pendidikan dan pelatihan. Setiap tambahan satu satuan pendidikan dan latihan akan meningkatkan kemampuan kerja, ketrampilan dan tingkat penghasilan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja usaha (Simanjuntak, 1998).

Investasi pemerintah melalui biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pelatihan ini merupakan investasi jangka panjang dari arus waktu dan uang yang hasilnya akan dapat dilihat kembali berupa peningkatan laba usaha yang pada akhirnya nanti meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi usaha industri mikro dan kecil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel 1.3 yang menginformasikan bahwa pada tahun 2002 terdapat 2.874,38 ribu unit usaha mikro kecil dengan penyerapan tenaga kerja 7.592,52 ribu orang dapat memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 55,69 triliun rupiah lebih besar dibandingkan dengan industri menengah sebesar 54,38 triliun rupiah. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan industri mikro kecil memang perlu perhatian yang sangat serius dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka agar lebih produktif.

Melalui pelatihan diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kerampilan tetapi sekaligus dapat merubah perilaku pengusaha dengan melakukan pekerjaan yang lebih efektif untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar (Tan Chuee Hurt dan Derch Torrington, 1998 dan Chiu Warren, 1999).

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Sarder Ghost and Rosa (1997) terhadap 161 pengusaha industri kecil di Bangladesh dan William Cole (1999) yang meneliti tentang kemitraan usaha di Philipina bahwa kemitraan dalam investasi, teknologi, jalur informasi, dan kemitraan bisnis secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja klaster di Philipina. Leo Paul Dana (1999) menggunakan pendekatan kualitatif menunjukkan pembinaan

pemerintah melalui EOMEX di Yunani mampu mengatasi permasalahan ekonomi dengan cara memasarkan hasil kerajinan tangan. Murp F B Aji (1999) membuktikan bahwa tata kelola pembinaan pemerintah/ BUMN/ P/D berupa (Kemitraan, kemampuan mahaerial, pendidikan, teknologi, kewirausahaan, aliran informasi pasar, ketrampilan teknis) mempengaruhi Kinerja UKM (Variabel terikat) di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ada yang menggunakan pendekatan kualitatif (Leo Paul Dana, 1999), menggunakan analisis regresi liner berganda (Sarder Ghost and Rosa, 1997 ; Murp F B Aji (1999) ; Moeljadi, 1999) jika dibandingkan dengan penelitian ini belum ada yang menggunakan SEM, sehingga penelitian terdahulu hanya sebatas menguji pengaruh variabel (konstruk kalau di SEM) tanpa bisa menguji apakah setiap indikator tersebut dapat membentuk konstruk atau tidak. Oleh karena itu penelitian ini lebih akurat karena mengikutsertakan indikator dalam menguji setiap konstraknya, sehingga dapat diketahui berapa persen reliabilitas indikator tersebut dalam membentuk konstruk.

Dukungan hasil penelitian ini terhadap beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesamaan karakteristik pengusaha industri kecil di negara manapun yaitu memerlukan bantuan pelatihan untuk meningkatkan kinerja.

Namun demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Moeljadi (1999) yang mengatakan bahwa pelatihan berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha karena adanya kekeliruan dalam menentukan : sasaran pelatihan, kurikulum kurang sesuai, indentifikasi kebutuhan peserta,

kapasitas lembaga pelatihan tidak memadai, pelaksanaan pola pelatihan kurang dilengkapi alat peraga dan media belajar mengajar yang memadai.

Berdasarkan teori, beberapa penelitian terdahulu baik yang menolak maupun yang mendukung tentang hubungan pelatihan terhadap kinerja usaha dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan teknis bagi pengusaha industri kecil sangat berpengaruh terhadap kinerja dengan syarat harus memperhatikan mutu program pelatihan, dapat mengidentifikasi program apa saja yang dibutuhkan oleh para pengusaha kecil secara periodik agar program yang disampaikan tepat sasaran, menyusun kurikulum baik teori teori maupun praktek secara berkesinambungan Kompetensi para instruktur sangat membantu para pengusaha dalam memahami materi yang disampaikan dengan cara antara lain : pemberian materi secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Perubahan perilaku pengusaha setelah mengikuti pelatihan teknis dapat berlangsung apabila ada pemberian motivasi dari instruktur agar segera mempraktekkan hasil pelatihan. Tata kelola pembinaan pemerintah ini meski harus dipantau secara berkesinambungan untuk melihat perubahan perilaku pengusaha.

6.1.2 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa peraturan pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini dapat dilihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif dengan nilai Critical Ratio (CR) -3,0351 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0025 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang

menyatakan peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima.

Besarnya pengaruh langsung tata kelola pembinaan melalui peraturan pemerintah di bidang penerbitan ijin terhadap kinerja usaha sebesar $-0,3702$, dengan asumsi pengaruh variabel lain terhadap kinerja usaha tetap. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa tujuan peraturan pemerintah untuk menerbitkan izin-izin usaha adalah untuk memberikan legalitas dan keleluasaan bagi pengusaha untuk memproduksi barang baik yang akan dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri. Namun implementasi tata kelola pembinaan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha kurang sesuai dengan juknis sebagaimana ditentukan, akibatnya peraturan pemerintah berdampak negatif terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dari tanggapan para pengusaha industri kecil yaitu : (1) persyaratan yang diminta cukup berbelit-belit, (2) Petugas kadang-kadang tidak jujur dalam memberikan keterangan dan informasi tentang rincian dan jumlah biaya pengurusan izin yang sebenarnya harus dikeluarkan pemohon ijin; (3) Waktu pengurusan izin, petugas kurang memperhatikan kecepatan proses dan ketepatan pelayanan sehingga selesainya lambat ; (4) persyaratan administrasi berupa dokumen penyerta yang dipersyaratkan tidak sederhana sehingga kurang dapat dipenuhi ; (5) petugas kurang mampu menjelaskan dengan baik tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, kurang menguasai peraturan dan kurang trampil untuk membantu pengusaha/pemohon, sehingga pengusaha dibuat bingung. Karena kelima hal ini pengusaha menjadi enggan mengurus izin usahanya, akibatnya pengusaha tidak bisa mendapatkan bantuan permodalan, sulit untuk mendapatkan

fasilitas dalam mengembangkan pangsa pasar dalam negeri maupun ekspor, sehingga kinerja usahanya tidak meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di lapangan diperoleh informasi bahwa iklim usaha yang kondusif yang diciptakan oleh pemerintah tidak bisa diakomodasi oleh para pengusaha. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengusaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan administratif seperti pengisian formulir yang kurang dimengerti, NPWP, pernyataan tentang industri tidak mencemari lingkungan, HO dan sebagainya. Implementasi yang tidak sesuai dengan juknis tata kelola pembinaan pemerintah ternyata menurunkan kinerja usaha para pengusaha industri kecil, ini dibuktikan oleh hasil koefisien jalur sebesar $-0,3702$.

Jika dilihat sepintas dari hasil analisis menunjukkan penurunan kinerja usaha, padahal berdasarkan data empirik pada Tabel 1.1 selama lima tahun mulai tahun 1998 sampai tahun 2001 terjadi pertumbuhan jumlah unit usaha rata-rata 11,12% pertahun, dan kontribusi nilai tambah IMKM terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan sebesar 14,26% selama tahun 2000 (Tabel 1.4). Hal ini mengindikasikan meskipun layanan para petugas dalam menerbitkan ijin belum sesuai dengan harapan pengusaha, namun para pengusaha industri kecil berusaha untuk tetap memperoleh ijin. Layanan petugas yang kurang memuaskan pengusaha tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, pemerintah harus segera memperbaikinya. Jika hal ini tetap dibiarkan dalam kondisi yang kurang baik, ada kemungkinan pengusaha akan enggan untuk mengurus izin usaha. Hal ini juga memberikan dampak pada penurunan pertumbuhan jumlah unit usaha pada tahun-tahun mendatang dan kontribusi nilai tambah IMKM terhadap industri kecil secara

nasional juga akan menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami mengapa peraturan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha.

Fakta empirik pada Tabel 2.3 menginformasikan bahwa biaya pengurusan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di beberapa kabupaten di Jawa Timur berkisar Rp 25.000 sampai Rp 350.000 apalagi di kota besar seperti Surabaya harganya bisa melambung sampai Rp 700.000. Hal ini membuktikan tidak ada patokan biaya yang pasti dalam pengurusan penerbitan SIUP. Di Provinsi Sumatera Utara masih ada pengusaha industri kecil yang tidak memiliki SIUP dan TDP sebanyak 27,33%, sedangkan yang tidak memiliki Tanda Daftar Industri sebanyak 23,23%. Fakta ini baru 150 unit usaha yang diambil sebagai sampel dari jumlah keseluruhan populasi sebanyak 2468 unit usaha. Jika dilihat dari banyaknya pouplulasi berarti dapat diprediksi masih banyak unit usaha yang belum memiliki izin usaha.

Oleh karena itu pemerintah harus mengevaluasi tentang implementasi kebijakan khususnya pada aparat pelaksana penerbitan izin usaha di lapangan. Evaluasi terhadap kebijakan publik juga harus dilihat dari membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan awalnya, sehingga dapat diketahui apakah kesenjangan implementasi di lapangan dengan tujuan yang sangat mulia tersebut masih lebar atau sudah bisa dipersempit. Dalam teori kebijakan publik dikatakan bahwa setiap implementasi kebijakan harus disertai dengan evaluasi (Hesel Nogi, 2003). Dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana dampak dari implementasi kebijakan pembinaan pemeritah melalui peraturan pemerintah dalam penerbitan ijin terhadap kinerja usaha.

Jika dilihat hasil analisis faktor konfirmatori pada tabel 5.25, menunjukkan kelima indikator tersebut cukup kuat hubungannya dalam membentuk konstruk peraturan pemerintah dengan nilai loading masing masing : layanan penerbitan izin sesuai dengan prosedur sebesar 0,6652, kejujuran petugas memberikan keterangan tentang biaya pengurusan penerbitan izin sebesar 0,5903, kecepatan proses dan ketepatan layanan sebesar 0,6649, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebesar 0,7262, dan kemampuan petugas memahami peraturan penerbitan izin sebesar 0,8894. Kelima indikator tersebut membentuk unidimensionalitas dan signifikan. Tetapi pada kenyataannya tanggapan responden tentang implementasi peraturan pemerintah dalam pemberian izin usaha masih rendah dengan nilai rata-rata 2,8493.

Kontrasnya hasil analisis faktor konfirmatori dengan nilai rata-rata tanggapan responden menunjukkan kelima indikator tersebut berperan sangat penting membentuk tata kelola pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah tentang penerbitan izin usaha, namun implementasi di lapangan tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Perindag (2000) pada industri kecil Perak di Pasuruan terpaksa mengekspor hasil produksinya berupa perhiasan dari bahan perak yang banyak digemari oleh masyarakat Eropa melalui pihak ketiga yaitu eksportir dari Bali karena eksportir tersebut memiliki izin yang dapat mendukung ekspor. Adanya pihak perantara untuk mengekspor produk akan mempertinggi biaya operasional sehingga laba usaha dapat turun, tingkat pengembalian penjualan (*Return on Sales*) dan tingkat pengembalian investasi

(ROI) menjadi rendah. Kegiatan bisnis di bidang perdagangan baik domestik apalagi perdagangan internasional sangat berkaitan erat dengan izin perdagangan, semakin banyak persyaratan dan peraturan yang harus dipenuhi dan semakin berbelit dalam rangka mendapatkan izin perdagangan ekspor akan berdampak terhadap rendahnya kinerja usaha (Godfrey Baldacchino, 1998). Selain sulit untuk melakukan pengembangan usaha atau ekspor, berbelitnya izin perdagangan juga menghambat pemanfaatan fasilitas kredit lunak dari pihak bank karena tidak dapat melampirkan ijin sebagai persyaratan administratif permohonan yang diajukan, akhirnya kinerja usaha menurun sehingga perusahaan terhambat perkembangannya (Dience Rumerang, 1992).

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori kebijakan Vasant Desai (2003) karena hasil dari operasi tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik berupa prosedur maupun instruksi. Oleh karena itu Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002-2004 merupakan salah satu produk kebijakan publik yang masih memerlukan evaluasi implementasi yang lebih baik lagi di lapangan.

Tata kelola pembinaan pemerintah yang bagus secara konsep tampaknya masih perlu dievaluasi kembali pada saat implementasi di lapangan apa saja kendalanya sehingga jangan sampai resiko terjadi kegagalan terlalu besar. Evaluasi ini dalam rangka untuk mengukur kesenjangan antara konsep tata kelola dan pelaksanaan di lapangan apakah hasil operasional kebijakannya itu sudah sesuai dengan prosedur maupun instruksi. Kualitas layanan perizinan yang prima sangat

diperlukan untuk mendapatkan izin usaha baik untuk keperluan domestik apalagi ekspor, karena tanpa adanya izin pengusaha sulit untuk meningkatkan kinerja usahanya.

6.1.3 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 3,2801 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0011 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima.

Besarnya pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan terhadap kinerja usaha sebesar 0,5458, dengan asumsi pengaruh variabel lain terhadap kinerja usaha tetap. Artinya apabila pemerintah semakin berperan untuk memberikan kemudahan mendapatkan akses sumber bantuan modal, merealisasikan realisasi bantuan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah, jangka waktu pengembalian pinjaman modal dan bunga (*grace period*) disesuaikan dengan kebutuhan jangka waktu pengolahan sampai dengan hasil produksi dapat dipasarkan, modal yang disalurkan oleh pemerintah cukup variatif, proposal yang diusulkan oleh pengusaha industri kecil sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pemerintah akan menaikkan kinerja pengusaha industri kecil sebesar 0,5458.

Pengaruh antara setiap indikator pembentuk konstruk permodalan dengan kinerja usaha dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Bahwa pemerintah berperan dalam memberikan akses sumber bantuan permodalan bagi pengusaha industri kecil dalam mencari tambahan nilai investasinya untuk meningkatkan pendapatan ; (2) Kesesuaian realisasi bantuan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah dengan kebutuhan pengusaha untuk meningkatkan nilai investasinya yang digunakan untuk mempercepat proses dan menambah kuantitas produksi dengan tujuan meningkatkan volume penjualan; (3) Penyesuaian jangka waktu pengembalian pinjaman modal dan bunga dengan kebutuhan jangka waktu pengolahan sampai dengan hasil produksi dapat memacu pengusaha untuk meningkatkan hasil produksinya ; (4) Semakin bervariasi jenis modal yang disalurkan oleh pemerintah semakin terbuka peluang untuk menambah nilai investasinya ; (5) semakin sesuai proposal yang diusulkan oleh pengusaha industri kecil dengan persyaratan yang diminta oleh pemerintah semakin mempercepat pencairan bantuan modal untuk menambah nilai investasi.

Fakta empirik pada tabel 1.4 menginformasikan bahwa persentase sumbangan industri mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan di Indonesia sebesar 27,20% atau sekitar Rp 66.750.032 (juta). Fakta ini menunjukkan bahwa adanya bantuan modal dari pemerintah dapat meningkatkan investasi di perusahaan. Bantuan ini dapat memberikan nilai tambah sebesar Rp 36.484.970 (juta). Artinya bantuan permodalan tersebut dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan keuntungan sekitar 54,66% dan besarnya keuntungan tersebut dapat memberikan kontribusi sebesar 14,26%

terhadap pertumbuhan industri secara nasional. Bantuan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah kepada para pengusaha industri kecil memang secara kuantitas tidak 100 persen jumlahnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pengusaha, tetapi besarnya nilai bantuan masih dikalkulasi kembali sesuai dengan persyaratan dan kelayakan proposal yang diajukan. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan akses permodalan antara lain melalui (1) kredit perbankan, (2) pinjaman lembaga keuangan bukan bank; (3) modal ventura; (4) pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan LPT Indag. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai investasi pengusaha industri kecil di Provinsi Sumatera Utara (gambar 6.1) dari rata-rata 3,54 juta sebelum dapat bantuan pembinaan pemerintah menjadi rata-rata 88,82 juta setelah dapat bantuan pembinaan pemerintah. Peningkatan yang sangat tinggi hampir mendekati 30 kali.

Hasil penelitian ini mendukung teori permodalan yang dikemukakan oleh Riyanto Bambang (1990). Bantuan permodalan yang cukup dan sesuai dengan harapan pengusaha merupakan proses terus menerus selama perusahaan beroperasi ditujukan untuk pengadaan bahan, keperluan proses produksi dan distribusi (penjualan).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Naro Zainimar (2000) yaitu faktor kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan para pengerajin industri kecil bordir dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin tinggi pula

kemampuannya untuk memperoleh pendapatan dan penyerapan tenaga kerja semakin besar.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Abdul Manan (1999) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan dan bantuan peralatan teknis memberikan pengaruh positif terhadap kinerja industri kecil di Jawa Timur.

Demikian juga hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Utami (1995) yang menyimpulkan bahwa faktor keunggulan strategis berupa perputaran aktiva dan biaya pemasaran berpengaruh terhadap volume penjualan. Pembinaan pemerintah kepada para pengusaha industri kecil tentang bagaimana cara memanfaatkan modal seefisien mungkin sehingga menghasilkan perputaran aktiva yang dapat meningkatkan omzet penjualan sangat penting.

Dukungan penelitian ini terhadap beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola pembinaan pemerintah melalui pemberian bantuan permodalan tidak harus berupa finansial tetapi bisa juga mesin dan peralatan produksi sesuai dengan kebutuhan, cara pemanfaatan modal seefisien mungkin sangat diperlukan pengusaha industri kecil untuk meningkatkan kinerja usahanya.

Oleh karena itu tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan perlu memperhatikan beberapa hal antara lain : (1) kesesuaian realisasi bantuan pemerintah baik berupa finansial maupun mesin dan peralatan produksi yang dibutuhkan pengusaha dalam rangka memperlancar kegiatan produksi maupun operasional, (2) jangka waktu pengembalian pinjaman modal dan bunga (*grace period*) yang tidak memberatkan pengusaha akan memberikan peluang bagi pengusaha untuk memutar modalnya, (3) bunga yang tidak terlalu tinggi juga tidak

membebani pengusaha dalam mengembalikan modal sehingga pengusaha dapat mengatur arus kas seberapa besar untuk pengembalian modal dan biaya operasional perusahaan. (4) jenis permodalan yang bervariasi memberikan banyak pilihan bagi pengusaha sesuai dengan tingkat kemampuan pengembaliannya. (5) kesesuaian proposal yang diusulkan dengan persyaratan yang diminta oleh pemerintah menunjukkan pengusaha sudah semakin memahami bagaimana penulisan proposal yang baik beserta persyaratannya hal ini tidak terlepas dari hasil pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah untuk memberikan akses permodalan ataupun bantuan modal langsung terhadap pengusaha IK- PED sangat dibutuhkan oleh pengusaha, karena masalah permodalan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pengusaha IK- PED di Provinsi Sumatera Utara.

6.1.4 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,1767 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima.

Besarnya pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran terhadap kinerja usaha sebesar 0,3242, dengan asumsi pengaruh

variabel lain terhadap kinerja usaha tetap. Artinya apabila pemerintah semakin berperan merealisasikan bantuan dana pemasaran melalui penyelenggaraan promosi, pameran, pembuatan leaflet, brosur, dan biaya media elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan pengusaha, menginformasikan harga, jumlah, mutu barang, yang diinginkan para importir di luar negeri, memberikan bantuan akses pasar ke luar negeri akan menaikkan kinerja usaha pengusaha industri kecil sebesar 0,3242.

Fakta empirik pada tabel 1.4 menginformasikan bahwa kontribusi omzet penjualan industri mikro kecil menengah terhadap pertumbuhan industri nasional sebesar 14,74% atau sekitar Rp 66.674.265 juta. Hal ini membuktikan bahwa bantuan pemasaran dalam rangka penyebaran informasi hasil produksi, harga, di dalam negeri maupun bantuan akses pasar ke luar negeri kepada para pengusaha industri kecil dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan industri nasional. Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 66.674.265 juta, artinya Return On Sales IMKM secara nasional sebesar 56,41%. Dapat dikatakan bahwa para pengusaha IMKM dapat memanfaatkan secara optimal bantuan pemasaran yang diberikan oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung teori Jauch dan Glueck (1999) tentang empat belas faktor-faktor internal pemasaran dan distribusi yang dapat diamati oleh perencanaan strategi pemasaran. Hal ini dapat dijelaskan keterkaitan antara keempatbelas faktor pada penelitian Jauch dan Gluech dengan penelitian sekarang sebagai berikut : (1) Realisasi bantuan dana pemasaran melalui penyelenggaraan promosi, bantuan pembuatan leaflet, brosur, biaya media elektronik, bantuan biaya

pameran yang diselurkan oleh pemerintah berfungsi sebagai iklan dan pemasaran yang efektif dan efisien; (2) Kegiatan promosi yang gencar merupakan bentuk komunikasi ke masyarakat dengan harapan barang yang ditawarkan akan mendapatkan respons. Kegiatan pameran dalam skala yang lebih luas akan menaikkan reputasi perusahaan dan sangat berpeluang terjadinya transaksi di pameran tersebut bahkan terjadi kerjasama perdagangan antar perusahaan domestik maupun dengan luar negeri dalam skala nilai produksi dan omzet penjualan yang lebih tinggi ; (4) Informasi harga, jumlah, mutu barang, yang diinginkan para importir di luar negeri yang diinformasikan oleh pemerintah pada penelitian ini merupakan bentuk strategi yang efektif untuk produk dan jasa dalam rangka menciptakan pangsa pasar yang lebih luas ; (5) Bantuan akses pasar dari pemerintah sesuai dengan jangkauan pemasaran hasil produksi ke luar negeri dalam penelitian ini merupakan perluasan jalur distribusi dan liputan geografis yang efisien dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pembinaan pemerintah dalam bidang pemasaran industri kecil juga mengikutsertakan langkah-langkah strategi pemasaran.

Kelima indikator pemasaran tersebut dapat dilaksanakan secara optimal bila didahului dengan riset pasar (Glueck, 1999) pada bauran pemasaran produk dan jasa, sistem layanan hingga konsumen akhir dengan tujuan memperkuat posisi daya saing dengan pengusaha sejenis dari propinsi lain yang sangat memungkinkan untuk masuk ke propinsi Sumatera Utara. Posisi daya saing ini ditentukan oleh kemampuan asset usaha dan kemampuan inti dari perusahaan sebagai indikator dari peningkatan kinerja usaha (John, 1992). Tidak kalah pentingnya diferensiasi

produk sebagai salah satu indikator keunggulan daya saing (Porter, 2000). Diferensiasi ini dapat dilakukan pada kualitas produk, jenis produk, harga sehingga dapat memperluas lini produk selain produk utama.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Leo Paul Dana (1999) dan Acar (1993) yang mengidentifikasi pengaruh faktor lingkungan internal terhadap kinerja usaha pada perusahaan kecil terutama yang berkaitan dengan indikator pemasaran pada penelitian ini yaitu kemampuan pemasaran, kemampuan manajemen dan kemampuan strategi.

Oleh karena itu tata kelola pembinaan pemerintah dalam memberikan bantuan pemasaran tidak sebatas secara finansial yang berhubungan dengan bauran pemasaran tetapi juga bantuan riset pasar untuk mendukung pelaksanaan strategi pemasaran guna meningkatkan omzet penjualan.

6.1.5 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Indag Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa penyuluh industri dan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini dapat ditunjukkan koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 3,1855 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0015 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan penyuluh industri dan perdagangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima.

Besarnya pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh terhadap kinerja usaha sebesar 0,5454, dengan asumsi pengaruh

variabel lain terhadap kinerja usaha tetap. Artinya apabila pemerintah semakin berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha, memberikan informasi tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik, meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugasnya, melalui tenaga penyuluh Indag akan dapat merubah perilaku para pengusaha, dalam rangka meningkatkan kinerja usaha industri kecil sebesar 0,5454.

Hasil analisis faktor konfirmatori pada setiap indikator yang membentuk konstruk penyuluhan pada tabel 5.35 menunjukkan hasil yang positif dan signifikan serta semua nilai loading lebih besar dari 0,5. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Zeitham dalam Ridwan (2003). Oleh karena itu tata kelola pembinaan pemerintah tentang penyuluhan harus tetap memperhatikan kelima indikator tersebut.

Pengaruh setiap indikator penyuluh terhadap kinerja dapat dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail (2003) : (1) penyuluhan semakin bermanfaat pada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha, semakin dapat mengevaluasi dan menganalisis ekonomi usahanya apakah kinerja usahanya saat ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya ; (2) semakin sesuai informasi tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha, maka semakin mampu untuk melakukan analisis situasi dan merumuskan tindakan masa akan datang bagaimana caranya supaya kinerja usaha meningkat minimal tetap dari waktu ke waktu ; (3) semakin berkompeten dan berpengalaman para instruktur dalam melaksanakan tugasnya dapat meningkatkan kualitas SDM, dan kualitas manajerial para

pengusaha kecil ; (4) semakin berhasil penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah untuk merubah perilaku para pengusaha semakin meningkat pengembangan mentalitas dan moralitas kerja yang positif, maju dan profesional dalam memajukan perusahaannya ; (5) semakin tanggap para penyuluh terhadap masalah bisnis dan menyelesaikannya dengan tuntas semakin meningkat pengetahuan dan pengembangan wawasan usaha para pengusaha industri kecil dalam meningkatkan daya saing perusahaan menjadi perusahaan yang berkinerja tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung teori kehadiran penyuluh yang dikemukakan oleh Shapiro, Eccles, and Soske (1993), Ivancevich (1996) dan Hermosilla (1997) secara garis besar menyatakan bahwa kehadiran tenaga penyuluh untuk dapat meningkatkan kinerja usaha. Dengan adanya tenaga penyuluh beberapa kendala seperti cara meningkatkan daya saing, pengembangan mutu dan ketrampilan manajemen dapat diatasi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Leo Paul Dana (1999) pada pengusaha industri kecil di Yunani. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan seminar bekerja sama dengan institusi lain terkait dalam mendirikan laboratorium seni di sekolah-sekolah dengan tujuan agar para seniman muda dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pameran, membantu penjualan produk. Sedangkan Murp FB Aji (1999) dan Abdul Manan (1999) menggunakan bantuan tenaga ahli dan pola kemitraan dalam pemberian penyuluhan. Berdasarkan ketiga peneliti terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola pembinaan pemerintah dalam menyelenggarakan penyuluhan kepada para pengusaha industri kecil perlu bekerja

sama dengan institusi lain yang terkait, menggunakan bantuan ahli dan mengembangkan pola kemitraan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Moeljadi (1999), karena pendampingan yang dilakukan pemerintah cenderung menimbulkan ketergantungan kegiatan usaha yang pada gilirannya menjadikan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif, jika hal ini terjadi maka program penyuluhan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja usaha, tetapi malah memberikan pengaruh negatif. Disamping hal diatas, diketahui pula bahwa bantuan tenaga penyuluh indag yang dilakukan oleh pemerintah adalah secara umum untuk semua jenis industri dan diaplikasikan secara umum (Top Down) . Pada hal yang sebenarnya adalah Bottom Up. Artinya setiap pelaksanaan penyuluhan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha (Bottom Up).

Tata kelola pembinaan pemerintah melalui kegiatan penyuluh sangat diperlukan untuk : mengatasi kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha, mengembangkan mentalitas dan moralitas kerja yang positif, maju dan profesional, tetapi hal ini harus didukung oleh kompetensi dan pengalaman, pendidikan yang memadai dan menunjang kemampuan teknis para tenaga penyuluh dalam melaksanakan tugas. Tanpa adanya kompetensi dan pengalaman tenaga penyuluh, pendidikan yang memadai maka kegiatan penyuluhan cenderung menciptakan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif. Kegiatan penyuluhan dapat diadakan dalam bentuk seminar dan kerja sama dengan institusi lain yang terkait. Kebijakan ini jangan sampai mengurangi kemandirian pengusaha dan menciptakan ketergantungan

dengan pemerintah. Kerjasama dengan instansi lain yang kompeten di bidangnya dan menggunakan bantuan tenaga ahli sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan keberhasilan program penyuluhan.

6.1.6 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,5213 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,012 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap struktur unit usaha diterima.

Besarnya pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan terhadap struktur usaha sebesar 0,4254, artinya apabila ada kenaikan tanggapan responden tentang mutu program, kesesuaian materi yang diajarkan dengan harapan pengusaha, perubahan perilaku pengusaha setelah mengikuti pelatihan teknis, kompetensi para Instruktur, pencapaian tujuan pelaksanaan program penyuluhan sebesar satu satuan skor maka, akan menaikkan struktur unit usaha pengusaha industri kecil sebesar 0,4254, dengan asumsi pengaruh variabel lain terhadap struktur usaha tetap.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Suparmoko (2002) dan Syafri Mangkuprawira T. B (2003) bahwa pelatihan tidak hanya dipandang sebagai suatu pembelajaran sesaat, melainkan proses belajar berkelanjutan di seluruh lapisan karyawan dalam meningkatkan ketrampilan teknis .

dan produktivitas karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan struktur usaha. Pengusaha yang sudah mengikuti pelatihan akan memiliki kemampuan untuk mengelola usaha dan termotivasi untuk menghemat kapital, menghemat tenaga kerja, menekan biaya produksi, meningkatkan permintaan, dan menaikkan mutu produksi. Penghematan modal, tenaga kerja dan penekanan biaya produksi akan menambah aset perusahaan, karena terjadi efisiensi biaya produksi dan tenaga kerja. Tambahan aset perusahaan ini dapat digunakan untuk menambah nilai investasi sehingga terjadi pertumbuhan nilai investasi, yang awalnya usaha industri mikro menjadi usaha industri kecil. Peningkatan mutu produksi dapat meningkatkan permintaan hasil produksi yang berpengaruh pada pertumbuhan omzet penjualan.

Untuk meningkatkan struktur usaha pemerintah telah menyelenggarakan pelatihan yang diikuti oleh pengusaha kecil di Provinsi Sumatera Utara yaitu diklat kewirausahaan sebanyak 97 responden (64,67%), diklat manajemen sederhana sebanyak 37 responden (24,67%), *Achievement Motivation Training* (AMT) sebanyak 11 responden (7,33%), *Creation of Entreprises Formation of Entrepreneur* (CEFE) sebanyak 5 responden (7,33%).

Hasil penelitian ini maupun penelitian terdahulu didukung oleh fakta empirik pada tabel 1.1 yang menginformasikan bahwa pertumbuhan industri mikro dan kecil rata-rata sebesar 11,12% per tahun hampir 2 kali lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan industri menengah yang hanya 6,24% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi struktur usaha yang pada awalnya sebagai usaha industri mikro, setelah memperoleh pelatihan teknis,

pengusaha memiliki kemampuan untuk mengelola usaha menekan biaya produksi, meningkatkan permintaan, dan menaikkan mutu sehingga berdampak terhadap struktur usaha

Pengusaha setelah mengikuti pelatihan teknis diharapkan memiliki kemampuan sebagai innovator mampu menggunakan modal secara optimal, pemanfaatan tenaga kerja, penekanan biaya produksi, peningkatan permintaan, pemakaian bentuk organisasi yang lebih baik, pembukaan pasar-pasar baru (Suparmoko, 2002 dan Subanar Harimurti, 1998).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Johor La Presse (1992) yang dilakukan bagi pengusaha industri kecil di Quebec bahwa setelah pemerintah membantu melaksanakan program pelatihan 32,5% dari perusahaan telah tumbuh dalam tiga tahun setelah pelatihan terakhir dan mempunyai potensi akan lebih berkembang di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya mempengaruhi kinerja usaha tetapi juga mengembangkan struktur usaha.

Kualitas produk yang baik merupakan hasil inovasi dari pengusaha setelah mendapat pengetahuan dan ketrampilan teknis selama mengikuti pelatihan yang bermuara pada peningkatan penjualan dan keuntungan produk, perluasan pasar dengan melakukan kegiatan ekspor dan pertumbuhan investasi (Suparmoko, 2002, Hema Wijewardane, 1999 dan Camille Carier, 1999).

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan teknis dapat meningkatkan kemampuan untuk menekan biaya produksi, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi

Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan teknis dalam rangka meningkatkan struktur usaha diupayakan dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan faktor-faktor produksi seperti menghemat kapital, menghemat tenaga kerja, menekan biaya produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan permintaan, membuka pasar-pasar baru dengan kegiatan ekspor. Peningkatan kemampuan pengelolaan beberapa faktor tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan omzet penjualan sebagai indikator struktur usaha.

Pertumbuhan nilai investasi dan omzet penjualan usaha industri kecil di Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai investasi pada saat menjadi pengusaha industri mikro sebelum ada pembinaan pemerintah rata-rata 3,54 juta, setelah ada pembinaan pemerintah meningkat menjadi rata-rata 88,82 juta dan angka ini tergolong usaha industri kecil. Pertumbuhan nilai investasi dari usaha industri mikro menjadi usaha industri kecil sekitar 80-96%, suatu nilai pertumbuhan yang sangat luar biasa. Omzet penjualan pada saat menjadi pengusaha industri mikro sebelum ada pembinaan pemerintah rata-rata 19,12 juta, setelah ada pembinaan pemerintah meningkat menjadi rata-rata 62,81 juta dan angka ini tergolong usaha industri kecil. Pertumbuhan nilai omzet penjualan dari usaha industri mikro menjadi usaha industri kecil sekitar 36-91%, suatu nilai pertumbuhan yang sangat luar biasa.

6.1.7 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa peraturan pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif dengan nilai CR - 2,6602 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0081 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha diterima.

Besarnya pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah terhadap struktur usaha sebesar -0,3181, dengan asumsi pengaruh variabel lain terhadap struktur usaha tetap. Hal ini terjadi karena implementasi peraturan pemerintah dalam penerbitan izin usaha pada kenyataannya kurang didukung oleh aparat pelaksana di lapangan, sehingga para pengusaha industri kecil enggan mengurus perizinan. Kondisi demikian mengakibatkan para pengusaha tidak bisa meningkatkan jumlah investasinya melalui bantuan permodalan yang disediakan oleh pemerintah karena tidak memiliki izin usaha sebagai persyaratan utama untuk memperoleh pinjaman baik yang berdumber dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Namun demikian walaupun pengusaha belum memiliki ijin usaha yang lengkap, para pengusaha industri kecil tetap termotivasi untuk meningkatkan pertumbuhan nilai investasinya dengan cara pemupukan modal sendiri dari.

Hasil tanggapan responden menunjukkan para pengusaha industri kecil sebagian besar 76,67% menggunakan modal sendiri dan hanya 23,23% dapat

bantuan pemerintah. Meskipun menggunakan modal sendiri ternyata dapat meningkatkan nilai investasi dari 3,54 juta (tergolong industri mikro) sebelum dibina oleh pemerintah menjadi 88,82 juta (tergolong industri kecil) setelah dibina oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa dengan berbekal pada kemampuan dan kerampilan untuk mengelola modal sendiri dari hasil mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan nilai investasi sehingga terjadi struktur usaha dari industri mikro menjadi industri kecil.

Kurangnya dukungan aparat pelaksana dalam mengimplemetasikan tata kelola pemerintah khususnya penerbitan izin usaha tidak dapat dibiarkan terlalu lama. Karena penggunaan modal sendiri untuk meningkatkan struktur usaha mengandung resiko cukup besar. Apabila pengelolaan modal untuk investasi tidak berhasil, karena biaya operasional lebih tinggi daripada peningkatan omzet penjualan, akan menyebabkan penurunan nilai investasi sehingga struktur usaha bisa kembali menjadi usaha mikro.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami meskipun koefisien tata kelola pembinaan peraturan pemerintah dalam penerbitan izin usaha bernilai negatif, ternyata masih dapat meningkatkan struktur usaha.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Vasant Desai (2003), karena peraturan pemerintah atau regulasi dengan struktur pertumbuhan unit usaha merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tata kelola pemerintah yang diwujudkan dalam penerbitan izin usaha diupayakan mendukung pertumbuhan unit usaha industri mikro menjadi industri kecil.

Tetapi kenyataannya tidaklah demikian, peraturan pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan struktur usaha, melalui hasil penelitian ini berpengaruh negatif. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara tata kelola yang dibuat dengan implementasi tata kelola tersebut oleh petugas pelaksana di lapangan.

Adanya kesenjangan ini berakibat para pelaku bisnis enggan untuk mengurus izin-izin tersebut meskipun sebenarnya perizinan itu sangat diperlukan sebagai instrumen vital dalam memanfaatkan berbagai fasilitas kredit bank dengan bunga lunak untuk pengadaan bahan baku, pemasaran ekspor, dan sebagainya. Hasilnya dapat dilihat di mana pertumbuhan unit usaha menjadi lamban bahkan berhenti di tempat (tidak ada penambahan investasi, omzet penjualan yang tidak betumbuh, penyerapan tenaga kerja yang tidak meningkat, akses sumber bahan baku yang terbatas, perluasan pasar berupa produk ekspor yang tidak dapat bersaing (Disperindag 2002). Tidak adanya pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan omzet penjualan mengakibatkan tidak adanya peningkatan struktur usaha.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Bido A Budiman (2005) terhadap pengusaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa, hambatan utama para pengusaha untuk menanamkan investasi baik dalam perluasan maupun membuka usaha baru di Jawa Timur adalah masalah perizinan. Diketahui bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan izin membuka usaha baru, perluasan kapasitas produksi riil masih berbelit-belit walaupun semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Mestinya jika semua

dokumen yang dibutuhkan sebagai pelengkap permohonan mendapatkan izin, seharusnya dalam waktu satu hari izin sudah keluar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Hambatan berinvestasi berarti rendahnya pertumbuhan nilai investasi, hambatan perluasan kapasitas produksi riil berarti tidak dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga pertumbuhan omzet penjualan menjadi rendah. Rendahnya pertumbuhan kedua faktor tersebut mengindikasikan rendahnya peningkatan struktur usaha. Pengusaha industri mikro tidak bisa meningkatkan struktur usahanya menjadi pengusaha industri kecil.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Baldacchino (1997) yang dilakukan di Lembah Suva ibukota Fiji dan di Jepang. Penelitian Baldachhino membuktikan bahwa industri kecil produk sabun tradisional berhasil menembus pasar Eropa, Afrika Selatan dan Amerika Utara karena didukung oleh kemudahan dalam perizinan untuk pemasaran ekspor, pengemasan yang baik dan bantuan fasilitas internet dalam memasarkan hasil produksinya dapat meningkatkan volume pemasaran produk.

Oleh karena itu tata kelola pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah dibidang penerbitan ijin usaha, harus diikuti dengan bagusnya implementasi tata kelola sesuai dengan petunjuk teknis, serta didukung oleh kehandalan petugas di lapangan. Kemudian didukung oleh layanan yang berkualitas yang diberikan oleh petugas dalam membantu pengusaha industri kecil untuk memperoleh izin usaha, para pengusaha industri kecil dapat meningkatkan nilai investasinya dengan mencari tambahan modal, dapat meningkatkan omzet penjualan dengan melakukan ekspor, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja

karena adanya peningkatan permintaan barang. Pertumbuhan ketiga faktor inilah yang akan meningkatkan struktur usaha dari usaha industri mikro menjadi industri kecil.

6.1.8 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 3,1959 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0015 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan permodalan berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha diterima.

Besarnya pengaruh langsung tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan terhadap struktur usaha sebesar 0,5055, dengan asumsi pengaruh variabel lain terhadap struktur usaha tetap. Artinya apabila pemerintah semakin berperan untuk memberikan kemudahan mendapatkan akses sumber bantuan modal, realisasi bantuan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah, jangka waktu pengembalian pinjaman modal dan bunga (*grace period*) tidak memberatkan pengusaha, modal yang disalurkan oleh pemerintah cukup variatif, proposal yang diusulkan oleh pengusaha industri kecil sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pemerintah akan meningkatkan struktur usaha sebesar 0,5055.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Teo dan Low (1993) Wijewardena and Cooray (1995) Tan and Tay (1994), bahwa bantuan permodalan

dari pemerintah berupa mesin, gedung, dan sarana prasarana lainnya mendorong pertumbuhan industri kecil menengah di Singapore, dan Kobe di Jepang.

Bantuan permodalan pemerintah kepada industri mikro kecil dan menengah diupayakan sebagai sarana mengatasi kendala permodalan dengan cara : (1) meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri, (2) meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan, (3) meningkatkan kemampuan manajemen keuangan, (4) menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2005).

Keberhasilan tata kelola pembinaan pemerintah untuk mengatasi kendala permodalan dengan cara meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri berpengaruh terhadap struktur usaha. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 76,67% pengusaha industri kecil di Provinsi Sumatera Utara mengembangkan usahanya berasal dari modal sendiri digunakan untuk menambah nilai investasi dengan membeli mesin-mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi, memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Peningkatan permintaan pasar mengindikasikan adanya peningkatan omzet penjualan. Hal ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden berkaitan dengan pertumbuhan omzet penjualan. Berawal dari industri mikro dengan rata-rata omzet penjualan 19,12 juta menjadi industri kecil dengan rata-rata omzet penjualan 62,81 juta. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan pemerintah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan modal sendiri dapat meningkatkan struktur usaha dari industri mikro menjadi industri kecil.

Keberhasilan pengusaha industri kecil Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola modal sendiri dapat ketahui dari Tabel 1.6. Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai investasi tujuh komoditi usaha industri kecil sebesar Rp 15.849.231.000 dapat menghasilkan nilai produksi sebesar Rp 64.732.293.000. Rasio antara nilai produksi dengan nilai investasi sebesar 408,43%, artinya pengusaha industri kecil berhasil meningkatkan nilai investasi karena keberhasilannya meningkatkan nilai produksi empat kali lipat. Suatu angka peningkatan yang cukup signifikan.

Meskipun terdapat peningkatan omzet penjualan dengan menggunakan modal sendiri, namun berdasarkan hasil wawancara terhadap pengusaha industri kecil diketahui bahwa pengusaha industri masih mengharapkan bantuan pemerintah agar lebih berperan untuk mengakses atau memberikan bantuan permodalan secara langsung untuk mengatasi kendala permodalan yang dihadapi oleh pengusaha.

Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan jangan sampai menumbuhkan budaya karitas, hal ini jelas tidak mendidik. Tetapi diupayakan pemberian modal kepada pengusaha industri kecil dalam rangka mendidik pengusaha supaya lebih mampu untuk manage modal yang pada akhirnya nanti meningkatkan kemampuan modal pengusaha sendiri. Hal ini untuk menghindari ketergantungan kepada pemerintah.



6.1.9 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,1091 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,036 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler (1997). Pengusaha yang memperoleh bantuan pemasaran menjadi tahu bagaimana menyesuaikan diri pada pasar yang terus berubah, dengan melakukan perencanaan strategis yang berwawasan pasar, mengembangkan dan menjaga keselarasan antara sasaran, sumber daya, kemampuan dan peluang, melakukan proses perencanaan strategis pada tingkat korporasi, tingkat bisnis dan tingkat produk.

Pasar yang terus berubah memberikan peluang kepada para pengusaha untuk meningkatkan nilai-nilai tambah pada produk sesuai dengan selera dan permintaan konsumen, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan layanan pada konsumen dan perencanaan strategis lainnya. Peluang ini harus diantisipasi dan ditangkap melalui perencanaan yang matang dengan peningkatan mutu tenaga kerja yang ada dalam perusahaan, peningkatan kemampuan berproduksi, penambahan nilai investasi. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam menginformasikan mutu barang, harga, maupun jumlah barang yang dibutuhkan oleh pasar agar dapat

direncanakan bagaimana caranya untuk memenuhi semua hal yang dibutuhkan oleh pasar. Jika hal ini tidak dapat dilakukan oleh pengusaha industri kecil, maka tidak akan terjadi pertumbuhan omzet penjualan, sehingga tidak akan meningkatkan struktur usaha.

Untuk meningkatkan omzet penjualan dapat dilakukan kegiatan 4P yaitu : (1) pencarian informasi pemasaran yang diperlukan ; (2) penonjolan diri untuk meyakinkan konsumen ; (3) penghematan ongkos produksi dan penjualan ; (4) pelayanan konsumen bagi terciptanya kelangsungan pembelian (Subanar Harimurti, 1998).

Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam menginformasikan tentang harga, jumlah, mutu barang yang dibutuhkan oleh pasar kepada pengusaha industri kecil. Dengan informasi ini pengusaha dapat mengatur strategi bagaimana caranya supaya ketiga hal tersebut dapat dipenuhi, karena berhubungan dengan permintaan pasar yang nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan omzet penjualan. Peranan pemerintah bagi pengusaha industri kecil sangat diperlukan berkaitan dengan penonjolan diri untuk meyakinkan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan biaya pameran. Dalam pameran tersebut, pengusaha dapat menampilkan produk-produk berkualitas sesuai dengan selera pasar dan bertemu langsung dengan calon pembeli. Hal yang sering terjadi adalah adanya peningkatan omzet penjualan pada saat mengikuti pameran dan adanya permintaan pasar yang melebihi kapasitas produksi sehingga pengusaha perlu menambah nilai investasi dengan mempebarui mesin-mesin yang sudah tidak memenuhi syarat untuk berproduksi atau menambah mesin-mesin baru untuk memenuhi permintaan pasar. Tidak hanya itu, proses pembelian ulang dapat terjadi setelah pameran itu usai.

Peranan pemerintah bagi pengusaha industri kecil sangat diperlukan berkaitan dengan penghematan ongkos produksi dan penjualan dapat dilakukan dengan cara bantuan akses pemasaran. Bantuan ini akan memberikan keuntungan bagi pengusaha dalam memasarkan produknya tepat sasaran sesuai dengan potensi pangsa pasar. Hal ini dapat menghemat ongkos produksi dan penjualan karena dapat diketahui dengan pasti produk apa yang dibutuhkan, berapa jumlah permintaannya, berapa harga yang dapat ditawarkan, berapa biaya distribusinya. Penghematan ongkos produksi dan penjualan, hasilnya dapat digunakan untuk menambah nilai investasi. Kualitas layanan konsumen sangat menunjang bagi terciptanya hubungan antara pengusaha industri kecil selaku penjual dengan pembeli. Peranan pemerintah untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan bantuan akses pasar dari pemerintah sesuai dengan jangkauan pemasaran hasil produksi. Hal ini berkaitan dengan ketepatan waktu pengiriman hasil produksi sampai ke tangan konsumen sebagai salah satu aspek tingginya kualitas layanan yang diberikan oleh pengusaha. Layanan yang berkualitas berpengaruh pada pembelian ulang yang akan meningkatkan pertumbuhan omzet penjualan.

Untuk industri mikro kecil menengah yang mempunyai kendala dalam melakukan promosi dan pameran antara lain (Nurcahyadi, 2005) : terbatasnya dana promosi dan pameran yang dimiliki oleh para pengusaha, tidak mampu mencari pasar sendiri sehingga masih banyak terlibat dalam pasar konvensional. Hal ini dapat diatasi dengan cara : pendirian pusat-pusat pameran sebagai wadah bagi para IMKM untuk berpameran dan bertransaksi dengan buyer baik lokal maupun luar negeri, membuat jaringan ke luar negeri dalam rangka memperluas pasar

internasional, mengikut sertakan para pengusaha secara langsung untuk berpameran di luar negeri (yang difasilitasi oleh pemerintah), penyebaran informasi harga produk negara importir dan jenis produk yang dibutuhkan pasar dalam maupun luar negeri, penyebaran Informasi kualitas dan kuantitas permintaan produk yang di distribusikan melalui bagian perdagangan luar dan dalam negeri, informasi jalur distribusi dan liputan geografis yang efisien dan efektif.

Keberhasilan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran dapat dibuktikan dengan hasil tanggapan kuesioner tentang pertumbuhan omzet penjualan berkisar 36,00 – 91,0% atau rata-rata 19,12 juta ketika menjadi industri mikro sebelum adanya pembinaan menjadi 62,81 juta menjadi industri kecil setelah adanya pembinaan. Dari 150 responden pengusaha industri kecil ternyata diperoleh hasil yang cukup menggembirakan yaitu sebanyak 111 industri kecil (74%) berada pada tingkatan sedang (dengan omzet penjualan berkisar 54,33 – 72,66 %) sampai tinggi (dengan omzet penjualan berkisar 72,67 – 91,00%), hanya 39 industri kecil (26,00%) berada pada tingkatan rendah (dengan omzet penjualan berkisar 36,00 – 54,32 %).

Bantuan pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pemasaran para pengusaha industri kecil untuk mencapai target segmen pasar, akses terhadap posisi pasar/produk alternatif, dengan strategi harga, periklanan, promosi, distribusi, pelayanan purna jual (Khan dan Rocha, 1982 ; Sa dan Hambrick, 1998 dan Dess dan Davism 1984) dapat meningkatkan volume penjualan pengusaha industri kecil.

Kebeijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran dapat membentuk pengusaha industri kecil lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan pemasaran yang terus mengalami perubahan dengan melakukan perencanaan strategis supaya dapat menangkap peluang pasar. Bantuan pencarian informasi pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar, bantuan penyelenggaraan pameran untuk menampilkan produk-produk berkualitas, bantuan akses pemasaran untuk sesuai dengan jangkauan pemasaran untuk menghemat ongkos produksi, penjualan dan memberikan kualitas layanan yang prima bagi konsumen.

6.1.10 Pengaruh Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Indag Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa penyuluh indag berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,7938 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0055 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan penyuluh indag berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Rubalcaba (1999), Gonzales (1999) yang menyatakan bahwa penyuluhan terhadap pengusaha-pengusaha meningkatkan dinamisasi ekonomi di kebanyakan di negara Eropa dan Spanyol.

Penyuluh industri dan perdagangan mempunyai kedudukan sangat strategis karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan bimbingan/pendampingan langsung bagi pengusaha terutama di pedesaan. Manfaat bantuan

penyuluhan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Sebagian besar para pengusaha industri kecil di Provinsi Sumatera Utara berpendidikan lulus SD (44,67%), sehingga perlu pendampingan secara langsung dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dapat berupa penekanan biaya produksi, peningkatan permintaan, penghematan tenaga kerja. Pendampingan pada pengusaha industri kecil harus didukung oleh kompetensi dan pengalaman tenaga penyuluh, karena tidak mudah memberikan pengertian dan pemahaman tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan struktur usaha pada lulusan SD. Perubahan perilaku pengusaha sebagai tolak ukur mulai *actionnya* para pengusaha setelah menerima penyuluhan. Pengusaha dapat mengatur keuangan dengan membdakan keuangan perusahaan dengan keuangan rumah tangga sehingga dapat mengalokasikan dana untuk menambah nilai investasi.

Adanya dinamisasi ekonomi dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menginformasikan persentase tingkat pertumbuhan jumlah unit usaha industri mikro dan kecil dari tahun 1998-2001 mengalami pertumbuhan rata-rata 11,12%. Sumber dari Depperindag (2003) menyatakan bahwa selama kurun waktu lima tahun (1999-2003) terdapat pertumbuhan rata-rata per tahun pada jumlah unit usaha sebesar 9%, penyerapan tenaga kerja sebesar 7,8%, jumlah investasi sebesar 8,8% dan nilai produksi 7,8%. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh dalam pengelolaan usaha yang efektif dan profesional.

Sebagaimana dilaporkan Manas dalam penelitiannya (1992) menyatakan bahwa tenaga penyuluh digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Eropa yaitu : di Spanyol 23% pengusaha IKM menggunakan tenaga penyuluh, Italy 47%, kerajaan Inggris 34%. Para tenaga penyuluh/pendamping sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha (pertumbuhan usaha) di bidang pemasaran (35,6%), organisasi (26,5%), perbaikan mutu (23,1%) penyuluhan lain-lainnya (14,8%).

Manfaat kegiatan pendampingan untuk meningkatkan struktur usaha di bidang pemasaran, organisasi dan perbaikan mutu produksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Kegiatan pendampingan yang berkaitan dengan pemasaran dapat dilakukan dengan pengembangan jaringan usaha. Penyuluh harus mengetahui dengan melakukan wawancara secara langsung tentang komoditi apa yang diproduksi, berapa item produknya, berapa jumlah produksi dalam satu bulan, berapa harga yang ditawarkan per item produk. Data ini dapat digunakan untuk mengembangkan jaringan usaha ke daerah-daerah pemasaran yang potensial, yang sangat berminat membeli produk tersebut. Dengan cara seperti ini, permintaan dari pangsa pasar potensial dapat dipenuhi oleh pengusaha industri kecil, sehingga kesenjangan antara permintaan dan penawaran dapat dipersempit. Apabila tingginya permintaan pangsa pasar sesuai dengan penawaran yang diberikan oleh pengusaha industri kecil selalu dapat dipenuhi, maka akan terjadi peningkatan omzet penjualan. Namun bila tidak dapat dipenuhi, maka akan terjadi penurunan omzet penjualan. Kegiatan pendampingan yang berkaitan dengan organisasi dapat dilakukan dengan pengelolaan usaha yang efektif dan profesional. Penyuluh

harus mengetahui secara langsung berapa tingkat pengembalian investasinya (ROI). Apabila tingkat pengembalian investasinya rendah maka dapat dipastikan laba usahanya juga rendah. Hal ini mengindikasikan rendahnya pertumbuhan omzet penjualan, sehingga peningkatan struktur usahanya lambat. Demikian juga apabila tingkat pengembalian penjualannya (ROS) rendah, maka dapat dipastikan laba usahanya juga rendah, karena hasil penjualannya banyak digunakan untuk biaya operasional perusahaan antara lain gaji karyawan, biaya pemeliharaan alat-alat produksi. Rendahnya laba akan sulit untuk meningkatkan nilai investasi yang diperlukan untuk peremajaan alat-alat produksi atau menambah alat-alat produksi baru. Kegiatan pendampingan yang berkaitan dengan perbaikan mutu dapat dilakukan dengan pembukaan akses bahan baku, peningkatan mutu dan proses produksi. Penyuluh terlebih dahulu mengetahui secara langsung proses pembuatan barang produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi. Tindakan ini untuk mengetahui apakah bahan baku yang digunakan sudah bermutu atau belum, karena barang jadi yang dihasilkan dari bahan baku yang kurang bermutu hasilnya kurang bermutu pula. Apabila barang jadi diketahui hasilnya kurang bermutu, sesegera mungkin dibantu untuk dapat mengakses bahan baku yang lebih bermutu. Bila hal ini dibiarkan terlalu lama dapat dipastikan akan terjadi penurunan omzet penjualan, karena pasti konsumen akan kecewa dengan melakukan pembelian barang produksi yang kurang bermutu. Pendampingan penyuluh untuk meningkatkan proses produksi berhubungan dengan efisiensi penggunaan bahan baku, alat-alat produksi dan tenaga kerja. Penggunaan bahan baku untuk menghasilkan barang jadi yang terlalu berlebihan dapat memperbesar biaya produksi. Demikian juga penggunaan

alat-alat produksi yang sebetulnya dapat lebih optimal untuk menghasilkan barang produksi, ternyata tidak digunakan seoptimal mungkin. Penggunaan tenaga kerja yang terlalu berlebihan akan menimbulkan ketidakefisienan penggunaan tenaga kerja. Ketiga hal tersebut dapat menambah biaya operasional perusahaan, sehingga dapat menurunkan laba. Penurunan laba dapat menurunkan tingkat pengembalian investasi (ROI), sehingga dana untuk menambah nilai investasi minim. Hal ini mengindikasikan rendahnya pertumbuhan nilai investasi.

Kehadiran tenaga pendamping diperlukan untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan pengusaha mikro kecil karena pada umumnya mereka tidak punya jiwa kewirausahaan. Jiwa wirausaha yang akan membangun usahanya bukan hanya bermodal keberanian tanpa perhitungan, tetapi keberanian yang didukung kemampuan manajerial dan sistem pengadministrasian yang benar. Di awal usaha para pengusaha dengan adanya para penyuluh tidak lagi *trial error* karena resiko gagal teramat besar. Hal ini akan menghemat modal, waktu serta tenaga. Keberhasilan pengusaha meningkatkan struktur usahanya tidak terlepas dari peran penyuluh untuk memberikan arah dan membantu kemampuan merumuskan kebijakan strategi dalam memanfaatkan faktor produksi (Apibunyopas, 1983) dan kejelian pengusaha dalam memanfaatkan kesempatan mencari ceruk pasar yang masih dapat diakses (Viljoen, 1991 ; Kotler, 1995).

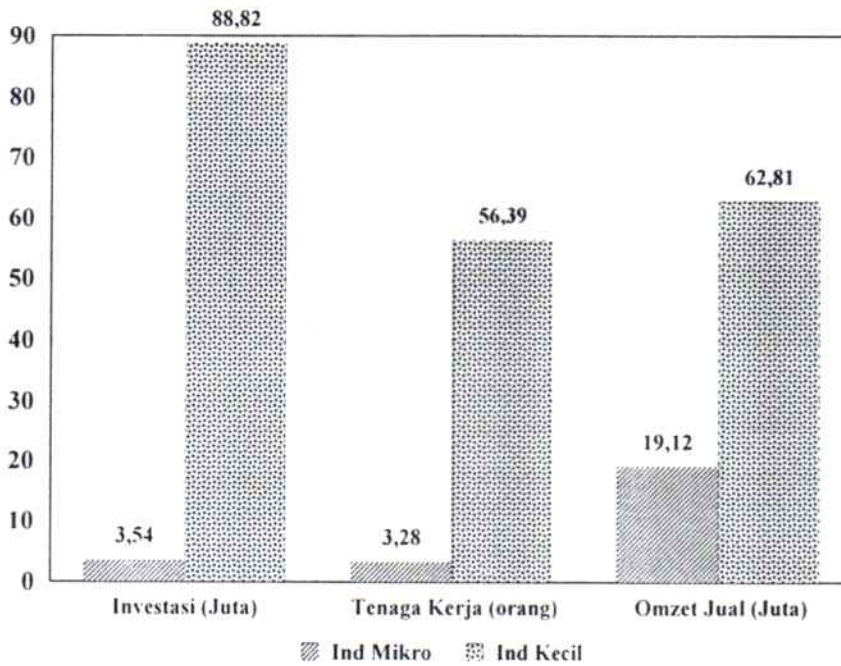
Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi untuk senantiasa secara terus menerus meningkatkan dinamisasi ekonomi nasional. Hal ini dapat diidentifikasi dengan adanya pertumbuhan jumlah unit usaha industri mikro kecil, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja,

pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan nilai produksi. Apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut mengalami stagnasi atau angka pertumbuhannya rendah, maka dapat dipastikan dinamisasi ekonomi tidak berjalan atau lebih tepat dikatakan jalan di tempat. Dinamisasi ekonomi akan tetap terjaga pertumbuhannya apabila tata kelola pembinaan pemerintah melalui penyuluhan mengarah pada pendampingan di bidang pemasaran, organisasi, dan perbaikan mutu serta proses produksi. Selain itu tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru yang akan membangun usahanya bukan hanya bermodal keberanian tanpa perhitungan, tetapi keberanian yang didukung kemampuan manajerial dan sistem pengadministrasian yang benar, juga menjadi indikasi adanya dinamisasi ekonomi.

6.1.11 Pengaruh Kinerja Usaha Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.42, menunjukkan bahwa kinerja usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 14,558 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar $5,92 \cdot 10^{-38}$ lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kinerja usaha berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha diterima.

Untuk mengetahui peningkatan struktur usaha dari industri mikro menjadi industri kecil dilihat dari pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan omzet penjualan seperti pada gambar 6.1.



Gambar 6.1
GRAFIK PENINGKATAN STRUKTUR USAHA
DARI INDUSTRI MIKRO MENJADI INDUSTRI KECIL

Untuk mengetahui bukti empirik apakah peningkatan struktur usaha dari industri mikro menjadi industri kecil sebelum dan sesudah adanya pembinaan pemerintah terhadap Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah (IK-PED) melalui ketiga indikator (Jumlah Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan besarnya omzet penjualan) tersebut benar-benar berbeda secara signifikan atau tidak, dapat dijelaskan dengan uji beda t berpasangan (*paired sample t test*) dan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan struktur usaha tersebut dapat dijelaskan dengan uji korelasi seperti digambarkan pada grafik 6.1.

Tabel 6.1
UJI PERBEDAAN DAN PENINGKATAN STRUKTUR USAHA DARI
INDUSTRI MIKRO MENJADI INDUSTRI KECIL

Indikator	Uji beda (t hitung)	Sig.	Ket	Uji Korelasi	Sig.	Ket
Investasi	-266,754	1,44310 ⁻²⁰¹	Signifikan	-0,4173	1,08510 ⁻⁷	Signifikan
Penyerapan tenaga kerja	-56,879	6,04810 ⁻¹⁰³	Signifikan	-0,8648	3,93110 ⁻⁴⁶	Signifikan
Omzet penjualan	-32,690	7,47310 ⁻⁷⁰	Signifikan	-0,5138	1,77010 ⁻¹¹	Signifikan

Keterangan: * tanda negatif menunjukkan investasi, penyerapan tenaga kerja, omzet penjualan pada industri mikro (sebelum dibina) lebih rendah dibandingkan dengan setelah adanya pembinaan pemerintah.
Sumber : Lampiran 14

Berdasarkan gambar 6.1 dan perhitungan kedua uji di atas dapat diketahui bahwa ada peningkatan struktur usaha dari indusri mikro menjadi industri kecil dilihat dari

1. Investasi pada strata industri mikro sebelum dibina dengan nilai rata-rata Rp 3,54 juta, meningkat menjadi rata-rata Rp 88,82 juta setelah dibina yaitu menjadi strata industri kecil. Investasi ketika masih industri strata mikro (sebelum dibina) menjadi industri strata kecil (setelah dibina) menunjukkan adanya perbedaan sangat signifikan dengan kenaikan sekitar 41,73%.
2. Penyerapan tenaga kerja pada industri strata mikro sebelum dibina sebesar rata-rata 3 orang, meningkat menjadi rata-rata 56 orang setelah dibina menjadi industri kecil. Penyerapan tenaga kerja ketika masih industri mikro (sebelum dibina) menjadi industri kecil (setelah dibina) menunjukkan adanya perbedaan sangat signifikan dengan kenaikan sekitar 86,48%.
3. Omzet penjualan pada industri mikro sebelum dibina senilai rata-rata 19,12 juta, meningkat menjadi rata-rata 62,81 juta setelah dibina menjadi industri kecil. Omzet penjualan ketika masih industri mikro (sebelum dibina) menjadi

industri kecil (setelah dibina) menunjukkan adanya perbedaan sangat signifikan dengan kenaikan sekitar 51,38%.

Berdasarkan data-data di atas terlihat jelas adanya peningkatan struktur unit usaha yang sangat signifikan, tetapi hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut struktur usaha industri kecil berdasarkan kategori rendah, sedang dan tinggi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar industri kecil yang berada di ketiga kategori di atas.

Secara empirik hasil penelitian terhadap indikator kinerja usaha yaitu nilai pengembalian penjualan (ROS) dan nilai pengembalian investasi (ROI) dari 150 industri kecil yang diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut (Tabel 5.6) :

1. Nilai pengembalian penjualan (ROS) : 104 industri kecil (69,33%) berada pada tingkatan sedang (27,25 – 34,74 %) sampai tinggi (34,75 – 42,24 %), sedangkan hanya 46 industri kecil (30,67%) nilai ROS nya berada pada tingkatan rendah (19,75 – 27,24 %).
2. Untuk nilai pengembalian investasi (ROI) : 105 industri kecil (70,00%) berada pada tingkatan sedang (23,78 – 36,41 %) sampai tinggi (36,42 – 49,05%), sedangkan hanya 45 industri kecil (30,00%) nilai ROI nya berada pada tingkatan rendah (11,15 – 23,77 %).

Hasil ini membuktikan bahwa setelah adanya pembinaan oleh pemerintah kinerja usaha perusahaan industri kecil berada pada tingkatan sedang sampai tinggi.

Secara empirik hasil penelitian ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah investasi, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan, pertumbuhan omzet

penjualan dari 150 industri kecil yang diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut (Tabel 5.8) :

1. Pertumbuhan jumlah investasi : sebanyak 126 industri kecil (84%) berada pada tingkatan sedang (85,33 – 90,66 %) sampai tinggi (90,67 – 96,00 %), sedangkan hanya 24 industri kecil (16,00%) berada pada tingkatan rendah (80,00 – 85,32 %).
2. Pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja : sebanyak 118 industri kecil (78,66%) berada pada tingkatan sedang (48,14 – 62,95 %) sampai tinggi (62,96 – 77,77 %), sedangkan hanya 32 industri kecil (21,34%) berada pada tingkatan rendah (33,33 – 48,13 %).
3. Pertumbuhan jumlah omzet penjualan : sebanyak 111 industri kecil (74%) berada pada tingkatan sedang (54,33 – 72,66 %) sampai tinggi (72,67 – 91,00%), sedangkan hanya 39 industri kecil (26,00%) berada pada tingkatan rendah (36,00 – 54,32 %).

Hasil ini membuktikan bahwa setelah adanya pembinaan oleh pemerintah ada peningkatan struktur usaha pada industri kecil dilihat dari pertumbuhan investasi, jumlah penyerapan tenaga kerja dan jumlah omzet penjualan.

Hasil penelitian ini memperkuat teori struktur usaha Devine (1994) yang menyatakan bahwa masing-masing struktur mempunyai karakteristik yang berbeda dilihat dari investasi, penyerapan tenaga kerja, omzet penjualan. Dari hasil uji beda menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan struktur usaha dari industri mikro menjadi industri kecil dan sebagian besar berada dalam kategori sedang sampai tinggi.

Melalui peningkatan struktur usaha merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya, demikian yang dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 Februari 2005 dalam pidatonya menyambut tahun mikro keuangan di gedung SMESCO Promotion Center Jakarta. Pernyataan ini seharusnya segera diwujudkan oleh pemerintah dengan terus mengadakan pembinaan supaya pengusaha industri kecil yang masih berada di kategori rendah terutama ditinjau dari omzet penjualan dan investasi segera diupayakan naik menjadi kategori sedang bahkan tinggi. Bagi para pengusaha segera meningkatkan kinerja usahanya supaya meningkat juga struktur usahanya dari kategori rendah menjadi kategori sedang dan tinggi. Sinergi antara tata kelola pembinaan pemerintah dan kemauan meningkatkan kinerja usaha para pengusaha sangat diperlukan untuk mewujudkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk lebih memperkuat pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha, akan dilakukan analisis tabulasi silang dengan nilai Chi Kuadrat antara setiap indikator kinerja usaha dengan setiap indikator struktur usaha.

Hasil tabulasi silang ROS dengan pertumbuhan investasi dapat dilihat pada Tabel 6.2 Dari hasil nilai Chi Square sebesar 104,317 dengan probabilitas error $1,184 \cdot 10^{-21}$ lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka dapat dikatakan ada hubungan antara ROS dengan pertumbuhan investasi. Keeratan hubungan antar dua indikator tersebut sangat kuat yaitu sebesar 78,38%. Keeratan hubungan ini dapat

dilihat dari banyaknya industri kecil dan persentase pada setiap kategorinya dapat dijelaskan seperti pada tabel 6.2.

Table 6.2
TABULASI SILANG ROS DENGAN PERTUMBUHAN INVESTASI

Kategori		Pertumbuhan Investasi (Y2.1)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
ROS (Y1.1)	Rendah	19	25	2	46
		12,67%	16,67%	1,33%	30,67%
	Sedang	5	42	13	60
		3,33%	28,00%	8,67%	40,00%
	Tinggi	0	3	41	44
		,00%	2,00%	27,33%	29,33%
	Total	24	70	56	150
		16,00%	46,67%	37,33%	100,0%
	Chi Square = 104,317 ; prob = $1,184 \cdot 10^{-21}$ $C \max = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0,8165$ Kontingensi koefisien = 0,640 Kecratan hubungan = $\frac{0,640}{0,8165} \times 100\% = 78,38\%$				

Sumber : Lampiran 14

1. Jika ROS rendah maka pertumbuhan investasinya juga rendah sebanyak 19 industri (12,67%), tetapi menariknya meskipun ROS rendah ada yang pertumbuhan investasinya menjadi sedang sebanyak 25 industri (16,67%) bahkan ada yang tinggi 2 perusahaan (1,33%).
2. Jika ROS sedang maka pertumbuhan investasinya juga sedang sebanyak 42 industri (28,00%), tetapi menariknya meskipun ROS sedang tetapi ada yang tingkat pertumbuhan investasinya menjadi tinggi sebanyak 13 industri (8,67%).
3. Jika ROS tinggi maka pertumbuhan investasinya juga tinggi sebanyak 41 industri (27,33%).

Hasil tabulasi silang ROS dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 6.3 Dari hasil nilai Chi Square sebesar 27,711 dengan probabilitas error $1,427 \cdot 10^{-5}$ lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka dapat dikatakan ada hubungan antara ROS dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Keeratan hubungan antar dua indikator tersebut cukup kuat yaitu sebesar 48,37%. Keeratan hubungan ini dapat dilihat dari banyaknya industri kecil dan persentase pada setiap kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6.3
TABULASI SILANG ROS DENGAN
PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

Kategori		Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja (Y2.2)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
ROS (Y1.1)	Rendah	14	19	13	46
		9,33%	12,67%	8,67%	30,67%
	Sedang	18	34	8	60
		12,00%	22,67%	5,33%	40,00%
	Tinggi	0	21	23	44
		,00%	14,00%	15,33%	29,33%
	Total	32	74	44	150
		21,33%	49,33%	29,33%	100,00%

Chi Square = 27,711 ; prob = $1,427 \cdot 10^{-5}$ C max = $\sqrt{\frac{2}{3}}$ = 0,8165

Kontingensi koefisien = 0,395 Keeratan hubungan = $\frac{0,395}{0,8165} \times 100\% = 48,37\%$

Sumber : Lampiran 14

1. Jika ROS rendah maka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja juga rendah sebanyak 14 industri (9,33%), tetapi menariknya meskipun ROS rendah ada yang tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menjadi sedang sebanyak 19 industri (12,67%) bahkan ada yang tinggi 13 perusahaan (8,67%).
2. Jika ROS sedang maka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja juga sedang sebanyak 34 industri (22,67%), tetapi menariknya meskipun ROS sedang ada

yang tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menjadi tinggi sebanyak 8 industri (5,33%).

- 3. Jika ROS tinggi maka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja juga tinggi sebanyak 23 industri (15,33%).

Hasil tabulasi silang ROS dengan pertumbuhan omzet penjualan dapat dilihat pada Tabel 6.4 Dari hasil nilai Chi Square sebesar 78,849 dengan probabilitas error $3,053 \cdot 10^{-16}$ lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka dapat dikatakan ada hubungan antara ROS dengan pertumbuhan omzet penjualan. Keeratan hubungan antar dua indikator tersebut cukup kuat yaitu sebesar 48,37%. Keeratan hubungan ini dapat dilihat dari banyaknya industri kecil dan persentase pada setiap kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Jika ROS rendah maka pertumbuhan omzet penjualan juga rendah sebanyak 24 industri (16,00%), tetapi menariknya meskipun ROS rendah ada yang tingkat pertumbuhan omzet penjualan menjadi sedang sebanyak 19 industri (12,67%) bahkan ada yang tinggi 3 perusahaan (2,00%).

Table 6.4
TABULASI SILANG ROS DENGAN PERTUMBUHAN OMZET PENJUALAN

Kategori		Pertumbuhan omzet penjualan (Y2.3)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
ROS (Y1.1)	Rendah	24	19	3	46
		16,00%	12,67%	2,00%	30,67%
	Sedang	15	40	5	60
		10,00%	26,67%	3,33%	40,00%
	Tinggi	0	13	31	44
		,00%	8,67%	20,67%	29,33%
	Total	39	72	39	150
		26,00%	48,00%	26,00%	100,00%
Chi Square = 78,849 ; prob = 3,053 10 ⁻¹⁶ ; C max = $\sqrt{\frac{2}{3}}$ = 0,8165					
Kontingensi koefisien = 0,587 ; Keeratan hubungan = $\frac{0,587}{0,8165}$ x 100% = 48,37%					

Sumber : Lampiran 13

2. Jika ROS sedang maka pertumbuhan omzet penjualan juga sedang sebanyak 40 industri (26,67%), tetapi menariknya meskipun ROS sedang ada yang tingkat pertumbuhan omzet penjualan menjadi tinggi sebanyak 5 industri (3,33%).
3. Jika ROS tinggi maka pertumbuhan omzet penjualan juga tinggi sebanyak 31 industri (16,00%).

Hasil tabulasi silang ROI dengan pertumbuhan investasi dapat dilihat pada Tabel 6.5. Dari hasil nilai Chi Square sebesar 110,653 dengan probabilitas error $5,281 \cdot 10^{-23}$ lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka dapat dikatakan ada hubungan antara ROI dengan pertumbuhan investasi. Keeratan hubungan antar dua indikator tersebut sangat kuat yaitu sebesar 79,85%. Keeratan hubungan ini dapat dilihat dari banyaknya industri kecil dan persentase pada setiap kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Table 6.5
TABULASI SILANG ROI DENGAN PERTUMBUHAN INVESTASI

Kategori		Pertumbuhan investasi (Y2.1)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
ROI (Y1.2)	Rendah	21	22	2	45
		14,00%	14,67%	1,33%	30,00%
	Sedang	3	40	9	52
		2,00%	26,67%	6,00%	34,67%
	Tinggi	0	8	45	53
		,00%	5,33%	30,00%	35,33%
	Total	24	70	56	150
		16,00%	46,67%	37,33%	100,00%

Chi Square = 110,653 ; prob = 5,281 10⁻²³

C max = $\sqrt{\frac{2}{3}}$ = 0,8165

Kontingensi koefisien = 0,652

Keeratan hubungan = $\frac{0,652}{0,8165}$ x 100% = 79,85%

Sumber : Lampiran 14

1. Jika ROI rendah maka pertumbuhan investasi juga rendah sebanyak 21 industri (14,67%), tetapi menariknya meskipun ROI rendah ada yang tingkat pertumbuhan investasi menjadi sedang sebanyak 22 industri (14,67%) bahkan ada yang tinggi 2 perusahaan (1,33%).
2. Jika ROI sedang maka pertumbuhan investasi juga sedang sebanyak 40 industri (26,67%), tetapi menariknya meskipun ROI sedang ada yang tingkat pertumbuhan investasi menjadi tinggi sebanyak 9 industri (6,00%).
3. Jika ROI tinggi maka pertumbuhan investasi juga tinggi sebanyak 45 industri (30,00%).

Hasil tabulasi silang ROI dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 6.6 Dari hasil nilai Chi Square sebesar 25,696 dengan probabilitas error $3,643 \cdot 10^{-5}$ lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka dapat dikatakan ada hubungan antara ROI dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Keeratan hubungan antar dua indikator tersebut cukup kuat yaitu sebesar 46,79%. Keeratan hubungan ini dapat dilihat dari banyaknya industri kecil dan persentase pada setiap kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika ROI rendah maka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja juga rendah sebanyak 12 industri (8,00%), tetapi menariknya meskipun ROI rendah ada yang tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menjadi sedang sebanyak 20 industri (13,33%) bahkan ada yang tinggi 13 perusahaan (8,67%).
2. Jika ROI sedang maka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja juga sedang sebanyak 23 industri (15,33%), tetapi menariknya meskipun ROI sedang ada

yang tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menjadi tinggi sebanyak 9 industri (6,00%).

Table 6.6
TABULASI SILANG ROI DENGAN PERTUMBUHAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA

Kategori		Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja (Y2.2)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
ROI (Y1.2)	Rendah	12	20	13	45
		8,00%	13,33%	8,67%	30,00%
	Sedang	20	23	9	52
		13,33%	15,33%	6,00%	34,67%
	Tinggi	0	31	22	53
		,00%	20,67%	14,67%	35,33%
	Total	32	74	44	150
		21,33%	49,33%	29,33%	100,00%
Chi Square = 25,696 ; prob = 3,643 10 ⁻⁵					
C max = $\sqrt{\frac{2}{3}}$ = 0,8165					
Kontingensi koefisien = 0,382					
Keeratan hubungan = $\frac{0,382}{0,8165}$ x 100% = 46,79%					

Sumber : Lampiran 14

3. Jika ROI tinggi maka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja juga tinggi sebanyak 22 industri (14,67%).

Hasil tabulasi silang ROI dengan pertumbuhan omzet penjualan dapat dilihat pada Tabel 6.7 Dari hasil nilai Chi Square sebesar 73,037 dengan probabilitas error 3,185 10⁻¹⁵ lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka dapat dikatakan ada hubungan antara ROI dengan pertumbuhan omzet penjualan. Keeratan hubungan antar dua indikator tersebut sangat kuat yaitu sebesar 70,42%. Keeratan hubungan ini dapat dilihat dari banyaknya industri kecil dan persentase pada setiap kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Jika ROI rendah maka pertumbuhan omzet penjualan juga rendah sebanyak 22 industri (14,67%), tetapi menariknya meskipun ROI rendah ada yang tingkat pertumbuhan omzet penjualan kerja menjadi sedang sebanyak 20 industri (13,33%) bahkan ada yang tinggi 3 perusahaan (2,00%).
- 2. Jika ROI sedang maka pertumbuhan omzet penjualan juga sedang sebanyak 33 industri (22,00%), tetapi menariknya meskipun ROI sedang ada yang tingkat pertumbuhan omzet penjualan menjadi tinggi sebanyak 2 industri (1,33%).

Jika ROI tinggi maka pertumbuhan omzet penjualan juga tinggi sebanyak 34 industri (22,67%).

Table 6.7
TABULASI SILANG ROI DENGAN PERTUMBUHAN
OMZET PENJUALAN

Kategori		Pertumbuhan omzet penjualan (Y2.3)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
ROI (Y1.2)	Rendah	22	20	3	45
		14,67%	13,33%	2,00%	30,00%
	Sedang	17	33	2	52
		11,33%	22,00%	1,33%	34,67%
	Tinggi	0	19	34	53
		,00%	12,67%	22,67%	35,33%
	Total	39	72	39	150
		26,00%	48,00%	26,00%	100,00%

Chi Square = 73,037 ; prob = 3,185 10⁻¹⁵

$C \max = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0,8165$

Kontingensi koefisien = 0,575

Keeratan hubungan = $\frac{0,575}{0,8165} \times 100\% = 70,42\%$

Sumber : Lampiran 14

Hasil keenam uji Chi Square melalui tabulasi silang tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara indikator kinerja yaitu ROI dan ROS dengan indikator struktur usaha yaitu investasi, penyerapan tenaga kerja dan

omzet penjualan. Kinerja yang rendah akan menghasilkan struktur usaha juga rendah demikian juga untuk industri kecil yang berada pada kategori sedang dan tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Tulus Tambunan (1999:67), Hema Wijewar Dane and Garry E. Tibbits (1999), Colm O’Gorman and Rosalyn Doran (1999), Camille Career (1999). Peningkatan laba usaha/pendapatan pengusaha sebagai hasil pembinaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan struktur usaha karena tumbuh dan perkembangan kegiatan industri skala mikro kecil dan menengah tersebut (berarti penambahan permintaan terhadap tenaga kerja melalui pasar output, meningkatkan volume produksi, mempunyai kesempatan waktu dan dana untuk investasi).

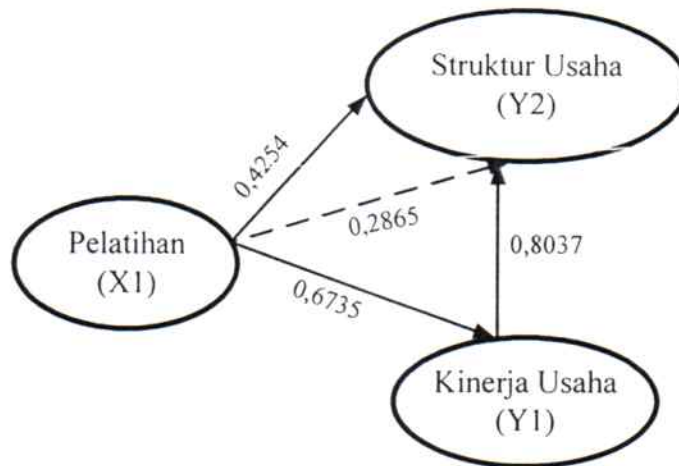
6.1.12 Pengaruh Tidak Langsung Pelatihan, Peraturan Pemerintah, Permodalan, Pemasaran Dan Penyuluh Industri Perdagangan Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha

Pada bagian ini akan dibahas pengaruh tidak langsung faktor-faktor tata kelola pemerintah terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha. Dengan demikian variabel kinerja usaha menjadi variabel *antecedent* (yang mendahului) pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah terhadap struktur usaha. Pengaruh total merupakan penjumlahan pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung. Untuk lebih detail dapat dilihat penjelasan berikut ini (berdasarkan Tabel 5.43). Berdasarkan kajian beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk menyusun disertasi baik yang mendukung maupun yang menolak, belum ada yang mengkaji secara jelas tentang pengaruh tidak langsung tata kelola pembinaan pemerintah terhadap struktur usaha melalui kinerja. Oleh karena itu hasil penelitian ini

merupakan sintesa antara penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah terhadap kinerja usaha dengan penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha.

6.1.12.1 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha sebesar 0,2865. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan Gambar 5.20 dapat disederhanakan menjadi Gambar 6.2.



Keterangan $\longrightarrow$ = Pengaruh langsung $- - \longrightarrow$ = Pengaruh tidak langsung
Gambar 6.2

PENGARUH TIDAK LANGSUNG PELATIHAN TERHADAP STRUKTUR USAHA MELALUI KINERJA USAHA

Hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yaitu : penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan terhadap kinerja usaha dilakukan oleh : Murp B. Aji (1993), Sharder Ghost dan Rosa, (1997), Yusuf (1998), Leo Paul Dana, (1999), Moeljadi (1999), sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab

6.1.1 dengan penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha dilakukan oleh Hema W dan Camille, (1999) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.11. Oleh karena belum ada penelitian terdahulu yang secara tegas menyatakan hasilnya bahwa ada pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap struktur usaha melalui kinerja, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan tadi.

Apabila dikaji lebih mendalam hasil penelitian ini mendukung teori yang dinyatakan oleh Mangkuprawira Syafri (2003), bahwa pelatihan merupakan proses belajar berkelanjutan. Artinya, tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan kepada pengusaha industri kecil diupayakan berkelanjutan untuk meningkatkan struktur usaha industri kecil melalui peningkatan kinerja usaha.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka materi dan mutu program pelatihan yang diberikan kepada pengusaha industri kecil disesuaikan dengan perubahan lingkungan pasar dan perubahan teknologi. Perubahan lingkungan pasar berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Berbekal pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan pada pelatihan tentang pemasaran, pengusaha industri kecil diharapkan dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen. Cepatnya antisipasi perubahan tersebut, berarti permintaan konsumen masih dapat dipenuhi. Dapat dipastikan omzet penjualan masih tetap tinggi, laba perusahaan juga tinggi. Laba perusahaan yang cukup tinggi sebagai indikator meningkatnya kinerja usaha, dapat digunakan untuk menambah nilai investasi sehingga ada pertumbuhan nilai investasi sebagai indikator adanya

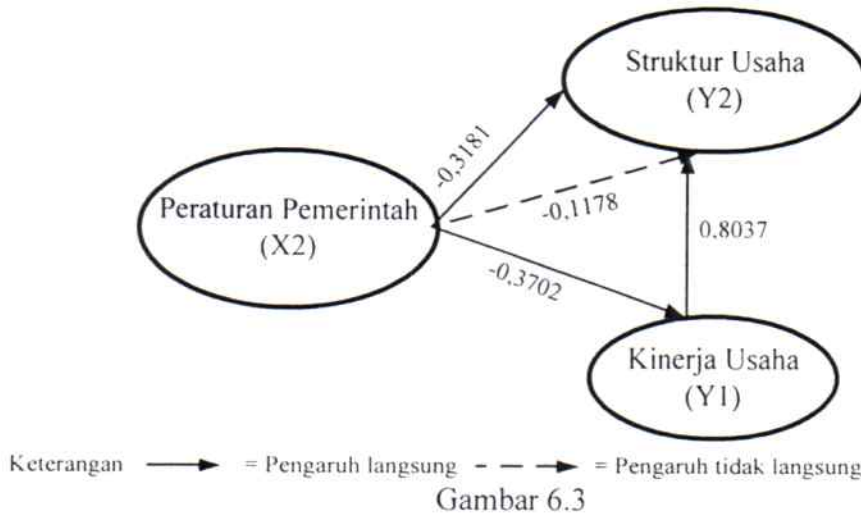
peningkatan struktur usaha. Pelatihan tentang keterampilan teknis sangat berguna untuk mengantisipasi perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat dipastikan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik, penggunaan bahan baku lebih hemat. Hal ini akan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menekan biaya produksi. Peningkatan kapasitas produksi berarti meningkatnya pertumbuhan omzet penjualan. Rendahnya biaya produksi akan meningkatkan laba perusahaan.

Kompetensi para instrukturpun harus ditingkatkan dari waktu ke waktu supaya materi dan mutu pelatihan yang diberikan punya relevansi dengan perubahan lingkungan yang terjadi di daerah pengusaha untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu sebelum mengadakan pelatihan, para instruktur perlu mengidentifikasi materi pelatihan yang dibutuhkan oleh pengusaha industri kecil. Sehingga betul-betul tepat sasaran dan dapat diaplikasikan di perusahaannya.

Pencapaian hasil akhir tujuan pelaksanaan program pelatihan teknis untuk meningkatkan struktur usaha harus dipantau secara berkesinambungan, karena struktur usaha dilihat dari “pertumbuhan” bukan sekedar “kenaikan” investasi, penyerapan tenaga kerja dan omzet penjualan.

6.1.12.2 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh tidak langsung peraturan pemerintah terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha sebesar -0,1178. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan Gambar 5.20 dapat disederhanakan menjadi Gambar 6.3



PENGARUH TIDAK LANGSUNG PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP STRUKTUR USAHA MELALUI KINERJA USAHA

Hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yaitu : penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah terhadap struktur usaha melalui peraturan pemerintah terhadap kinerja usaha dilakukan oleh : Dience R (1992), Goefrey Badacchino (1998), Abd. Manan (1999) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.2 dengan penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha dilakukan oleh Hema W dan Camille, (1999) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.11. Oleh karena belum ada penelitian terdahulu yang secara tegas menyatakan hasilnya bahwa ada pengaruh tidak langsung peraturan pemerintah terhadap struktur usaha melalui kinerja, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan tadi.

Apabila dikaji lebih mendalam, hasil penelitian ini mendukung teori yang dinyatakan oleh Vasant Desai (2003) bahwa, tujuan dasar dibalik semua peraturan

adalah untuk meyakinkan bahwa hasil dari operasi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik pada barang, prosedur maupun instruksi.

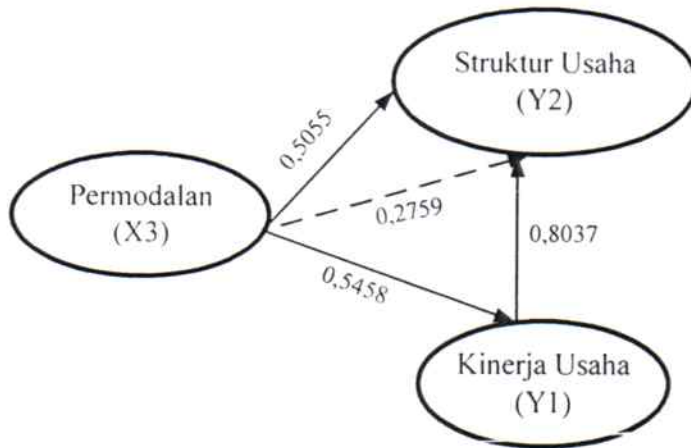
Seperti yang sudah dijelaskan di sub bab 6.1.2 bahwa implementasi yang tidak sesuai dengan juknis tata kelola pembinaan pemerintah oleh petugas di lapangan ternyata menurunkan kinerja usaha para pengusaha industri kecil, ini dibuktikan oleh hasil koefisien jalur sebesar $-0,3702$. Hal ini mengindikasikan ketidaksesuaian hasil operasi dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah harus segera memperbaiki hasil implementasi kebijakannya agar dapat meyakinkan kepada para pengusaha bahwa tujuan dikeluarkannya kebijakan itu untuk meningkatkan struktur usahanya. Karena antara peraturan pemerintah/regulasi dengan struktur usaha merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan di lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui apakah hasil operasi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara terjun langsung mengamati layanan yang diberikan pada para pengusaha industri kecil dalam penerbitan izin usaha, atau bertanya secara langsung kepada para pengusaha, sehingga pemerintah dapat memperoleh jawaban yang sebenarnya tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha.

6.1.12.3 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh tidak langsung peraturan pemerintah terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha sebesar 0,2759. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan Gambar 5.20 dapat disederhanakan menjadi Gambar 6.4



Keterangan → = Pengaruh langsung - - → = Pengaruh tidak langsung

Gambar 6.4

PENGARUH TIDAK LANGSUNG PERMODALAN TERHADAP STRUKTUR USAHA MELALUI KINERJA USAHA

Hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yaitu : penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan terhadap kinerja usaha dilakukan oleh : Abdul Manan (1999), Zainimar Naro (2000) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.3 dengan penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha dilakukan oleh Hema W dan Camille, (1999) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.11. Oleh karena belum ada penelitian terdahulu yang secara tegas menyatakan hasilnya bahwa ada pengaruh tidak langsung bantuan permodalan terhadap struktur usaha melalui

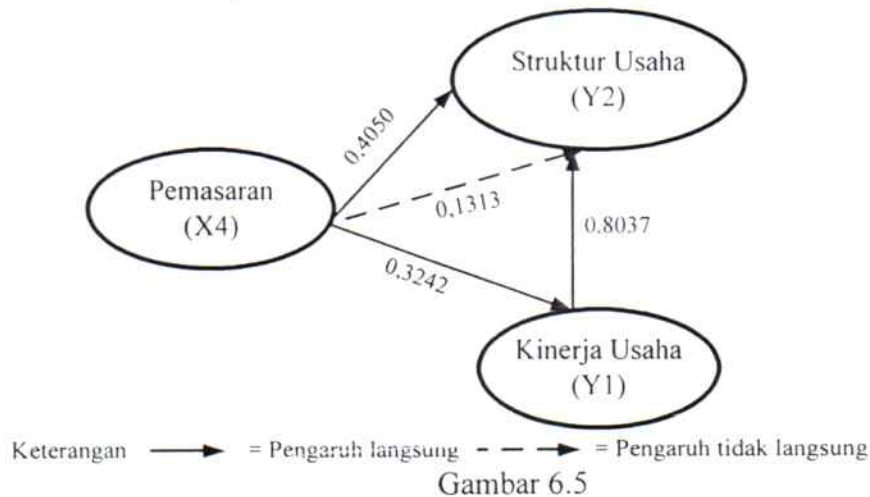
kinerja, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan tadi.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Eitman (1992) yang menyatakan bahwa pengelolaan modal kerja merupakan aktivitas perusahaan setiap hari sehingga masalah operasional perusahaan berjalan lancar. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan kepada pengusaha industri kecil dalam rangka mendidik pengusaha supaya lebih mampu untuk manage modal yang pada akhirnya nanti meningkatkan kemampuan modal pengusaha sendiri. karena pengelolaan modal kerja merupakan aktivitas perusahaan setiap hari sehingga masalah operasional perusahaan berjalan lancar (Eitman, 1992: 383). Lancarnya operasional perusahaan tidak terlepas dari ketepatan penggunaan sumber modal karena apabila biaya modal rendah, maka beban biaya yang dibayarkan semakin rendah pula. Jika beban biaya rendah, diharapkan laba produksi juga akan semakin besar. Pertumbuhan laba produksi dapat digunakan untuk menambah nilai investasi, sehingga ada peningkatan struktur usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketepatan pengelolaan modal yang dilakukan oleh pengusaha industri mikro akan meningkatkan kinerja usaha yang diindikasikan adanya peningkatan laba perusahaan. Laba tersebut digunakan untuk menambah nilai investasi sebagai tolak ukur struktur usaha.

6.1.12.4 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh tidak langsung pemasaran terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha sebesar 0,1313. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan Gambar 5.20 dapat disederhanakan menjadi Gambar 6.5



Gambar 6.5

PENGARUH TIDAK LANGSUNG PEMASARAN TERHADAP STRUKTUR USAHA MELALUI KINERJA USAHA

Hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yaitu : penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran terhadap kinerja usaha dilakukan oleh : Abdul Manan (1999) dan Leo Paul Dana (1999) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.4 dengan penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha dilakukan oleh Hema W dan Camille, (1999) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.11. Oleh karena belum ada penelitian terdahulu yang secara tegas menyatakan hasilnya bahwa ada pengaruh tidak langsung bantuan pemasaran terhadap struktur usaha

melalui kinerja, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan tadi.

Apabila dikaji lebih mendalam ada teori yang dapat menjelaskan bahwa kinerja usaha merupakan variabel *antecedent* (yang mendahului) pengaruh pemasaran terhadap struktur usaha. Seperti yang dinyatakan oleh Kotler (1997) bahwa, perusahaan yang cemerlang tahu bagaimana menyesuaikan diri pada pasar yang terus berubah, dengan melakukan perencanaan strategis yang berwawasan pasar. Mereka harus tahu mengembangkan dan menjaga keselarasan antara sasaran, sumber daya, kemampuan dan peluang. Mereka melakukan proses perencanaan strategis pada tingkat korporasi, tingkat bisnis dan tingkat produk.

Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran lebih diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha industri kecil tentang bagaimana caranya menyesuaikan diri pada pasar yang terus berubah dengan melakukan perencanaan strategis yang berwawasan pasar. Bantuan pemasaran yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha industri kecil berupa penyelenggaraan promosi melalui pameran, penyebaran informasi harga, jumlah, mutu barang dan bantuan akses pasar dari pemerintah berfungsi sebagai katalisator untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi dengan kemampuannya dalam mengelola bantuan tersebut untuk menangkap peluang yang ada di pasar dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan penjualan.

Perencanaan strategis pada tingkat korporasi dapat dilakukan dengan cara menginformasikan seluruh produk yang dapat dihasilkan melalui pameran, penyebaran informasi hasil produksi, harga. Semakin banyak informasi yang

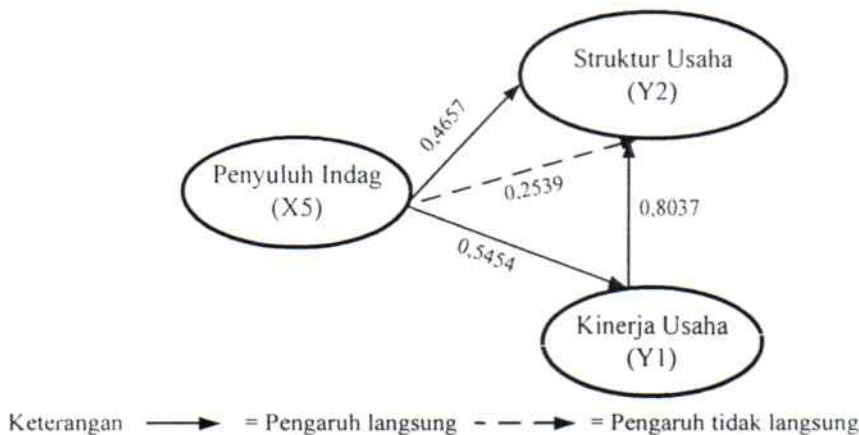
disebarkan kepada konsumen sasaran semakin besar pula peluang untuk meningkatkan omzet penjualan. Perencanaan strategis pada tingkat bisnis dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan bantuan akses pasar yang diberikan oleh pemerintah guna memperluas jangkauan pemasaran hasil produksi ke pasar luar negeri. Perencanaan strategis pada tingkat produk dapat dilakukan dengan cara inovasi produk. Inovasi produk tidak selalu membuat suatu produk yang benar-benar “baru”, namun inovasi produk dapat dilakukan dengan memodifikasi atribut produk misalnya warna, desain model menghasilkan suatu produk yang tampaknya berbeda dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Hal ini akan membentuk selera baru konsumen dalam berbelanja produk tersebut. Ketiga perencanaan strategis tersebut dapat meningkatkan kinerja usaha yaitu meningkatnya tingkat pengembalian penjualan (ROS) dan jangka panjangnya meningkatkan pertumbuhan omzet penjualan sebagai salah satu indikator struktur usaha.

6.1.12.5 Pengaruh Tidak Langsung Tata Kelola Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Indag Terhadap Struktur Usaha Melalui Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh tidak langsung penyuluh industri perdagangan terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha sebesar 0,2539. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan Gambar 5.20 dapat disederhanakan menjadi Gambar 6.6

Hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yaitu : penelitian terdahulu yang telah membuktikan pengaruh kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh terhadap kinerja usaha dilakukan oleh : Leo Paul Dana (1999), Moeljadi (1999), Murp FB Aji (1999), sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.5 dengan penelitian terdahulu yang telah

membuktikan pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha dilakukan oleh Hema W dan Camille, (1999) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.11. Oleh karena belum ada penelitian terdahulu yang secara tegas menyatakan hasilnya bahwa ada pengaruh tidak langsung bantuan pemasaran terhadap struktur usaha melalui kinerja, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan sintesa dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan tadi.



Gambar 6.6

PENGARUH TIDAK LANGSUNG PENYULUH INDUSTRI PERDAGANGAN TERHADAP STRUKTUR USAHA MELALUI KINERJA USAHA

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Lessem (1995:47) mengutarakan suatu perusahaan yang memperoleh pendampingan berarti mendapatkan faktor produksi baru (*fresh resources*) baik bidang manajemen, teknik dan financial, sehingga dapat memperlancar kegiatan usaha. Mereka yang mendapatkan pendampingan dapat mengadakan adaptasi dan responsif terhadap langkah strategiknya (*corporate strategic activities*) dan sekaligus menjabarkan dalam manajemen operasi (*operating management*).

Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh diupayakan untuk mengubah perilaku dan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya organisasinya, sehingga pada akhirnya pengusaha tersebut mampu menolong organisasinya dengan kekuatan sendiri untuk mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi.

Langkah strategik yang harus segera dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehubungan dengan perolehan faktor produksi baru di bidang teknik yaitu yaitu memperbaiki kualitas produk, memperbaiki proses produksi agar lebih efisien, melakukan inovasi produk dengan memodifikasi produk yang sudah ada menghasilkan produk yang tampil “beda” . Dalam bidang manajemen dapat dijabarkan dengan mengevaluasi dan menganalisis ekonomi usahanya apakah kinerja usahanya saat ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya. Melakukan analisis situasi dan merumuskan tindakan masa akan datang bagaimana caranya supaya kinerja usaha meningkat minimal tetap dari waktu ke waktu. Dalam bidang finansial dapat menggunakan sumber-sumber dana seoptimal mungkin dengan efisiensi biaya operasional untuk memperlancar kinerja usaha dan menambah nilai investasi perusahaan.

6.2 Temuan Penelitian

Seperti dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor tata kelola pembinaan pemerintah meliputi pelatihan teknis, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh industri perdagangan terhadap kinerja usaha dan struktur usaha yang nantinya dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

Hasil penelitian ini mendukung teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Tan Chuee Hurt dan Dereh Torrington (1998), Chiu Warren (1999) dan Simanjuntak P (1998) yang menyatakan bahwa seseorang yang dapat meningkatkan pengetahuannya melalui pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelatihan tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan kerja dan kinerja usaha, tetapi sekaligus dapat meningkatkan struktur usaha. Pengaruh total pelatihan terhadap kinerja usaha dan struktur usaha sangat kuat yaitu 0,924. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Moeljadi (1999), yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha, karena kesalahan menentukan sasaran pelatihan, kurikulum kurang sesuai, identifikasi kebutuhan peserta keliru, kapasitas lembaga pelatihan tidak memadai, pelaksanaan pola pelatihan pada Unit Pelayanan Teknis kurang dilengkapi alat peraga dan media belajar mengajar yang memadai (Program pelatihan Top Down).

Pelatihan tidak hanya dipandang sebagai suatu pembelajaran sesaat, melainkan proses belajar berkelanjutan di seluruh lapisan karyawan dalam meningkatkan ketrampilan teknis dan produktivitas karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan struktur usaha mendukung teori yang dikemukakan oleh Suparmoko (2002) dan Syafri Mangkuprawira T. B (2003).

Hasil penelitian pengaruh peraturan pemerintah terhadap kinerja usaha dan struktur usaha bernilai negative dan signifikan. Jika dikaji lebih mendalam hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Hesel Nogi (2003) bahwa setiap implementasi kebijakan harus disertai dengan evaluasi. Pengaruh negatif

disebabkan oleh implementasi peraturan pemerintah berupa penerbitan izin usaha tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Juknis) yaitu : (1) persyaratan yang diminta cukup berbelit-belit ; (2) Petugas tidak jujur dalam memberikan keterangan dan kejelasan rincian biaya pengurusan izin; (3) waktu penyelesaian pengurusan izin lambat; (4) persyaratan administrasi tidak sederhana sehingga kurang dapat dipenuhi; (5) petugas tidak menguasai prosedur penerbitan izin usaha. Karena kelima hal ini pengusaha menjadi enggan mengurus izin usahanya, akibatnya pengusaha tidak bisa mendapatkan bantuan permodalan, sulit untuk mendapatkan fasilitas dalam mengembangkan pangsa pasar dalam negeri maupun ekspor, sehingga kinerja usahanya tidak meningkat. Oleh karena itu pemerintah harus mengevaluasi tentang implementasi kebijakan khususnya pada aparat pelaksana penerbitan izin usaha di lapangan.

Hasil penelitian pengaruh kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan terhadap kinerja usaha dan struktur usaha mendukung teori yang dikemukakan oleh (Eitman, 1992) yang menyatakan pengelolaan modal kerja merupakan aktivitas perusahaan setiap hari selama perusahaan beroperasi. Mendukung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005) bahwa bantuan permodalan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pemupukan modal sendiri. Oleh karena itu kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan jangan sampai menumbuhkan budaya karitas, hal ini jelas tidak mendidik. Tetapi diupayakan pemberian modal kepada pengusaha industri kecil dalam rangka mendidik pengusaha supaya lebih mampu untuk manage modal

yang pada akhirnya nanti meningkatkan kemampuan modal pengusaha sendiri. Hal ini untuk menghindari ketergantungan kepada pemerintah.

Hasil penelitian pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran terhadap kinerja usaha dan struktur usaha mendukung beberapa penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut. Mendukung teori Jauch dan Glueck (1999), bahwa kebijakan pembinaan pemerintah dalam bidang pemasaran industri kecil juga mengikutsertakan langkah-langkah strategi pemasaran. Mendukung hasil penelitian Leo Paul Dana (1999) dan Acar (1993) bahwa pembinaan pemerintah yang diberikan meningkatkan kemampuan pemasaran, kemampuan manajemen dan kemampuan strategi. Mendukung hasil penelitian (Subanar Harimurti, 1998), bahwa pembinaan pemerintah yang diberikan dapat meningkatkan omzet penjualan melalui kegiatan 4P. Hasil penelitian ini ternyata tidak mendukung penelitian Abdul Manan (1999) bantuan pemasaran berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha, karena kendala pemasaran yang dihadapi oleh pengusaha di Jawa Timur yaitu : terbatasnya kemampuan finansial untuk membiayai tempat-tempat pusat promosi dan pemasaran baik di tingkat nasional maupun internasional, terbatasnya informasi pasar dan sulitnya mendapatkan akses pasar ke luar negeri.

Hasil penelitian pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh terhadap kinerja usaha dan struktur usaha mendukung maupun menolak beberapa penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut. Mendukung teori yang dikemukakan oleh Shapiro, Eccles, and Soske (1993), Ivancevich (1996), Hermosilla (1997) dan Ismail (2002), menyatakan bahwa

kehadiran penyuluh sangat diperlukan untuk : mengatasi kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha, mengembangkan mentalitas dan moralitas kerja yang positif, maju dan profesional. Penyuluhan dapat meningkatkan dinamisasi ekonomi dalam penelitian ini ditandai adanya peningkatan struktur usaha dari pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil (Rubalcaba, 1999 dan Gonzales, 1999). Namun tidak mendukung hasil penelitian Moeljadi (1999), karena pendampingan yang dilakukan pemerintah cenderung menimbulkan ketergantungan kegiatan usaha yang pada gilirannya menjadikan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif, jika hal ini terjadi maka program penyuluhan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja usaha, tetapi malah memberikan pengaruh negatif.

Hasil penelitian pengaruh kinerja terhadap struktur usaha mendukung beberapa penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut. Mendukung teori struktur usaha Devine (1994) yang menyatakan bahwa masing-masing struktur mempunyai karakteristik yang berbeda dilihat dari investasi, penyerapan tenaga kerja, omzet penjualan. Dari hasil uji beda menunjukkan adanya perbedaan dan struktur usaha dari industri mikro menjadi industri kecil dan sebagian besar berada dalam kategori sedang sampai tinggi. Selain itu hubungan kinerja usaha dengan struktur usaha tidak hanya bisa diketahui pengaruhnya antar konstruk saja tetapi sampai hubungan antar indikator pembentuk konstruk itupun sangat kuat hubungannya.

Pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha sebesar 0,8037. Nilai koefisien jalur tersebut paling besar diantara kesepuluh koefisien jalur lainnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha merupakan pengaruh dominan diantara kesepuluh pengaruh lainnya. Hasil analisis SEM diperkuat dengan uji beda dua rata-rata berpasangan yang membuktikan bahwa pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan omzet penjualan sebelum dan sesudah dibina oleh pemerintah terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah berhasil mengimplementasikan kebijakan pembinaannya melalui bantuan pelatihan, perarutan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh indag sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang no 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan UKM, dengan adanya kenaikan struktur usaha dari industri kecil ke industri mikro. Hasil analisis SEM diperkuat oleh uji Chi Square untuk mengetahui hubungan antar dua indikator kinerja usaha dengan tiga indikator struktur usaha. Ternyata dari enam uji Chi Square menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan tidak hanya terdapat hubungan antara konstruk kinerja dengan struktur usaha, namun sekaligus lebih detail yaitu hubungan antara indikator pada kedua konstruk tersebut.

Adanya pengaruh tidak langsung tata kelola pemerintah (pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh) terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha, menunjukkan bahwa variabel kinerja usaha menjadi variabel *antecedent* (yang mendahului) pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah terhadap struktur usaha.

Dari nilai koefisien determinasi hasil analisis persamaan model struktural model akhir (Lampiran 12) dapat diketahui bahwa pengaruh secara serempak

konstruk pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh cukup kuat sebesar 39,2%. Sedangkan pengaruh secara serempak kelima konstruk tersebut ditambah dengan kinerja usaha terhadap struktur usaha sebesar 65,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa jika kelima tata kelola pemerintah dijalankan dengan baik hasilnya akan mempengaruhi kinerja usaha dan struktur usaha sangat berarti.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini disadari belum mampu menjawab dengan tuntas semua permasalahan yang terkait dengan pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh industri perdagangan, kinerja usaha dan struktur usaha industri kecil. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan serta hambatan-hambatan lain yang dialami selama penelitian antara lain seperti :

1. Metode pengumpulan data yang bersifat *cross-sectional*.

Meskipun dari penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat *cross-sectional*, namun sebenarnya sebuah riset yang menyangkut kinerja usaha sangat disarankan menggunakan metode *longitudinal* agar pengamatan terhadap pengaruh struktur usaha dalam kurun waktu tertentu lebih cermat.

2. Perlunya pengembangan penelitian dengan menggolongkan kategori kinerja usaha dan struktur usaha ke dalam rendah, sedang dan tinggi untuk dicari variabel tata kelola pemerintah apa saja yang membedakan kinerja usaha dan struktur usaha atas dasar penggolongan ke dalam tiga kategori tadi.

BAB 7

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan model persamaan struktural hubungan kausalitas antara pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah meliputi pelatihan teknis, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh industri perdagangan terhadap kinerja usaha dan struktur usaha pada industri kecil penggerak ekonomi daerah di Sumatera Utara, disertai dengan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, kesebelas hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hipotesis kedua dan ketujuh berpengaruh negatif, sedangkan kesembilan hipotesis lainnya berpengaruh positif.

Secara rinci simpulan yang dapat diberikan atas penelitian tentang pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah meliputi pelatihan teknis, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh industri perdagangan terhadap kinerja usaha dan struktur usaha industri kecil penggerak ekonomi daerah di Sumatera Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha. Hasil penelitian ini mendukung teori Human Capital yang dikemukakan oleh Tan Chuee Hurt dan Derch Torrington (1998), Chiu Warren (1999) dan Simanjuntak (1998) yang menyatakan bahwa seseorang yang dapat meningkatkan pengetahuannya melalui pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Moeljadi (1999),

yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha, karena kesalahan menentukan sasaran pelatihan, kurikulum kurang sesuai, identifikasi kebutuhan peserta keliru, kapasitas lembaga pelatihan tidak memadai, pelaksanaan pola pelatihan kurang dilengkapi alat peraga dan media belajar mengajar yang memadai .

2. Tata kelola pembinaan melalui deregulasi peraturan pemerintah dalam penerbitan izin usaha berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja usaha.

Koefisien jalur bernilai negatif karena implementasi kebijakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur penerbitan ijin usaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan tentang penerbitan ijin usaha. Ketidaksesuaian dapat dilihat dari hasil tanggapan responden yaitu : (1) Kemauan atau dukungan petugas untuk memberikan pelayanan penerbitan izin tidak sesuai dengan prosedur, dan persyaratan yang diminta cukup berbelit-belit, (2) Petugas langsung yang menangani penerbitan ijin, kadang-kadang tidak jujur dalam memberikan keterangan dan informasi tentang rincian dan jumlah biaya pengurusan izin yang sebenarnya harus dikeluarkan pemohon ijin; (3) Waktu pengurusan izin, petugas kurang memperhatikan kecepatan proses dan ketepatan pelayanan sehingga selesainya lambat ; (4) persyaratan administrasi berupa dokumen penyerta yang dipersyaratkan tidak sederhana sehingga kurang dapat dipenuhi ; (5) Dalam proses penerbitan izin, petugas kurang mampu menjelaskan dengan baik tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh

pemohon, kurang menguasai peraturan dan kurang trampil untuk membantu pengusaha/pemohon, sehingga pengusaha dibuat bingung.

Oleh karena itu pemerintah harus mengevaluasi setiap implementasi kebijakan (Hesel S Nogi, 2003) khususnya pada aparat pelaksana penerbitan izin usaha di lapangan. Evaluasi terhadap kebijakan publik juga harus dilihat dari membandingkan antara implementasi dari program-program tersebut dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui apakah terjadi kesenjangan antara implementasi di lapangan dengan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Kemudian hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam penyusunan program selanjutnya.

3. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Zainimar Naro (2000) yaitu semakin besar modal yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk memperoleh pendapatan dan penyerapan tenaga kerja semakin besar. Juga mendukung penelitian Utami (1995) yang menyimpulkan bahwa faktor keunggulan strategis berupa perputaran aktiva dan biaya pemasaran berpengaruh terhadap volume penjualan.
4. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh John (1992), Glueck (1999), Leo Paul Dana (1999). Kebijakan pembinaan pemerintah dalam bidang pemasaran telah mengikutsertakan langkah-langkah strategi pemasaran, memperkuat posisi

daya saing dengan pengusaha sejenis dari propinsi lain, meningkatkan kemampuan pemasaran, kemampuan manajemen dan kemampuan strategi.

5. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh industri perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ivancevich (1996), Hermosilla (1997), Leo Paul Dana (1999), Murp F.B Aji, (1999), Ismail (2003). Tenaga penyuluh dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha, mengembangkan mentalitas dan moralitas kerja yang positif, maju dan profesional. Semakin mampu untuk melakukan analisis situasi dan merumuskan tindakan masa akan datang bagaimana caranya supaya kinerja usaha meningkat minimal tetap dari waktu ke waktu

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Moeljadi (1999) yang menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan atau pendampingan berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha industri kecil di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan pendampingan yang dilakukan pemerintah propinsi Jawa Timur (top-down) cenderung menimbulkan ketergantungan kegiatan usaha yang pada gilirannya menjadikan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif.

6. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur usaha. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Johor La Presse (1992), Camelle Career (1999), Hema Wijewardane dan Garry E. Tibbits (1999) dan Suparmoko (2002). Pengusaha yang sudah mengikuti pelatihan akan memiliki kemampuan untuk

mengelola usaha dan termotivasi untuk menghemat kapital, menghemat tenaga kerja, menekan biaya produksi, meningkatkan permintaan, dan menaikkan mutu sehingga ada perkembangan struktur usaha.

7. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur usaha. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Godfrey (1991), Manan (1999), Bido A. Budiman (2005). Pengaruh negatif ini terjadi karena implementasi peraturan pemerintah di lapangan tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur penerbitan izin usaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yaitu : biaya pengurusan relatif tinggi disamping biaya resmi ada beberapa biaya yang dapat dikategorikan biaya pungli, waktu pengurusan relatif lama dan tidak ada kepastian kapan selesai, waktu selesai yang dijanjikan seringkali tidak tepat, persyaratan administratif yang terlalu banyak sehingga terkesan berbelit, kemampuan pegawai dalam melayani dan penanganan proses perizinan yang terlalu lamban dan kurang profesional, rendahnya pemahaman para pengusaha khususnya industri mikro dan kecil tentang arti fungsi dan manfaat perizinan terhadap eksistensi perusahaan di masa depan.

Namun pada kenyataannya tetap terjadi perkembangan struktur unit usaha, karena meskipun tidak punya izin usaha, para pengusaha industri kecil tetap termotivasi untuk meningkatkan pertumbuhan nilai investasinya dengan cara pemupukan modal sendiri dari saudara, keluarga atau teman-teman dekat.

8. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur usaha. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Teo dan Low (1993), Tan and Tay (1994), Wijewardena and Cooray (1995), Premaratne, SP (1999), Budiono (2005). Bantuan permodalan dari pemerintah mendorong pertumbuhan industri kecil berupa mesin, gedung, dan sarana prasarana lainnya merupakan faktor produksi yang berperan terhadap perkembangan struktur usaha. Bantuan permodalan diupayakan sebagai sarana mengatasi kendala permodalan dengan cara : meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri, meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan, meningkatkan kemampuan manajemen keuangan, dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan industri kecil menengah untuk meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat lebih merata.
9. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh positif signifikan terhadap struktur usaha. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kotler (1997), Subanar Harimurti (1998), Nurcahyadi (2005). Bantuan pemasaran dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan struktur usaha melalui : pencarian informasi pemasaran yang diperlukan, penonjolan diri untuk meyakinkan konsumen, pengurangan ongkos produksi dan penjualan, pelayanan konsumen demi meningkatnya pertumbuhan omzet penjualan. Juga membentuk pengusaha industri kecil lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan pemasaran yang terus mengalami perubahan dengan melakukan perencanaan strategis supaya dapat menangkap peluang

pasar dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan industri kecil menengah untuk meningkatkan ekspor baik dalam nilai maupun ragam jenis produk untuk dalam rangka memberikan kontribusi terhadap kenaikan nilai ekspor nasional.

10. Tata kelola pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh industri perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur usaha. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Apibunyopas (1983), Association TADCP (1987), Viljoen (1991), Manas E (1992), Kotler (1995). Keberhasilan pengusaha meningkatkan struktur usahanya tidak terlepas dari peran penyuluh untuk memberikan arah dan membantu kemampuan merumuskan kebijakan strategi dalam memanfaatkan faktor produksi dan kejelian pengusaha dalam memanfaatkan kesempatan mencari ceruk pasar yang masih dapat diakses. Kegiatan pendampingan yang diberikan oleh tenaga penyuluh kepada pengusaha industri kecil di bidang pemasaran melalui pengembangan jaringan usaha, di bidang organisasi melalui bagaimana caranya melakukan pengelolaan usaha yang efektif dan professional, di bidang perbaikan mutu dapat dilakukan dengan pembukaan akses bahan baku, peningkatan mutu dan proses produksi.
11. Kinerja usaha berpengaruh positif signifikan terhadap struktur unit usaha. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Devine (1994), Hema W, Colm, Camille (1999) dan Tambunan (1999). Peningkatan laba usaha atau pendapatan pengusaha memberikan dampak positif terhadap perkembangan unit usaha karena tumbuh dan perkembangan kegiatan industri skala mikro kecil dan menengah berarti penambahan permintaan terhadap

tenaga kerja melalui pasar output, meningkatkan volume produksi, mempunyai kesempatan waktu dan dana untuk investasi.

Hasil analisis Chi Square dengan tabulasi silang terdapat hubungan yang sangat kuat antara masing-masing indikator kinerja usaha yaitu ROS dan ROI dengan masing-masing indikator perkembangan unit usaha yaitu pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan omzet penjualan. ROS atau ROI yang berada dalam kategori rendah akan menghasilkan tingkat pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan omzet penjualan juga rendah, demikian juga untuk kategori sedang dan tinggi.

12. Terdapat pengaruh tidak langsung tata kelola pembinaan pemerintah (pelatihan teknis, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh) terhadap struktur usaha melalui kinerja usaha, menunjukkan bahwa variabel kinerja usaha berfungsi sebagai variabel antara (*intervening*) pengaruh kebijakan pembinaan pemerintah terhadap perkembangan struktur unit usaha. Hasil penelitian ini menjadi temuan penelitian yang menarik karena (1) berdasarkan hasil penelitian terdahulu belum ada yang menyebutkan secara tegas bahwa variabel kinerja berfungsi sebagai variabel antara dalam menguji pengaruh kebijakan pembinaan pemerintah terhadap perkembangan struktur usaha ; (2) Meskipun dalam hasil penelitian ini terdapat pengaruh langsung kebijakan pembinaan pemerintah terhadap perkembangan struktur usaha, namun tanpa adanya peningkatan kinerja usaha industri kecil tidak akan ada perkembangan struktur unit usaha.

13. Pertumbuhan jumlah unit usaha industri mikro, kecil dan menengah mulai tahun 1998 sampai tahun 2001 dengan pertumbuhan rata-rata 11,12% per tahun menunjukkan adanya peningkatan kinerja usaha dan perkembangan struktur unit usaha dengan adanya kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluhan.
14. Pertumbuhan jumlah unit usaha industri mikro, kecil dan menengah rata-rata per tahun sebesar 17,36% (Tabel 1.1), penyerap tenaga kerja sebesar rata-rata 19,99% per tahun lebih besar dari penyerapan tenaga kerja pada industri besar rata-rata hanya 4,13% per tahun selama tahun 1998-2001. Hal ini membuktikan bahwa industri mikro, kecil dan menengah unggul dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan industri besar. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan industri kecil perlu lebih ditingkatkan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran yang semakin bertambah dari tahun ke tahun.
15. Kontribusi usaha industri mikro dan kecil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (rasio terhadap PDB) pada tahun 2002 sebesar 19,31 juta per unit usaha dari PDB sebesar Rp 55,69 trilliun (Tabel 1.3). Data ini menunjukkan bahwa keberadaan industri mikro kecil memang perlu perhatian yang sangat serius dari pemerintah dengan melalui kebijakan-kebijakan pembinaan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka agar lebih produktif.
16. Kontribusi nilai tambah IMKM terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan sebesar 14,26% selama tahun 2000 (Tabel 1.4), menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan pemerintah mengarah pada pengembangan sektor

atau kelompok industri pilihan yang diprioritaskan sebagai kontributor pertumbuhan industri kecil secara nasional.

17. Berdasarkan keenambelas kesimpulan tersebut dapat diberikan simpulan terpadu yaitu terdapat pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah meliputi bantuan pelatihan teknis, peraturan pemerintah, bantuan permodalan, bantuan pemasaran, dan bantuan tenaga penyuluh industri dan perdagangan terhadap kinerja dan struktur usaha.

Temuan terpenting yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu : adanya pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha. Besarnya pengaruh tersebut paling kuat diantara kesepuluh pengaruh lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha merupakan pengaruh dominan diantara kesepuluh pengaruh lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah berhasil mengimplementasikan kebijakan pembinaannya sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang no 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan UKM yaitu dengan adanya kenaikan struktur usaha dari industri mikro ke industri kecil.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan dalam implementasi kebijakan pemerintah untuk membina industri kecil sebaiknya :

1. Meningkatkan pemberian bantuan pelatihan kepada para pengusaha industri kecil dalam : mutu program, pengajaran prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik, ketrampilan teknis produksi dan pemasaran, perubahan perilaku

pengusaha dapat berlangsung setelah mengikuti pelatihan, kompetensi para instruktur, hasil akhir pencapaian tujuan pelaksanaan program pelatihan. Hal ini penting karena dengan pendidikan dan pelatihan para pengusaha dapat meningkatkan kinerja usaha dan perkembangan struktur usaha.

2. Mengevaluasi dan memperbaiki implementasi peraturan pemerintah dengan meningkatkan kualitas layanan pengurusan izin melalui layanan satu atap dalam pengurusan Ijin Industri, Tanda Daftar Industri, Ijin Perluasan Industri, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan atau segala perizinan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha dan perkembangan struktur usaha. Selain itu biaya pengurusan sebaiknya tidak terlalu tinggi sehingga dapat dijangkau para pengusaha industri kecil, waktu pengurusan sesuai dengan standar layanan yang sudah ditetapkan jangan sampai tidak ada kepastian atau terlambat, persyaratan administratif disederhanakan dan tidak terlalu berbelit, kemampuan dan profesionalitas pegawai sangat diperlukan dalam memberikan penjelasan dan kelancaran pengurusan izin. Kesemuanya ini diperlukan sebagai aspek legalitas secara hukum maupun operasional ketika melakukan kegiatan pemasaran baik di dalam negeri apalagi berhubungan dengan pihak luar negeri.
3. Meningkatkan pemberian bantuan permodalan kepada para pengusaha industri kecil hendaknya dalam : kemudahan mendapatkan akses sumber bantuan modal, realisasi bantuan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah, penyesuaian jangka waktu pengembalian pinjaman modal dan bunga dengan hasil produksi dapat dipasarkan, jenis permodalan lebih variatif. Pemberian

bantuan modal ini hendaknya diupayakan tidak saja meningkatkan pendapatan pengusaha industri kecil tetapi juga mampu meningkatkan pertumbuhan omzet penjualan dan pertumbuhan investasi.

4. Kegiatan bantuan pemasaran kepada para pengusaha industri kecil lebih diarahkan pada : pencarian informasi pemasaran yang diperlukan, penonjolan diri untuk meyakinkan konsumen, pengurangan ongkos produksi dan penjualan, pelayanan konsumen bagi terciptanya kelangsungan pembelian, pendirian pusat-pusat pameran sebagai wadah bagi para IMKM untuk berpameran dan bertransaksi dengan buyer baik lokal maupun luar negeri, membuat jaringan ke luar negeri dalam rangka memperluas pasar internasional, mengikut sertakan para pengusaha secara langsung untuk berpameran di luar negeri (Subanar Harimurti, 1998 dan Nurcahyadi, 2005)
5. Kehadiran penyuluh industri perdagangan dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan perkembangan struktur usaha lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk, strategi pemasaran dan kemampuan manajerial, memberikan arah dan membantu kemampuan merumuskan kebijakan strategi dalam memanfaatkan faktor produksi (Apibunyopas, 1983) dan memanfaatkan kesempatan mencari ceruk pasar yang masih dapat diakses (Viljoen, 1991 ; Kotler, 1995). Jangan sampai kehadiran penyuluh industri perdagangan cenderung menimbulkan ketergantungan kegiatan usaha yang pada gilirannya menjadikan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif (Moeljadi, 1999).
6. Peningkatan kinerja usaha melalui kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh

industri perdagangan diupayakan tidak hanya memperbesar pendapatan tetapi juga meningkatkan perkembangan struktur industri, dari industri mikro tumbuh menjadi industri kecil dari industri kecil tumbuh menjadi industri menengah. Hal ini dapat diidentifikasi melalui pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan omzet penjualan. Ketiga indikator ini perlu juga dievaluasi kategori rendah sedang dan tinggi dengan tujuan pengusaha yang masih berada pada kategori rendah dapat meningkatkan indikator perkembangan struktur usahanya menjadi pengusaha industri kecil yang mempunyai ketiga indikator pertumbuhan berkategori sedang bahkan tinggi.

7. Untuk kepentingan penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan disarankan untuk mengembangkan penelitian yang sifatnya longitudinal agar dapat mengamati secara cermat perkembangan kinerja usaha dan struktur usaha.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Acar C. Achmad, 1993, The Impact of Key Internal Factors on forms Performance : An Emphirical Study of Small Turkis Firms, *Journal of Small Business Management* Vol 11 No 8 October pp 781.
- Alison Morrison and John Breen, 2003, Small Business Growth Intention, Ability and Opportunity, *Journal of Small Business Management*, Vol. 41 No. 4 October pp. 417-425.
- Alison Morrison *et al.*, 2000, Creating a Seamless Local Government and Small Business Interfase for better Regional Economic Development Outcomes, Paper Presented at the ICSB,World Conference 2000 Brisbane Australia June.
- Apibunyopas Procyamuch, 1983, *An Analysis of factors Affecting The Performance of Small Rural non-Farm Firm in Thailand*, Un-published Ph.D Dissertation, Purdue University.
- Arikunto Suharsini, 1995, *Prosedur Penelitian*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asociaciondel terciario Avanzado de la Comunidad Valenciana, 1987, *Estudio del Mercado de la Image: Empleo Factores de Exito de las Empresas de Servicios, desde la Perspective de la empresa Contratante (A study of The Image Market : Employment and Success Keys for service businesses from the Contracting Company (Perspektif)*. Valencia; Spain. Emer.
- Augusty Ferdinand, 2002, *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen Aplikasi Model-Model Rumus dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*, Semarang, Seni Pustaka Kunci : BP. UNDIP.
- Australian Bureau of Statistic, 2000, *History of the US. Small Business in Australia 1999 Canberra*, Australia : Commonwealth Government.
- Awat dan Mulyadi, 1996, *Keputusan-Keputusan Keuangan Perusahaan (teori dan Hasil Pengujian Empiris*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta hlm 25.
- Babbie, Earl, R, 1979, *The Practice of Social Research*, Second Edition, California, Wardsworth Publishing Company Inc.
- Badan Pengembangan Industri Kecil (BAPIK), 1994, *Program Lima Tahun Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Pelita IV*, Jakarta, Un-published.

- Bastech A.B, 1994, Productivity Gains from the Implementation *Employee Training programs*, Industrial Relation, 33 pp. 411-425.
- Bentler, P.M. and C.P. Chou, 1987, Practical Issue in Structural Modeling, *Sociological Methods and Research* 16 [1], 78-117
- Bido A Budiman, 2005, Perizinan menjadi Kendala Utama Investasi, *Kompas* Tahun 14 No 9 Hlm 12.
- Birch D, 1999, *The Job Creation Process, Financial Report to Economic Development Administration*, Cambridge, MA : MT Program on Nighborhood and Regional Change.
- Biro Pusat Statistik, 1997, *Statistik Indonesia*, Jakarta
- Bray, M., 1987, *Small Countries in International Development, Review Article*, *Journal of Development Studies*, Vol. 23 NO. 2, pp. 295-300.
- Bridge,S. K. O' Neill and S.Cronie, 1998, *Understanding Entrepreneurship and Small Business*, London: Mac Miland Business.
- Budiono, 2005, Ekonomi Indonesia Mau Kemana, *Harian Kompas*. Tahun ke 14 No. 006, Hlm 15.
- Bune, P., 1987, Vulnerability of Small Island Statks : The Case of The South Pacific Region and Fiji, *The Courier*, Vol. 104, 164, pp. 85-87.
- Camaco J.A, 1998, Los Servicios en Las Relaciones Intersectoriales de la Economia : Propuesta Metodologika y. endencia (Services in Intersector relation Within The Economy : A Metodology and Evidence, *Working Paper No 3 Madrid,Spain*, Serilab-Laboratorio de de Investigation del sector Cerviceos.
- Camille Career, 1999, The Training and Development Needs of Owner-Managers of Small Businesses with Export Potential, *Journal of Small Business Management*, Vol. 37 No 4 October pp. 30-41.
- Carter *et al.*, 2000, *Barriers to Survival and Growth in UK Small Firms*, London. Federation of Small Business
- Christensen, 1992, *Population and Sample*, New York Mc Graw Hill Book Company.
- Churchill, N, and V. Lewis, 1983, The Five Stages of Small Business Growth, *Harvard Business Review* Vol. 61 pp. 30-50.

- Chiu Warren Thomson and David, 1999, ReThinking Training Needs Analysis : Appropose Frame Work for Literatur Review, *Personnel Review* Vol. 28 No 12 pp 778
- Colm O'Gorman and Roslyn Doran, 1999, Mission Statements in Small and Medium-Size, *Journal of Small Business Management*, Vol 37 No 4 October pp. 30-41.
- Cooper,DR dan CW Emory, 1995, *Business Research Method*, Edition 5th Sitompul E. G dan I. Nurmawan, Metode Penelitian Bisnis, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Davidsson P., 1991, Continued Entrepreneurship : Ability, Need and Opportunity as the Determinants of Small Firm Growth, *Journal of Business Venturing* Vol. NO. 12, pp. 405-409.
- Deborah T, E. Hartman and C. Tower, 1994, Innovative Activity in Small Business : Competitive Context anda Organizational Level, *Journal of Engineering and Technology Management* Vol.11, No.1, pp. 253-272.
- Department of Trade and Industry, 2000, *Small and Medium Enterprises (SMES), Statistics for the UK*, 1999 London : DTI.
- Departemen Perindustrian, 1999, *Limapuluh Tahun Pembangunan Industri Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia*, PT Greenvoice Central Chatulistiwa, Jakarta.
- Departemen Perindustrian, 2002, *Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002-2004*, Buku 1 Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri kecil Menengah Hlm. 45, Un-published.
- , 2003a, *Kebijakan Umum Di bidang, Ekspor*, Direktorat Jenderal perdagangan Luar Negeri, Jakarta, Un-Published.
- , 2003b, *Kebijakan Umum Di bidang, Impor*, Direktorat Jenderal perdagangan Luar Negeri, Jakarta, Un-Published.
- , 2004, *Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindag*, Un-Published, jakarta, Hl. 89-98.
- Dess dan Davis, 1984, Competencies Needs for Small Business Success Perseptions of Jamaican Entrepreneurs, *Journal of Small Business Management* Vol 12 No 8 pp 73.
- Devine P.J, et al., 1994, *An Introduction to Industrial Economics*, George Allen & Unwin Ltd, London, Eidinburgh.

- Dewa Purna Jaya, 2005, *Benih Unggul ditinggal : Petani tidak Disiplin akibat hilangnya Penyuluh*. Kompas Tahun 14 No 8 Hlm. 18.
- Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim, 2000, *Laporan Hasil Penyuluhan Industri Rumah Tangga Kerajinan Perak Jawa Timur*, Surabaya, Un-Published.
- Djimanto, 2005, Apindo Usulkan Adanya Cetak Biru Kebijakan, *Kompas Tahun 14 No 10*
- Djumilah Zain, et al, 2005, *Analisis Struktural Industri terhadap daya saing Industri Kerajinan Kuningan Juwana-Pati Jateng*, Kumpulan Artikel Seminar Hasil Penelitian Bidang Kajian Usaha Kecil Menengah, Malang, Program Pascasarjana Unibra.
- Edward, Eric, 1994, The Organization and It's Environment, *Journal Credit Management*, Vol. 12 No. 12, pp. 42-48.
- Eitman W, J. and J.N. Holtz, 1992, *Working Capital Management : Essays on Business Finance*, Michigan, Mosterco.Press. Inc. Ann Arbor.
- Erick A Helfert, 1996, *Teknik Analisis Keuangan Petunjuk Praktis untuk Mengelola dan Mengukur Kinerja Perusahaan*, Alih Bahasa Herman Widodo, Jakarta, Erlangga.
- Fisseha, Yacob, 1994, *Practicess and Performance in Small Scale Manufacturing Enterprisess*, Jamaican, Michigan, Un-published, Ph.D Dissertation.
- Foster, Canon and C romie, 1998, Marketing Planing in Small Enterprise : A Modal and Some Empirical Evidence, *Journal of Marketing Management*, Vol. 1 No. , pp. 33 – 49.
- Freeman R.B, 1986, Demand for Education In O Ashenfelter R Rayrds (Eds), *Analysis of Labour Economics, Journal*, Amsterdam, Elseiver Vol. 2 No 10 pp. 45-53.
- Ghost , B, C, S, Teo and Low, 1993, Factors Contributing to the Success of Local SMES : An Insight from Singapore, *Journal of Small Business and Entrepreneurship* 10 (April-June) 32 – 46.
- Ghozali, Imam, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2004, *Model Persamaan Struktural : Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver 5.0*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Glancey K, 1998, Determinants of growth and Profitability in Small Entrepreneurial Firms, *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research* Vol 4 pp. 18-27.
- Glueck, William F and Jauch Lawrence R, 1988, *Business Policy and Strategic management*, 5th Ed, Singapore McGraw-Hill Book Company. Englewood Cliffs, prentice Hall.
- Godfrey Baldacchino, 1999, Small Business in Small Island : A Case Study From Fiji, *Journal of Small Business Management*, Vol. 37, No. 4 October pp. 80-84.
- Gonzales F, 1999, *Comercio Internacional de Servicios : Revision Conceptual y Especial referencia al caso Espanol (International Service Trading : A Conceptual Revision with Special Reference to the Spanish Case)* Granada, Spain : Universidad de Granada.
- Good Figand Storey, D., 1998, *Understanding Small Business*, London : Routledge.
- Gray C, 2000, Formality, Internationality and Planning : Features of Success Entrepreneurial SMES in the future, *Paper Presented at the ICSB World Conference 2000*, Brisbane, Australia, June.
- Hadari Nawawi, H, 2003, *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hadi Sutrisno, 1991, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada.
- Hair, Joseph F., R. E. Anderson, Ronald L. Tatham, and William C. Black, 1998, *Multivariate Analysis*, Fifth Edition, Prentice Hall International Inc.
- Hakim Abdul, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, Ekonesia.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Haywood, Miner John, 1992, *Organizational Behaviour-Performance and Productivity*, New York, Random House Business Division.
- Hema Wijewardane and Garry Tibbits, 1999, Factors Contributing to the Growth of Small Manufacturing Firms : Data From Australia, *Journal of Small Business Management*, Vol. 37 No 2 April pp. 88-96.

- Hermosilla, A, 1997, El Consumo de Servicios, por la Industria Espanola La de Cervicis a la Industria (ESI) (The use of Cervices by Spain Industry. The Services to Industry, Survey (ESI) "*Economic Industrial* " Vol. 313 pp. 77-92.
- Hesel Nogi S, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Cetakan Pertama, Yayasan Pembina Administrasi Publik Indonesia, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Home and Amstrong, 1995, *Human Resource Development*, New York, prentice Hall, Inc.
- Hordes, P., 1985, *Inovation and Entreprenurship*, London : Heinmann.
- Huck John F : and T McEwen, 1995, Competencies Need For Small Business Success : Perceptions of Jamaican Enrepreneurs, *Journal of Small Business Management* Vol 29 No 4 April p 90-93.
- Ibnu Syamsu, 1994, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Rinekacipta
- Indriartoro dan Supomo Bambang, 1999, *Metode Penelitian Bisnis untuk Humaniora dan Manajemen*, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Hlm.18.
- Industri Kecil dan Dagang Kecil, 1992, *Program Pembinaan dengan Pengembangan IDKM*, Jakarta, Un-Published.
- Instruksi bersama Menteri Perdagangan dan Kepolisian RI, Nomor Ins/04/VIII/1990/32/Ins/M/VIII/1990 tentang *Petunjuk Kerja Sama Pelaksanaan Penyidikan Tindak di Bidang WDP*
- Ismail Rizal, 2002, *Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia, Upaya Strategis Pemulihan Ekonomi dan Mengatasi Kemiskinan melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah*, Penerbit Forum Kampus Kuning Jakarta, Hlm. 50 – 60.
- Islami Irvan, 1998, *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada FIA Unibraw*, Agustus 1998.
- Ivancevich, J.M., P. Lorenzi, S.J. Skinner, and P.B Crosby, 1996, *Gestion : Tration : Quality and Competitivly*, Madrid Spain : Irwin.
- Jaidep Motwani, et al, 1999, Managing Innovation in French Small and Medium Size Enterprises, *Journal of Small Business Management* Vol 37 No 2 April pp. 106-112

- Jane, Orpha, 1997, *Metode Evaluasi Kinerja Saluran Pemasaran, Usahawan Indonesia*, Jakarta, Vol. 16 No. 11, November 411.23.
- Jauch Laurence R dan William F Glueck, 1999, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Edisi Ketiga, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- John D. Martin Arthur J. Kevin, J. William Petty David F, Scot Jr, 1992, *Basic Financial Manajemen Terjemahan, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Kelima, Jjiid I dan II, Diterbitkan atas Kerjasama dengan Prentice Hall Inc.
- Joyal A, P.A. Julien and (Deshais), 1993, *Exportation des PME Quebecoises et Faccord de Libre echchange aves les Etats-Units Review Internationale PME* : Vol 6 No 10 pp. 50-62.
- Kantor Wilayah Depperind. Provinsi Jatim, 1999, *Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perdagangan dalam Negeri bagi Pengusaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Timur*, Un-Published Surabaya hlm 118.
- , 1993a, *Laporan Penyaluran Bantuan Modal Ventura Bagi Usaha IMKM di Provinsi Jawa Timur*, Surabaya, Un-Published.
- , 1993b, *Informasi Pelaksanaan Program Keterkaitan Kerja Sama Bapak Angkat-Mitra Usaha*, Jatim III-1993, Un-Published, Surabaya.
- Kantor Wilayah Depperindag Provinsi Sumut, 2000, *Laporan Kegiatan Proyek PIKM, T.A 1999/2000* Un-Published Medan. Hlm 16.
- Karmakar, U.S., 1996, Integrative Research in marketing and Operation Management, *Journal of Marketing Research*, Vol. XXXIII (May) P: 125 – 133.
- Kazanjian R., 1998, Relation of Dommand Problems to Stages of Growth in Technology-Based New Ventures, *Academy of Management Journal* Vol 31 pp 257-279.
- Ken Matsuno, John T. Mentzer & Aysegne Ozsomer, 2002, The Effects of Entrepreneurial Proclivity and Market Orientation on Business Performance, *Journal of Marketing* Vol 66 No 6 July pp. 18-32.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagngan RI No 256/MPP/Kep/7/1997 *Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri*.

- Kerlinger. Fred N, 1990, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Khan, R. and J. Rocha, 1982, Recurring Management Problems in Small Business, *American Jour of Small Business* Vo. 7 No. 1, pp. 50-58.
- Kompas, 2005, Apa Makna Pencanaan Tahun Keuangan Mikro, *Kompas Tahun ke 14* No 4 Hlm 4.
- Kotler P. John and Heskert L. James, 1995, *Corporate Culture and Performance*, Second Edition, McGraw-Hill Book Company.
- Kotler, 1994, *Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation, and Control, Seventh Edition Englewood Clips*, Prentice Hall International Inc.
- , 1997, *Marketing Management*, Nine Edition By Prentice-Hall, Inc. pp 18.
- La Presse, 1992, *Aid For Small Business Exporting Firms : The Role of Governments and Information net Works Halifac*, Canada Institute of Research on Public Policy.
- Leo Paul Dana, 1999, Preserving Culture Through Small Business : Government Support for Artisans and Craftsmen in Greece, *Journal of Small Business Management* Vol 37 No 1 January pp. 68-77.
- Lessem R, 1995, An Examination of the Effects of Organizational Structure and Environmental Uncertainty on Entrepreneurial Strategy, *Journal of Management*, 1998 Vol 18 pp. 639.
- Little, I. M. D., 1997, Small Manufacturing Enterprise in Developing Countries, *The World Bank Economic Review* 2 (Januari) 203-235.
- Lorie, D. O dan Barry, A. S., 1986, Don't Mistake Business Plant for Planning, *Journal of Small Business Strategy*, Vol 10 No. 12 February pp. 67-72.
- Lyman. W. Hornsby, J.S and Montagno, 1968, *Strategic Management*, First Edition, London, John Willey & Sons.
- Maki, K., and T. Pukkinen, 2000, Barriers to Growth and Employment in Finish Small Enterprises, *Paper Presented at the ICSB World Conference 2004*, Brisbane, Australia, June.
- Manan Abdul, 1999, *Dampak Pola Pembinaan terhadap Kinerja Sub-Sektor Industri Kecil di Jawa Timur*, Un-Published, Disertasi S3 Unair, Hlm 7.

- Manas E, 1992, La Demanda de Servicios a Empresas Segun Tanamo, Actividad y. Localization (demand for services to Business According ti Size, Activity and Localization : *Papeles de Economica Espanda* Vol 50 pp. 307-311.
- Mangkunegara Anwar Prabu, 2003, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung, Rafika Aditama.
- Maryoto Andreas, 2005, Ketersediaan Konsultan Bagi Usaha Kecil Menengah masih Minim, *Kompas* Tahun ke 14 No 16 14/08 Hlm 14.
- Mathis Jackson, 2000, *Human resource management*, Shouth Western College Publishing.
- Mazzarol T., 2000, Do Formal Business Plan really Matter?, A Survey of Small Business Owners in Australia, *Paper Presentated at the ICSB World Conference 2000 Brisbane*, Australia. June.
- Mc. Celland, DC, 1993, Testing for Competence Rather than for Inteligence, *American Phsycologist* Vol 28 No. 6 pp. 1-14.
- Mirza Teuku, 1996, *Return on Investment (ROI) : Makna dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Usahawan No 06/Thn XXV.
- Moeljadi, 1999, *Pengaruh Beberapa Faktor Internal Perusahaan dan program Asistensi Pemerintah terhadap Kinerja Industri kecil di Jawa Timur*, Un – Published, Disertasi S3, Unair.
- Murp. F. B. Aji, 1999, Dampak Pembinaan Pemerintah/BUMN/P/Dan terhadap Kinerja UKM di Indonesia, *National Workshop Small and Medium Enterprisess Development in Indonesia*, 8-9 Desember, Hotel Borobudur, Jakarta.
- Naro Zainimar R, 2000, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan pendapatan pengrajin dan penyerapan Tenaga kerja pada Industri kecil Bordir di Jawa Timur*, Un-published, Disertasi S3, Unair.
- Nazir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nitisemito, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Ketiga, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nur Cahyo, 2005, *Trading House untuk Perluasan Pasar*, Kompas Tahun ke 14 No 9 Hlm B.

- Nurhayati, 2003, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil yang Berorientasi Ekspor di Jawa Timur*, Un-Published, Disertasi S3 Unibraw, Hlm 24-25.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997, *Tentang Pengalihan Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan*.
- Porter, Michael, 1994, *Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Premaratne S. P, 1999, Networks, Resources and Small Business Growth : The Experience in Sri Lanka, *Journal of Small Business Management* Vol 37 No 11 Januari pp.121-127.
- Quasar Company, 1990, *Los Servicios a las Empresas en la egion de Murcia (Services to Business in the Murcian region, Municia, Spain* : Instituto de Fomento de La region de Murcia and Mimeo.
- Rabalcaba, L., 1999, *Competetividad y Comercio do Servicios, en La Economia Espanola (Competetivity and Service Trading in The Spanis Economy*, "Working Paper" No 5 Madrid, Spain : Servilab-Laboratorio de Investigation del Sector Servicios.
- Rencana Induk *Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*, 2002, *Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*, Un-Published, Jakarta.
- Ridwan, 2003, *Skala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*, Cetakan Kedua, CV. Alfabeta, Bandung.
- Riyanto Bambang, 1990, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Ketiga, Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Robinson, R.B dan Pearce, J.A., 1983, The Impact of Formalized Strategic Planning in Small Organization. *Strategy Management Journal* Vol.4 pp. 97-207.
- Rumerang, Dience, 1992, *Analisis Tingkat Keberhasilan Usaha Kecil Kerajinan Rotan di Maluku*, Thesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sa, Hambirch and J. Deuhurts, 1998, *Small Business and Entrepreneurship*, London, Mac Millan Business.
- Salim, Wahid, 1996, Strategi Kemitraan Tinjauan atas Konsep dan Aplikasinya, *Usahawan Indonesia*, Jakarta, Vol 25 No. 9 Hlm 14-17.

- Sandee H. P.Reitvelt, H. Supratikno, dan P. Yuono, 1994, Promoting Small Scale and Cottage Industry. An Infact Analysis for Central Java, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 30 (3).
- Sarder Ghost and Rosa, 1997, The Importance of Support Service to Small Enterprises in Bangladesh, *Journal of Small Business Management* Vol 8 No 6 pp. 26-36.
- Sekaran, 2000, *Research Method for Business Small Building Approach*, Second Edition, John Willy and Sons, Inc.
- Shapiro, E.C., R. G. Eccles and T. I Soske, 1993, Consultaria : Es la Solucion parte del problem : Consultant is the Solution part of The Problem, *Harpard Deusto Business Review* Vol 58 No 6 pp.38-45.
- Simanjuntak P.J, 1998, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simamora, Henry, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Penerbit Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri, 1989, *Pengantar Metode Survey*, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sirat Abdul Hadi, 2002, *Pengaruh Kemampuan Produksi, kemampuan Pemasaran, Karakteristik Bisnis terhadap Produktivitas, Modal Kerja, dan Kinerja Keuangan Industri kecil Manufakturing TDI di Jawa Timur*, UnPublished, Disertasi S3 Unair.
- Siswanto Sastrohadiwiryo (2003), *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Small Business Administration, 2000, *History the US Small Business Administration*, [http : // WWW. Sba. Gov](http://WWW.Sba.Gov) (acced 25 Mey 2001).
- Smith R.S., 1995, *Motivation trough the Design of Work : Test of Theory Organizational Behaviour and Human Performance*, Summer, August pp. 79-250.
- Solimun, 2003, *Structural Equation Modelling, LISREL, dan AMOS*, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sri Widodo, 2003, *Peran Agribisnis Usaha Kecil Menengah untuk Memperkokoh Ekonomi nasional*, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta.

- Stan Worth, J. Curray, 1996, Growth and the Smaller Firm-An Alternative View “*Journal of Management Studies* 13 (May) pp. 95-110.
- Subanar Harimurti, 1998, *Manajemen Usaha Kecil*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, BPFE.
- Sugiyono, 2003, *Penelitian Bisnis*, Cetakan Pertama, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko M. Irawan, 2002, *Ekonomika Pembangunan*, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Yogyakarta, BPFE.
- Susan Hurt and Nocolaos Tzigas, 1999, The Impact of Consulting Service of Spanish Firms, *Journal of Small Business Management* Vo. 37 No 4 April pp 34-42.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, 2005, *Formula Empat Sehat Lima sempurna Kebijakan pembinaan Industri Mikro, kecil Menengah Dalam Rangka Mengatasi Kendala yang Dihadapi Pengusaha IMKM*. Dialog dan Temu Usaha bagi IMKM : 25 Pebruari 2005, Jakarta.
- Syafri Manguprawira, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Cetakan Kedua, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tambunan Tulus, 1999, *Perkembangan Industri Skala kecil di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya.
- Tan William and S. T. Richard Tay, 1994, Factors Contributing to the Growth of SMES : *The Singapore Case Proceedings to the Fifth ENDEC, World Convergence in Entrepreneurship* : Singapore : N T V – Entrepreneurship Development Center, 151-161.
- Tan Chuee Huat, Dereh Torrington, 1998, *Human Resource Management For Shotheast Asia and Hongkong*, Pearson Education Asia Pte Ltd. Singapore.
- Theo and Low, 1994, *Factors Contributing to the Growth of SMES : The Singapore Case, Proceedings to the Fifth Endec World Conference on Entrepreneurship* Singapore : NTV – Intrepreneurship Development Center, 150-161.
- Tilaar HA, 2003, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Tunggal Amin Wijaya, 2001, *Memahami Konsep Economic Value Added (EVA) dan Value Based Management (UBM)*, Jakarta, Haravindo.
- Undang-Undang RI, Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Menengah.

Utami Muji, 1995, *Beberapa Faktor Keunggulan Strategi yang berpengaruh terhadap Keberhasilan Industri Bordir*, Un-Published, Thesis S2, Unair.

Vasant Desai, 2003, *Management of A Small-Scale Industry*, Tenth Edition, Himalaya Publishing House, Mumbai, India.

Vearce and David Olaf Solem, 1987, Factors for Succes in Small Manufacturing Firms, *Journal of Small Business Management* Vol 26 No 1 pp 51-58.

Viljoen, John, 1991, *How to Analysis, Choose Impleentation Corpoprte Strategies*, Second Edition, Longman profesional Press, NSW.

Wahab Abdul, Solichin, 1998, *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*, Malang, FIA Unibraw.

Weston J, Fred & Thomas E. Copeland, 1992. *Management Finance, terjemahan Jilid 2*, Edisi Kedelapan (Edisi revisi), Binarupa Aksara, Jakarta.

Wheelen, Thomas L dan Hunger J. David, 1995a, *Strategic Planning in Small Organization, Strategic management and Business Policy* Fifth Edition Addison Wesley Publishing Company. *Journal* Vol 4 pp. 97.

-----, 1995b, *Strategic Management and Business Policy*, Fifth Edition Addison-Wesley Publishing Company.

-----, 1995c, *Strategic Planning in Small Organization, Strategic Management and Business Policy*, Fifth Edition. Addison Wesley Publishing Company, *Journal* Vol 4 pp. 97.

William Cole, 1999, *Peranan dan Dukungan Kemitraan usaha dalam Pengembangan Klaster, makalah disampaikan dalam Seminar on Small and Medium Enterprises Development in Indonesia* yang diselenggarakan bersama oleh ADB, ILO, Bappenas dan World Bank, pada tanggal 8-9 Desember di Hotel Borobudur, Jakarta.

Wijardena, Hema and Shivas Cooray, 1995. Determinant of Growth in Small Japanese Manufacturing Firms, Survey Evidence from Kobe, *Journal of Small Business Management* Vol 33 No 4 pp. 87-92.

Yusuf Attahir, 1995, Critical Success Factors for Small Business: Perceptions of South pasific Entrepreneurs, *Journal of Small Business management* Vol 33 No 1 October pp 68-73

Zadjuli S.I, 1986, Pola Pengembangan Berimbang dalam Struktur Ekonomi Daerah Jawa Timur, Un-Published, Disertasi S3 Unair.

-----, 2002, Ekonomi Kerakyatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia (SDM), Makalah Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Percepatan Gerakan Koperasi dan UKM Indonesia, Sangatta.

LAMPIRAN 1

PETA TEORI

PETA TEORI

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel/faktor yang digunakan dan Alat Analisis	Hasil
1	Dience Rumerang Tahun 1992	Analisis tingkat keberhasilan Usaha Industri Kecil Kerajinan Rotan di Maluku.	<i>Variabel Dependent:</i> Keberhasilan usaha <i>Variabel Independent:</i> Modal usaha, proses produksi, proses pemasaran, produktivitas. <i>Alat Analisis:</i> Model regresi berganda	1. Sulitnya memperoleh modal karena tidak memiliki ijin usaha sementara pengusaha memiliki keterbatasan modal. 2. Sumber bahan baku yang tidak terjamin 3. Kurangnya ketrampilan pengusaha dan belum adanya pembagian kerja. 4. Pemasaran melalui pihak ketiga 5. Rendahnya produktivitas total disebabkan rendahnya produktivitas parsial tenaga kerja - Rendahnya produktivitas rata – rata bahan karena adanya inefisiensi dalam proses produksi 6. Produktivitas rata – rata peralatan rendah karena jumlah peralatan terbatas 7. Variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha yang diukur berdasarkan tingkat keuntungan secara parsial adalah bahan baku, volume produksi, dan harga jual per unit output.
2	Godfrey Baldacchino Tahun 1997	Small Business in Small Islands : A Case Study From Fiji	deskriptif	Diketahui bahwa perizinan, faktor ekspatriat, lingkungan kerja, dan bantuan internet berpengaruh terhadap volume pemasaran ekspor produk sabun industri rumah tangga (SPL) di lembah Suva Ibu kota Fiji. (terjadi perluasan pasar dan pengurangan biaya transportasi dan komplein.
3	Sarder, Ghost and Rosa Tahun 1997	Pentingnya Dukungan Pembinaan terhadap Usaha kecil di Bangladesh.	<i>Variabel Dependent:</i> Kinerja UKM <i>Variabel Independent:</i> pertumbuhan penjualan, pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanilai tambah per tenaga kerja penuh waktu	Secara serempak seluruh variabel dependent berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM dan Variabel Financial berpengaruh signifikan terhadap kinerja UKM.

dillanjutkan

.....lanjutan 1

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel/faktor yang digunakan dan Alat Analisis	Hasil
4	Muji Utami Tahun 1998	Faktor-faktor Keunggulan Strategis pada Industri Bordir di Jawa Timur	Perencanaan Strategis dan Ratio Keuangan. <i>Variable Dependent</i> Volume penjualan <i>Variable Independent</i> Factor keunggulan strategis <i>Alat Analisis</i> : Analisis Diskriminan dan Analisis regresi berganda.	Volume penjualan dipengaruhi oleh faktor-faktor keunggulan strategis Faktor keunggulan strategis yang berpengaruh dominan terhadap volume penjualan adalah tingkat perputaran aktiva.
5	Abdul Manan Tahun 1999	Dampak pola pembinaan terhadap kinerja subsektor industri kecil di Jawa Timur.	<i>Dependent Variable</i> : Kinerja subsektor industri kecil di Jawa Timur <i>Independent Variable</i> : a. <i>Pola Pembinaan Pelati han</i> (pelatihan teknis produksi, pelatihan kesehatan, penanganan limbah dan kewirausahaan b. <i>Pola Pembinaan non Pelatihan</i> bantuan tenaga ahli, bantuan keuangan, bantuan peralatan/mesin, kerja sama operasional, peraturan pemerintah. <i>Alat analisis</i> : Regresi Linear Berganda Populasi : Pengusaha industri kecil di provinsi Jawa Timur. Sebanyak 179 pengusaha yang terdapat di sentara-sentara sub sektor industri kecil.	Dengan menggunakan uji stepwise, pola pembinaan non pelatihan yaitu: (pemberian bantuan dan kerja sama), dan peraturan pemerintah berpengaruh secara signifikan <i>Aspek – aspek yang berpengaruh terhadap kinerja subsektor industri kecil di Jawa Timur</i> : Pelatihan teknis produksi, pelatihan kesehatan, penanganan limbah, kewirausahaan, bantuan: tenaga ahli, keuangan, peralatan/mesin, kerja sama operasional, dan peraturan pemerintah. <i>Aspek- aspek yang berpengaruh negatif tetapi signifikan</i> : Pelatihan kesehatan, penanganan limbah dan pelati han kewirausahaan. <i>Aspek – aspek yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan</i> : Pelatihan keuangan/modal, pelatihan pemasaran, pelatihan manajemen, kerja sama dagang Dengan uji-t pola pembinaan non pelatihan lebih berpengaruh dan signifikan dibandingkan dengan pola pembinaan pelatihan.

dillanjutkan

..... lanjutan 2

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel/faktor yang digunakan dan Alat Analisis	Hasil
6	Camille Career Tahun 1999	The Training and Deveplopment Needs of Owner-Managers of Small BusinessesExport Potential.	Deskriptif.	Berdasarkan hasil survey dan wawancara terhadap 15 pengusaha dalam satu kelompok yang bergerak dibidang eksport, diketahui bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kemampuan memasuki pasar ekspor. Dengan pelatihan kemampuan adaptasi produk dan kemampuan teknik melakukan perdagangan internasional.
7	Colm O' Gorman and Roselyn Doran Tahun 1999	Mission Statements in Small and Medium Size Business	Deskriptif	Dari hasil penelitian diketahui terdapat 3 komponen yang harus terkandung dalam pernyataan misi agar pertumbuhan pendapatan dan struktur pertumbuhan unit usaha yaitu: ☐ Persoalan kualitas ☐ Kebutuhan konsumen ☐ Hubungan supplier. Ketiga komponen diatas berpengaruh terhadap kinerja dan struktur pertumbuhan unit usaha.
8	Hema Wijewar-Dane and Garry E. Ribbits Tahun 1999	Factors Contributing to the growth of Small Manufacturing Firms : Data from Australia.	<i>Varibel Dependent</i> ☐ Growth of Small Firms <i>Independent Varibel :</i> ☐ Age of firm ☐ Size of Firm ☐ Market Competition ☐ Export Orientation <i>Alat analisis :</i> Regresi Linear Berganda Populasi 136 pengusaha industri kecil di Marybirmong, New South Wales, Australia.	Berdasarkan analisis diketahui bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan unit usaha. Sedang ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan unit usaha

dillanjutkan

..... lanjutan ?

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel/faktor yang digunakan dan Alat Analisis	Hasil
9	Jaidep Motwani, Thomas dan Dridge, James Jiang and Klas Soderqu Ist Tahun 1999.	Managing Innovation in French Small and Medium-Sized Enterprises.	<i>Dependent Variabel</i> ☐ Inovasi produk ☐ Orientasi pemasaran ☐ Formulasi Strategi Efektif <i>Independent Variabel</i> Keberhasilan industri kecil menengah (Profitabilitas perusahaan) <i>Alat Analisis</i> Multivariat Analisis (manova). <i>Populasi:</i> Para Eksekutif industri kecil 60% menengah 40% di Rhone Alps wilayah Perancis yang terkenal dengan pertumbuhan pengusaha kecil menengah yang bergerak dibidang transportasi, manufaktur, komunikasi dan sektor konstruksi.	Diketahui bahwa terciptanya produk-produk baru hasil inovasi berkat peningkatan ketrampilan dan kemampuan orientasi pasar melalui pelatihan. Peningkatan penjualan, teknologi dan penciptaan lingkungan usaha. 49% dari responden mampu meningkatkan pemasaran produknya setelah melakukan inovasi produk. 29% responden berpendapat bahwa adanya pembauran merk dan formula strategi meningkatkan penjualan, sehingga perusahaan tumbuh dan berkembang di daerah Rhone Alps perancis.
10	Leo Paul Dana Tahun 1999	Upaya mem pertahan kan bu daya melalui kebijakan pembinaan pemerintah terhadap pengusaha kerajinan tangan di Yunani.	Deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan pemerintah yang disebut EOMEX terbukti mampu mengatasi permasalahan ekonomi dengan cara memasarkan hasil kerajinan tangan produk seni Yunani di pasar Yunani dan Eropah utara dan menciptakan peluang perkembangan regional yang sekaligus juga mempertahankan kekayaan budaya Yunani. Inovasi yang luas dan struktur pajak masih diperlukan jika ingin sektor kesenian tetap berjalan. Pembinaan pemerintah melalui EOMEX menyediakan pelayanan untuk mentoring seniman muda dalam berbagai sektor kerajinan di Yunani. EOMEX membantu melakukan workshop, seminar, partisipasi dalam pelaksanaan pameran dan mendirikan laboratorium di sekolah-sekolah, membantu penjualan produk.

dilanjutkan

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel/faktor yang digunakan dan Alat Analisis	Hasil
11	Moeljadi Tahun 1999	Pengaruh beberapa faktor internal perusahaan dan asistensi pemerintah terhadap industri kecil	<i>Dependent Variabel</i> Kinerja industri kecil di Jawa Timur <i>Independent Variabel</i> Diklat/pengalaman kerja, pengalaman usaha, kewirausahaan, identitas budaya, kemampuan usaha, karakteristik perusahaan, kebijakan modalan, kebijakan luasan pasar, kebijakan produksi, tingkat upah. <i>Alat Analisis :</i> Menggunakan multiple regresion	I. Variabel internal - Diklat-pengalaman kerja dan pengalaman usaha berpengaruh positif terhadap pembentukan identitas budaya. - Diklat - pengalaman kerja, pengalaman usaha, identitas budaya berpengaruh positif signifikan terhadap kewirausahaan. - Diklat - pengalaman kerja, pengalaman usaha, identitas. - Kemampuan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan modalan, kebijakan produksi dan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan perluasan pasar. 2. Kebijakan modalan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan perluasan pasar, kebijakan produksi dan kebijakan tingkat upah 3. Program asistensi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan modalan, kebijakan perluasan pasar, dan kebijakan produksi, namun berpengaruh signifikan terhadap kebijakan tingkat upah 4. Program asistensi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja. 5. Karakteristik perusahaan dan tingkat upah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

dillanjutkan

..... lanjutan 5

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel/faktor yang digunakan dan Alat Analisis	Hasil
12	Murp, F. B. Aji Tahun 1999	Dampak Pembinaan Pemerintah/BUMN/P/D Terhadap kinerja UKM di Indonesia	<i>Dependent Variabel</i> KinerjaUKM <i>Independent Variabel</i> ☐ Kemitraan ☐ Kemampuan Manajerial ☐ Pendidikan ☐ Teknologi ☐ Kewirausahaan ☐ Aliran Informasi pasar ☐ Ketrampilan teknis.	Secara serempak seluruh variabel dependent berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM dan Variabel bantuan keuangan berpengaruh
13	Premaratne, S. P Tahun 1999	Pengaruh pembinaan Pemerintah terhadap Kinerja Usaha Industri kecil di Srilanka.	<i>Dependent Variabel</i> ☐ Kinerja Usaha <i>Independent Variabel</i> ☐ Bantuan keuangan ☐ Informasi dan non-material ☐ Kewirausahaan ☐ Sumber bahan Baku Alat Analisis: Regresi Linear berganda Populasi ; Pengusaha industri kecil sebanyak 303 pengusaha di Srilanka.	Secara serempak seluruh variabel dependent berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM dan Variabel bantuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UKM.

dillanjutkan

..... lanjutan 6

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel/faktor yang digunakan dan Alat Analisis	Hasil
14	Susan Hart and Nikolaos Tzogas Tahun 1999	The Impact of Consulting Service of Spanis Firms	<i>Dependent Variable</i> □ Pendapatan usaha <i>Independent Variable</i> □ Jasa Tenaga Pendamping/penyuluh - Organisasi - Peningkatan kualitas - Pemasaran - Strategi usaha <i>Alat Analisis :</i> Test Chi Squared mentel henzels dan pearsons Populasi 1.000 pengusaha menengah di Spanyol	Diketahui bahwa jasa tenaga pendamping/ penyuluhan sangat berpengaruh terhadap kinerja usaha pengusaha menengah di Spanyol. 50% dari responden menyatakan bahwa pengusaha menengah di spanyol membutuhkan tenaga konsultan pendamping/Penyuluh
15	William Cole Tahun 1999	Pengaruh kemitraan usaha terhadap kinerja klaster industri kecil di Philipina.	<i>Variabel Dependent :</i> Kinerja Klaster industri kecil <i>Variabel Independent</i> Kemitraan dalam investasi, teknologi, jalur informasi, dan kemitraan bisnis <i>Alat Analisis :</i> Regresi berganda.	Seluruh variabel bebas secara serempak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja klaster industri kecil di Philipina

dillanjutkan

..... lanjutan 7

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel/faktor yang digunakan dan Alat Analisis	Hasil
16	Zainimar Naro R Tahun 2000	Faktor – faktor yang mempengaruhi peningkat tan pendapa tan Pengrajin dan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil bordir di Jawa Timur.	<i>Variabel Dependent:</i> Pendapatan Pengrajin (Y1) Penyerapan tenaga kerja (Y2). <i>Variabel Independent</i> Gaji, modal saat ini, volume penjualan per bulan, penerangan ruang kerja, harga mesin baru, lama produksi per satuan, organisasi perusahaan, jumlah mesin, fasilitas yang dimiliki, asal pengrajin, tingkat pendidikan, jumlah mesin lama, kedisiplinan pekerja, upah per satuan, motivasi mendirikan usaha, tunjangan per bulan, sirkulasi udara di ruang kerja <i>Alat Analisis :</i> Analisis faktor dan regresi berganda	1. Untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap pendapatan industri kecil bordir di Jawa Timur (Y1) digunakan uji F. hasil analisis menunjukkan semua variabel bebas secara serempak berpengaruh signifikan. 2. Dengan menggunakan uji-t, terdapat dua variabel berpengaruh dominan terhadap pendapatan pengrajin yaitu; faktor modal dan organisasi perusahaan. 3. Untuk menjelaskan pengaruh industri kecil bordir terhadap penyerapan tenaga kerja (Y2) digunakan uji F. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel dependent berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan uji-t diketahui dua variabel bebas yaitu modal dan fasilitas yang dimiliki berpengaruh dominan. 4. Berdasarkan hasil uji parsial disimpulkan bahwa faktor modal berpengaruh dominan terhadap peningkatan pendapatan pengrajin (Y1). Maupun terhadap penyerapan tenaga kerja (Y2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar modal yang dimiliki pengusaha, maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk memperoleh pendapatan dan semakin tinggi pula kemampuan dalam menyerap tenaga kerja 5. Faktor permodalan berpengaruh dominan terhadap peningkatan pendapatan pengrajin maupun terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa faktor modal merupakan faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan usaha kecil bordir di Jawa Timur.

dillanjutkan

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel/faktor yang digunakan dan Alat Analisis	Hasil
17	Alison Morison, John brenn and Sammeh Tahun 1999	Small Business Growth Intention, Ability, and Opportunity	<i>Dependent Variable:</i> ☐ Small Business Growth <i>Independent Variable:</i> ☐ Intention ☐ Ability ☐ Opportunity <i>Alat Analisis :</i> Kualitatif	Ability yang dicerminkan oleh ketrampilan teknis dan kemampuan manajerial berpengaruh terhadap keberhasilan dan pertumbuhan unit usaha. Tanpa adanya kemampuan maka kesempatan dan tujuan yang ditetapkan tidak akan dapat tercapai.
18	Djumilah Zain, Tuus Rahayu, Agung Yuniarin to Tahun 1999	Analisis Struktur Industri terhadap daya saing Industri Kerajinan di Juwana Pati Jateng.	<i>Dependent Variable:</i> ☐ Difrensiasi produk ☐ Kebutuhan Modal ☐ Jumlah pesaing ☐ Pertumbuhan Industri ☐ Hambatan pengunduran Diri ☐ Penurunan Harga ☐ Mutu yang tinggi ☐ Produk Substitusi. <i>Independent Variable:</i> Kemampuan bersaing usaha <i>Alat Analisis :</i> Metode Simultan (independent toether) dan Metode Stepwise (Stepwise method).	Dilaporkan terdapat empat variabel yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan daya saing industri kerajinan kunningan Yuana yaitu; ☐ Permodalan ☐ Jumlah Pesaing ☐ Penurunan harga ☐ Dan Peningkatan Mutu. Oleh sebab itu bantuan pemerintah terhadap industri mikro berupa permodalan sangat diharapkan, agar pengusaha kerajinan di sektor ini dapat tumbuh dan berkembang. -

LAMPIRAN 2

KUESIONER

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Kuesioner ini ditujukan kepada responden yaitu pengusaha Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah yang sudah pernah mendapat bantuan pembinaan dari pemerintah. Responden dimohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini pada tempat yang disediakan. Selanjutnya untuk pilihan berganda cukup memilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu, dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu huruf jawaban yang telah disediakan..

A. Identitas Responden (Pengusaha) :

1. Nama Lengkap :
2. U m u r :
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki – laki ☐ Wanita.
4. Status Keluarga : ☐ Kawin ☐ Tidak Kawin
5. Alamat : Desa/Kelurahan.....Kec.....
6. Pendidikan Formal yang pernah ditempuh :
 - ☐ Tidak Sekolah.
 - ☐ Tidak tamat SD : kelas
 - ☐ Tamat SD
 - ☐ Tidak tamat SMP/SLTP : kelas
 - ☐ Tamat SLTP.
 - ☐ Tidak tamat SMA/SLTA : kelas
 - ☐ Tamat SMA/SLTA.
 - ☐ Tidak tamat Perguruan tinggi / Akademi : tahun ke
 - ☐ Tamat perguruan tinggi sebutka :

7. Jenis Pelatihan yang pernah diikuti. (beri tanda **X** untuk setiap pelatihan yang pernah diikuti, jawaban bisa lebih dari satu)
- ☐ Diklat Kewirausahaan /Achievemen Motivation Training (AMT)
 - ☐ Creation of Entreprises Formation of Entrepreneur (CEFE)
 - ☐ Diklat Manajemen Sederhana
 - ☐ Diklat Kewirausahaan
 - ☐ Diklat Pembinaan Manajemen Terpadu/Gugus Kendali Mutu..
 - ☐ Lain-lain Pelatihan
8. Jenis Izin yang dimiliki (beri tanda **X** untuk setiap jenis izin yang anda miliki).
- ☐ Ijin Industri
 - ☐ Tanda Daftar Industri
 - ☐ Ijin Perluasan Industri
 - ☐ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - ☐ Wajib Daftar Perusahaan (WDP)
 - ☐ Izin HO
9. Bentuk Badan Usaha : ☐ Perorangan ☐ CV ☐ PT ☐ Firma ☐ Lainnya.
10. Sumber pembiayaan : ☐ modal sendiri ☐ Bantuan Pembinaan Pemerintah
☐ Pinjaman Bank

B. TANGGAPAN ATAS PENGARUH KEBIJAKAN PEMBINAAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA DAN PERKEMBANGAN STRUKTUR UNIT USAHA INDUSTRI KECIL PENGGERAK EKONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA (X).

Berikut ini ada beberapa pertanyaan untuk ditanggapi berkaitan dengan Kebijakan Pembinaan Pemerintah terhadap Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah melalui bantuan; Pelatihan Teknis, Layanan Perizinan, Permodalan, Pemasaran, Bantuan Penyuluhan, Kinerja dan Perkembangan Unit Usaha.

1. Bantuan Pelatihan Teknis (X1).

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan tentang efektivitas bantuan pelatihan teknis yang pernah anda ikuti. Pertanyaan berkaitan dengan program (*programme*) pelatihan, pembelajaran (*learning*), perilaku (*behaviour*), Kompetensi instruktur (*Competention*), Hasil Pelatihan (*output*)

Untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut anda dari lima jawaban yang tersedia, gunakan kunci penilaian sesuai dengan bobot untuk masing-masing jawaban

Berilah tanda (X) untuk setiap jawaban yang paling tepat menurut anda .

1	Bagaimana Mutu Program Pelatihan Teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah ? (<i>valuble/realistis</i>)	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak bermutu Sangat bermutu
2	Apakah metode yang digunakan oleh para instruktur mengenai prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik, ketrampilan teknis produksi dan pemasaran sesuai dengan harapan pengusaha ? (<i>Learning</i>)	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuai Sangat sesuai
3	Bagaimana perubahan perilaku pengusaha dapat berlangsung setelah mengikuti pelatihan teknis ? (<i>Behaviour</i>)	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak berubah Sangat berubah
4	Apakah Kompetensi para pengajar (Instruktur) sudah sesuai dengan bidang tugasnya ? (<i>Competention</i>)	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuai Sangat sesuai
5	Bagaimana hasil akhir pencapaian tujuan Pelaksanaan Program Pelatihan teknis bagi peserta ? (<i>Output</i>)	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak tercapai Sangat tercapai

2. Peraturan Pemerintah (X2)

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan tentang layanan pemerintah dalam penerbitan izin usaha yang meliputi Izin Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Perluasan, TDI, SIUP, HO. Pertanyaan berkaitan dengan; mekanisme penerbitan izin, biaya pengurusan izin, jangka waktu penyelesaian, dan kemampuan para petugas penerbitan izin.

Untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut anda dari lima jawaban yang tersedia, gunakan kunci penilaian sesuai dengan bobot masing-masing jawaban.

Berilah tanda (X) untuk setiap jawaban yang paling tepat menurut anda .

1	Layanan yang diberikan oleh petugas kepada pengusaha dalam penerbitan izin sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang diminta tidak berbelit-belit.	①—②—③—④—⑤ Sangat berbelit Sangat tidak berbelit
2	Petugas senantiasa memegang sikap kejujuran dalam memberikan keterangan dan kejelasan rincian biaya pengurusan izin.	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak jujur Sangat jujur
3	Jangka waktu pengurusan izin, petugas senantiasa memperhatikan kecepatan proses dan ketepatan pelayanan serta selalu dilakukan dengan baik dan tuntas.	①—②—③—④—⑤ Sangat lambat Sangat cepat
4	Persyaratan administrasi berupa dokumen penyerta yang dipersyaratkan cukup sederhana dan dapat dipenuhi.	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sederhana Sangat sederhana
5	Dalam proses penerbitan izin, petugas mampu dan menguasai peraturan dan trampil atau keinginan untuk membantu masyarakat	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak menguasai Sangat menguasai

3. Bantuan Permodalan (X3)

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan anda sehubungan dengan bantuan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah. Pertanyaan berkaitan dengan; sumber permodalan, jumlah bantuan permodalan, jangka waktu pengembalian, jenis permodalan, persyaratan proposal, Untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut anda dari lima jawaban yang tersedia, gunakan kunci penilaian sesuai dengan bobot masing-masing jawaban.

Berilah tanda (X) untuk setiap jawaban yang paling tepat menurut anda .

1	pemerintah berperan untuk memberikan kemudahan mendapatkan akses sumber bantuan modal sesuai harapan pengusaha.	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak berperanSangat berperan
2	Sejauh ini bagaimana menurut anda realisasi bantuan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah apakah sesuai dengan kebutuhan pengusaha	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuaiSangat sesuai
3	Jangka waktu pengembalian pinjaman modal dan bunga (<i>grace period</i>) apakah disesuaikan dengan kebutuhan jangka waktu pengolahan sampai dengan hasil produksi dapat dipasarkan	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuaiSangat sesuai
4	Variasi atau jenis modal (Investasi, modal kerja) yang disalurkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan harapan dan jenis usaha.	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuaiSangat sesuai
5	Apakah proposal yang anda usulkan sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pemerintah (yang menyalurkan dana pinjaman)?	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuaiSangat sesuai

4. Bantuan Pemasaran (X4)

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan anda sehubungan dengan bantuan pemasaran yang disalurkan oleh pemerintah terhadap Industri kecil Penggerak Ekonomi Daerah..

Pertanyaan berkaitan dengan jumlah bantuan biaya promosi, pemberian bantuan biaya pameran, bantuan biaya pembuatan leaflet, brosur dan sejenisnya untuk penyebaran informasi produk dalam negeri, keakuratan informasi harga dan mutu barang permintaan imortir, bantuan akses pasar luar negeri.

Untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut anda dari lima jawaban yang tersedia, gunakan kunci penilaian dengan bobot masing-masing jawaban sebagai berikut :

Berilah tanda (X) untuk setiap jawaban yang paling tepat menurut anda .

1	Apakah realisasi bantuan dana pemasaran melalui penyelenggaraan promosi yang disalurkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengusaha ?	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuai Sangat sesuai
2	apakah bantuan biaya pameran yang disalurkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengusaha ?	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuai Sangat sesuai
3	apakah dana bantuan pembuatan leaflet, brosur, dan biaya media elektronik lainnya yang disalurkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan pengusaha dalam rangka penyebaran informasi hasil produksi, harga di dalam negeri.	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuai Sangat sesuai
4	Informasi harga, jumlah, mutu barang. yang diinginkan para importir di luar negeri yang diinformasikan oleh pemerintah sesuai dan cukup akurat ?	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuai Sangat sesuai
5	Apakah bantuan akses pasar dari pemerintah. sesuai dengan jangkauan pemasaran hasil produksi anda ke luar negeri?.	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuai Sangat sesuai

5. Bantuan Penyuluh Industri dan Perdagangan (X5)

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan anda sehubungan dengan bantuan Penyuluh Industri dan perdagangan.

Pertanyaan berkaitan dengan metode penyuluhan, kompetensi para tenaga penyuluh, pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha, ketanggapan terhadap masalah bisnis

Untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut anda dari empat jawaban yang tersedia, gunakan kunci penilaian dengan bobot masing-masing jawaban sebagai berikut :

Berilah tanda (X) untuk setiap jawaban yang paling tepat menurut anda

1	Metode penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengusaha. (<i>reaksi</i>)	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak manfaat Sangat manfaat
2	Tenaga penyuluh Indag mempunyai pengalaman yang memadai dan menunjang kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh/pendamping pengusaha. (<i>Kompetensi</i>)	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak pengalaman Sangat pengalaman
3	Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha (<i>Pembelajaran</i>).	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak sesuai Sangat sesuai
4	Penyuluhan yang diberikan pemerintah dapat merubah perilaku para pengusaha sehingga kinerja usaha dapat meningkat.. (<i>perilaku</i>)	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak berubah Sangat berubah
5	Tenaga penyuluh Indag senantiasa tanggap terhadap masalah bisnis dan menyelesaikannya dengan tuntas. (<i>hasil</i>)	①—②—③—④—⑤ Sangat tidak tanggap Sangat tanggap

6. Kinerja Usaha (Y1)

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi/kinerja usaha anda yang mencakup data penjualan, laba, investasi awal dan jumlah karyawan

Omzet penjualan (Rp) 2004	Laba (Rp) 2004	Investasi (Rp) awal buka usaha	Jumlah karyawan sampai saat ini (orang)
Rp. _____	Rp _____	Rp _____	_____ orang

7. Perkembangan Unit Usaha (Y2)

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persentase pertumbuhan investasi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan jumlah omzet penjualan sebelum dan sesudah dibina oleh pemerintah.

No	Indikator Struktur Unit Usaha	Satuan	Jumlah	
			Sebelum Dibina	Setelah Dibina
1	Nilai Investasi	(Rp)		
2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	(Orang)		
3	Omzet Penjualan	(Rp)		

LAMPIRAN 3

KARAKTERISTIK RESPONDEN,
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG
PELATIHAN, PERATURAN
PEMERINTAH, PERMODALAN,
PEMASARAN,
PENYULUH INDUSTRI
PERDAGANGAN, KINERJA USAHA,
PERKEMBANGAN STRUKTUR USAHA

Karakteristik Responden

Umur (tahun)	Jumlah	Persen
35-45	97	64,67
> 45-55	37	24,67
> 55-75	16	10,67
Total	150	100,00

Jenis kelamin	Jumlah	Persen
Pria	94	62,67
Wanita	56	37,33
Total	150	100,00

Pendidikan	Jumlah	Persen
Tidak tamat SD	15	10,00
Tamat SD	67	44,67
Tamat SLTP	46	30,67
Tamat SLTA	22	14,67
Total	150	100,00

Jenis Pelatihan	Jumlah	Persen
AMT	11	7,33
CEFE	5	3,33
Diklat manajemen sederhana	37	24,67
Diklat kewirausahaan	97	64,67
Total	150	100,00

Jenis Pelatihan	Jumlah	Persen
Sumber pembiayaan		
Modal sendiri	115	76,67
bantuan pemerintah	35	23,33
Total	150	100,00

Izin perdagangan yang dimiliki	Jumlah	Persen
SIUPP-TDP	109	72,67
Tidak memiliki	41	27,33
Total	150	100,00

Izin perdagangan yang dimiliki	Jumlah	Persen
TDI	115	76,67
Ijin industri	35	23,33
Tidak memiliki	22	14,67
Total	150	100,00

Nilai Rata-Rata Per Indikator Per Komoditi

Variabel	Indikator	Makanan Ringan	Tenun Gedogan Ulos	Pupuk Alam & Organik	Genteng	Kapal Kayu Perahu	Pehiasan emas Perak	Alsintan dari Besi dan logam	Mean Per Indikator
Pelatihan	X1.1	3,7647	3,6944	4,0000	4,0000	4,3333	4,0000	4,0667	3,7867
	X1.2	3,7451	3,6944	3,6667	4,0000	4,0000	3,7500	4,0667	3,7600
	X1.3	3,8039	3,8333	4,0000	4,0000	4,3333	3,7500	3,9333	3,8467
	X1.4	3,6275	3,7361	4,0000	4,5000	4,3333	3,7500	4,3333	3,7867
	X1.5	3,6863	3,7500	4,0000	4,5000	4,6667	3,7500	4,2000	3,8067
	Mean variabel per komoditi	3,7255	3,7417	3,9333	4,2000	4,3333	3,8000	4,1200	3,7973
Peraturan Pemerintah	X2.1	2,8627	2,8333	2,6667	3,5000	2,3333	2,2500	2,6000	2,8000
	X2.2	2,9412	2,8611	2,6667	3,5000	2,3333	2,5000	2,4667	2,8333
	X2.3	2,8824	2,9722	2,6667	3,5000	2,3333	2,2500	2,5333	2,8667
	X2.4	2,9216	2,9722	3,0000	3,5000	2,3333	2,2500	2,4667	2,8800
	X2.5	2,8627	2,9861	3,0000	3,5000	2,3333	2,5000	2,4000	2,8667
	Mean variabel per komoditi	2,8941	2,9250	2,8000	3,5000	2,3333	2,3500	2,4933	2,8493
Permodalan	X3.1	3,6275	3,6806	3,6667	4,5000	4,3333	4,0000	4,1333	3,7400
	X3.2	3,4706	3,8611	3,0000	5,0000	4,0000	3,7500	4,1333	3,7533
	X3.3	3,4706	3,8889	3,0000	5,0000	4,6667	3,7500	4,0667	3,7733
	X3.4	3,4314	3,8750	3,0000	5,0000	4,3333	3,2500	4,0000	3,7267
	X3.5	3,6078	3,8333	3,0000	4,5000	4,6667	3,7500	4,2000	3,8000
	Mean variabel per komoditi	3,5216	3,8278	3,1333	4,8000	4,4000	3,7000	4,1067	3,7587

Variabel	Indikator	Makanan Ringan	Tenun Gedogan Ulos	Pupuk Alam & Organik	Genteng	Kapal Kayu Perahu	Pehiasan emas Perak	Alsintan dari Besi dan logam	Mean Per Indikator
Pemasaran	X4.1	3,5882	3,8889	3,0000	4,5000	4,3333	3,2500	4,1333	3,7933
	X4.2	3,6078	3,8750	3,0000	4,5000	4,3333	4,2500	4,0667	3,8133
	X4.3	3,5882	3,9028	3,0000	4,5000	4,3333	3,7500	4,1333	3,8133
	X4.4	3,3725	3,7083	3,0000	4,5000	4,3333	4,2500	4,2000	3,6667
	X4.5	3,4706	3,6528	2,6667	4,5000	4,6667	4,0000	4,5333	3,7000
	Mean variabel per komoditi	3,5255	3,8056	2,9333	4,5000	4,4000	3,9000	4,2133	3,7573
Penyuluh Indag	X5.1	3,4314	3,6528	3,3333	4,5000	4,6667	4,2500	4,4000	3,6933
	X5.2	3,4510	3,6528	3,0000	4,5000	4,6667	4,0000	4,4667	3,6933
	X5.3	3,4902	3,6944	3,3333	4,5000	4,6667	4,2500	4,4000	3,7333
	X5.4	3,4314	3,5694	3,3333	4,5000	4,6667	4,0000	4,4000	3,6467
	X5.5	3,4118	3,5278	3,0000	4,5000	4,6667	4,2500	4,4000	3,6200
	Mean variabel per komoditi	3,4431	3,6194	3,2000	4,5000	4,6667	4,1500	4,4133	3,6773
Grand Mean Per Komoditi		3,4220	3,5839	3,2000	4,3000	4,0267	3,5800	3,8693	3,5680

**Kategorisasi Indikator Jenis Usaha dan Perkembangan Struktur Usaha
Ke Dalam Rendah, Sedang dan Tinggi**

1. ROS (Y1.1) (Persen)

Minimal 19,75%

Maksimal 42,25%

$$\text{Interval } \frac{42,25 - 19,75}{3} = 7,5$$

Rendah : 19,75 – 27,24

Sedang : 27,25 – 34,74

Tinggi : 34,75 – 42,25

2. ROI (Y1.2) (Persen)

Minimal 11,15%

Maksimal 49,05%

$$\text{Interval } \frac{49,05 - 11,15}{3} = 12,63$$

Rendah : 11,15 – 23,77

Sedang : 23,78 – 36,41

Tinggi : 36,42 – 49,05

3. Pertumbuhan Investasi (Y2.1) (Persen)

Minimal 80,00%

Maksimal 96,00%

$$\text{Interval } \frac{96 - 80}{3} = 5,33$$

Rendah : 80,00 – 85,32

Sedang : 85,33 – 90,66

Tinggi : 90,67 – 96,00

4. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja (Y2.2) (Persen)

Minimal 33,33%

Maksimal 77,77%

$$\text{Interval } \frac{77,77 - 33,33}{3} = 14,81$$

Rendah : 33,33 – 48,13

Sedang : 48,14 – 62,95

Tinggi : 62,96 – 77,77

5. Pertumbuhan Omzet Penjualan (Y2.3) (Persen)

Minimal 36,00%

Maksimal 91,00%

$$\text{Interval } \frac{91,00 - 36,00}{3} = 18,33$$

Rendah : 36,00 – 54,32

Sedang : 54,33 – 72,66

Tinggi : 72,67 – 91,00

Berdasarkan kategori tersebut di atas setiap indicator dapat diketahui jumlah industri kecil yang masuk ke dalam ketiga kategori di atas :

Kategori	Y1.1 (%)	Y1.2 (%)	Y2.1 (%)	Y2.2 (%)	Y2.3 (%)
Rendah	46,0	45,0	24,0	32,0	39
	30,67	30,00	16,00	21,33	26,00
Sedang	60,0	52,0	70,0	74,0	72
	40,00	34,67	46,67	49,33	48,00
Tinggi	44,0	53,0	56,0	44,0	39
	29,33	35,33	37,33	29,33	26,00

Tabel Jumlah Penyebaran Data Komoditi Industri Kecil Berdasarkan Indikator Kinerja Usaha dan Perkembangan Struktur Usaha dengan Kategori Rendah Sedang dan Tinggi

Komoditi	Kategori	Y1.1	Y1.2	Y2.1	Y2.2	Y2.3
Makanan Ringan	Rendah	17	16	8	12	12
	Sedang	15	14	21	25	23
	Tinggi	19	21	22	14	16
Tenun	Rendah	16	16	8	12	19
	Sedang	31	29	35	35	35
	Tinggi	25	27	29	25	18
Pupuk Alam & Organik	Rendah	1	1	0	0	0
	Sedang	2	2	3	3	3
	Tinggi	0	0	0	0	0
Genteng	Rendah	1	1	1	1	1
	Sedang	1	1	1	1	1
	Tinggi	0	0	0	0	0
Kapal Kayu	Rendah	1	1	1	1	1
	Sedang	1	1	1	1	1
	Tinggi	0	0	0	0	0
Perhiasan emas	Rendah	4	4	4	4	4
	Sedang	1	1	1	1	1
	Tinggi	0	0	0	0	0
Alsintan	Rendah	6	6	2	2	2
	Sedang	9	4	8	8	8
	Tinggi	0	5	5	5	5

NO	Pelatihan (X1)					Peraturan Pemerintah (X2)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
1	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4
2	5	5	4	4	4	3	4	4	3	3
3	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4
4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	4
5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
6	5	4	5	4	5	3	3	4	3	4
7	4	4	5	5	4	3	3	4	4	4
8	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3
9	4	5	4	4	4	2	2	3	2	2
10	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
11	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
13	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
14	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2
15	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3
16	5	4	4	4	4	2	2	3	3	3
17	5	5	5	4	3	3	2	3	3	3
18	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
19	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3
20	5	5	4	4	4	3	2	3	3	3
21	4	4	5	4	4	2	2	3	2	3
22	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
24	5	5	4	4	4	2	3	3	2	2
25	5	4	5	4	4	3	2	3	3	3
26	4	4	5	4	4	3	3	3	2	2
27	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3
29	4	4	5	4	4	2	3	2	2	2
30	5	4	4	4	3	2	2	2	2	2
31	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
32	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2

NO	Pelatihan (X1)					Peraturan Pemerintah (X2)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
33	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
37	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
38	4	4	4	4	4	3	2	2	3	2
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2
41	3	3	5	4	4	2	2	3	3	2
42	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2
43	3	3	4	3	4	2	2	3	3	3
44	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3
45	3	3	4	4	4	2	2	2	2	2
46	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
47	3	3	3	4	4	2	2	3	3	3
48	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
49	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2
50	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3
51	4	3	4	3	3	2	3	3	2	2
52	4	4	4	4	3	3	2	2	3	2
53	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
54	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2
55	4	4	4	3	4	2	2	2	3	2
56	3	3	4	4	4	3	2	2	3	3
57	4	4	4	4	4	2	2	3	2	2
58	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4
59	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3
60	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
61	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3
62	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
63	5	3	3	3	3	3	3	4	4	4
64	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4

NO	Pelatihan (X1)					Peraturan Pemerintah (X2)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
65	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4
66	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4
67	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4
68	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
69	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
70	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3
71	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4
72	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4
80	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
81	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
90	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
92	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
94	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3
95	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2

NG	Pelatihan (X1)					Peraturan Pemerintah (X2)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
97	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
98	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
102	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
103	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
109	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
112	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2
113	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
114	3	3	5	4	4	4	4	3	3	3
115	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
116	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3
117	4	4	4	5	5	3	3	3	3	3
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	3	3	5	5	5	3	3	4	3	3
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3
126	4	3	4	5	5	3	3	3	3	3
127	4	4	5	4	4	2	2	2	2	2

NO	Pelatihan (X1)					Peraturan Pemerintah (X2)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
128	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
129	3	4	5	4	5	2	3	2	3	2
130	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
131	4	3	4	5	4	2	2	2	2	2
132	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3
133	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
134	5	5	4	5	5	3	3	3	3	3
135	4	4	4	5	4	2	2	3	2	2
136	5	5	4	4	4	3	2	2	3	3
137	4	4	4	5	5	2	2	3	2	2
138	4	4	4	5	5	2	2	3	3	2
139	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3
140	5	4	5	4	5	3	3	2	3	2
141	4	4	3	5	4	3	3	2	2	2
142	4	4	4	5	5	2	2	3	2	3
143	4	5	4	5	5	2	2	3	2	2
144	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
145	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
146	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
147	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
148	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2
149	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3
150	5	4	4	4	4	2	2	3	3	3

NO	Permodalan (X3)					Pemasaran (X4)					Penyuluhan (X5)				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5
1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4
2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5
3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4
5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4
6	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
8	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
14	3	2	2	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
19	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2
21	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
23	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
26	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
40	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
41	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
44	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
46	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
47	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3
49	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
50	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3
51	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3
52	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3

NO	Permodalan (X3)					Pemasaran (X4)					Penyuluhan (X5)				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5
53	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3
54	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
57	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3
58	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
61	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
62	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3
63	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
64	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3
65	2	3	3	4	2	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3
67	3	3	4	4	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3
68	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3
69	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
70	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3
72	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
75	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
78	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3
79	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3
80	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
82	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3
84	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3
85	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3
86	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
87	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4
88	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
90	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3
91	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3
92	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3
94	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3
95	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
97	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3
99	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
101	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3
103	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3
104	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4

NO	Permodalan (X3)					Pemasaran (X4)					Penyuluhan (X5)				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5
105	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
107	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
109	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
110	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3
111	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4
114	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
115	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
117	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
119	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
120	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5
123	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
126	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
127	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
129	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
134	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
135	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
136	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5
138	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
139	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
140	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
141	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
142	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
143	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
145	3	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	4	2	2	2	5	3	5	4	5	4	5	4	5	4	5
149	4	5	5	4	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4
150	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4

No	Omzet (Rp Juta)	laba (Juta Rp)	Investasi Awal (Juta Rp)	ROS (%)	ROI (%)
1	30,00	6,37	3	21,23	11,15
2	30,00	6,98	2	23,25	12,24
3	60,00	19,35	4	32,25	38,75
4	30,00	6,71	2	22,35	12,25
5	40,00	9,74	2	24,35	21,25
6	37,50	8,71	3	23,22	18,25
7	30,00	6,38	2	21,25	11,75
8	40,00	10,10	2,5	25,25	21,35
9	40,00	10,10	3	25,25	22,15
10	30,00	6,08	2	20,25	11,15
11	40,00	10,50	3	26,25	21,15
12	37,50	7,97	2,5	21,25	18,75
13	37,50	8,34	2,5	22,25	19,25
14	40,00	10,10	3	25,25	21,25
15	37,50	7,59	2,5	20,25	18,75
16	40,00	9,70	3	24,25	21,15
17	45,00	12,71	2	28,25	27,75
18	40,00	10,50	3	26,25	21,32
19	45,00	12,70	2	28,22	28,12
20	60,00	19,42	3	32,36	38,75
21	45,00	12,94	2,5	28,75	27,75
22	60,00	20,61	3	34,35	38,25
23	100,00	40,45	2,5	40,45	48,75
24	100,00	41,75	3	41,75	47,85
25	40,00	10,30	2,5	25,75	21,25
26	40,00	10,30	3	25,75	22,35
27	40,00	11,30	3	28,25	21,75
28	40,00	11,29	3	28,22	21,15
29	60,00	20,62	3	34,37	38,12
30	100,00	40,45	2	40,45	48,15
31	100,00	41,75	3	41,75	48,55
32	37,50	8,53	2	22,75	18,75
33	37,50	8,49	3	22,65	18,25
34	37,50	8,68	3,5	23,15	19,15
35	37,50	8,91	3,5	23,75	17,85
36	37,50	8,53	2	22,75	19,15
37	100,00	36,75	3,5	36,75	47,85
38	100,00	38,75	3,5	38,75	48,85
39	100,00	40,25	2	40,25	47,15
40	60,00	20,85	4,5	34,75	38,05
41	45,00	12,94	2,5	28,75	28,15

No	Omzet (Rp Juta)	laba (Juta Rp)	Investasi Awal (Juta Rp)	ROS (%)	ROI (%)
42	52,50	18,24	2,5	34,75	31,75
43	52,50	17,19	2,5	32,75	32,25
44	52,50	16,46	3,5	31,35	33,05
45	52,50	16,98	2,5	32,35	31,25
46	45,00	12,71	2,5	28,25	28,75
47	60,00	20,85	4,5	34,75	38,5
48	60,00	20,55	4,5	34,25	38,15
49	60,00	20,25	4,5	33,75	37,85
50	60,00	20,85	4,5	34,75	38,15
51	52,50	18,14	4,5	34,55	31,55
52	52,50	17,98	4,5	34,25	32,35
53	52,50	17,72	4,5	33,75	33,15
54	52,50	17,19	4,5	32,75	34,05
55	52,50	17,46	4,5	33,25	33,15
56	37,50	7,41	4,5	19,75	18,5
57	60,00	20,79	4,5	34,65	38,15
58	60,00	20,85	3,5	34,75	37,85
59	60,00	21,09	3,5	35,15	38,05
60	37,50	8,72	3,5	23,25	17,75
61	37,50	8,38	4,5	22,35	18,15
62	37,50	8,53	4,5	22,75	17,05
63	37,50	8,68	4	23,15	18,15
64	37,50	8,81	2,5	23,5	15,55
65	45,00	12,94	2,5	28,75	28,15
66	40,00	9,82	4	24,55	20,25
67	40,00	10,22	4	25,55	21,25
68	45,00	12,94	4	28,75	28,75
69	45,00	12,49	4	27,75	29,05
70	45,00	12,71	4	28,25	28,75
71	45,00	12,49	4	27,75	27,85
72	45,00	12,71	4	28,25	28,15
73	45,00	12,76	4	28,35	27,95
74	45,00	12,49	4	27,75	28,05
75	45,00	12,71	4	28,25	29,05
76	45,00	12,49	4	27,75	27,85
77	100,00	38,25	2	38,25	48,55
78	100,00	40,25	2	40,25	47,75
79	100,00	41,75	3,5	41,75	48,5
80	100,00	40,25	2	40,25	47,5
81	100,00	39,75	3,5	39,75	49,05
82	100,00	41,25	3,5	41,25	45,75

No	Omzet (Rp Juta)	laba (Juta Rp)	Investasi Awal (Juta Rp)	ROS (%)	ROI (%)
83	100,00	41,75	4	41,75	46,15
84	100,00	40,75	4	40,75	47,15
85	100,00	39,75	4	39,75	45,55
86	60,00	20,25	4	33,75	37,75
87	60,00	20,55	4	34,25	35,65
88	60,00	21,09	3,5	35,15	38,15
89	60,00	19,40	3,5	32,34	38,25
90	60,00	20,61	3,5	34,35	39,05
91	52,50	16,14	4,5	30,75	31,15
92	52,50	16,35	4,5	31,15	32,05
93	52,50	15,88	4,5	30,25	31,05
94	52,50	16,67	4,5	31,75	33,05
95	52,50	16,93	4,5	32,25	31,75
96	52,50	16,14	4,5	30,75	31,25
97	52,50	16,67	4,5	31,75	30,95
98	52,50	17,40	4,5	33,15	32,75
99	45,00	12,67	4	28,15	27,85
100	45,00	13,12	4	29,15	27,15
101	45,00	12,94	4,5	28,75	25,85
102	45,00	12,71	4	28,25	28,75
103	45,00	12,49	4	27,75	28,15
104	45,00	12,22	4	27,15	26,75
105	67,50	24,81	4	36,75	40,15
106	67,50	24,81	3,5	36,75	42,75
107	67,50	25,75	3,5	38,15	43,75
108	67,50	25,75	4	38,15	44,25
109	67,50	25,14	4	37,25	45,15
110	100,00	37,15	4	37,15	47,15
111	100,00	37,25	3,5	37,25	45,05
112	100,00	38,95	3,5	38,95	48,15
113	100,00	37,95	4	37,95	49,05
114	100,00	40,45	3,5	40,45	45,05
115	100,00	41,25	3,5	41,25	48,25
116	100,00	42,25	3,5	42,25	47,15
117	100,00	41,75	4	41,75	48,85
118	100,00	38,75	4	38,75	45,65
119	100,00	39,25	3,5	39,25	46,65
120	100,00	37,25	3,5	37,25	48,15
121	100,00	40,25	4	40,25	48,05
122	100,00	41,25	4	41,25	46,75
123	100,00	40,75	4	40,75	47,55

No	Omzet (Rp Juta)	laba (Juta Rp)	Investasi Awal (Juta Rp)	ROS (%)	ROI (%)
124	100,00	39,75	4	39,75	45,65
125	37,50	8,53	4	22,75	18,25
126	37,50	7,97	3,5	21,25	17,65
127	37,50	8,53	4	22,75	16,85
128	37,50	7,97	3,5	21,25	17,95
129	37,50	8,08	4	21,55	18,65
130	37,50	8,42	4	22,45	18,15
131	37,50	7,71	4	20,55	17,25
132	37,50	7,78	4	20,75	17,75
133	37,50	8,53	3,5	22,75	19,25
134	37,50	7,97	3,5	21,25	16,65
135	37,50	8,68	3,5	23,15	18,25
136	37,50	8,31	3,5	22,15	19,15
137	45,00	12,71	4	28,25	28,35
138	45,00	12,49	4	27,75	27,65
139	45,00	12,04	4	26,75	29,05
140	45,00	12,67	4,5	28,15	26,95
141	52,50	16,41	4,5	31,25	31,85
142	52,50	16,67	4,5	31,75	31,25
143	52,50	16,14	4,5	30,75	33,55
144	45,00	12,94	4,5	28,75	28,65
145	60,00	21,30	3,5	35,5	38,15
146	52,50	16,14	3,5	30,75	31,25
147	45,00	12,94	3,5	28,75	27,25
148	45,00	12,22	3,5	27,15	28,15
149	45,00	12,67	3,5	28,15	27,65
150	45,00	12,89	3,5	28,65	28,55

No	Investasi (juta)			Jmlh Tenaga Kerja (orang)			Omzet Penjualan (juta)		
	Sebelum	Sesudah	Growth	Sebelum	Sesudah	Growth	Sebelum	Sesudah	Growth
1	3,0	15	80,00	3	6	50,00	15,00	30,00	50,00
2	2,0	15	86,67	2	6	66,67	9,00	30,00	70,00
3	4,0	40	90,00	4	8	50,00	24,00	60,00	60,00
4	2,0	15	86,67	2	6	66,67	9,00	30,00	70,00
5	2,0	20	90,00	2	6	66,67	9,00	40,00	77,50
6	3,0	25	88,00	3	7	57,14	15,00	37,50	60,00
7	2,0	15	86,67	2	6	66,67	9,00	30,00	70,00
8	2,5	20	87,50	2	6	66,67	15,00	40,00	62,50
9	3,0	20	85,00	3	6	50,00	15,00	40,00	62,50
10	2,0	15	86,67	2	6	66,67	9,00	30,00	70,00
11	3,0	20	85,00	3	6	50,00	15,00	40,00	62,50
12	2,5	25	90,00	2	7	71,43	15,00	37,50	60,00
13	2,5	25	90,00	2	7	71,43	15,00	37,50	60,00
14	3,0	20	85,00	3	6	50,00	15,00	40,00	62,50
15	2,5	25	90,00	2	7	71,43	15,00	37,50	60,00
16	3,0	20	85,00	3	6	50,00	15,00	40,00	62,50
17	2,0	30	93,33	2	7	71,43	9,00	45,00	80,00
18	3,0	20	85,00	3	6	50,00	15,00	40,00	62,50
19	2,0	30	93,33	2	7	71,43	9,00	45,00	80,00
20	3,0	40	92,50	3	8	62,50	15,00	60,00	75,00
21	2,5	30	91,67	2	7	71,43	15,00	45,00	66,67
22	3,0	40	92,50	3	8	62,50	15,00	60,00	75,00
23	2,5	50	95,00	2	9	77,78	15,00	100,00	85,00
24	3,0	50	94,00	3	9	66,67	15,00	100,00	85,00
25	2,5	20	87,50	2	6	66,67	15,00	40,00	62,50
26	3,0	20	85,00	3	6	50,00	15,00	40,00	62,50
27	3,0	20	85,00	3	6	50,00	15,00	40,00	62,50
28	3,0	20	85,00	3	6	50,00	15,00	40,00	62,50
29	3,0	40	92,50	3	8	62,50	15,00	60,00	75,00
30	2,0	50	96,00	2	9	77,78	9,00	100,00	91,00
31	3,0	50	94,00	3	9	66,67	15,00	100,00	85,00
32	2,0	25	92,00	2	7	71,43	9,00	37,50	76,00
33	3,0	25	88,00	3	7	57,14	15,00	37,50	60,00
34	3,5	25	86,00	3	7	57,14	20,30	37,50	45,87
35	3,5	25	86,00	3	7	57,14	20,30	37,50	45,87
36	2,0	25	92,00	2	7	71,43	9,00	37,50	76,00
37	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
38	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
39	2,0	50	96,00	2	9	77,78	9,00	100,00	91,00
40	4,5	40	88,75	4	8	50,00	19,62	60,00	67,30
41	2,5	30	91,67	2	7	71,43	15,00	45,00	66,67
42	2,5	35	92,86	2	8	75,00	15,00	52,50	71,43
43	2,5	35	92,86	2	8	75,00	15,00	52,50	71,43
44	3,5	35	90,00	3	8	62,50	20,30	52,50	61,33
45	2,5	35	92,86	2	8	75,00	15,00	52,50	71,43
46	2,5	30	91,67	2	7	71,43	15,00	45,00	66,67
47	4,5	40	88,75	4	8	50,00	19,62	60,00	67,30
48	4,5	40	88,75	4	8	50,00	19,62	60,00	67,30
49	4,5	40	88,75	4	8	50,00	19,62	60,00	67,30
50	4,5	40	88,75	4	8	50,00	19,62	60,00	67,30
51	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63

No	Investasi (juta)			Jmlh Tenaga Kerja (orang)			Omzet Penjualan (juta)		
	Sebelum	Sesudah	Growth	Sebelum	Sesudah	Growth	Sebelum	Sesudah	Growth
52	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
53	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
54	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
55	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
56	4,5	25	82,00	4	7	42,86	19,62	37,50	47,68
57	4,5	40	88,75	4	8	50,00	19,62	60,00	67,30
58	3,5	40	91,25	3	8	62,50	20,30	60,00	66,17
59	3,5	40	91,25	3	8	62,50	20,30	60,00	66,17
60	3,5	25	86,00	3	7	57,14	20,30	37,50	45,87
61	4,5	25	82,00	4	7	42,86	19,62	37,50	47,68
62	4,5	25	82,00	4	7	42,86	19,62	37,50	47,68
63	4,0	25	84,00	4	7	42,86	24,00	37,50	36,00
64	2,5	25	90,00	2	7	71,43	15,00	37,50	60,00
65	2,5	30	91,67	2	7	71,43	15,00	45,00	66,67
66	4,0	20	80,00	4	6	33,33	24,00	40,00	40,00
67	4,0	20	80,00	4	6	33,33	24,00	40,00	40,00
68	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
69	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
70	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
71	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
72	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
73	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
74	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
75	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
76	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
77	2,0	50	96,00	2	9	77,78	9,00	100,00	91,00
78	2,0	50	96,00	2	9	77,78	9,00	100,00	91,00
79	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
80	2,0	50	96,00	2	9	77,78	9,00	100,00	91,00
81	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
82	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
83	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
84	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
85	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
86	4,0	40	90,00	4	8	50,00	24,00	60,00	60,00
87	4,0	40	90,00	4	8	50,00	24,00	60,00	60,00
88	3,5	40	91,25	3	8	62,50	20,30	60,00	66,17
89	3,5	40	91,25	3	8	62,50	20,30	60,00	66,17
90	3,5	40	91,25	3	8	62,50	20,30	60,00	66,17
91	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
92	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
93	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
94	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
95	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
96	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
97	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
98	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
99	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
100	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
101	4,5	30	85,00	4	7	42,86	19,62	45,00	56,40
102	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67

No	Investasi (juta)			Jmlh Tenaga Kerja (orang)			Omzet Penjualan (juta)		
	Sebelum	Sesudah	Growth	Sebelum	Sesudah	Growth	Sebelum	Sesudah	Growth
103	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
104	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
105	4,0	45	91,11	4	9	55,56	24,00	67,50	64,44
106	3,5	45	92,22	3	9	66,67	20,30	67,50	69,93
107	3,5	45	92,22	3	9	66,67	20,30	67,50	69,93
108	4,0	45	91,11	4	9	55,56	24,00	67,50	64,44
109	4,0	45	91,11	4	9	55,56	24,00	67,50	64,44
110	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
111	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
112	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
113	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
114	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
115	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
116	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
117	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
118	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
119	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
120	3,5	50	93,00	3	9	66,67	20,30	100,00	79,70
121	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
122	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
123	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
124	4,0	50	92,00	4	9	55,56	24,00	100,00	76,00
125	4,0	25	84,00	4	7	42,86	24,00	37,50	36,00
126	3,5	25	86,00	3	7	57,14	20,30	37,50	45,87
127	4,0	25	84,00	4	7	42,86	24,00	37,50	36,00
128	3,5	25	86,00	3	7	57,14	20,30	37,50	45,87
129	4,0	25	84,00	4	7	42,86	24,00	37,50	36,00
130	4,0	25	84,00	4	7	42,86	24,00	37,50	36,00
131	4,0	25	84,00	4	7	42,86	24,00	37,50	36,00
132	4,0	25	84,00	4	7	42,86	24,00	37,50	36,00
133	3,5	25	86,00	3	7	57,14	20,30	37,50	45,87
134	3,5	25	86,00	3	7	57,14	20,30	37,50	45,87
135	3,5	25	86,00	3	7	57,14	20,30	37,50	45,87
136	3,5	25	86,00	3	7	57,14	20,30	37,50	45,87
137	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
138	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
139	4,0	30	86,67	4	7	42,86	24,00	45,00	46,67
140	4,5	30	85,00	4	7	42,86	19,62	45,00	56,40
141	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
142	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
143	4,5	35	87,14	4	8	50,00	19,62	52,50	62,63
144	4,5	30	85,00	4	7	42,86	19,62	45,00	56,40
145	3,5	40	91,25	3	8	62,50	20,30	60,00	66,17
146	3,5	35	90,00	3	8	62,50	20,30	52,50	61,33
147	3,5	30	88,33	3	7	57,14	20,30	45,00	54,89
148	3,5	30	88,33	3	7	57,14	20,30	45,00	54,89
149	3,5	30	88,33	3	7	57,14	20,30	45,00	54,89
150	3,5	30	88,33	3	7	57,14	20,30	45,00	54,89

LAMPIRAN 4

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Uji Validitas dan Reliabilitas Pelatihan (X1)

Correlations

		Tot_X1
Pearson Correlation	X1.1	,8433**
	X1.2	,8289**
	X1.3	,8287**
	X1.4	,7975**
	X1.5	,7350**
	Tot_X1	1
Sig. (2-tailed)	X1.1	4,920E-009
	X1.2	1,532E-008
	X1.3	1,554E-008
	X1.4	1,322E-007
	X1.5	3,732E-006
	Tot_X1	
N	X1.1	30
	X1.2	30
	X1.3	30
	X1.4	30
	X1.5	30
	Tot_X1	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,866	5

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People		36,140	29	1,246		
Within People	Between Items	1,373	4	,343	2,050	,092
	Residual ^a	19,427	116	,167		
	Total	20,800	120	,173		
Total		56,940	149	,382		

Grand Mean = 4,0200

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

Uji Validitas dan Reliabilitas Peraturan Pemerintah (X2)

Correlations

		Tot_X2
Pearson Correlation	X2.1	,6538**
	X2.2	,4945**
	X2.3	,7022**
	X2.4	,8443**
	X2.5	,8494**
	Tot_X2	1
Sig. (2-tailed)	X2.1	8,935E-005
	X2.2	,0055
	X2.3	1,525E-005
	X2.4	4,530E-009
	X2.5	2,941E-009
N	X2.1	30
	X2.2	30
	X2.3	30
	X2.4	30
	X2.5	30
	Tot_X2	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,7578	5

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		27,733	29	,956		
Within People	Between Items	,733	4	,183	,792	,533
	Residual ^a	26,867	116	,232		
	Total	27,600	120	,230		
Total		55,333	149	,371		

Grand Mean = 3,7333

^a . Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

Uji Validitas dan Reliabilitas Permodalan (X3)

Correlations

		Tot_X3
Pearson Correlation	X3.1	,8963**
	X3.2	,9647**
	X3.3	,9664**
	X3.4	,9664**
	X3.5	,8001**
	Tot_X3	1
Sig. (2-tailed)	X3.1	2,143E-011
	X3.2	9,383E-018
	X3.3	4,610E-018
	X3.4	4,610E-018
	X3.5	1,116E-007
N	X3.1	30
	X3.2	30
	X3.3	30
	X3.4	30
	X3.5	30
	Tot_X3	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,9528	5

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		51,793	29	1,786		
Within People	Between Items	,227	4	,057	,673	,612
	Residual ^a	9,773	116	,084		
	Total	10,000	120	,083		
Total		61,793	149	,415		

Grand Mean = 3,6067

^a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

Uji Validitas dan Reliabilitas Pemasaran (X4)

Correlations

		Tot_X4
Pearson Correlation	X4.1	,8793**
	X4.2	,9333**
	X4.3	,9068**
	X4.4	,9157**
	X4.5	,9333**
	Tot_X4	1
Sig. (2-tailed)	X4.1	1,615E-010
	X4.2	5,619E-014
	X4.3	5,163E-012
	X4.4	1,327E-012
	X4.5	5,619E-014
N	X4.1	30
	X4.2	30
	X4.3	30
	X4.4	30
	X4.5	30
	Tot_X4	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,9494	5

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		52,860	29	1,823		
Within People	Between Items	,093	4	,023	,253	,907
	Residual ^a	10,707	116	,092		
	Total	10,800	120	,090		
Total		63,660	149	,427		

Grand Mean = 3,6600

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penyuluh Industri Perdagangan (X5)

Correlations

		Tot_X5
Pearson Correlation	X5.1	,7944**
	X5.2	,9226**
	X5.3	,9393**
	X5.4	,9392**
	X5.5	,8872**
	Tot_X5	1
Sig. (2-tailed)	X5.1	1,597E-007
	X5.2	4,186E-013
	X5.3	1,564E-014
	X5.4	1,588E-014
	X5.5	6,570E-011
N	X5.1	30
	X5.2	30
	X5.3	30
	X5.4	30
	X5.5	30
	Tot_X5	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,9379	5

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		50,060	29	1,726	1,772	,139
Within People	Between Items	,760	4	,190		
	Residual ^a	12,440	116	,107		
	Total	13,200	120	,110		
Total		63,260	149	,425		

Grand Mean = 3,4600

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

LAMPIRAN 5

UJI ASUMSI PERSAMAAN MODEL STRUKTURAL : NORMALITAS, OUTLIER DAN MULTIKOLINIERITAS

Uji Normalitas dan Multikolinier

19 Oktober 2005 21:53:02

Amos

by James L. Arbuckle

Version 4.01

Copyright 1994-1999 SmallWaters Corporation

1507 E. 53rd Street - #452

Chicago, IL 60615 USA

773-667-8635

Fax: 773-955-6252

<http://www.smallwaters.com>

Number of variables in your model: 69

Number of observed variables: 30

Number of unobserved variables: 39

Number of exogenous variables: 37

Number of endogenous variables: 32

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	39	0	0	0	0	39
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	34	10	37	0	0	81
Total:	73	10	37	0	0	120

NOTE:

The model is recursive.

Assessment of normality

	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
Y1.2	11,150	49,050	0,133	0,667	-1,133	-2,831
Y1.1	19,750	42,250	0,141	0,704	-1,128	-2,819
Y2.3	36,000	91,000	-0,087	-0,437	-0,661	-1,651
Y2.2	33,300	77,800	0,212	1,060	-0,928	-2,321
Y2.1	80,000	96,000	-0,067	-0,336	-0,563	-1,408
X5.5	2,000	5,000	0,514	2,572	-0,659	-1,647
X5.4	2,000	5,000	0,504	2,521	-0,709	-1,772
X5.3	2,000	5,000	0,261	1,306	-0,666	-1,666
X5.2	2,000	5,000	0,276	1,379	-0,623	-1,557
X5.1	2,000	5,000	0,371	1,855	-0,714	-1,786
X4.5	2,000	5,000	0,373	1,866	-0,747	-1,868
X4.4	3,000	5,000	0,459	2,295	-0,715	-1,787
X4.3	3,000	5,000	0,137	0,683	-0,510	-1,275

X4.2	2,000	5,000	0,052	0,262	-0,401	-1,002
X4.1	2,000	5,000	-0,071	-0,355	-0,155	-0,387
X3.5	2,000	5,000	0,025	0,125	-0,431	-1,078
X3.4	2,000	5,000	0,018	0,092	-0,279	-0,698
X3.3	2,000	5,000	0,019	0,094	-0,341	-0,851
X3.2	2,000	5,000	0,046	0,229	-0,360	-0,900
X3.1	2,000	5,000	0,164	0,819	-0,504	-1,260
X2.5	3,000	5,000	0,074	0,369	-0,388	-0,970
X2.4	3,000	5,000	0,229	1,144	-0,650	-1,626
X2.3	3,000	5,000	0,142	0,712	-0,502	-1,255
X2.2	2,000	5,000	-0,147	-0,733	0,059	0,147
X2.1	2,000	5,000	-0,011	-0,057	-0,248	-0,619
X1.5	3,000	5,000	0,125	0,626	-0,476	-1,191
X1.4	3,000	5,000	0,220	1,102	-0,662	-1,655
X1.3	3,000	5,000	0,067	0,335	-0,341	-0,853
X1.2	3,000	5,000	0,176	0,882	-0,550	-1,374
X1.1	2,000	5,000	0,095	0,474	-0,453	-1,133
Multivariate					178,387	24,930

Sample size: 150

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments:	465
Number of distinct parameters to be estimated:	81

Degrees of freedom:	384

Condition number of Sample Correlations = 8,245545e+002

Determinant of sample covariance matrix = 21635590000

UJI NORMALITAS UNIVARIATE DAN MULTIVARIATE

Indikator	skew	c.r.	kurtosis	c.r.	Keterangan
X1.1	0,0948	0,4741	-0,4533	-1,1333	Normal
X1.2	0,1764	0,8820	-0,5496	-1,3740	Normal
X1.3	0,0670	0,3349	-0,3411	-0,8528	Normal
X1.4	0,2203	1,1016	-0,6619	-1,6548	Normal
X1.5	0,1251	0,6256	-0,4763	-1,1908	Normal
X2.1	-0,0115	-0,0573	-0,2476	-0,6190	Normal
X2.2	-0,1466	-0,7331	0,0589	0,1474	Normal
X2.3	0,1425	0,7123	-0,5021	-1,2554	Normal
X2.4	0,2288	1,1440	-0,6502	-1,6255	Normal
X2.5	0,0738	0,3692	-0,3881	-0,9702	Normal
X3.1	0,1638	0,8192	-0,5039	-1,2599	Normal
X3.2	0,0458	0,2288	-0,3601	-0,9004	Normal
X3.3	0,0187	0,0937	-0,3406	-0,8515	Normal
X3.4	0,0185	0,0925	-0,2790	-0,6976	Normal
X3.5	0,0251	0,1255	-0,4310	-1,0776	Normal
X4.1	-0,0709	-0,3547	-0,1548	-0,3870	Normal
X4.2	0,0524	0,2621	-0,4007	-1,0017	Normal
X4.3	0,1365	0,6827	-0,5098	-1,2746	Normal
X4.4	0,4590	2,2950	-0,7147	-1,7867	Normal
X4.5	0,3732	1,8659	-0,7472	-1,8680	Normal
X5.1	0,3710	1,8552	-0,7143	-1,7857	Normal
X5.2	0,2759	1,3794	-0,6229	-1,5573	Normal
X5.3	0,2612	1,3059	-0,6662	-1,6656	Normal
X5.4	0,5041	2,5205	-0,7088	-1,7720	Normal
X5.5	0,5143	2,5717	-0,6590	-1,6474	Normal
Y1.1	0,1409	0,7043	-1,1278	-2,8194	Tidak Normal
Y1.2	0,1334	0,6670	-1,1325	-2,8313	Tidak Normal
Y2.1	-0,0672	-0,3362	-0,5631	-1,4079	Normal
Y2.2	0,2120	1,0598	-0,9283	-2,3208	Normal
Y2.3	-0,0874	-0,4370	-0,6605	-1,6513	Normal
Multivariate			178,387	24,930	Tidak Normal

Uji Multivariate Outlier Jarak Mahalanonbis

Resp	Mahalanobis	Keterangan	Resp	Mahalanobis	Keterangan	Resp	Mahalanobis	Keterangan
1	41,424	normal	51	58,309	outlier	101	14,255	normal
2	57,018	outlier	52	51,396	outlier	102	32,389	normal
3	53,700	outlier	53	26,309	normal	103	37,947	normal
4	50,786	outlier	54	27,324	normal	104	23,128	normal
5	43,767	normal	55	31,954	normal	105	19,674	normal
6	49,742	outlier	56	40,052	normal	106	13,536	normal
7	37,557	normal	57	21,169	normal	107	13,152	normal
8	34,791	normal	58	25,258	normal	108	16,949	normal
9	36,914	normal	59	32,338	normal	109	20,138	normal
10	13,527	normal	60	22,945	normal	110	22,748	normal
11	17,008	normal	61	32,282	normal	111	13,435	normal
12	15,524	normal	62	24,586	normal	112	17,809	normal
13	18,114	normal	63	46,180	outlier	113	24,805	normal
14	40,384	normal	64	39,129	normal	114	29,114	normal
15	35,802	normal	65	67,861	outlier	115	20,143	normal
16	38,799	normal	66	38,694	normal	116	34,284	normal
17	56,961	outlier	67	62,404	outlier	117	24,881	normal
18	10,473	normal	68	40,458	normal	118	15,606	normal
19	50,038	outlier	69	17,188	normal	119	14,279	normal
20	45,461	outlier	70	51,666	outlier	120	19,317	normal
21	26,706	normal	71	29,309	normal	121	4,799	normal
22	30,728	normal	72	62,809	outlier	122	50,288	outlier
23	26,036	normal	73	18,862	normal	123	11,370	normal
24	29,968	normal	74	37,182	normal	124	5,388	normal
25	38,350	normal	75	17,376	normal	125	23,737	normal
26	43,791	outlier	76	25,182	normal	126	26,122	normal
27	38,184	normal	77	27,490	normal	127	20,783	normal
28	31,752	normal	78	18,645	normal	128	25,455	normal
29	38,531	normal	79	37,556	normal	129	51,882	outlier
30	41,242	normal	80	31,200	normal	130	15,818	normal
31	23,486	normal	81	26,035	normal	131	25,417	normal
32	41,558	normal	82	25,306	normal	132	17,195	normal
33	32,747	normal	83	20,159	normal	133	12,718	normal
34	28,997	normal	84	20,862	normal	134	23,257	normal
35	19,301	normal	85	20,169	normal	135	23,646	normal

36	32,368	normal	86	13,620	normal	136	45,321	outlier
37	23,116	normal	87	44,769	outlier	137	42,793	normal
38	28,893	normal	88	14,056	normal	138	43,458	normal
39	15,573	normal	89	8,851	normal	139	29,659	normal
40	25,960	normal	90	13,503	normal	140	43,980	outlier
41	44,970	outlier	91	22,867	normal	141	70,454	outlier
42	26,956	normal	92	10,043	normal	142	45,588	outlier
43	29,355	normal	93	25,222	normal	143	50,543	outlier
44	23,680	normal	94	39,588	normal	144	13,977	normal
45	18,937	normal	95	10,284	normal	145	39,555	normal
46	17,234	normal	96	11,406	normal	146	2,363	normal
47	27,222	normal	97	9,884	normal	147	2,385	normal
48	13,361	normal	98	19,362	normal	148	77,728	outlier
49	24,803	normal	99	19,846	normal	149	75,081	outlier
50	31,391	normal	100	16,475	normal	150	43,247	normal

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-4,9907	151,6654	75,5000	35,13131	150
Std. Predicted Value	-2,291	2,168	,000	1,000	150
Standard Error of Predicted Value	4,293	20,789	12,611	3,176	150
Adjusted Predicted Value	-19,7773	156,9718	76,0495	35,77130	150
Residual	-75,25404	59,31921	,00000	25,55956	150
Std. Residual	-2,631	2,074	,000	,894	150
Stud. Residual	-3,307	2,482	-,009	1,011	150
Deleted Residual	-118,897	84,96475	-,54949	33,04189	150
Stud. Deleted Residual	-3,456	2,538	-,011	1,022	150
Mahal. Distance	2,363	77,728	29,800	14,972	150
Cook's Distance	,000	,205	,010	,023	150
Centered Leverage Value	,016	,522	,200	,100	150

a. Dependent Variable: No

Nilai Z Score Per Indikator

No	ZX1.1	ZX1.2	ZX1.3	ZX1.4	ZX1.5	ZX2.1	ZX2.2	ZX2.3	ZX2.4	ZX2.5
1	0,328	0,394	0,256	1,894	0,317	0,492	0,355	1,994	0,356	0,364
2	1,863	2,034	0,256	0,333	0,317	2,096	0,355	0,351	1,928	2,070
3	0,328	0,394	0,256	1,894	1,957	0,492	0,355	1,994	0,356	0,364
4	0,328	0,394	0,256	1,894	1,957	0,492	0,355	1,994	1,928	0,364
5	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	2,096	0,355	0,351	1,928	2,070
6	1,863	0,394	1,925	0,333	1,957	-1,112	2,071	0,351	1,928	0,364
7	0,328	0,394	1,925	1,894	0,317	-1,112	-1,361	0,351	0,356	0,364
8	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	0,492	0,355	-1,293	0,356	-1,342
9	0,328	2,034	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	0,356	0,364
10	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
11	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
12	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
13	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
14	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	-1,112	-1,361	0,351	0,356	0,364
15	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-2,717	-1,361	0,351	0,356	-1,342
16	1,863	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
17	1,863	2,034	1,925	0,333	-1,323	-1,112	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
18	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
19	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	0,492	-1,361	0,351	-1,216	-1,342
20	1,863	2,034	0,256	0,333	0,317	-1,112	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
21	0,328	0,394	1,925	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	0,356	-1,342
22	1,863	2,034	1,925	0,333	0,317	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
23	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	0,492	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
24	1,863	2,034	0,256	0,333	0,317	0,492	-1,361	-1,293	0,356	0,364
25	1,863	0,394	1,925	0,333	0,317	-1,112	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
26	0,328	0,394	1,925	0,333	0,317	-1,112	-1,361	-1,293	0,356	0,364
27	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
28	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	0,355	0,351	0,356	-1,342
29	0,328	0,394	1,925	0,333	0,317	0,492	-1,361	0,351	0,356	0,364
30	1,863	0,394	0,256	0,333	-1,323	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
31	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	0,351	0,356	0,364
32	-1,208	0,394	0,256	0,333	-1,323	0,492	-1,361	0,351	0,356	0,364
33	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	0,355	0,351	-1,216	0,364
34	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
35	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342

No	ZX1.1	ZX1.2	ZX1.3	ZX1.4	ZX1.5	ZX2.1	ZX2.2	ZX2.3	ZX2.4	ZX2.5
36	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	0,355	0,351	-1,216	-1,342
37	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
38	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	-1,112	0,355	0,351	-1,216	0,364
39	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
40	0,328	0,394	0,256	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	0,351	0,356	0,364
41	-1,208	-1,247	1,925	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	-1,216	0,364
42	0,328	0,394	0,256	-1,228	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
43	-1,208	-1,247	0,256	-1,228	0,317	0,492	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
44	-1,208	-1,247	0,256	-1,228	0,317	-1,112	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
45	-1,208	-1,247	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
46	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
47	-1,208	-1,247	-1,413	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
48	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
49	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	-1,216	0,364
50	-1,208	-1,247	0,256	-1,228	0,317	0,492	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
51	0,328	-1,247	0,256	-1,228	-1,323	0,492	-1,361	-1,293	0,356	0,364
52	0,328	0,394	0,256	0,333	-1,323	-1,112	0,355	0,351	-1,216	0,364
53	-1,208	0,394	0,256	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
54	0,328	0,394	0,256	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	0,351	-1,216	0,364
55	0,328	0,394	0,256	-1,228	0,317	0,492	0,355	0,351	-1,216	0,364
56	-1,208	-1,247	0,256	0,333	0,317	-1,112	0,355	0,351	-1,216	-1,342
57	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	0,356	0,364
58	1,863	0,394	0,256	0,333	0,317	-1,112	0,355	-1,293	0,356	0,364
59	1,863	0,394	0,256	0,333	0,317	-1,112	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
60	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	-1,112	0,355	0,351	0,356	0,364
61	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
62	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
63	1,863	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	0,351	0,356	0,364
64	0,328	0,394	0,256	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	0,351	-1,216	0,364
65	-2,244	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-2,078	-1,293	-1,216	0,364
66	0,328	0,394	-1,413	-1,228	0,317	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	0,364
67	0,328	0,394	-1,413	-1,228	0,317	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	0,364
68	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	0,355	0,351	0,356	-1,342
69	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	-1,216	0,364
70	0,328	2,034	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	-1,342

No	ZX1.1	ZX1.2	ZX1.3	ZX1.4	ZX1.5	ZX2.1	ZX2.2	ZX2.3	ZX2.4	ZX2.5
71	0,328	2,034	0,256	0,333	0,317	0,492	-1,361	0,351	0,356	0,364
72	0,328	2,034	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	0,356	0,364
73	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
74	0,328	2,034	0,256	-1,228	0,317	-1,112	0,355	0,351	0,356	0,364
75	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
76	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
77	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	0,351	0,356	0,364
78	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
79	0,328	0,394	0,256	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	0,351	0,356	0,364
80	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	0,355	-1,293	0,356	-1,342
81	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	0,492	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
82	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
83	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
84	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
85	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
86	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
87	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	0,355	0,351	-1,216	-1,342
88	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
89	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
90	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
91	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
92	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
93	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
94	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	0,317	-1,112	0,355	-1,293	0,356	-1,342
95	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
96	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
97	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
98	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	-1,216	0,364
99	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
100	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
101	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
102	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
103	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	0,492	-1,361	0,351	-1,216	0,364
104	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
105	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364

No	ZX1.1	ZX1.2	ZX1.3	ZX1.4	ZX1.5	ZX2.1	ZX2.2	ZX2.3	ZX2.4	ZX2.5
106	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
107	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
108	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
109	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
110	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
111	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-1,112	-1,361	-1,293	-1,216	-1,342
112	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	-1,216	0,364
113	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
114	-1,208	-1,247	1,925	0,333	0,317	0,492	0,355	-1,293	-1,216	-1,342
115	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	-1,112	-1,361	0,351	0,356	0,364
116	-1,208	-1,247	1,925	1,894	1,957	2,096	2,071	1,994	1,928	2,070
117	0,328	0,394	0,256	1,894	1,957	2,096	2,071	1,994	1,928	2,070
118	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
119	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
120	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
121	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
122	-1,208	-1,247	1,925	1,894	1,957	2,096	2,071	0,351	1,928	2,070
123	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
124	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
125	-1,208	-1,247	1,925	1,894	1,957	2,096	2,071	1,994	1,928	2,070
126	0,328	-1,247	0,256	1,894	1,957	2,096	2,071	1,994	1,928	2,070
127	0,328	0,394	1,925	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
128	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
129	-1,208	0,394	1,925	0,333	1,957	0,492	2,071	0,351	1,928	0,364
130	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
131	0,328	-1,247	0,256	1,894	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
132	1,863	2,034	1,925	1,894	1,957	2,096	2,071	1,994	1,928	2,070
133	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
134	1,863	2,034	0,256	1,894	1,957	2,096	2,071	1,994	1,928	2,070
135	0,328	0,394	0,256	1,894	0,317	0,492	0,355	1,994	0,356	0,364
136	1,863	2,034	0,256	0,333	0,317	2,096	0,355	0,351	1,928	2,070
137	0,328	0,394	0,256	1,894	1,957	0,492	0,355	1,994	0,356	0,364
138	0,328	0,394	0,256	1,894	1,957	0,492	0,355	1,994	1,928	0,364
139	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	2,096	0,355	0,351	1,928	2,070
140	1,863	0,394	1,925	0,333	1,957	-1,112	2,071	0,351	1,928	0,364

No	ZX1.1	ZX1.2	ZX1.3	ZX1.4	ZX1.5	ZX2.1	ZX2.2	ZX2.3	ZX2.4	ZX2.5
141	0,328	0,394	-1,413	1,894	0,317	-1,112	2,071	0,351	0,356	0,364
142	0,328	0,394	0,256	1,894	1,957	0,492	0,355	1,994	0,356	2,070
143	0,328	2,034	0,256	1,894	1,957	0,492	0,355	1,994	0,356	0,364
144	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
145	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
146	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
147	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	0,351	0,356	0,364
148	0,328	0,394	0,256	0,333	0,317	-1,112	-1,361	0,351	0,356	0,364
149	-1,208	-1,247	-1,413	-1,228	-1,323	-2,117	2,071	0,351	0,356	-1,342
150	1,863	0,394	0,256	0,333	0,317	0,492	0,355	1,994	1,928	2,070

No	ZX3.1	ZX3.2	ZX3.3	ZX3.4	ZX3.5	ZX4.1	ZX4.2	ZX4.3	ZX4.4	ZX4.5
1	0,400	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	2,045	1,851
2	1,940	1,875	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	1,851
3	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	1,922	0,511	0,427
4	0,400	0,371	0,340	0,424	1,751	1,862	1,828	0,302	0,511	1,851
5	1,940	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	2,045	0,427
6	1,940	0,371	0,340	0,424	1,751	1,862	1,828	1,922	0,511	0,427
7	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
8	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
9	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
10	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
11	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
12	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
13	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
14	-1,139	-2,637	-2,659	-2,681	-1,167	-1,224	-1,253	0,302	0,511	0,427
15	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-2,767	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
16	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
17	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	-1,224	0,288	0,302	0,511	0,427
18	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
19	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	0,319	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
20	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	-1,224	-1,253	0,302	-1,023	-0,997
21	0,400	0,371	0,340	0,424	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
22	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
23	0,400	0,371	0,340	0,424	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
24	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
25	0,400	0,371	0,340	0,424	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
26	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	0,288	-1,318	-1,023	-0,997
27	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
28	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
29	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	0,292	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
30	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
31	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
32	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
33	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
34	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
35	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997

No	ZX3.1	ZX3.2	ZX3.3	ZX3.4	ZX3.5	ZX4.1	ZX4.2	ZX4.3	ZX4.4	ZX4.5
36	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
37	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
38	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
39	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
40	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
41	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	0,319	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
42	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
43	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
44	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
45	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
46	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
47	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	-0,997
48	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
49	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
50	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
51	-1,139	0,371	0,340	-1,128	-1,167	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
52	-1,139	-1,133	0,340	-1,128	-1,167	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
53	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	-0,997
54	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
55	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
56	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-2,420
57	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
58	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
59	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
60	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
61	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
62	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
63	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
64	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
65	-2,279	-1,133	-1,159	0,424	-2,226	0,319	-1,253	0,302	0,511	-0,997
66	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	-0,997
67	-1,139	-1,133	0,340	0,424	-1,167	-1,224	-2,294	-1,318	-1,023	0,427
68	-1,139	0,371	0,340	0,424	-1,167	-1,224	0,288	-1,318	-1,023	-0,997
69	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
70	0,400	-1,133	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997

No	ZX3.1	ZX3.2	ZX3.3	ZX3.4	ZX3.5	ZX4.1	ZX4.2	ZX4.3	ZX4.4	ZX4.5
71	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	0,427
72	-1,139	0,371	0,340	-1,128	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
73	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	0,427
74	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
75	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
76	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	0,427
77	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
78	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
79	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
80	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
81	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	-0,997
82	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	0,427
83	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	-0,997
84	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
85	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
86	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	0,427
87	0,400	0,371	-1,159	-1,128	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
88	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
89	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
90	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	0,427
91	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	0,427
92	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
93	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
94	0,400	-1,133	0,340	-1,128	0,292	-1,224	0,288	-1,318	-1,023	-0,997
95	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
96	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
97	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
98	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	-0,997
99	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	0,511	0,427
100	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
101	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
102	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
103	-1,139	0,371	-1,159	0,424	-1,167	0,319	-1,253	0,302	0,511	0,427
104	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
105	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997

No	ZX3.1	ZX3.2	ZX3.3	ZX3.4	ZX3.5	ZX4.1	ZX4.2	ZX4.3	ZX4.4	ZX4.5
106	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
107	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
108	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	0,427
109	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
110	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
111	-1,139	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
112	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	-1,023	-0,997
113	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	-0,997
114	-1,139	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	0,511	0,427
115	0,400	-1,133	-1,159	-1,128	-1,167	-1,224	-1,253	-1,318	-1,023	-0,997
116	1,940	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	0,511	1,851
117	1,940	1,875	1,839	1,977	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
118	0,400	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	2,045	1,851
119	0,400	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	2,045	1,851
120	0,400	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	0,511	0,427
121	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
122	0,400	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	2,045	0,427
123	0,400	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	0,511	0,427
124	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
125	1,940	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	2,045	1,851
126	1,940	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	0,511	0,427
127	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	2,045	1,851
128	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	1,851
129	1,940	0,371	1,839	0,424	1,751	0,319	1,828	0,302	2,045	0,427
130	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	2,045	0,427
131	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
132	1,940	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	0,511	0,427
133	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	2,045	1,851
134	1,940	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	0,511	1,851
135	0,400	1,875	1,839	1,977	1,751	1,862	1,828	1,922	2,045	1,851
136	1,940	1,875	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	2,045	1,851
137	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	1,922	0,511	1,851
138	0,400	0,371	0,340	0,424	1,751	1,862	1,828	0,302	0,511	1,851
139	1,940	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	1,851
140	1,940	0,371	0,340	0,424	1,751	1,862	1,828	1,922	0,511	0,427

No	ZX3.1	ZX3.2	ZX3.3	ZX3.4	ZX3.5	ZX4.1	ZX4.2	ZX4.3	ZX4.4	ZX4.5
141	1,940	0,371	1,839	0,424	1,751	1,862	0,288	1,922	0,511	1,851
142	1,940	0,371	1,839	0,424	1,751	0,319	0,288	0,302	0,511	1,851
143	1,940	1,875	0,340	0,424	1,751	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
144	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	2,045	1,851
145	-1,139	0,371	1,839	1,977	0,292	0,319	0,288	0,302	2,045	1,851
146	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
147	0,400	0,371	0,340	0,424	0,292	0,319	0,288	0,302	0,511	0,427
148	0,400	-2,237	-2,259	-2,281	1,751	-1,224	1,828	0,302	2,045	0,427
149	0,400	1,875	1,839	0,424	-2,126	-2,167	-1,253	-1,318	0,511	0,427
150	0,400	0,371	0,340	-1,128	0,292	0,319	1,828	0,302	0,511	0,427

No	ZX5.1	ZX5.2	ZX5.3	ZX5.4	ZX5.5	ZY1.1	ZY1.2	ZY2.1	ZY2.2	ZY2.3
1	0,441	1,855	0,391	0,500	0,521	-1,468	-1,846	-2,500	-0,594	-0,943
2	0,441	0,435	1,857	0,500	1,891	-1,155	-1,747	-0,603	0,957	0,529
3	-2,438	0,435	0,391	0,500	0,521	0,241	0,668	0,331	-0,594	-0,207
4	0,441	0,435	0,391	1,917	0,521	-1,295	-1,746	-0,603	0,957	0,529
5	0,441	0,435	0,391	1,917	0,521	-0,984	-0,926	0,331	0,957	1,080
6	0,441	1,855	0,391	1,917	1,891	-1,160	-1,199	-0,235	0,066	-0,207
7	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-1,465	-1,791	-0,603	0,957	0,529
8	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-0,845	-0,917	-0,376	0,957	-0,023
9	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-0,845	-0,844	-1,084	-0,594	-0,023
10	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-1,620	-1,846	-0,603	0,957	0,529
11	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	0,521	-0,690	-0,935	-1,084	-0,594	-0,023
12	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-1,465	-1,154	0,331	1,394	-0,207
13	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	0,521	-1,310	-1,108	0,331	1,394	-0,207
14	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-0,845	-0,926	-1,084	-0,594	-0,023
15	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-1,620	-1,154	0,331	1,394	-0,207
16	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-1,000	-0,935	-1,084	-0,594	-0,023
17	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-0,380	-0,334	1,266	1,394	1,264
18	-0,998	0,435	0,391	0,500	0,521	-0,690	-0,920	-1,084	-0,594	-0,023
19	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-0,384	-0,300	1,266	1,394	1,264
20	-0,998	-0,985	-2,541	-2,332	-2,220	0,258	0,668	1,039	0,567	0,897
21	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-0,302	-0,334	0,813	1,394	0,286
22	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	0,521	0,566	0,622	1,039	0,567	0,897
23	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	1,512	1,579	1,747	1,988	1,632
24	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	1,714	1,497	1,464	0,957	1,632
25	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-2,220	-0,767	-0,926	-0,376	0,957	-0,023
26	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-0,767	-0,826	-1,084	-0,594	-0,023
27	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-0,380	-0,881	-1,084	-0,594	-0,023
28	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-0,384	-0,935	-1,084	-0,594	-0,023
29	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	0,569	0,611	1,039	0,567	0,897
30	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	1,512	1,524	2,030	1,988	2,074
31	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	1,714	1,561	1,464	0,957	1,632
32	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-1,233	-1,154	0,898	1,394	0,970
33	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-1,248	-1,199	-0,235	0,066	-0,207
34	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-1,170	-1,117	-0,801	0,066	-1,244
35	0,441	-0,985	0,391	-0,916	-0,850	-1,077	-1,236	-0,801	0,066	-1,244

No	ZX5.1	ZX5.2	ZX5.3	ZX5.4	ZX5.5	ZY1.1	ZY1.2	ZY2.1	ZY2.2	ZY2.3
36	0,441	-0,985	0,391	0,500	0,521	-1,233	-1,117	0,898	1,394	0,970
37	0,441	-0,985	0,391	-0,916	-0,850	0,938	1,497	1,181	0,957	1,242
38	0,441	-0,985	0,391	-0,916	0,521	1,249	1,588	1,181	0,957	1,242
39	0,441	-0,985	0,391	0,500	0,521	1,481	1,433	2,030	1,988	2,074
40	0,441	-0,985	0,391	0,500	0,521	0,628	0,604	-0,008	-0,594	0,330
41	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-0,302	-0,298	0,813	1,394	0,286
42	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	0,628	0,030	1,152	1,728	0,632
43	0,441	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	0,318	0,076	1,152	1,728	0,632
44	0,441	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	0,101	0,149	0,331	0,567	-0,111
45	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	0,256	-0,015	1,152	1,728	0,632
46	0,441	-0,985	-1,075	0,500	0,521	-0,380	-0,243	0,813	1,394	0,286
47	-0,998	0,435	0,391	-0,916	-0,850	0,628	0,645	-0,008	-0,594	0,330
48	-0,998	-0,985	0,391	-0,916	-0,850	0,551	0,613	-0,008	-0,594	0,330
49	0,441	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	0,473	0,586	-0,008	-0,594	0,330
50	0,441	-0,985	0,391	0,500	-0,850	0,628	0,613	-0,008	-0,594	0,330
51	-0,998	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	0,597	0,012	-0,490	-0,594	-0,016
52	-0,998	0,435	0,391	-0,916	-0,850	0,551	0,085	-0,490	-0,594	-0,016
53	-0,998	0,435	0,391	-0,916	-0,850	0,473	0,158	-0,490	-0,594	-0,016
54	-0,998	0,435	0,391	-0,916	-0,850	0,318	0,240	-0,490	-0,594	-0,016
55	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	0,521	0,396	0,158	-0,490	-0,594	-0,016
56	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-1,698	-1,177	-1,933	-1,253	-1,112
57	0,441	-0,985	0,391	0,500	-0,850	0,613	0,613	-0,008	-0,594	0,330
58	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	0,628	0,586	0,699	0,567	0,249
59	-0,998	0,435	0,391	0,500	0,521	0,690	0,604	0,699	0,567	0,249
60	0,441	-0,985	-1,075	0,500	0,521	-1,155	-1,245	-0,801	0,066	-1,244
61	-0,998	-0,985	0,391	0,500	0,521	-1,295	-1,208	-1,933	-1,253	-1,112
62	-0,998	-0,985	-1,075	0,500	-0,850	-1,233	-1,309	-1,933	-1,253	-1,112
63	-0,998	-0,985	-1,075	0,500	-0,850	-1,170	-1,208	-1,367	-1,253	-1,973
64	-0,998	-0,985	0,391	-0,916	-0,850	-1,116	-1,445	0,331	1,394	-0,207
65	0,441	0,435	0,391	-0,916	-0,850	-0,302	-0,298	0,813	1,394	0,286
66	-0,998	0,435	0,391	-0,916	-0,850	-0,953	-1,017	-2,500	-2,144	-1,678
67	0,441	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	-0,798	-0,926	-2,500	-2,144	-1,678
68	0,441	0,435	0,391	-0,916	-0,850	-0,302	-0,243	-0,603	-1,253	-1,185
69	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-0,457	-0,216	-0,603	-1,253	-1,185
70	-0,998	0,435	0,391	0,500	0,521	-0,380	-0,243	-0,603	-1,253	-1,185

No	ZX5.1	ZX5.2	ZX5.3	ZX5.4	ZX5.5	ZY1.1	ZY1.2	ZY2.1	ZY2.2	ZY2.3
71	-0,998	-0,985	-1,075	0,500	-0,850	-0,457	-0,325	-0,603	-1,253	-1,185
72	-0,998	0,435	-1,075	0,500	-0,850	-0,380	-0,298	-0,603	-1,253	-1,185
73	0,441	0,435	0,391	0,500	-0,850	-0,364	-0,316	-0,603	-1,253	-1,185
74	-0,998	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	-0,457	-0,307	-0,603	-1,253	-1,185
75	0,441	-0,985	-1,075	0,500	-0,850	-0,380	-0,216	-0,603	-1,253	-1,185
76	0,441	-0,985	-1,075	0,500	0,521	-0,457	-0,325	-0,603	-1,253	-1,185
77	0,441	0,435	0,391	-0,916	-0,850	1,171	1,561	2,030	1,988	2,074
78	0,441	-0,985	-1,075	0,500	-0,850	1,481	1,488	2,030	1,988	2,074
79	0,441	-0,985	-1,075	0,500	-0,850	1,714	1,556	1,181	0,957	1,242
80	-0,998	0,435	-1,075	0,500	0,521	1,481	1,465	2,030	1,988	2,074
81	0,441	0,435	0,391	-0,916	0,521	1,404	1,606	1,181	0,957	1,242
82	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	0,521	1,636	1,306	1,181	0,957	1,242
83	-0,998	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	1,714	1,342	0,898	-0,073	0,970
84	0,441	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	1,559	1,433	0,898	-0,073	0,970
85	0,441	0,435	0,391	0,500	-0,850	1,404	1,287	0,898	-0,073	0,970
86	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	0,473	0,577	0,331	-0,594	-0,207
87	-0,998	0,435	-1,075	-0,916	0,521	0,551	0,386	0,331	-0,594	-0,207
88	-0,998	0,435	0,391	0,500	0,521	0,690	0,613	0,699	0,567	0,249
89	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	0,255	0,622	0,699	0,567	0,249
90	0,441	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	0,566	0,695	0,699	0,567	0,249
91	0,441	-0,985	0,391	-0,916	-0,850	0,008	-0,024	-0,490	-0,594	-0,016
92	-0,998	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	0,070	0,058	-0,490	-0,594	-0,016
93	-0,998	-2,405	0,391	0,500	-0,850	-0,069	-0,033	-0,490	-0,594	-0,016
94	0,441	-0,985	0,391	0,500	-0,850	0,163	0,149	-0,490	-0,594	-0,016
95	-0,998	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	0,241	0,030	-0,490	-0,594	-0,016
96	-0,998	0,435	0,391	-0,916	-0,850	0,008	-0,015	-0,490	-0,594	-0,016
97	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	0,163	-0,043	-0,490	-0,594	-0,016
98	-0,998	-0,985	0,391	-0,916	-0,850	0,380	0,121	-0,490	-0,594	-0,016
99	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	-0,395	-0,325	-0,603	-1,253	-1,185
100	-0,998	0,435	0,391	-0,916	-0,850	-0,240	-0,389	-0,603	-1,253	-1,185
101	-0,998	-0,985	0,391	-0,916	-0,850	-0,302	-0,507	-1,084	-1,253	-0,472
102	0,441	-2,405	0,391	0,500	-0,850	-0,380	-0,243	-0,603	-1,253	-1,185
103	-0,998	0,435	0,391	-0,916	-0,850	-0,457	-0,298	-0,603	-1,253	-1,185
104	0,441	-0,985	0,391	-0,916	0,521	-0,550	-0,425	-0,603	-1,253	-1,185
105	0,441	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	0,938	0,795	0,643	-0,073	0,117

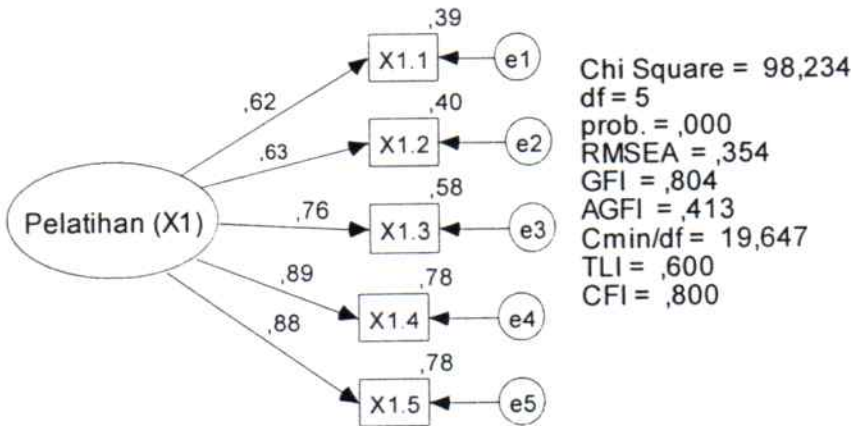
No	ZX5.1	ZX5.2	ZX5.3	ZX5.4	ZX5.5	ZY1.1	ZY1.2	ZY2.1	ZY2.2	ZY2.3
106	0,441	0,435	0,391	-0,916	-0,850	0,938	1,032	0,954	0,957	0,521
107	-0,998	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	1,156	1,123	0,954	0,957	0,521
108	0,441	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	1,156	1,169	0,643	-0,073	0,117
109	-0,998	0,435	0,391	-0,916	-0,850	1,016	1,251	0,643	-0,073	0,117
110	-0,998	0,435	-1,075	-0,916	-0,850	1,001	1,433	0,898	-0,073	0,970
111	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	1,016	1,242	1,181	0,957	1,242
112	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	1,280	1,524	1,181	0,957	1,242
113	0,441	-0,985	0,391	-0,916	0,521	1,125	1,606	0,898	-0,073	0,970
114	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	1,512	1,242	1,181	0,957	1,242
115	-0,998	-0,985	-1,075	-0,916	-0,850	1,636	1,533	1,181	0,957	1,242
116	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	1,791	1,433	1,181	0,957	1,242
117	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	1,714	1,588	0,898	-0,073	0,970
118	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	1,249	1,296	0,898	-0,073	0,970
119	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	1,326	1,388	1,181	0,957	1,242
120	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	1,016	1,524	1,181	0,957	1,242
121	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	1,481	1,515	0,898	-0,073	0,970
122	1,881	0,435	1,857	0,500	1,891	1,636	1,397	0,898	-0,073	0,970
123	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	1,559	1,470	0,898	-0,073	0,970
124	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	1,404	1,296	0,898	-0,073	0,970
125	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-1,233	-1,199	-1,367	-1,253	-1,973
126	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-1,465	-1,254	-0,801	0,066	-1,244
127	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-1,233	-1,327	-1,367	-1,253	-1,973
128	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-1,465	-1,227	-0,801	0,066	-1,244
129	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-1,419	-1,163	-1,367	-1,253	-1,973
130	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-1,279	-1,208	-1,367	-1,253	-1,973
131	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-1,574	-1,290	-1,367	-1,253	-1,973
132	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-1,543	-1,245	-1,367	-1,253	-1,973
133	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-1,233	-1,108	-0,801	0,066	-1,244
134	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-1,465	-1,345	-0,801	0,066	-1,244
135	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-1,170	-1,199	-0,801	0,066	-1,244
136	1,881	1,855	0,391	0,500	0,521	-1,326	-1,117	-0,801	0,066	-1,244
137	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-0,380	-0,279	-0,603	-1,253	-1,185
138	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-0,457	-0,343	-0,603	-1,253	-1,185
139	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-0,612	-0,216	-0,603	-1,253	-1,185
140	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-0,395	-0,407	-1,084	-1,253	-0,472

No	ZX5.1	ZX5.2	ZX5.3	ZX5.4	ZX5.5	ZY1.1	ZY1.2	ZY2.1	ZY2.2	ZY2.3
141	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	0,086	0,039	-0,490	-0,594	-0,016
142	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	0,163	-0,015	-0,490	-0,594	-0,016
143	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	0,008	0,194	-0,490	-0,594	-0,016
144	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	-0,302	-0,252	-1,084	-1,253	-0,472
145	1,881	1,855	1,857	1,917	1,891	0,745	0,613	0,699	0,567	0,249
146	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	0,008	-0,015	0,331	0,567	-0,111
147	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-0,302	-0,380	-0,150	0,066	-0,582
148	1,881	0,435	1,857	0,500	1,891	-0,550	-0,298	-0,150	0,066	-0,582
149	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-0,395	-0,343	-0,150	0,066	-0,582
150	0,441	0,435	0,391	0,500	0,521	-0,318	-0,261	-0,150	0,066	-0,582

LAMPIRAN 6

ANALISIS FAKTOR
KONFIRMATORI
VARIABEL PELATIHAN (X1)

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PELATIHAN (X1)

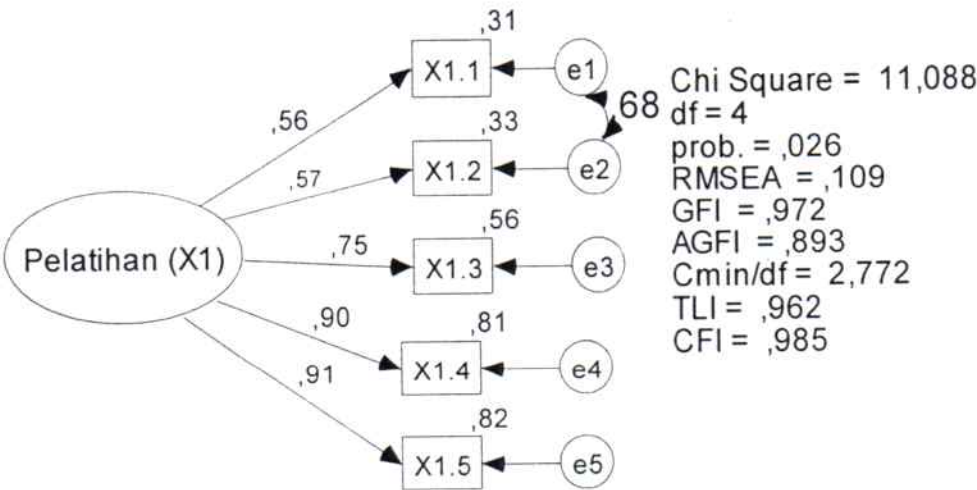


Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi Square	Kecil	98,234	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,000	Belum fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,354	Kurang Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,804	Kurang Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,413	Kurang Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	19,647	Kurang Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,600	Kurang Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,800	Kurang Baik

Modification Indices

Covariances:

	M.I.	Par Change
e1 <-----> e5	10,710	-0,048
e1 <-----> e4	4,142	-0,031
e1 <-----> e2	69,431	0,173



CFA X1 MI-1
20 Oktober 2005 16:35:32

Amos
by James L. Arbuckle
Version 4.01

Title

Cfa x1 mi-1: 20 Oktober 2005 04:35

Number of variables in your model: 11
Number of observed variables: 5
Number of unobserved variables: 6
Number of exogenous variables: 6
Number of endogenous variables: 5

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	5	0	1	0	0	6
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	5	1	5	0	0	11
Total:	10	1	6	0	0	17

NOTE:
The model is recursive.

Sample size: 150

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 15
Number of distinct parameters to be estimated: 11

Degrees of freedom: 4

Minimum was achieved

Chi-square = 11,088
Degrees of freedom = 4
Probability level = 0,026

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:			Estimate	S.E.	C.R.	P
X1.1	<--	Pelatihan (X1)	0,3638	0,0508	7,1553	8,3465E-13
X1.5	<--	Pelatihan (X1)	0,5501	0,0402	13,6806	1,3260E-42
X1.4	<--	Pelatihan (X1)	0,5735	0,0424	13,5122	1,3242E-41
X1.2	<--	Pelatihan (X1)	0,3475	0,0474	7,3313	2,2796E-13
X1.3	<--	Pelatihan (X1)	0,4452	0,0431	10,3325	5,0242E-25

Standardized Regression Weights: Estimate

X1.1	<-----	Pelatihan (X1)	0,561
X1.5	<-----	Pelatihan (X1)	0,905
X1.4	<-----	Pelatihan (X1)	0,898
X1.2	<-----	Pelatihan (X1)	0,572
X1.3	<-----	Pelatihan (X1)	0,746

Squared Multiple Correlations: Estimate

X1.5	0,820
X1.4	0,807
X1.3	0,556
X1.2	0,327
X1.1	0,314

Summary of models

Model	NP	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	11	11,088	4	0,026	2,772
Saturated model	15	0,000	0		
Independence model	5	475,878	10	0,000	47,588
Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI	
Default model	0,017	0,972	0,893	0,259	
Saturated model	0,000	1,000			
Independence model	0,191	0,403	0,104	0,269	
Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	0,977	0,942	0,985	0,962	0,985
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE	
Default model	0,109	0,034	0,188	0,084	
Independence model	0,559	0,517	0,603	0,000	

SIGNIFIKANSI INDIKATOR PELATIHAN (X1)

Indikator	Estimate	Probabilitas	Keterangan
X1.1	0,5606	$8,3465 \cdot 10^{-13}$	Signifikan
X1.2	0,5719	$2,2796 \cdot 10^{-13}$	Signifikan
X1.3	0,7456	$5,0242 \cdot 10^{-25}$	Signifikan
X1.4	0,8981	$1,3242 \cdot 10^{-41}$	Signifikan
X1.5	0,9053	$1,3260 \cdot 10^{-42}$	Signifikan

STANDAR LOADING DAN MEASUREMENT ERROR INDIKATOR PELATIHAN TEKNIS (X1)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	measurement error ($1-\lambda^2$)
X1.1	0,5606	0,3143	0,6857
X1.2	0,5719	0,3271	0,6729
X1.3	0,7456	0,5559	0,4441
X1.4	0,8981	0,8066	0,1934
X1.5	0,9053	0,8196	0,1804
Jumlah	3,6815	2,8234	2,1766

Berdasarkan Tabel di atas dapat disusun persamaan yang membentuk konstruk pelatihan yaitu :

$X1.1 = 0,5606 X1 + 0,6857$

$X1.2 = 0,5719 X1 + 0,6729$

$X1.3 = 0,7456 X1 + 0,4441$

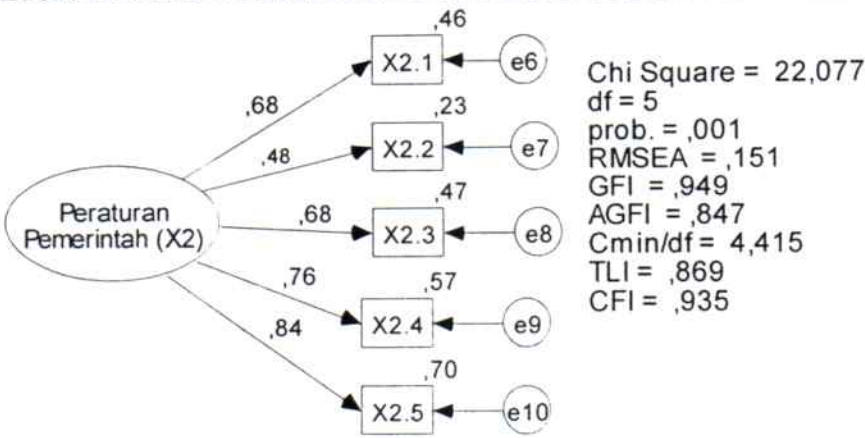
$X1.4 = 0,8981 X1 + 0,1934$

$X1.5 = 0,9053 X1 + 0,1804$

LAMPIRAN 7

**ANALISIS FAKTOR
KONFIRMATORI
VARIABEL PERATURAN
PEMERINTAH (X2)**

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PERATURAN PEMERINTAH (X2)



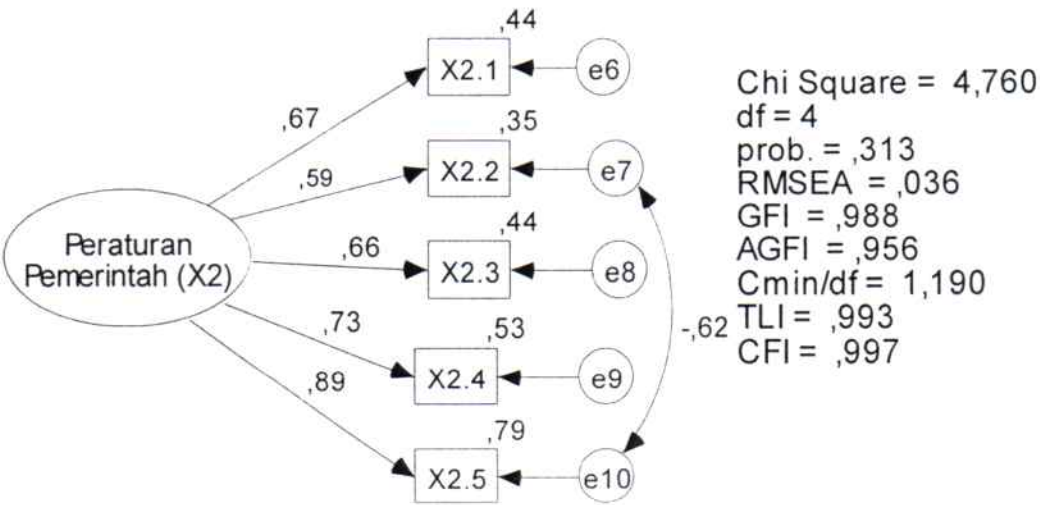
Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi Square	Kecil	22,077	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,001	Belum fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,151	Kurang baik
GFI	$\geq 0,90$	0,949	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,847	Kurang Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	4,415	Kurang baik
TLI	$\geq 0,95$	0,869	Kurang baik
CFI	$\geq 0,95$	0,935	Kurang baik

Modification Indices

Covariances:

e7 <-----> e10
e7 <-----> e9
e6 <-----> e8

M.I.	Par Change
10,983	-0,050
6,864	0,048
4,703	-0,041



CFA X2 MI-1
20 Oktober 2005 16:39:06

Amos
by James L. Arbuckle
Version 4.01

Title

Cfa x2 mi-1: 20 Oktober 2005 04:39

Number of variables in your model: 11
Number of observed variables: 5
Number of unobserved variables: 6
Number of exogenous variables: 6
Number of endogenous variables: 5

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fixed:	5	0	1	0	0	6
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	5	1	5	0	0	11
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total:	10	1	6	0	0	17

NOTE:
The model is recursive.

Sample size: 150

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 15
Number of distinct parameters to be estimated: 11

Degrees of freedom: 4

Minimum was achieved

Chi-square = 4,760
Degrees of freedom = 4
Probability level = 0,313

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:			Estimate	S.E.	C.R.	p
X2.1	<--	Peraturan (X2)	0,4385	0,0501	8,7596	1,9600E-18
X2.5	<--	Peraturan (X2)	0,4811	0,0387	12,4166	2,1234E-35
X2.4	<--	Peraturan (X2)	0,4401	0,0450	9,7782	1,3965E-22
X2.2	<--	Peraturan (X2)	0,3335	0,0486	6,8591	6,9278E-12
X2.3	<--	Peraturan (X2)	0,3804	0,0434	8,7546	2,0477E-18

Standardized Regression Weights: Estimate

X2.1 <---- Peraturan_Pemerintah (X2)	0,665
X2.5 <---- Peraturan_Pemerintah (X2)	0,889
X2.4 <---- Peraturan_Pemerintah (X2)	0,726
X2.2 <---- Peraturan_Pemerintah (X2)	0,590
X2.3 <---- Peraturan_Pemerintah (X2)	0,665

Squared Multiple Correlations: Estimate

X2.5	0,791
X2.4	0,527
X2.3	0,442
X2.2	0,348
X2.1	0,442



Modification Indices

Covariances: M.I. Par Change

Variances: M.I. Par Change

Regression Weights: M.I. Par Change

Summary of models

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	11	4,760	4	0,313	1,190
Saturated model	15	0,000	0		
Independence model	5	270,935	10	0,000	27,093
Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI	
Default model	0,009	0,988	0,956	0,264	
Saturated model	0,000	1,000			
Independence model	0,137	0,514	0,272	0,343	
Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	0,982	0,956	0,997	0,993	0,997
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE	
Default model	0,036	0,000	0,133	0,492	
Independence model	0,418	0,376	0,462	0,000	

SIGNIFIKANSI INDIKATOR PERATURAN PEMERINTAH (X2)

Indikator	Estimate	Probabilitas	Keterangan
X2.1	0,6652	$1,9600 \cdot 10^{-18}$	Signifikan
X2.2	0,5903	$2,1234 \cdot 10^{-35}$	Signifikan
X2.3	0,6649	$1,3965 \cdot 10^{-22}$	Signifikan
X2.4	0,7262	$6,9278 \cdot 10^{-12}$	Signifikan
X2.5	0,8894	$2,0477 \cdot 10^{-18}$	Signifikan

STANDAR LOADING DAN MEASUREMENT ERROR INDIKATOR PERATURAN PEMERINTAH (X2)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	measurement error ($1-\lambda^2$)
X2.1	0,6652	0,4425	0,5575
X2.2	0,5903	0,3485	0,6515
X2.3	0,6649	0,4421	0,5579
X2.4	0,7262	0,5274	0,4726
X2.5	0,8894	0,7910	0,2090
Jumlah	3,5360	2,5514	2,4486

Berdasarkan Tabel di atas dapat disusun persamaan yang membentuk konstruk pelatihan

$X2.1 = 0,6652 X2 + 0,5575$

$X2.2 = 0,5903 X2 + 0,6515$

$X2.3 = 0,6649 X2 + 0,5579$

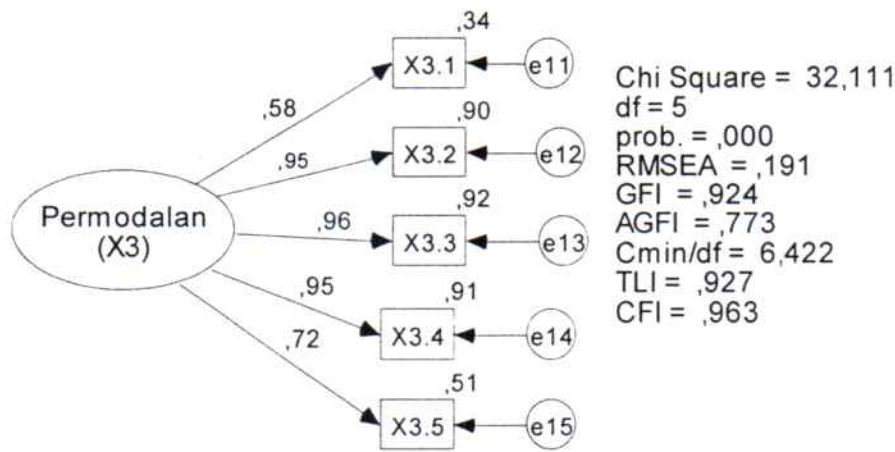
$X2.4 = 0,7262 X2 + 0,4726$

$X2.5 = 0,8894 X2 + 0,2090$

LAMPIRAN 8

ANALISIS FAKTOR
KONFIRMATORI
VARIABEL PERMODALAN (X3)

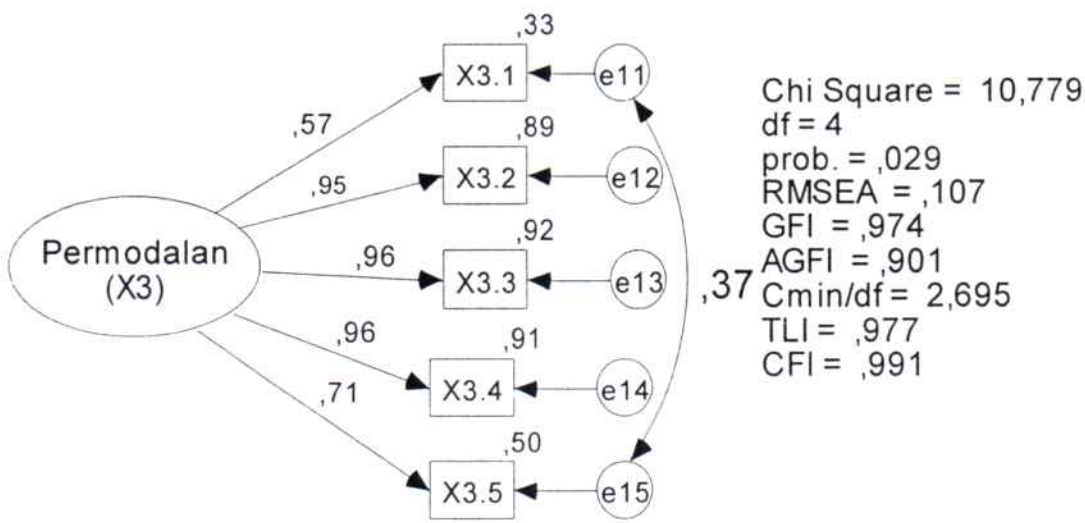
ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PERMODALAN (X3)



Modification Indices

Covariances:

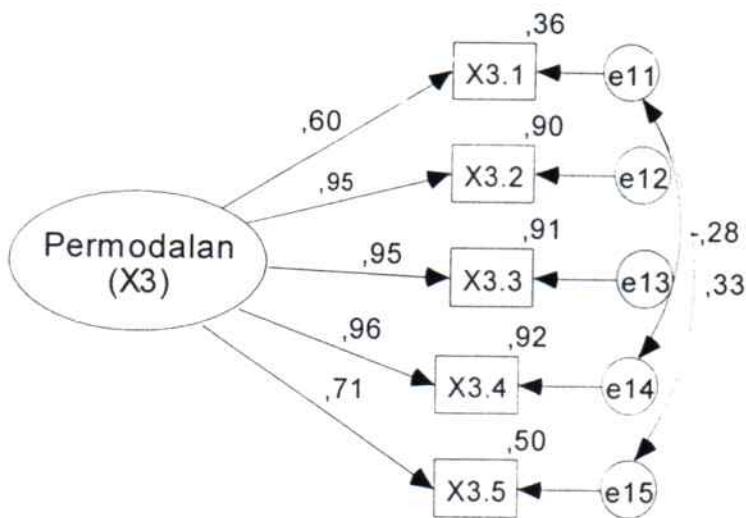
	M.I.	Par Change
e11 <-----> e15	20,078	0,094
e11 <-----> e14	10,713	-0,033



Modification Indices

Covariances:

	M.I.	Par Change
e11 <-----> e14	6,760	-0,024
e11 <-----> e12	5,246	0,023



Chi Square = 3,036
df = 3
prob. = ,386
RMSEA = ,009
GFI = ,992
AGFI = ,960
Cmin/df = 1,012
TLI = 1,000
CFI = 1,000

CFA X3 MI-2
20 Oktober 2005 16:40:49

Amos

by James L. Arbuckle

Version 4.01

Title

Cfa x3 mi-2: 20 Oktober 2005 04:40

Number of variables in your model: 11
Number of observed variables: 5
Number of unobserved variables: 6
Number of exogenous variables: 6
Number of endogenous variables: 5

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	5	0	1	0	0	6
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	5	2	5	0	0	12
Total:	10	2	6	0	0	18

NOTE:
The model is recursive.

Sample size: 150

Model: Default model
Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 15
Number of distinct parameters to be estimated: 12

Degrees of freedom: 3

Minimum was achieved

Chi-square = 3,036
Degrees of freedom = 3
Probability level = 0,386

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:			Estimate	S.E.	C.R.	p
X3.1	<--	Permodalan (X3)	0,3861	0,0488	7,9104	2,5650E-15
X3.5	<--	Permodalan (X3)	0,4846	0,0490	9,8996	4,1774E-23
X3.4	<--	Permodalan (X3)	0,6151	0,0389	15,8160	2,4139E-56
X3.2	<--	Permodalan (X3)	0,6278	0,0405	15,4958	3,7021E-54
X3.3	<--	Permodalan (X3)	0,6347	0,0404	15,7154	1,1863E-55

Standardized Regression Weights:		Estimate
-----		-----
X3.1	<----- Permodalan (X3)	0,599
X3.5	<----- Permodalan (X3)	0,709
X3.4	<----- Permodalan (X3)	0,958
X3.2	<----- Permodalan (X3)	0,947
X3.3	<----- Permodalan (X3)	0,955

Squared Multiple Correlations:		Estimate
	X3.5	0,503
	X3.4	0,918
	X3.3	0,911
	X3.2	0,897
	X3.1	0,359

Modification Indices

Covariances:	M.I.	Par Change
Variances:	M.I.	Par Change
Regression Weights:	M.I.	Par Change

Summary of models

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	12	3,036	3	0,386	1,012
Saturated model	15	0,000	0		
Independence model	5	751,949	10	0,000	75,195

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI	
Default model	0,004	0,992	0,960	0,198	
Saturated model	0,000	1,000			
Independence model	0,255	0,327	-0,009	0,218	

Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	0,996	0,987	1,000	1,000	1,000
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE	
Default model	0,009	0,000	0,139	0,540	
Independence model	0,706	0,663	0,749	0,000	

SIGNIFIKANSI INDIKATOR PERMODALAN (X3)

Indikator	Estimate	Probabilitas	Keterangan
X3.1	0,5989	$2,5650 \cdot 10^{-15}$	Signifikan
X3.2	0,9473	$3,7021 \cdot 10^{-54}$	Signifikan
X3.3	0,9547	$1,1863 \cdot 10^{-55}$	Signifikan
X3.4	0,9583	$2,4139 \cdot 10^{-56}$	Signifikan
X3.5	0,7094	$4,1774 \cdot 10^{-23}$	Signifikan

STANDAR LOADING DAN MEASUREMENT ERROR INDIKATOR PERMODALAN (X3)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	measurement error ($1-\lambda^2$)
X3.1	0,5989	0,3587	0,6413
X3.2	0,9473	0,8974	0,1026
X3.3	0,9547	0,9115	0,0885
X3.4	0,9583	0,9183	0,0817
X3.5	0,7094	0,5032	0,4968
Jumlah	4,1686	3,5891	1,4109

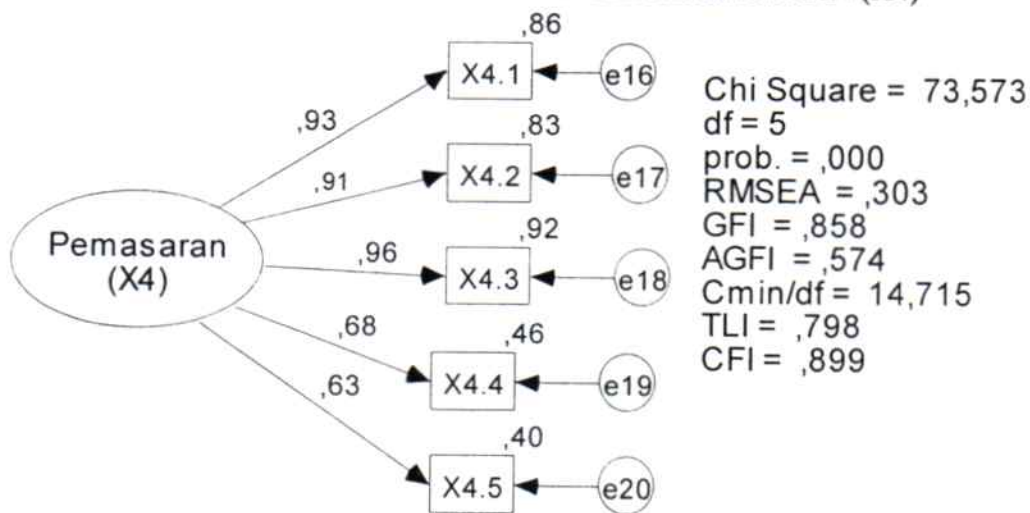
Berdasarkan Tabel di atas dapat disusun persamaan yang membentuk konstruk permodalan yaitu :

$$X3.1 = 0,5989 X3 + 0,6413$$
$$X3.2 = 0,9473 X3 + 0,1026$$
$$X3.3 = 0,9547 X3 + 0,0885$$
$$X3.4 = 0,9583 X3 + 0,0817$$
$$X3.5 = 0,7094 X3 + 0,4968$$

LAMPIRAN 9

ANALISIS FAKTOR
KONFIRMATORI
VARIABEL PEMASARAN (X4)

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PEMASARAN (X4)

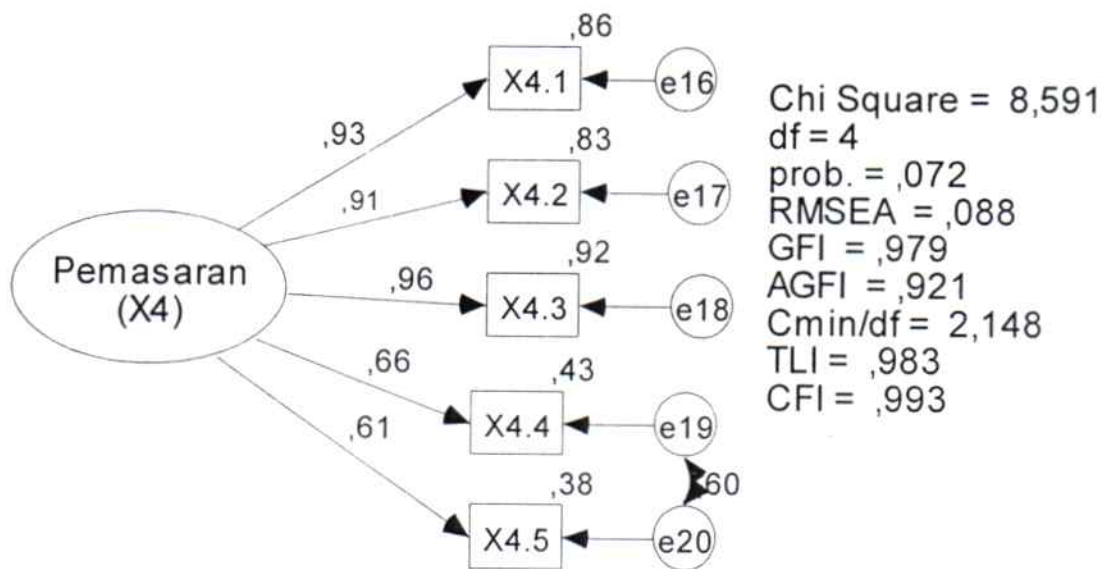


Modification Indices

Covariances:

e19 <-----> e20
e16 <-----> e19

M.I.	Par Change
54,363	0,162
9,173	-0,034



Amos

by James L. Arbuckle
Version 4.01

Title

Cfa x4 mi-1: 20 Oktober 2005 04:43

Number of variables in your model: 11
Number of observed variables: 5
Number of unobserved variables: 6
Number of exogenous variables: 6
Number of endogenous variables: 5

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fixed:	5	0	1	0	0	6
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	5	1	5	0	0	11
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total:	10	1	6	0	0	17

NOTE:

The model is recursive.
Sample size: 150

Model: Default model
Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 15
Number of distinct parameters to be estimated: 11

Degrees of freedom: 4

Minimum was achieved
Chi-square = 8,591
Degrees of freedom = 4
Probability level = 0,072

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:		Estimate	S.E.	C.R.	P
X4.1	<-- Pemasaran (X4)	0,5998	0,0403	14,8657	5,5055E-50
X4.5	<-- Pemasaran (X4)	0,4292	0,0526	8,1652	3,2089E-16
X4.4	<-- Pemasaran (X4)	0,4283	0,0479	8,9470	3,6540E-19
X4.2	<-- Pemasaran (X4)	0,5878	0,0410	14,3260	1,5061E-46
X4.3	<-- Pemasaran (X4)	0,5904	0,0375	15,7645	5,4566E-56

Standardized Regression Weights:	Estimate
-----	-----
X4.1 <----- Pemasaran (X4)	0,929
X4.5 <----- Pemasaran (X4)	0,613
X4.4 <----- Pemasaran (X4)	0,659
X4.2 <----- Pemasaran (X4)	0,909
X4.3 <----- Pemasaran (X4)	0,960

Squared Multiple Correlations:	Estimate
-----	-----
X4.5	0,376
X4.4	0,434
X4.3	0,921
X4.2	0,826
X4.1	0,862

Modification Indices

Covariances:	M.I.	Par Change
	-----	-----
Variances:	M.I.	Par Change
	-----	-----
Regression Weights:	M.I.	Par Change
	-----	-----

Summary of models

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Default model	11	8,591	4	0,072	2,148
Saturated model	15	0,000	0		
Independence model	5	688,169	10	0,000	68,817
Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Default model	0,006	0,979	0,921	0,261	
Saturated model	0,000	1,000			
Independence model	0,242	0,335	0,003	0,224	
Model	NCP	LO 90	HI 90		
-----	-----	-----	-----		
Default model	4,591	0,000	17,146		
Saturated model	0,000	0,000	0,000		
Independence model	678,169	595,843	767,893		
Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Default model	0,088	0,000	0,170	0,178	
Independence model	0,675	0,632	0,718	0,000	

SIGNIFIKANSI INDIKATOR PEMASARAN (X4)

Indikator	Estimate	Probabilitas	Keterangan
X4.1	0,9285	$5,5055 \cdot 10^{-50}$	Signifikan
X4.2	0,9087	$1,5061 \cdot 10^{-46}$	Signifikan
X4.3	0,9597	$5,4566 \cdot 10^{-56}$	Signifikan
X4.4	0,6591	$3,6540 \cdot 10^{-19}$	Signifikan
X4.5	0,6132	$3,2089 \cdot 10^{-16}$	Signifikan

STANDAR LOADING DAN MEASUREMENT ERROR INDIKATOR PEMASARAN (X4)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	measurement error ($1-\lambda^2$)
X4.1	0,9285	0,8621	0,1379
X4.2	0,9087	0,8257	0,1743
X4.3	0,9597	0,9210	0,0790
X4.4	0,6591	0,4344	0,5656
X4.5	0,6132	0,3760	0,6240
Jumlah	4,0692	3,4193	1,5807

Berdasarkan Tabel di atas dapat disusun persamaan yang membentuk konstruk pemasaran yaitu :

$X4.1 = 0,9285 X4 + 0,1379$

$X4.2 = 0,9087 X4 + 0,1743$

$X4.3 = 0,9597 X4 + 0,0790$

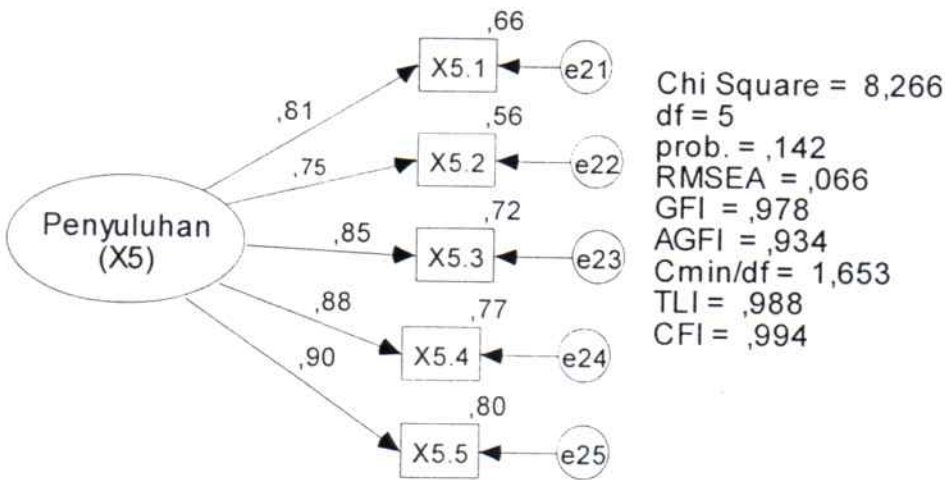
$X4.4 = 0,6591 X4 + 0,5656$

$X4.5 = 0,6132 X4 + 0,6240$

LAMPIRAN 10

**ANALISIS FAKTOR
KONFIRMATORI
VARIABEL PENYULUH
INDUSTRI
PERDAGANGAN (X5)**

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PENYULUHAN (X5)



CFA X5
18 Oktober 2005 15:51:57

Amos

by James L. Arbuckle

Version 4.01

Title

Cfa x5: 18 Oktober 2005 03:51

Number of variables in your model: 11
Number of observed variables: 5
Number of unobserved variables: 6
Number of exogenous variables: 6
Number of endogenous variables: 5

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	5	0	1	0	0	6
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	5	0	5	0	0	10
Total:	10	0	6	0	0	16

NOTE:
The model is recursive.

Sample size: 150
Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments:	15
Number of distinct parameters to be estimated:	10

Degrees of freedom:	5

Minimum was achieved

Chi-square = 8,266
Degrees of freedom = 5
Probability level = 0,142

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:		Estimate	S.E.	C.R.	P
X5.1	<-- Penyuluhan (X5)	0,5638	0,0475	11,8650	1,7990E-32
X5.5	<-- Penyuluhan (X5)	0,6512	0,0472	13,8003	2,5376E-43
X5.4	<-- Penyuluhan (X5)	0,6163	0,0463	13,3063	2,1267E-40
X5.2	<-- Penyuluhan (X5)	0,5275	0,0500	10,5457	5,3197E-26
X5.3	<-- Penyuluhan (X5)	0,5789	0,0455	12,7142	4,9324E-37

Standardized Regression Weights:		Estimate
-----		-----
X5.1	<----- Penyuluhan (X5)	0,814
X5.5	<----- Penyuluhan (X5)	0,895
X5.4	<----- Penyuluhan (X5)	0,876
X5.2	<----- Penyuluhan (X5)	0,752
X5.3	<----- Penyuluhan (X5)	0,851

Squared Multiple Correlations:		Estimate
-----		-----
	X5.5	0,802
	X5.4	0,767
	X5.3	0,725
	X5.2	0,565
	X5.1	0,663

Modification Indices

Covariances:	M.I.	Par Change
-----		-----
Variances:	M.I.	Par Change
-----		-----
Regression Weights:	M.I.	Par Change
-----		-----

Summary of models

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF

Default model	10	8,266	5	0,142	1,653
Saturated model	15	0,000	0		
Independence model	5	549,227	10	0,000	54,923

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI	
Default model	0,009	0,978	0,934	0,326	
Saturated model	0,000	1,000			
Independence model	0,283	0,335	0,003	0,224	
Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	0,985	0,970	0,994	0,988	0,994
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE	
Default model	0,066	0,000	0,143	0,306	
Independence model	0,602	0,559	0,645	0,000	

Indikator	Estimate	Probabilitas	Keterangan
X5.1	0,8144	$1,7990 \cdot 10^{-32}$	Signifikan
X5.2	0,7516	$5,3197 \cdot 10^{-26}$	Signifikan
X5.3	0,8514	$4,9324 \cdot 10^{-37}$	Signifikan
X5.4	0,8759	$2,1267 \cdot 10^{-40}$	Signifikan
X5.5	0,8954	$2,5376 \cdot 10^{-43}$	Signifikan

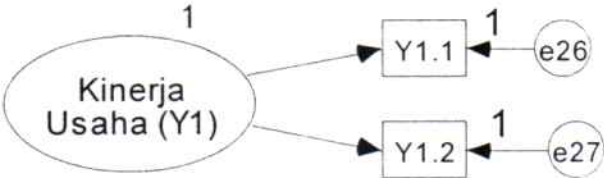
Berdasarkan Tabel di atas dapat disusun persamaan yang membentuk konstruk penyuluh industri dan perdagangan yaitu :

$$\begin{aligned}
 X5.1 &= 0,8144 X5 + 0,1379 \\
 X5.2 &= 0,7516 X5 + 0,4351 \\
 X5.3 &= 0,8514 X5 + 0,7249 \\
 X5.4 &= 0,8759 X5 + 0,7672 \\
 X5.5 &= 0,8954 X5 + 0,8017
 \end{aligned}$$

LAMPIRAN 11

ANALISIS FAKTOR
KONFIRMATORI
VARIABEL KINERJA USAHA
(Y1)

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI KINERJA USAHA (Y1)



CFA Y1
21 Oktober 2005 09:28:03

Amos

by James L. Arbuckle

Version 4.01

Number of variables in your model: 5
Number of observed variables: 2
Number of unobserved variables: 3
Number of exogenous variables: 3
Number of endogenous variables: 2

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	2	0	1	0	0	3
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	2	0	2	0	0	4
Total:	4	0	3	0	0	7

Sample size: 150

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 3
Number of distinct parameters to be estimated: 4
Degrees of freedom: -1

The analysis will not continue because:

The specified model has negative degrees of freedom. That is, the number of parameters to be estimated exceeds the number of distinct sample moments. For this reason, the model cannot be identified.

SIGNIFIKANSI INDIKATOR STRUKTUR USAHA (Y2)

Indikator	Estimate	Probabilitas	Keterangan
Y2.1	0,9510	$9,5712 \cdot 10^{-52}$	Signifikan
Y2.2	0,8344	$6,6419 \cdot 10^{-35}$	Signifikan
Y2.3	0,8963	$6,1271 \cdot 10^{-43}$	Signifikan

RELIABILITAS KONSTRUK DAN VARIANS EKSTRAK STRUKTUR USAHA (Y2)

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
Y2.1	0,9510	0,9044	0,0956
Y2.2	0,8344	0,6962	0,3038
Y2.3	0,8963	0,8034	0,1966
Jumlah	2,6817	2,4040	0,5960

Berdasarkan Tabel di atas dapat disusun persamaan yang membentuk konstruk

perkembangan struktur unit usaha yaitu :

$$Y2.1 = 0,9510 Y2 + 0,0956$$

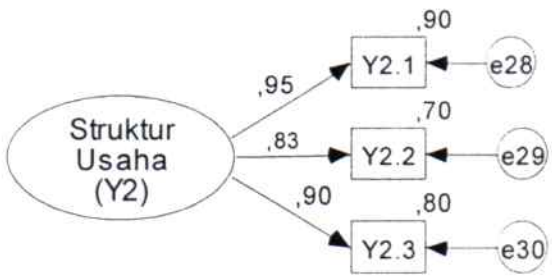
$$Y2.2 = 0,8344 Y2 + 0,3038$$

$$Y2.3 = 0,8963 Y2 + 0,1966$$

LAMPIRAN 12

**ANALISIS FAKTOR
KONFIRMATORI
VARIABEL PERKEMBANGAN
STRUKTUR USAHA (Y2)**

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI PERTUMBUHAN STRUKTUR USAHA (Y2)



Chi Square = ,000
df = 0
prob. = \p
RMSEA = \rmsea
GFI = 1,000
AGFI = \agfi
Cmin/df = \cmindf
TLI = \tli
CFI = \cfi

CFA Y2
21 Oktober 2005 09:39:37

Amos
by James L. Arbuckle
Version 4.01

Title

Cfa y2: 21 Oktober 2005 09:39

Number of variables in your model: 7
Number of observed variables: 3
Number of unobserved variables: 4
Number of exogenous variables: 4
Number of endogenous variables: 3

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	3	0	1	0	0	4
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	3	0	3	0	0	6
Total:	6	0	4	0	0	10

NOTE:
The model is recursive.

Sample size: 150

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 6
Number of distinct parameters to be estimated: 6

Degrees of freedom: 0

Minimum was achieved

Chi-square = 0,000
 Degrees of freedom = 0
 Probability level cannot be computed

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:	Estimate	S.E.	C.R.	P
Y2.2 <--struktur_usaha (Y2)	8,9559	0,7266	12,3250	6,6419E-35
Y2.1 <--struktur_usaha(Y2)	3,3479	0,2212	15,1346	9,5712E-52
Y2.3 <--struktur_usaha(Y2)	12,1424	0,8839	13,7366	6,1271E-43

Standardized Regression Weights:	Estimate
Y2.2 <----- struktur_usaha (Y2)	0,834
Y2.1 <----- struktur_usaha (Y2)	0,951
Y2.3 <----- struktur_usaha (Y2)	0,896

Modification Indices

Summary of models

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	6	0,000	0		
Saturated model	6	0,000	0		
Independence model	3	348,878	3	0,000	116,293
Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI	
Default model	0,000	1,000			
Saturated model	0,000	1,000			
Independence model	48,951	0,439	-0,122	0,220	
Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	1,000		1,000		1,000
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
Y2.1	0,9510	0,9044	0,0956
Y2.2	0,8344	0,6962	0,3038
Y2.3	0,8963	0,8034	0,1966
Jumlah	2,6817	2,4040	0,5960

Berdasarkan Tabel di atas dapat disusun persamaan yang membentuk konstruk perkembangan struktur unit usaha yaitu :

$$Y2.1 = 0.9510 Y2 + 0,0956$$

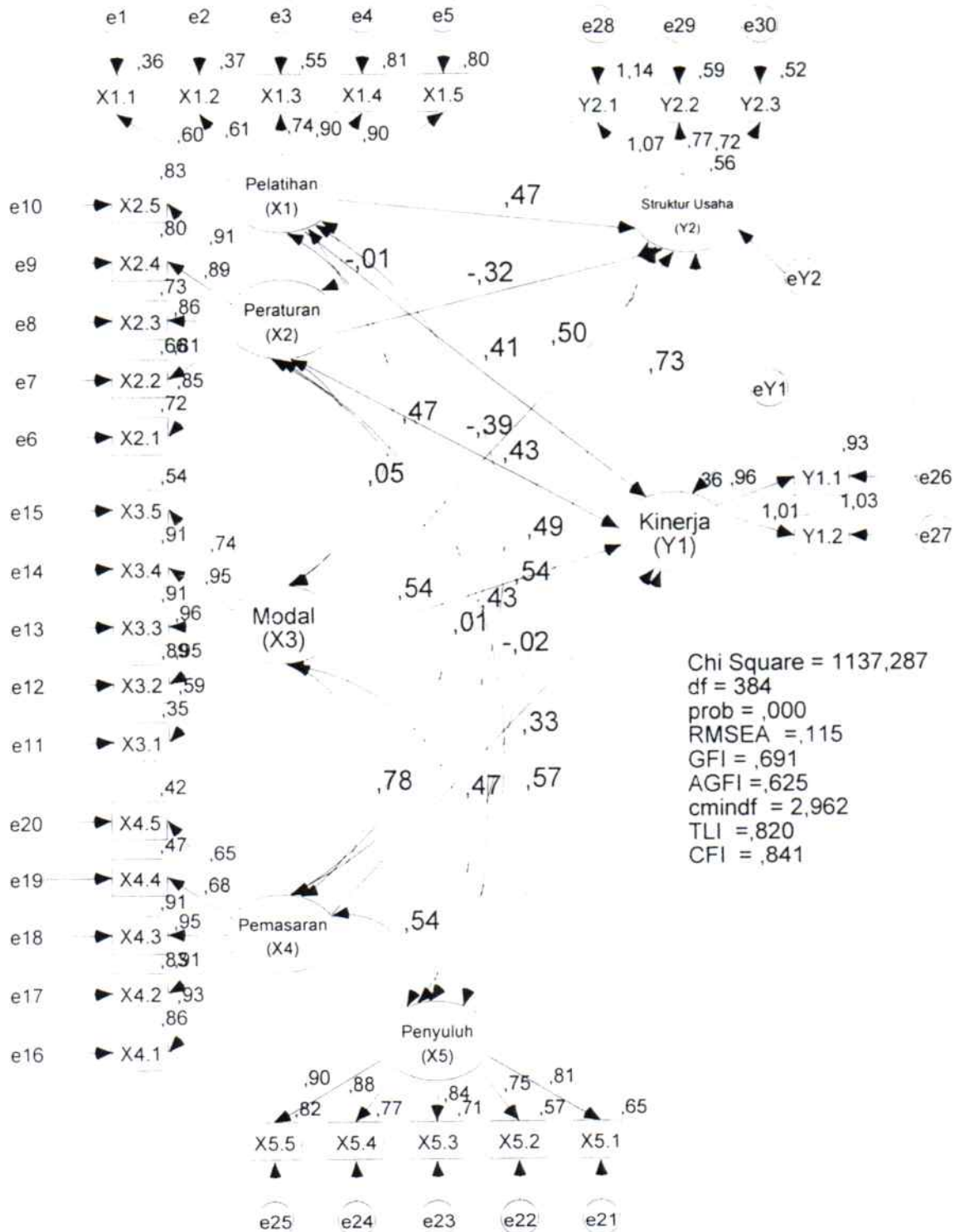
$$Y2.2 = 0,8344 Y2 + 0,3038$$

$$Y2.3 = 0.8963 Y2 + 0,1966$$

LAMPIRAN 13

MODEL PERSAMAAN
STRUKTURAL

PERSAMAAN MODEL STRUKTURAL AWAL



SEM ALL

21 Oktober 2005 15:23:45

Title

Sem all: 21 Oktober 2005 03:23

Number of variables in your model: 69
 Number of observed variables: 30
 Number of unobserved variables: 39
 Number of exogenous variables: 37
 Number of endogenous variables: 32

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	39	0	0	0	0	39
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	34	10	37	0	0	81
Total:	73	10	37	0	0	120

NOTE:

The model is recursive.

Sample size: 150

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 465
 Number of distinct parameters to be estimated: 81

 Degrees of freedom: 384

Minimum was achieved

Chi-square = 1137,287

Degrees of freedom = 384

Probability level = 0,000

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights			Estimate	S.E.	C.R.	P
Kinerja_(Y1)	<--	Pelatihan_(X1)	2,2527	0,84469	2,6669	7,9792E-03
Kinerja_(Y1)	<--	Peraturan_(X2)	-1,9006	0,81951	-2,3192	2,0908E-02
Kinerja_(Y1)	<--	Modal_(X3)	0,5764	0,18209	3,1654	1,6723E-03
Kinerja_(Y1)	<--	Pemasaran_(X4)	0,3441	0,14190	2,4249	1,5773E-02
Kinerja_(Y1)	<--	Penyuluh_(X5)	0,799	0,26475	3,0179	2,7151E-03
Struktur Usaha_(Y2)	<--	Kinerja_(Y1)	0,4462	0,02984	14,9555	3,5678E-40

Struktur Usaha (Y2)	<--	Pelatihan_ (X1)	0,6469	0,26467	2,4442	1,4966E-02
Struktur Usaha (Y2)	<--	Peraturan_ (X2)	-0,1509	0,05883	-2,5652	1,0691E-02
Struktur Usaha (Y2)	<--	Modal_ (X3)	0,0326	0,01069	3,0482	2,4615E-03
Struktur Usaha (Y2)	<--	Pemasaran_ (X4)	0,5211	0,24945	2,089	3,7366E-02
Struktur Usaha (Y2)	<--	Penyuluh_ (X5)	0,6681	0,22956	2,9103	3,8212E-03
X1.1	<--	Pelatihan_ (X1)	1			
X1.2	<--	Pelatihan_ (X1)	0,9508	0,1485	6,4014	1,5397E-10
X1.3	<--	Pelatihan_ (X1)	1,1473	0,1592	7,206	5,7617E-13
X1.4	<--	Pelatihan_ (X1)	1,4827	0,1887	7,8576	3,9172E-15
X1.5	<--	Pelatihan_ (X1)	1,4075	0,1807	7,7898	6,7104E-15
X2.1	<--	Peraturan_ (X2)	1			
X2.2	<--	Peraturan_ (X2)	1,0312	0,0828	12,4506	1,3876E-35
X2.3	<--	Peraturan_ (X2)	1,0435	0,0798	13,0717	4,7794E-39
X2.4	<--	Peraturan_ (X2)	1,0551	0,0734	14,3829	6,6225E-47
X2.5	<--	Peraturan_ (X2)	1,1355	0,0777	14,6192	2,1197E-48
X3.1	<--	Modal_ (X3)	1			
X3.2	<--	Modal_ (X3)	1,637	0,192	8,5267	1,5056E-17
X3.3	<--	Modal_ (X3)	1,659	0,1938	8,559	1,1387E-17
X3.4	<--	Modal_ (X3)	1,5958	0,1875	8,5109	1,7252E-17
X3.5	<--	Modal_ (X3)	1,3165	0,1792	7,3474	2,0209E-13
X4.1	<--	Pemasaran_ (X4)	1			
X4.2	<--	Pemasaran_ (X4)	0,9839	0,051	19,3024	5,1272E-93
X4.3	<--	Pemasaran_ (X4)	0,9803	0,0433	22,6304	2,1786E-93
X4.4	<--	Pemasaran_ (X4)	0,7426	0,0719	10,3234	5,5207E-25
X4.5	<--	Pemasaran_ (X4)	0,7554	0,0799	9,4581	3,1363E-21
X5.1	<--	Penyuluh_ (X5)	1			
X5.2	<--	Penyuluh_ (X5)	0,9451	0,0924	10,2336	1,4025E-24
X5.3	<--	Penyuluh_ (X5)	1,0257	0,0849	12,0776	1,3869E-33
X5.4	<--	Penyuluh_ (X5)	1,1032	0,087	12,6735	8,2895E-37
X5.5	<--	Penyuluh_ (X5)	1,1759	0,09	13,0596	5,6053E-39
Y2.1	<--	Struktur Usaha (Y2)	1			
Y2.2	<--	Struktur Usaha (Y2)	2,1798	0,1484	14,6853	8,0021E-49
Y2.3	<--	Struktur Usaha (Y2)	2,5994	0,2658	9,7781	1,3987E-22
Y1.1	<--	Kinerja_ (Y1)	1			
Y1.2	<--	Kinerja_ (Y1)	1,7932	0,0431	41,5793	0,0000E+00

Standardized Regression Weights:

Estimate

Kinerja_(Y1)	<--	Pelatihan_(X1)	0,4411
Kinerja_(Y1)	<--	Peraturan_(X2)	-0,3901
Kinerja_(Y1)	<--	Modal_(X3)	0,5357
Kinerja_(Y1)	<--	Pemasaran_(X4)	0,3333
Kinerja_(Y1)	<--	Penyuluh_(X5)	0,5723
Struktur Usaha(Y2)	<--	Kinerja_(Y1)	0,7323
Struktur Usaha(Y2)	<--	Pelatihan_(X1)	0,4665
Struktur Usaha(Y2)	<--	Peraturan_(X2)	-0,3248
Struktur Usaha(Y2)	<--	Modal_(X3)	0,5033
Struktur Usaha(Y2)	<--	Pemasaran_(X4)	0,4328
Struktur Usaha(Y2)	<--	Penyuluh_(X5)	0,4992
X1.1	<--	Pelatihan_(X1)	0,5967
X1.2	<--	Pelatihan_(X1)	0,6061
X1.3	<--	Pelatihan_(X1)	0,7441
X1.4	<--	Pelatihan_(X1)	0,899
X1.5	<--	Pelatihan_(X1)	0,8969
X2.1	<--	Peraturan_(X2)	0,8468
X2.2	<--	Peraturan_(X2)	0,8107
X2.3	<--	Peraturan_(X2)	0,8556
X2.4	<--	Peraturan_(X2)	0,8944
X2.5	<--	Peraturan_(X2)	0,9099
X3.1	<--	Modal_(X3)	0,5914
X3.2	<--	Modal_(X3)	0,9458
X3.3	<--	Modal_(X3)	0,9555
X3.4	<--	Modal_(X3)	0,9519
X3.5	<--	Modal_(X3)	0,7378
X4.1	<--	Pemasaran_(X4)	0,9262
X4.2	<--	Pemasaran_(X4)	0,9099
X4.3	<--	Pemasaran_(X4)	0,9533
X4.4	<--	Pemasaran_(X4)	0,6837
X4.5	<--	Pemasaran_(X4)	0,6456
X5.1	<--	Penyuluh_(X5)	0,8076
X5.2	<--	Penyuluh_(X5)	0,7529
X5.3	<--	Penyuluh_(X5)	0,8435
X5.4	<--	Penyuluh_(X5)	0,8766
X5.5	<--	Penyuluh_(X5)	0,904
Y2.1	<--	Struktur Usaha(Y2)	1,0699
Y2.2	<--	Struktur Usaha(Y2)	0,765
Y2.3	<--	Struktur Usaha(Y2)	0,7227

Y1.1	<--	Kinerja_(Y1)	0,9618
Y1.2	<--	Kinerja_(Y1)	1,0131

Modification Indices

Covariances:

	M.I.	Par Change
e30 <-----> eY1	4,842	8,489
e30 <-----> e27	5,669	-3,376
e30 <-----> e26	15,371	3,664
e29 <-----> Peraturan_(X2)	4,803	-0,651
e29 <-----> eY1	17,236	-11,389
e29 <-----> eY2	11,517	2,702
e29 <-----> e27	20,249	-4,527
e29 <-----> e26	9,363	2,033
e29 <-----> e30	13,180	13,069
e28 <-----> e27	6,574	0,450
e28 <-----> e26	7,027	-0,322
e28 <-----> e30	4,264	-1,193
e25 <-----> Pelatihan_(X1)	4,674	0,022
e25 <-----> eY2	4,680	0,120
e24 <-----> Peraturan_(X2)	5,694	0,048
e24 <-----> eY1	5,454	-0,431
e23 <-----> Pelatihan_(X1)	6,222	-0,028
e23 <-----> eY2	6,484	-0,152
e21 <-----> Pelatihan_(X1)	4,460	-0,026
e20 <-----> Penyuluh_(X5)	42,049	0,141
e20 <-----> Pemasaran_(X4)	5,321	-0,038
e20 <-----> Peraturan_(X2)	7,793	-0,079
e20 <-----> e21	4,691	0,042
e19 <-----> Penyuluh_(X5)	19,904	0,086
e19 <-----> Peraturan_(X2)	16,823	-0,103
e19 <-----> e29	4,955	0,502
e19 <-----> e23	4,403	0,033
e19 <-----> e20	52,558	0,155
e18 <-----> Penyuluh_(X5)	8,104	-0,027
e16 <-----> e26	4,744	0,071
e16 <-----> e20	4,277	-0,026
e16 <-----> e19	11,803	-0,038
e15 <-----> Pemasaran_(X4)	53,274	0,105
e15 <-----> Modal_(X3)	48,055	-0,068
e15 <-----> Pelatihan_(X1)	4,425	0,028
e15 <-----> e25	4,572	0,031
e15 <-----> e17	23,297	0,055
e14 <-----> e17	22,256	-0,027
e14 <-----> e16	7,231	0,014
e14 <-----> e15	6,665	-0,023
e13 <-----> Pemasaran_(X4)	4,020	-0,015
e11 <-----> Penyuluh_(X5)	4,116	0,043
e11 <-----> Pelatihan_(X1)	22,818	0,070
e11 <-----> e25	7,393	0,044
e11 <-----> e24	4,460	0,035

Variances:

M.I. Par Change

Regression Weights:

M.I. Par Change

Y1.2 <----- Y2.2	11,824	-0,057
Y1.1 <----- Y2.3	9,194	0,026
Y1.1 <----- Y2.2	5,054	0,024
Y1.1 <----- X2.3	4,082	0,313
Y2.3 <----- Kinerja_(Y1)	4,533	0,222
Y2.3 <----- Y1.2	6,351	0,151
Y2.3 <----- Y1.1	11,687	0,350
Y2.3 <----- Y2.2	8,705	0,181
Y2.2 <----- Peraturan_(X2)	4,816	-1,709
Y2.2 <----- Kinerja_(Y1)	19,331	-0,325
Y2.2 <----- Y1.2	15,582	-0,169
Y2.2 <----- Y1.1	10,775	-0,239
Y2.2 <----- Y2.3	9,306	0,105
Y2.2 <----- X2.4	6,696	-1,658
Y2.2 <----- X2.3	4,735	-1,348
Y2.2 <----- X2.2	5,850	-1,437
Y2.2 <----- X2.1	4,246	-1,319

Summary of models

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	81	1137,287	384	0,000	2,962
Saturated model	465	0,000	0		
Independence model	30	5180,650	435	0,000	11,910
Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI	
Default model	2,509	0,691	0,625	0,570	
Saturated model	0,000	1,000			
Independence model	8,967	0,206	0,152	0,193	
Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	0,780	0,751	0,843	0,820	0,841
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE	
Default model	0,115	0,107	0,122	0,000	
Independence model	0,271	0,264	0,277	0,000	

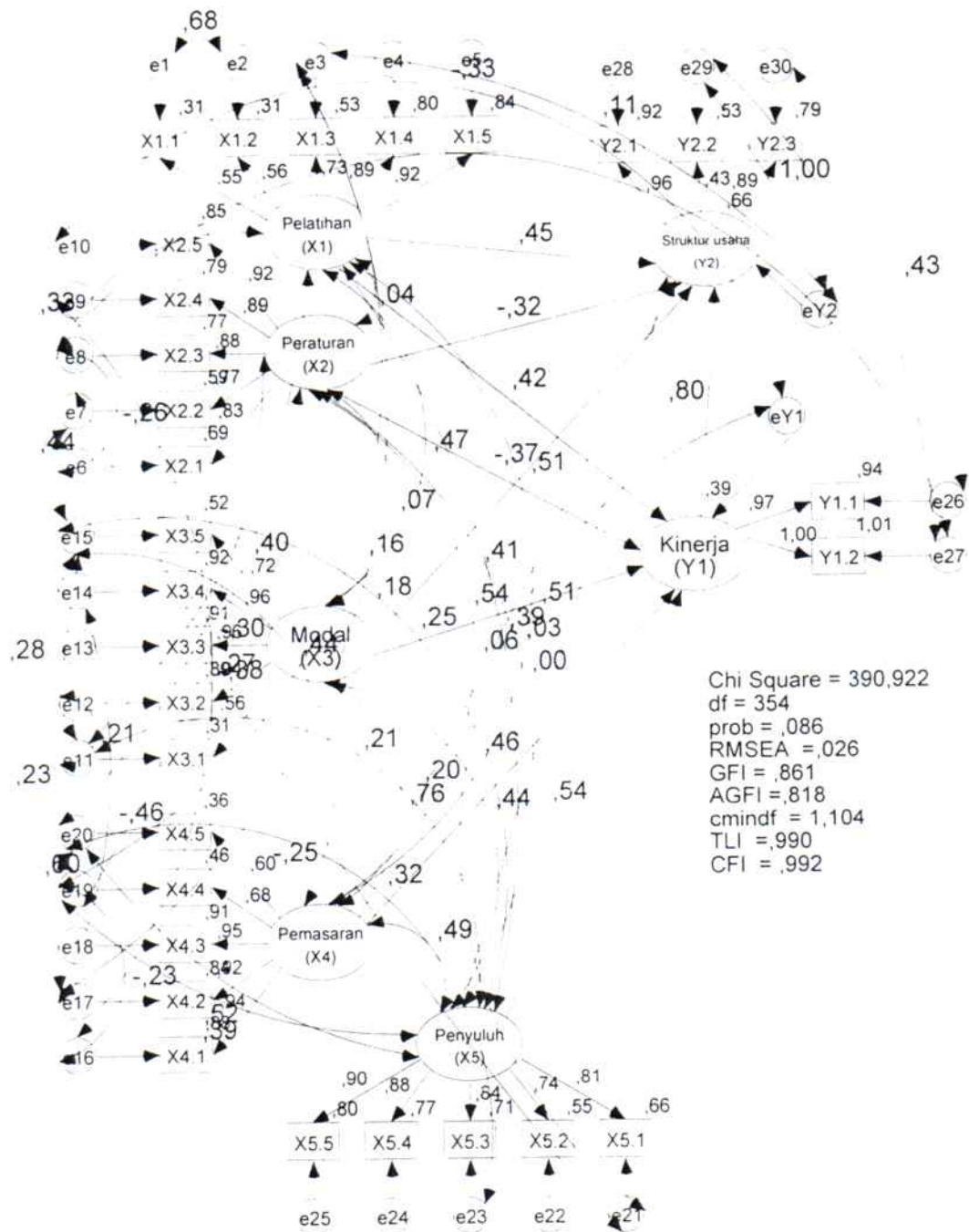
Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
<i>Chi Square</i>	Kecil	1137,287	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,000	Belum fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,115	Kurang baik
GFI	$\geq 0,90$	0,691	Kurang Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,625	Kurang Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	2,962	Kurang baik
TLI	$\geq 0,95$	0,820	Kurang baik
CFI	$\geq 0,95$	0,841	Kurang baik

Langkah Modifikasi Indeks (31 kali)

Langkah ke	Kovarians			MI	Chi square	Prob	Ket
1	e1	↔	e2	71,326	1137,287	0,000	Belum fit
2	e15	↔	Pemasaran_ (X4)	53,500	1046,504	0,000	Belum fit
3	e19	↔	e20	53,601	965,840	0,000	Belum fit
4	e6	↔	e7	25,892	901,537	0,000	Belum fit
5	e11	↔	e15	24,790	872,446	0,000	Belum fit
6	e14	↔	e17	22,091	842,999	0,000	Belum fit
7	e20	↔	Penyuluh_ (X5)	20,300	818,317	0,000	Belum fit
8	e29	↔	e27	20,247	792,074	0,000	Belum fit
9	e3	↔	eY2	12,081	756,246	0,000	Belum fit
10	e11	↔	Pelatihan_ (X1)	11,857	741,604	0,000	Belum fit
11	e19	↔	Penyuluh_ (X5)	10,417	725,378	0,000	Belum fit
12	e15	↔	e17	10,266	700,386	0,000	Belum fit
13	e29	↔	eY2	10,271	686,718	0,000	Belum fit
14	e30	↔	e26	16,772	565,522	0,000	Belum fit
15	e7	↔	e21	9,630	539,234	0,000	Belum fit
16	e19	↔	Peraturan_ (X2)	8,837	529,100	0,000	Belum fit
17	e6	↔	e8	8,294	518,716	0,000	Belum fit
18	e10	↔	eY1	7,424	508,461	0,000	Belum fit
19	e8	↔	e27	7,239	499,706	0,000	Belum fit
20	e16	↔	e19	7,076	491,804	0,000	Belum fit
21	e9	↔	e16	6,753	483,621	0,000	Belum fit
22	e15	↔	Pelatihan_ (X1)	6,538	476,572	0,001	Belum fit
23	e11	↔	e12	5,655	456,939	0,001	Belum fit
24	e3	↔	e17	5,086	450,802	0,001	Belum fit
25	e3	↔	e19	5,037	445,338	0,001	Belum fit
26	e21	↔	eY1	4,916	439,757	0,002	Belum fit
27	e20	↔	e23	5,070	434,218	0,004	Belum fit

28	e20	↔	Peraturan (X2)	5.469	428,385	0.006	Belum fit
29	e11	↔	Penyuluh (X5)	4.432	415,061	0.017	Belum fit
30	e15	↔	Penyuluh (X5)	5.466	407,482	0.028	Belum fit
31	e18	↔	e21	4.210	390,922	0.086	Sudah fit

MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL TAHAP AKHIR



SEM MI-31
21 Oktober 2005 16:38:19

Amos
by James L. Arbuckle
Version 4.01

Title
Sem mi-31: 21 Oktober 2005 04:38

Number of variables in your model: 69
Number of observed variables: 30
Number of unobserved variables: 39
Number of exogenous variables: 37
Number of endogenous variables: 32

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	39	0	0	0	0	39
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	34	40	37	0	0	111
Total:	73	40	37	0	0	150

NOTE:
The model is recursive.

Sample size: 150

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 465
Number of distinct parameters to be estimated: 111

Degrees of freedom: 354

Minimum was achieved

Chi-square = 390,922
Degrees of freedom = 354
Probability level = 0,086

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights				Estimate	S.E.	C.R.	P
Kinerja_(Y1)	<--	Pelatihan_(X1)		1,5800	0,54545	2,8967	4,0056E-03
Kinerja_(Y1)	<--	Peraturan_(X2)		-2,5720	0,84742	-3,0351	2,5825E-03
Kinerja_(Y1)	<--	Modal_(X3)		0,6167	0,18801	3,2801	1,1408E-03
Kinerja_(Y1)	<--	Pemasaran_(X4)		0,2500	0,11485	2,1767	3,0163E-02
Kinerja_(Y1)	<--	Penyuluh_(X5)		1,6300	0,51169	3,1855	1,5734E-03

Struktur usaha (Y2)	<--	Kinerja_ (Y1)	0,4324	0,02970	14,558	5,9190E-38
Struktur usaha (Y2)	<--	Pelatihan_ (X1)	0,2399	0,09515	2,5213	1,2131E-02
Struktur usaha (Y2)	<--	Peraturan_ (X2)	-0,1004	0,03774	-2,6602	8,1647E-03
Struktur usaha (Y2)	<--	Modal_ (X3)	0,5143	0,16092	3,1959	1,5193E-03
Struktur usaha (Y2)	<--	Pemasaran_ (X4)	0,0276	0,01309	2,1091	3,5638E-02
Struktur usaha (Y2)	<--	Penyuluh_ (X5)	0,1551	0,05552	2,7938	5,4927E-03
X1.1	<--	Pelatihan_ (X1)	1			
X1.2	<--	Pelatihan_ (X1)	0,9465	0,0949	9,9723	2,0144E-23
X1.3	<--	Pelatihan_ (X1)	1,2162	0,18	6,7558	1,4202E-11
X1.4	<--	Pelatihan_ (X1)	1,5767	0,2134	7,3898	1,4707E-13
X1.5	<--	Pelatihan_ (X1)	1,5437	0,2107	7,3257	2,3765E-13
X2.1	<--	Peraturan_ (X2)	1			
X2.2	<--	Peraturan_ (X2)	0,9864	0,0656	15,0475	3,5831E-51
X2.3	<--	Peraturan_ (X2)	1,0742	0,0882	12,1843	3,7698E-34
X2.4	<--	Peraturan_ (X2)	1,0637	0,0762	13,9559	2,8953E-44
X2.5	<--	Peraturan_ (X2)	1,1649	0,0809	14,4027	4,9746E-47
X3.1	<--	Modal_ (X3)	1			
X3.2	<--	Modal_ (X3)	1,7172	0,2073	8,2821	1,2103E-16
X3.3	<--	Modal_ (X3)	1,7466	0,2201	7,937	2,0715E-15
X3.4	<--	Modal_ (X3)	1,6948	0,2138	7,9269	2,0473E-15
X3.5	<--	Modal_ (X3)	1,333	0,1686	7,906	2,6575E-15
X4.1	<--	Pemasaran_ (X4)	1			
X4.2	<--	Pemasaran_ (X4)	0,9822	0,0467	21,0338	3,1206E-48
X4.3	<--	Pemasaran_ (X4)	0,9644	0,0399	24,1755	4,0312E-129
X4.4	<--	Pemasaran_ (X4)	0,7293	0,0737	9,9006	4,1389E-23
X4.5	<--	Pemasaran_ (X4)	0,6935	0,0787	8,8076	1,2785E-18
X5.1	<--	Penyuluh_ (X5)	1			
X5.2	<--	Penyuluh_ (X5)	0,9232	0,0881	10,476	1,1136E-25
X5.3	<--	Penyuluh_ (X5)	1,0145	0,0805	12,5982	2,1589E-36
X5.4	<--	Penyuluh_ (X5)	1,0938	0,0811	13,4833	1,9616E-41
X5.5	<--	Penyuluh_ (X5)	1,1501	0,0834	13,7853	3,1252E-43
Y2.1	<--	Struktur usaha (Y2)	1			
Y2.2	<--	Struktur usaha (Y2)	1,3716	0,2298	5,969	2,3871E-09
Y2.3	<--	Struktur usaha (Y2)	3,5603	0,1721	20,6867	4,5638E-95
Y1.1	<--	Kinerja_ (Y1)	1			
Y1.2	<--	Kinerja_ (Y1)	1,7553	0,042	41,8142	0,0000E+00

Standardized Regression Weights:			Estimate
Kinerja_(Y1)	<--	Pelatihan_(X1)	0,4202
Kinerja_(Y1)	<--	Peraturan_(X2)	-0,3702
Kinerja_(Y1)	<--	Modal_(X3)	0,5458
Kinerja_(Y1)	<--	Pemasaran_(X4)	0,3242
Kinerja_(Y1)	<--	Penyuluh_(X5)	0,5454
Struktur usaha(Y2)	<--	Kinerja_(Y1)	0,8037
Struktur usaha(Y2)	<--	Pelatihan_(X1)	0,4254
Struktur usaha(Y2)	<--	Peraturan_(X2)	-0,3181
Struktur usaha(Y2)	<--	Modal_(X3)	0,5055
Struktur usaha(Y2)	<--	Pemasaran_(X4)	0,4050
Struktur usaha(Y2)	<--	Penyuluh_(X5)	0,4657
X1.1	<--	Pelatihan_(X1)	0,5536
X1.2	<--	Pelatihan_(X1)	0,5598
X1.3	<--	Pelatihan_(X1)	0,7292
X1.4	<--	Pelatihan_(X1)	0,8919
X1.5	<--	Pelatihan_(X1)	0,9181
X2.1	<--	Peraturan_(X2)	0,8336
X2.2	<--	Peraturan_(X2)	0,77
X2.3	<--	Peraturan_(X2)	0,8769
X2.4	<--	Peraturan_(X2)	0,889
X2.5	<--	Peraturan_(X2)	0,9202
X3.1	<--	Modal_(X3)	0,5599
X3.2	<--	Modal_(X3)	0,9432
X3.3	<--	Modal_(X3)	0,9563
X3.4	<--	Modal_(X3)	0,9604
X3.5	<--	Modal_(X3)	0,7215
X4.1	<--	Pemasaran_(X4)	0,9379
X4.2	<--	Pemasaran_(X4)	0,9152
X4.3	<--	Pemasaran_(X4)	0,9528
X4.4	<--	Pemasaran_(X4)	0,6789
X4.5	<--	Pemasaran_(X4)	0,5992
X5.1	<--	Penyuluh_(X5)	0,8124
X5.2	<--	Penyuluh_(X5)	0,742
X5.3	<--	Penyuluh_(X5)	0,8406
X5.4	<--	Penyuluh_(X5)	0,8797
X5.5	<--	Penyuluh_(X5)	0,8953
Y2.1	<--	Struktur usaha(Y2)	0,9574
Y2.2	<--	Struktur usaha(Y2)	0,4313
Y2.3	<--	Struktur usaha(Y2)	0,8896

Y1.1 <-- Kinerja_(Y1) 0,9714
Y1.2 <-- Kinerja_(Y1) 1,0036

Squared Multiple Correlations

Estimate
Kinerja_(Y1) 0,392
Struktur usaha(Y2) 0,658

Modification Indices

Covariances:	M.I.	Par Change
Variances:	M.I.	Par Change
Regression Weights:	M.I.	Par Change

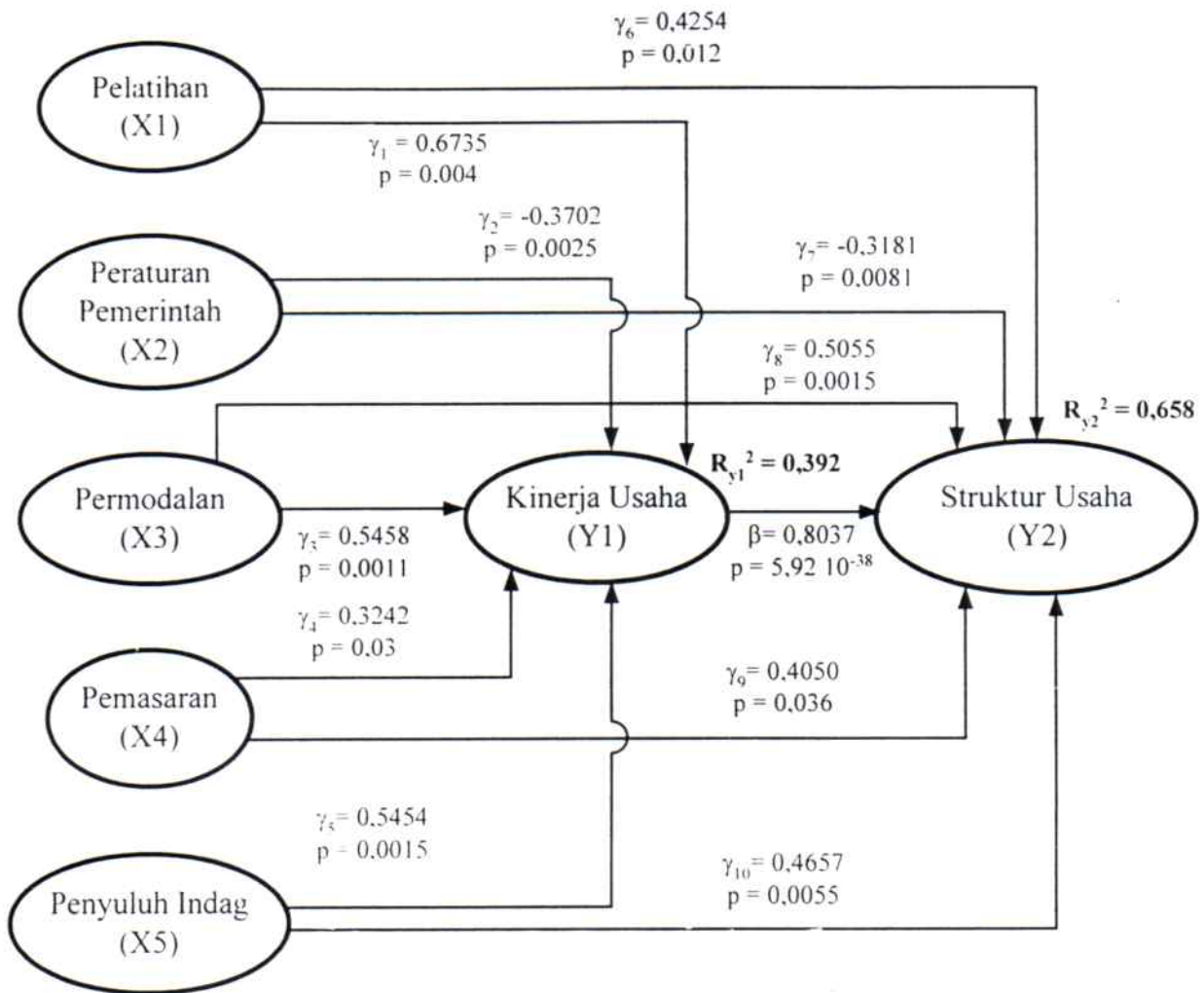
Summary of models

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	111	390,922	354	0,086	1,104
Saturated model	465	0,000	0		
Independence model	30	5180,650	435	0,000	11,910

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	0,254	0,861	0,818	0,656
Saturated model	0,000	1,000		
Independence model	8,967	0,206	0,152	0,193

Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	0,925	0,907	0,992	0,990	0,992
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	0,026	0,000	0,041	0,998
Independence model	0,271	0,264	0,277	0,000



Berdasarkan Gambar di atas dapat ditulis persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y1 = 0.6375 X1 - 0.3702 X2 + 0.5458 X3 + 0.3242 X4 + 0.5454 X5$$

$$Y1 = 0.4254 X1 - 0.3181 X2 + 0.5055 X3 + 0.4050 X4 + 0.4657 X5$$

$$Y2 = 0.8037 Y1$$

LAMPIRAN 14

UJI CHI SQUARE DAN

UJI BEDA BERPASANGAN

Tabulasi Silang Return On Sales dengan Pertumbuhan Investasi

Crosstab

			Pertumb Investasi (Y2.1)			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
ROS (Y1.1)	Rendah	Count	19	25	2	46
		% of Total	12,7%	16,7%	1,3%	30,7%
	Sedang	Count	5	42	13	60
		% of Total	3,3%	28,0%	8,7%	40,0%
	Tinggi	Count	0	3	41	44
		% of Total	,0%	2,0%	27,3%	29,3%
Total	Count	24	70	56	150	
	% of Total	16,0%	46,7%	37,3%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	104,317 ^a	4	1,184E-021
N of Valid Cases	150		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,04.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,640	1,184E-021
N of Valid Cases		150	

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabulasi Silang Return On Sales dengan Pertumbuhan Tenaga Kerja

Crosstab

			Pertumb Tenaga kerja (Y2.2)			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
ROS (Y1.1)	Rendah	Count	14	19	13	46
		% of Total	9,3%	12,7%	8,7%	30,7%
	Sedang	Count	18	34	8	60
		% of Total	12,0%	22,7%	5,3%	40,0%
	Tinggi	Count	0	21	23	44
		% of Total	,0%	14,0%	15,3%	29,3%
Total		Count	32	74	44	150
		% of Total	21,3%	49,3%	29,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	27,711 ^a	4	1,427E-005
N of Valid Cases	150		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,39.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,395	1,427E-005
N of Valid Cases		150	

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabulasi Silang Return On Sales dengan Pertumbuhan Omzet Penjualan

Crosstab

			Pertumb Omzet Jual (Y2.3)			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
ROS (Y1.1)	Rendah	Count	24	19	3	46
		% of Total	16,0%	12,7%	2,0%	30,7%
	Sedang	Count	15	40	5	60
		% of Total	10,0%	26,7%	3,3%	40,0%
	Tinggi	Count	0	13	31	44
		% of Total	,0%	8,7%	20,7%	29,3%
Total		Count	39	72	39	150
		% of Total	26,0%	48,0%	26,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	78,849 ^a	4	3,053E-016
N of Valid Cases	150		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,44.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,587	3,053E-016
N of Valid Cases		150	

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabulasi Silang Return On Investment dengan Pertumbuhan Investasi

Crosstab

			Pertumb Investasi (Y2.1)			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
ROI (Y1.2)	Rendah	Count	21	22	2	45
		% of Total	14,0%	14,7%	1,3%	30,0%
	Sedang	Count	3	40	9	52
		% of Total	2,0%	26,7%	6,0%	34,7%
	Tinggi	Count	0	8	45	53
		% of Total	,0%	5,3%	30,0%	35,3%
Total	Count	24	70	56	150	
	% of Total	16,0%	46,7%	37,3%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	110,653 ^a	4	5,281E-023
N of Valid Cases	150		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,20.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,652	5,281E-023
N of Valid Cases		150	

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabulasi Silang Return On Investment dengan Pertumbuhan Tenaga Kerja

Crosstab

			Pertumb Tenaga kerja (Y2.2)			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
ROI (Y1.2)	Rendah	Count	12	20	13	45
		% of Total	8,0%	13,3%	8,7%	30,0%
	Sedang	Count	20	23	9	52
		% of Total	13,3%	15,3%	6,0%	34,7%
	Tinggi	Count	0	31	22	53
		% of Total	,0%	20,7%	14,7%	35,3%
Total		Count	32	74	44	150
		% of Total	21,3%	49,3%	29,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,696 ^a	4	3,643E-005
N of Valid Cases	150		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,60.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,382	3,643E-005
N of Valid Cases		150	

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabulasi Silang Return On Investment dengan Pertumbuhan Omzet Jual

Crosstab

			Pertumb Omzet Jual (Y2.3)			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
ROI (Y1.2)	Rendah	Count	22	20	3	45
		% of Total	14,7%	13,3%	2,0%	30,0%
	Sedang	Count	17	33	2	52
		% of Total	11,3%	22,0%	1,3%	34,7%
	Tinggi	Count	0	19	34	53
		% of Total	,0%	12,7%	22,7%	35 3%
Total	Count	39	72	39	150	
	% of Total	26,0%	48,0%	26,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	74,037 ^a	4	3,185E-015
N of Valid Cases	150		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,70.

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	,575	3,185E-015
N of Valid Cases	150	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Uji Beda Berpasangan Pertumbuhan Investasi, Tenaga Kerja yang Diserap dan Omzet Penjualan
 Dari Industri Mikro (sebelum dibina) Menjadi Industri Kecil (setelah dibina)

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Investasi sbilm dibina (juta)	150	.76837	.06274
	Investasi ssdh dibina (juta)	150	3.53235	.28842
Pair 2	Tenaga kerja sbilm dibina (orang)	150	.76269	.06227
	Tenaga kerja ssdh dibina (orang)	150	10.76867	.87926
Pair 3	Omzet jual sbilm Dibina (juta)	150	4.50413	.36776
	Omzet jual ssdh Dibina (juta)	150	13.59339	1.10990

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.	
Pair 1	Investasi sbilm dibina (juta) & Investasi ssdh dibina (juta)	150	-.4173	1,085E-007
Pair 2	Tenaga kerja sbilm dibina (orang) & Tenaga kerja ssdh dibina (orang)	150	-.8648	3,931E-046
Pair 3	Omzet jual sbilm Dibina (juta) & Omzet jual ssdh Dibina (juta)	150	-.5138	1,770E-011

Paired Samples Test

		Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
					Lower	Upper				
Pair 1	Investasi sbilm dibina (juta) - Investasi ssdh dibina (juta)	-85,28600	3,91572	,31972	-85,91777	-84,65423	-266,754	149	1,443E-201	
Pair 2	Tenaga kerja sbilm dibina (orang) - Tenaga kerja ssdh dibina (orang)	-53,10467	11,43467	93364	-54,94955	-51,25979	-56,879	149	6,048E-103	
Pair 3	Omzet jual sbilm Dibina (juta) - Omzet jual ssdh Dibina (juta)	-43,69427	16,37013	1,33662	-46,33544	-41,05310	-32,690	149	7,473E-070	